LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

# KARYA & KINERJA

## 17 ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2020 - 2024



















EDITOR :
**NOORCA M. MASSARDI**

# Karya & Kinerja

## 17 Anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Periode 2020 - 2024

**ISBN: 978-602-19475-6-2**

**JUDUL:** KARYA & KINERJA 17 ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2020-2024

**EDITOR:** NOORCA M. MASSARDI

**PENULIS:**
Ahmad Yani Basuki, Andi Muslim, Arturo Gunapriatna, Ervan Ismail, Fetrimen , Hafidha Farwa, Joseph Samuel Krishna, Kuat Prihatin, Mukayat Al-Amin, Nasrullah, Naswardi, Noorca M. Massardi, Rita Sri Hastuti, Rommy Fibri Hardiyanto, Roseri Rosdy Putri, Saptari Novia Stri, Tri Widyastuti Setyaningsih

**DESAIN/LAYOUT:** Selo Sumarsono

**PENERBIT:** (C) Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI)
Diterbitkan pertama kali Desember 2023

**ALAMAT:** Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta-10270

**Email:** sekretariat@lsf.go.id

**Fax :** 021-2529285 **Telp :** 021-2524845

**Website:** lsf.go.id **IG:** instagram.com/lsf_ri **X:** twitter.com/lsf_ri
**FB:** fb.com/LembagaSensorFilmRI **Tiktok:** @lsf_ri
**YouTube:** Lembaga Sensor Film RI wa.me/6281188808622

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup
Hak Cipta Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan PidanaPasal 113
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pe- megang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pe- megang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana di- maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu mil- iar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pem- bajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

# Karya & Kinerja

## 17 Anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Periode 2020 - 2024

Editor: Noorca M. Massardi

ISBN 978-602-19475-6-2

**A**hmad Yani Basuki

**A**ndi Muslim

**A**rturo Gunapriatna

**E**rvan Ismail

**F**etrimen Zubir

**H**afidhah

**J**oseph Samuel Krishna

**K**uat Prihatin

**M**ukayat Al-Amin

**N**asrullah

**N**aswardi

**N**oorca M. Massardi

**R**ita Sri Hastuti

**R**ommy Fibri Hardiyanto

**R**oseri Rosdy Putri

**S**aptari Novia Stri

**T**ri Widyastuti Setyaningsih

# Sambutan

Pembuatan dan penerbitan buku ini, tentu bukan untuk membanggakan diri. Buku *Karya & Kinerja 17 Anggota LSF 2020-2024* yang berisi profil 17 Anggota LSF ini juga merupakan bagian dari tekad LSF untuk menjadi lembaga independen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan informatif. Tekad yang kemudian terbukti telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dua kali dari Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga dengan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Desember 2022 dan Desember 2023, serta penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Menuju Informatif.




Sejak dilantik Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim, pada Jumat, 8 Mei 2020, kami bertujuhbelas, dipersatukan oleh tugas dan fungsi sebagai anggota Lembaga Sensor Film (LSF), sesuai amanah Undang Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Berada di dalam sebuah lembaga independen untuk menganalisis, menilai, dan mengklasifikasikan film dan iklan film sebelum dipertunjukkan ke khalayak umum, tentu memerlukan kerjasama dan saling pengertian, serta kesamaan pandangan dalam menafsirkan pasal-pasal dan ayat-ayat, yang menjadi pedoman dalam penyensoran. Tidak hanya yang diamanahkan UU 33/2009, tetapi juga yang diatur Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang LSF, dan Permendikbud No 14, Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.

**Rommy Fibri Hardiyanto**
Ketua LSF 2020-2024



Mengingat ke-17 Anggota LSF berasal dari pelbagai latar pendidikan, profesi, organisasi, lembaga, suku, agama, dan minat serta bakat yang berbeda, tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu serta proses, untuk dapat saling memahami dan saling menghormati pandangan dan pendapat subyektif satu sama lain. Alhamdulillah, seiring waktu, kami bisa menemukan dan mencapai kesamaan, kebersamaan, kesehatian, dan keseimbangan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota LSF yang solid, kohesif dan obyektif.

Penulisan dan penyusunan buku *Karya & KInerja 17 Anggota LSF 2020-2024* yang dikoordinasikan dan diedit oleh Noorca M. Massardi, Anggota dan Ketua Subkomisi Dialog, ini membuktikan, di antara kami, telah terjalin adanya keterbukaan informasi tentang karya, kinerja, riwayat hidup, riwayat pendidikan, serta pengalaman anggota, yang ditulis sendiri oleh setiap Anggota. Dengan demikian, para pemangku kepentingan, kementerian, lembaga, dan masyarakat umum yang terkait dengan pelayanan dan kinerja LSF, diharapkan dapat lebih mengenal, apa, siapa dan bagaimana karya dan kinerja 17 Anggota LSF periode 2020-2024 ini. Baik sebelum maupun sesudah bergabung di LSF. Termasuk mengapa dan bagaimana suatu kebijakan LSF diproses dan diputuskan.

Bila buku ini baru diterbitkan pada tahun terakhir pengabdian para Anggota LSF, ini juga merupakani salah satu pertanggungjawaban kami kepada publik, yang telah berupaya melayani sepenuh hati dan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana, alhamdulillah, telah mendapatkan apresiasi dari lembaga negara lain: Ombudsman dan KIP.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
**Rommy Fibri Hardiyanto**

# Pengantar Editor







Pelantikan 17 Anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) Periode 2020-2024 dilakukan secara *hybrid,* pada Jumat, 8 Mei 2020. Sebagian Anggota berada di ruang sidang LSF di Gedung Film, Jl. MT Haryono, Jakarta Timur, dan sebagian berada di rumah masing-masing. Sementara Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim, memberikan amanah, membacakan sumpah jabatan, dan melantik Anggota LSF atas nama Presiden Republik Indonesia, dari dalam ruang kerjanya. Semua itu bisa terjadi, karena acara pelantikan itu dilakukan di tengah masa pandemi, setelah Pemerintah secara resmi mengakui "kehadiran" Covid-19 di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Dan, sejak April 2020, untuk menekan penularan virus Covid-19, pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Wabah itu sendiri baru dinyatakan berakhir melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia.

Adanya PSBB dan kemudian PPKM, yang baru resmi dicabut pada Jumat 30 Desember 2022, itu mengakibatkan jadwal kerja Anggota LSF wajib mengikuti pelbagai tahapan kebijakan, baik yang diterapkan Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Termasuk penetapan sebagian bekerja dari rumah (*work from home / WFH*) dan sebagian bekerja di kantor (*work from office / WFO*). Selain itu,

**Noorca M. Massardi**
Anggota - Ketua Subkomisi Dialog LSF
2020-2024









giliran bekerja di kantor juga ditentukan tidak hanya diselang-seling berdasarkan hari, tetapi juga disesuaikan dengan nomer kendaraan ganjil / genap Anggota, mengingat kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan "ga-ge" tetap diberlakukan oleh Pemprov DKI.

Dinamika Anggota LSF dalam menunaikan tugas dan fungsinya sesuai amanah UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang LSF, serta Permendikbud No 14, Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran, juga sempat terkendala ketika pada Oktober 2020, atap Gedung Film di Jl. MT Haryono, roboh. Sehingga dua lantai teratas tempat bekerja Anggota, Sekretariat, dan Tenaga Sensor (TS) tidak bisa dipakai. LSF pun sementara pindah ke Kompleks Kemendikbud Cipete di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan, sambil menyiapkan tempat baru di Gedung F Lantai 6 Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, selesai dirombak sesuai kebutuhan minimal, dan bisa ditempati hingga hari ini.

Akibat situasi pandemi, penjadwalan tugas, dan kepindahan kantor tersebut, sejak dilantik Mei 2020, rasanya belum cukup bagi sesama anggota yang bertujuhbelas, untuk bisa bersosialisasi dan saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Setelah wabah Covid-19 dinyatakan berakhir pada 31 Desember 2022, baru per Januari 2023 lah, di gedung yang baru, LSF sebagai lembaga negara independen, dapat bekerja

dan bersosialisasi satu sama lain, dengan lebih santai dan leluasa. Seluruh Anggota, Sekretariat, dan Tenaga Sensor, bisa bertatap muka tanpa masker, duduk dan berbicara dalam jarak normal, ngopi dan makan bareng, serta olahraga bersama tanpa kekhawatiran.

Keakraban, persahabatan, saling pengertian dan saling menghormati satu sama lain itulah, yang memungkinkan Anggota LSF pada akhirnya memiliki komitmen dan tekad bersama sepenuhnya, untuk menjadikan LSF sebagai lembaga negara independen, yang bersifat terbuka, transparan, akuntabel dan informatif.







Terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam melayani semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Baik para pelaku perfilman (rumah produksi, lembaga penyiaran televisi, jaringan bioskop) maupun para pegiat perfilman (para sineas, artis dan teknisi), serta para (calon) penonton, media massa (cetak / elektronik / online), maupun kementerian / lembaga negara terkait. Dan, yang lebih utama, dalam menjalankan tugas dan fungsi LSF untuk melakukan penelitian, penilaian serta penetapan penggolongan usia bagi film / iklan film yang akan dipertunjukkan ke khalayak umum. LSF dapat memberikan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) secara obyektif, dengan argumen yang solid dan kohesif. Termasuk ketika harus mengembalikan materi film / iklan film yang diberi catatan rekomendasi untuk direvisi pada adegan tertentu, agar sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.

Mengingat pelbagai dinamika di atas, serta masa bakti dan sosialisasi antaranggota yang "tahu-tahu" sesuai SK Presiden sudah akan berakhir pada Mei 2024, itulah maka menjelang akhir periode ini, LSF memutuskan untuk "mengabadikan" *Karya & Kinerja 17 Anggota LSF 2020-2024* dan menerbitkannya sebagai sebuah buku. Mengutip pernyataan Ketua LSF (2020-2024) Rommy Fibri Hardiyanto dalam kata sambutannya: "Pembuatan dan penerbitan buku ini, tentu bukan untuk membanggakan diri. Buku *Karya & Kinerja 17 Anggota LSF 2020-2024* yang berisi profil 17 Anggota LSF ini juga merupakan bagian dari tekad LSF untuk menjadi lembaga independen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan informatif. Tekad yang kemudian terbukti telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan dua kali dari Ombudsman Republik Indonesia, sebagai lembaga dengan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Desember 2022 dan Desember 2023,

serta penghargaan dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi "Menuju Informatif."

Sehubungan rencana pembuatan karya dan kinerja itu, pada rapat Pleno LSF, saya ditetapkan untuk merancang isi dan desain buku tersebut, serta sebagai editor utama, termasuk mengumpulkan semua naskah, dan menjadi koordinator bersama Sekretariat LSF, hingga buku bisa segera dicetak/diterbitkan/diedarkan. Keputusan itu mungkin diberikan, karena saya baru saja meluncurkan buku biografi Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan berjudul *Luhut* yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas, pada September 2022. Berdasarkan amanah tersebut, dalam Sidang Pleno 17 Juni 2023 di Bogor, saya memaparkan rancangan isi, tema dan fokus buku tersebut, agar tampil dengan sebaik-baiknya. Antara lain:



Semua ditulis bebas oleh setiap Anggota, sesuai gaya dan karakter masing-masing. Diharapkan, setiap Anggota dapat menggambarkan latar belakang pribadi / keluarga, pendidikan, karir / profesi / organisasi sebelum menjadi Anggota LSF, serta apa dan bagaimana pengalaman pertama terkait film / televisi, serta kapan dan mengapa tertarik untuk berkiprah di LSF.



Alhamdulillah, pada deadline pertama Agustus 2023, sesuai ketetapan Sidang Pleno, sebanyak 6 (enam) Anggota mampu memenuhi tenggat dan langsung diproses sehingga tampil sebagai *dummy* buku yang bersih dan rapi. Namun, karena pelbagai kendala, tugas rutin, serta harus melakukann literasi, sosialisasi dan pemantauan ke luar kota, luar daerah, luar pulau dan luar negeri, akhirnya *deadline* kedua ditetapkan pada akhir Desember 2023.



Syukurlah pada akhir Desember 2023, sesuai tenggat, semua teks dan foto dapat dituntaskan. Dan, saya harus mendedikasikan masa liburan Natal dan Tahun Baru 2023, dengan mengambil cuti khsus tugas editing buku ini. Saya juga berhubungan permanen dengan desainer buku Selo Sumarsono, baik secara daring, melalui pesan whatapps serta email, untuk dapat menata letak teks dan foto dengan sebaik-baiknya. Dan terus berjaga dalam 24 jam.

Selama menyelesaikan buku ini, kendalanya memang bukan sekadar teknis dan tenggat. Melainkan bagaimana setiap Anggota harus berkenan "membuka diri" sebagai bagian dari pejabat negara yang melayani kepentingan publik. Dengan demikian, publik harus tahu apa, siapa, dan bagaimana pejabat publik yang telah

diberi amanah oleh peraturan dan perundangan terkait, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film, Tujuh Belas Anggota Lembaga Sensor Film periode 2020-2024, dalam berkarya dan melakukan kinerjanya selama bertugas di LSF.

Memang, awalnya ada rasa *ewuh pakewuh (reluctant)* ketika setiap Anggota harus menuliskan karya dan kinerjanya sendiri sebagai orang pertama (aku/saya).







Ada hambatan psikologis, terutama bagi yang merasa bentuk aku/saya itu sebagai seolah ingin menonjolkan diri atau terlalu individualistis. Sementara karya dan kinerja di LSF merupakan hasil dari filosofi kerja kolektif kolegial. Namun, dengan persuasif dan sambil memberikan contoh-contoh penulisan prosa, baik fiksi maupun biografi, yang akan terasa lebih akrab dan intim bila menggunakan orang pertama aku/saya, akhirnya, ketujuhbelas Anggota ikhlas juga menyetujui konsep penulisan semacam minibiografi ini. Bagi yang tetap berkeberatan akhirnya harus rela dan *legowo*, ketika saya kemudian mengeditnya menjadi "saya." Alhamdulilah.

Bagi yang tidak terbiasa menulis prosa (artikel atau *features*), saya juga memberikan kebebasan untuk menulis sesuai kemauan dan kemampuannya. Dengan syarat, versi akhirnya akan terpulang pada saya, yang telah diberi mandat Sidang Pleno sebagai editor terakhir. Sehingga, teks yang versi "makalah ilmiah" sedapat dan sebagus mungkin saya upayakan dialihkan ke versi populer sebagaimana ketentuan teknis yang sudah saya jelaskan di atas.

Tentu, karena sejak awal panjang tulisan tidak dibatasi, kecuali batas minimal 10 (sepuluh) halaman, akhirnya ada yang menulis lebih singkat ada pula yang lebih panjang dibanding yang lain. Yang pasti sejumlah elemen dasar wajib tetap disertakan: jati diri, riwayat pendidikan, pengalaman, penghargaan dan daftar karya.

Alhamdulillah, sebagai editor "pengepul" saya semakin paham ihwal latar belakang, karakter pribadi, hobi, pengalaman, pendidikan, serta keluarga para kolega di LSF ini. Sesuatu yang tidak sempat kita ketahui dan dalami, sehubungan faktor pandemi dan banyaknya kegiatan di luar jadwal penyensoran di dalam studio: rapat-rapat, sosialisasi, dan literasi di dalam kota, luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri.

Saya pribadi merasa bersyukur, telah mengenal dan bergaul dengan para kolega,

termasuk bagaimana masing-masing berusaha "mengelola" pelbagai dinamika yang muncul, akibat perbedaan karakter, latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman, profesi, suku, bahkan agama. Terutama ketika harus memutuskan dan menetapkan penggolongan usia film / iklan film yang tengah disensor. Dinamika yang sering terjadi di dalam studio, setelah kita meneliti dan menilai film / iklan film dengan kaca mata "subyektif" masing-masing, kemudian dapat secara aklamasi mencapai keputusan final yang solid, obyektif, dan kohesif, menjadi keputusan Lembaga. Baik di dalam studio itu sendiri, atau di dalam rapat Komisi I Bidang Penyensoran, maupun di dalam forum Dialog dengan pemilik film / iklan film yang dalam proses sensor. Yang menarik, sepanjang periode 2020-2024 ini, tidak ada sebuah film / iklan film yang penetapan klasifikasi usianya harus diputuskan melalui Sidang Pleno.



Sebagai penutup, izinkan saya berterima kasih kepada seluruh Anggota LSF, yang pada akhirnya, masing-masing mampu menyelesaikan penulisan naskah *Karya & Kinerja 17 Anggota LSF 2020-2024* ini. Terutama bagi Anggota yang terus terang mengaku terbantu, berterima kasih, bahkan terilhami untuk menulis lebih panjang, setelah "berjuang" menyelesaikan "tugas akhir" ini. Terima kaish juga untuk teman-teman Tenaga Sensor yang sempat direpotkan untuk penulisan buku ini, serta bagian dokumentasi foto di Sekretariat LSF. Wabil khusus, terima kasih kepada Kepala Biro Tata Usaha LSF, Mas Abu Hanifah, yang tetap bersabar menantikan penyelesaian buku yang sudah dianggarkan sejak awal 2023 ini.



Kepada para pembaca, para pemangku kepentingan, kementerian / lembaga terkait, juga Anggota LSF periode 2025-2029, semoga buku ini bermanfaat, menjadi rujukan bagi keterbukaan dan transparansi Lembaga dan Anggotanya, serta kiranya dapat diteruskan pada periode selanjutnya. Sehingga, pemberian penghargaan dari Komisi Informasi Pusat kepada LSF, pada Desember 2023, dengan kualifikasi "Menuju Informatif," dapat ditingkatkan menjadi "Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif."

**Jakarta, 31 Desember 2023**

**Noorca M. Massardi**

Editor

# Daftar Isi


Sambutan Ketua LSF 8

Pengantar Editor 10

**Ahmad Yani Basuki**
Antara Guru, Tentara, dan Sinema 18

**Andi Muslim**
Adaptif dan Kolaboratif 58

**Arturo Gunapriatna**
Dari Film Untuk Film 74

**Ervan Ismail**
Kehadiran LSF pada Era Digital
Tetap Strategis 100

**Fetrimen Zubir**
Film Media Efektif bagi Pembelajaran 116

**Hafidhah**
Ingin Melindungi Perempuan dan
Anak-anak 134

**Joseph Samuel Krishna**
Apresiasi Film & Program TV Sebagai
Karya Seni 154

**Kuat Prihatin**
Dari Birokrat ke Lembaga Sensor Film 174

**Mukayat Al-Amin**
Kontribusi untuk Perfilman dan Masyarakat 195

**Nasrullah**
Menilai Film Jangan Menggunakan Analisis Fiqih 210

**Naswardi**
Hadir Wujudkan Tontonan Ramah Anak 226

**Noorca M. Massardi**
Jatuh Cinta dari Film ke Film 246

**Rita Sri Hastuti**
*Journalism Is May Passion* 294

**Rommy Fibri Hardiyanto**
Wartawan Perang yang Dipercaya Menjadi Ketua LSF 310

**Roseri Rosdy Putri**
Menjadi "Orang Film" di Lembaga Sensor Film 332

**Saptari Novia Stri**
Merancang PP tentang LSF dan Diminta Menjadi Anggota 356

**Tri Widyastuti Setyaningsih**
Filmorfosa 382



# Antara Guru, Tentara, dan Sinema

**Ahmad Yani Basuki**
Ketua Bidang Pemantauan, Hukum dan Advokasi

Waktu kecil, profesi yang paling saya kagumi adalah Guru. Maka, menjadi guru adalah cita-cita saya sejak dulu. Tidak ada pilihan lain. Tapi, perjalanan waktu ternyata telah menghadirkan tantangan dan pilihan baru. Cita-cita awal menjadi guru pun berubah: menjadi Tentara. Dan ternyata, tentara telah membawa jalan hidup saya menjelajah ke mana-mana. Termasuk, akhirnya mengantarkan saya menyelami lorong sinema.

Saya lahir di Blitar pada Senin, 5 Maret 1956. Tepatnya di desa Mangunan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Waktu saya kecil, kampung itu sering dilanda banjir. Termasuk gedung Sekolah Rakyat (SR), tempat saya belajar di sekolah dasar. Saat itu, bersama teman-teman, kami yang masih kecil, harus mengangkat meja kursi sekolah untuk dipindahkan ke ke balai rumah penduduk, tempat sementara kami belajar. Boyongan pindah tempat sekolah seperti itu bukan hanya sekali terjadi. Namun semua itu tidak pernah mengurangi keceriaan dan kelancaran studi kami. Saya pun patut bersyukur, karena pada akhir ujian nasional, saya mendapat nilai terbaik di sekolah. *Alhamdulillah.*

Tamat dari SR, tidak ada pilihan lain kecuali berjuang untuk dapat diterima di SMP Negeri. Satu-satunya SLTP Negeri yang ada, dengan lokasi di Kawedanan Srengat, tujuh kilometer dari rumah. Maka mendaftarlah saya di sekolah itu, bersaing dengan para pendaftar lain, yang datang dari beberapa desa dan kecamatan di Kawedanan Srengat. Alhamdulillah, saya lulus seleksi, dan diterima di sekolah tersebut. Ada kegembiraan, tapi sekaligus kesedihan. Karena dari beberapa teman satu SR yang mendaftar, hanya saya sendiri yang lulus dan diterima.

Terbayang betapa sepi dan sedihnya, jika nanti setiap pagi saya harus naik sepeda ke sekolah, tanpa teman satu angkatan dari kampung saya.

Ketika kegiatan orientasi dan pelajaran awal sudah saya ikuti, dan saya mulai akrab dengan dengan teman-teman baru. Sayangnya, saya terpaksa harus meninggalkan SMP Negeri itu. Dengan berat hati tentu. Sebab, saya terpikat pada edaran baru yang dibawa teman. Surat edaran itu berisi pengumuman tentang Penerimaan Siswa Baru untuk sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN). Saya berpikir, pintu saya untuk menjadi guru, sesuai cita-cita, telah hadir dan terbuka untuk saya. Selain itu, hati saya juga tergelitik, karena di surat edaran itu juga disebutkan, bagi siswa yang berprestasi, akan mendapatkan Ikatan Dinas (beasiswa), dan dijamin akan diangkat menjadi guru (Pegawai Negeri). Terpikir pula, bila saya berhasil mendapatkan uang Ikatan Dinas, itu saya akan dapat meringankan beban orang tua. Sebab, Ayah saya yang berprofesi sebagai seorang penjahit, harus membesarkan dan membiayai pendidikan enam putra-putrinya.

Bak kata pepatah, pucuk dicinta ulam tiba. Akhirnya, diam-diam saya pun mendaftar di Sekolah PGAN 4 Tahun, Blitar, tanpa sepengetahuan guru dan teman-teman SMP saya. Awalnya, orangtua saya juga keberatan pada niat saya itu. Sebab, perjuangan untuk dapat diterima di SMP Negeri itu sesungguhnya tidak mudah. Kenapa justru harus ditinggalkan? Lagipula, lokasi Sekolah PGAN berada jauh jauh dari kampung saya. Konsekuensinya, saya harus kost. Jadi, akan tambah biaya. Namun, karena kemauan saya yang keras, akhirnya orangtua saya memahami dan merestui. Kebetulan orang tua kami memang tergolong gigih dalam mengurus pendidikan bagi putra-putrinya.

Saya pun dapat mengikuti seleksi dan lulus serta diterima di PGAN itu, bersama seorang teman dari desa saya. Setelah yakin diterima, saya pun menghadap Kepala Sekolah SMP Negeri, untuk berpamitan dengan baik-baik. Juga kepada beberapa orang teman dekat. Saya lihat ada ekspresi terkejut dan menyayangkan dari wajah-wajah mereka. Tapi saya dapat menjelaskan alasan saya kepada mereka. Saya pun gembira ketika kemudian saya mendengar bahwa bangku kosong yang saya tinggalkan, dapat diisi oleh teman yang semula lulus sebagai cadangan.

Setelah mulai mengikuti pendidikan Sekolah PGAN 4 Tahun di kota Biltar, saya bersama teman-teman pun menunggu-nunggu pengumuman ihwal siapa yang berhak mendapatkan Ikatan Dinas (beasiswa). Namun, baru setahun kemudian, menjelang kami naik ke kelas dua, berita gembira itu pun datang. Alhamdulillah, saya termasuk 40 dari 120 orang seangkatan, yang terpilih dan berhak menerima Ikatan Dinas (ID).

Ada kenangan yang tidak terlupakan, saat saya menerima uang ID untuk yang pertama kalinya. Sebab, yang kami terima adalah uang rapel selama satu tahun, sehingga jumlahnya cukup lumayan. Dan, sebagai seorang pelajar SLTP, nilainya

sangat berarti bagi saya. Untuk mengambilnya pun harus didampingi orang tua. Dengan penuh rasa syukur dan suka cita, uang tersebut kemudian saya serahkan sepenuhnya kepada orang tua saya.

Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi hari libur, saya diajak Ayah pergi ke Pasar Sepeda. Pada waktu itu belum ada toko khusus sepeda, kecuali di kota. Yang ada Pasar Sepeda. Itu pun hanya buka pada hari-hari tertentu (hari pasaran). Di Pasar Sepeda itu Ayah menyuruh saya memilih sepeda yang dibeli dengan uang Ikatan Dinas saya. Dengan perasaan suka cita, saya naiki sepeda baru itu, dari pasar menuju rumah. Sementara Ayah mengiringi dari belakang, dengan wajah yang tampak ceria. Sejujurnya, ada perasaan berbunga-bunga di dalam hati saya.



**Suasana santai dg teman-teman kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya**

Maklum, waktu itu sepeda merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam keluarga. Ketika kami kembali masuk sekolah setelah menjalani hari libur, ternyata ada perasaan dan suasana batiniah yang sama di antara 40 orang penerima ID. Kami pun saling bercerita tentang kisah penggunaan uang ID itu. Dan, hampir semua ternyata dipakai untuk membeli sepeda baru. Maka di antara kami pun bisa saling berbagi info tentang sepeda baru masing-masing. Indah rasanya.

Lulus dari PGAN 4 Tahun, ternyata tidak serta merta diangkat menjadi guru, dan tidak ada keharusan untuk menjadi guru. Sementara saya sendiri merasa belum pantas menjadi guru, selain juga belum ingin bekerja. Saya pun kemudian memilih melanjutkan sekolah ke PGAN 6 Tahun di Tulungagung, lanjutan dari



**Bersama-sama Pengurus KMA-PBS Perguruan Tinggi lain mendapat kesempatan mengunjungi Istana Negara dan juga Istana Bogor**

PGAN 4 Tahun, dengan status masih sebagai Siswa Ikatan Dinas. Lulus dari PGAN 6 Tahun, juga ternyata tidak ada kewajiban menjadi guru. Dan, saya juga belum ingin menjadi guru. Maka saya memilih melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Semula saya ingin masuk ke Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), sesuai cita-cita semula untuk menjadi guru. Tetapi akhirnya saya tertarik dan memutuskan masuk Fakultas Dakwah IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel, di Surabaya. Di kampus itu keberuntungan ternyata masih menyertai. Saya termasuk salah seorang dari sejumlah mahasiswa yang berhak memeroleh Beasiswa Supersemar. Jika sewaktu di SMP saya bisa membeli sepeda *"onthel"* sendiri dari uang Ikatan Dinas, di kampus ini saya mampu membeli sepeda motor sendiri dari uang Beasiswa Supersemar, serta dari honor kegiatan les privat agama. Selain itu, saya juga sesekali mendapatkan honor dari tulisan saya yang dimuat di harian *Surabaya Pos* dan *Memorandum* waktu itu.

Saat di kampus, dibentuklah ikatan Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS), sebagaimana di kampus-kampus lainnya. Saya terpilih menjadi Ketua Umum yang pertama di kampus itu. Berkat jabatan itulah untuk pertama kalinya saya berkesempatan masuk Komplek Istana Kepresidenan (1981), bersama teman-teman KMA PBS dari pelbagai kampus di tanah air. Ke-

giatan lain saya adalah aktif sebagai Pemimpin Redaksi Majalah Kampus dan Senat Mahasiswa. Karena tulisan kritis saya waktu itu, saya sempat berurusan dengan salah seorang pimpinan lembaga di kampus. Saya pun menghadap untuk menerima teguran, sekaligus menyampaikan jawaban. *Alhamdulillah* urusan selesai.

Lulus pada 1982, saya diterima menjadi dosen di almamater saya, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Masih sejalan dengan cita-cita awal menjadi guru, saya sempat menjadi Asisten Prof. Dr. Salahuddin Hardy (alm.) di Institut Teknologi Surabaya (ITS), dan di Perguruan Tinggi Swasta lainnya. Selain menjadi dosen, saya pernah mengajar di SMA Taman Pendidikan Putri (TPP) Khadijah, Surabaya, yang muridnya putri semua. Di sekolah itulah, Nurul Fauzah, salah seorang siswinya, kelak saya persunting sebagai istri.



**Mampir foto bersama di bawah Patung Kuda**

Setelah dua tahun menjalani karir sebagai dosen, beredar panggilan penerimaan Sekolah Perwira Wajib Militer (Sepa Wamil) ABRI (sekarang TNI). Saya pun tertantang untuk mencoba ikut seleksi. Sebenarnya, waktu itu, banyak teman dan bahkan saya sendiri berpikir, bahwa saya tidak memiliki postur atau tampilan untuk menjadi tentara. Sementara dari 11 orang alumni IAIN Sunan Ampel yang ikut seleksi, 80 persennya memiliki *background* sebagai aktivis Resimen Mahasiswa (Menwa). Tentu mereka sudah terlatih. Namun, meski awalnya coba-coba, begitu menghadapi ujian seleksi, saya tetap menganggapnya sebagai tantangan dan uji kompetensi. Tidak ada lagi kata coba-coba. Karena itu saya pun serius mempersiapkan diri. Baik secara fisik, mental maupun akademis. Di luar dugaan, dari 11 orang teman IAIN Sunan Ampel, hanya saya sendiri yang lolos dan diterima. Dari situ saya merenung dan bertanya-tanya, benarkah saya sungguh-sungguh hendak menggeser cita-cita awal sebagai *Guru (Dosen)* menjadi Tentara? Akhirnya, dengan *bismillah,* pendidikan itu saya jalani. Walau agak berat, *alhamdulillah* selesai juga.

Lulus pada Jumat, 22 Juni 1984, saya dilantik sebagai perwira dengan pangkat

Letnan Satu Corp Ajudan Jenderal (Lettu CAJ). Saya memulai karir militer dengan jabatan Perwira Pembina Mental Batalyon Kavaleri V Serbu Kodam II Sriwijaya (Pa Bintal Yonkav- 5 Dam II/SWJ) di Desa Karangendah, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Inilah untuk pertama kalinya saya merantau cukup jauh dari kampung halaman.

Sesungguhnya ada perasaan berat jauh meninggalkan Ibu yang sudah ditinggal



**Kenangan bersama siswa Sepa Wamil 1983/1984**

wafat Ayah. Tapi demi menjalankan tugas, saya harus tegar. Di situ, saya mulai merasakan adanya ujian mental untuk menyesuaikan kehidupan militer, yang kesehariannya jauh berbeda dengan sewaktu saya di Surabaya sebagai masyarakat sipil. Kehidupan di batalyon yang begitu disiplin, ketat dan kadang terasa keras, seakan menegaskan bahwa 90 persen hidup kami memang milik TNI-untuk negeri. Sejak subuh sampai malam, kegiatan hidup kami diatur oleh Dinas. Meski berat, saya pun sadar memang harus begitu di batalyon, dan saya harus bangga dengan itu. Pada akhirnya, pengalaman tugas di batalyon, itu menjadi kenangan indah dan membanggakan bagi saya sebagai seorang Prajurit.

Setelah dua tahun di Yonkav-5, saya mutasi jabatan sebagai Pa Bintal Denma Resimen Induk Infanteri Kodam II/SWJ (Rinifdam II/SWJ), di Muara Enim, Sumsel. Selain sebagai Pa Bintal, saya juga diberi jabatan dan tugas rangkap di bidang Personalia dan Guru Militer, untuk mengampu beberapa mata pelajaran. Salah satu tugas pokok satuan Rinifdam ini memang sebagai Lembaga Pendidikan TNI di Kodam. Menindaklanjuti ST dari Pangdam II/SWJ, yang meminta nominasi kinerja personel/prajurit di satuan itu, saya dipromosikan sebagai Perwira Berprestasi Menonjol.

Dua tahun kemudian, saya pindah tugas ke Dinas Pembinaan Mental Kodam II SWJ di Palembang dengan jabatan sebagai Kepala Urusan Tradisi dan Kejuangan (Kaur Trajuang), merangkap jabatan sebagai Ketua Primer Koperasi. Dari situ, pada 1991, saya mendapat panggilan tugas Operasi Seroja di Timor Timur, dengan jabatan sebagai Pa Bintal Yonif 412/6/2 Kostrad, yang juga diberi tugas rangkap sebagai Perwira Seksi Teritorial Terbatas. Tugas Operasi itu mengharuskan saya berpisah dengan istri dan dua putra-putri saya. Yang pertama masih kecil dan yang bungsu masih bayi. Suka duka pisah dengan keluarga memang cukup terasa. Tetapi hikmahnya juga nyata. Istri saya lebih terlatih untuk tegar dan mandiri.



**Operasi Seroja di Timor-Timur 1991**



**Menyatu dengan masyarakat Timor-Timur, 1991**



**Menerima penghargaan sebagai pemenang Juara-I Lomba Karya Tulis Sospol ABRI 1994/1995 dari Kasospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid**

Sepulang dari Timor Timur, saya mendapat kesempatan Sekolah Lanjutan Perwira II (Suslapa II), pada 1994. Sekolah itu membuka pintu kesempatan untuk pindah, dan berkarir di Ibukota (*tour of area*). Setamat dari Suslapa II, saya mendapat tugas di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan jabatan sebagai Kasipers Bagpers Info Dispenad. Tugas itulah yang mengawali saya bersentuhan dengan dunia media, atau berkawan dengan banyak pewarta. Berikutnya, saya diberi jabatan sebagai Perwira Staf Ahli Karya Tulis Dispenad, yang memungkinkan saya terlibat langsung dalam penyusunan dan penulisan naskah-naskah pidato dan ceramah pimpinan TNI Angkatan Darat (KASAD). Pada masa-masa itulah saya mulai aktif lagi dengan hobby menulis. Beberapa tulisan saya, selain dimuat di media publikasi internal jajaran TNI, juga di koran-koran Nasional. Melalui tulisan kritis dalam Lomba Karya Tulis Sospol ABRI (1994/1995), saya mendapat penghargaan sebagai Juara I.

Pada 1997, saya memeroleh kesempatan mengikuti seleksi dan berhasil lulus mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Waktu itu sungguh tidak mudah untuk bisa lolos masuk Sekolah itu. Pada akhir sekolah tertinggi di Angkatan Darat itu, *alhamdulillah* saya memeroleh penghargaan *Karya Wira Jati,* sebagai Penulis Kertas Karya Perorangan (Taskap) Terbaik. Selesai Pendidikan Seskoad, saya sempat ditarik kembali bertugas di

Dinas Penerangan TNI-AD. Dan, ketika mantan atasan saya diangkat menjadi Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI, saya pun ditarik pindah ke Puspen TNI. Beberapa jabatan yang pernah saya jalani selama di Pusat Penerangan TNI antara lain, Kepala Dinas Analisa Penerangan (Kadislisapen), Kepala Dinas Penerangan Umum (Kadispenum), dan Sekretaris Puspen TNI.

Saat menjabat Kadislisapen Puspen TNI, pada 2003, saya mendapat panggilan tugas operasi sebagai Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) / Juru Bicara Komando Operasi TNI (Jubir Koops TNI), dalam Operasi Pemulihan Keamanan (Opslihkam) Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dengan tugas itu, saya kembali harus berpisah dengan istri dan putra-putri saya. Saya juga harus meninggalkan kuliah S3 di FISIP Universitas Indonesia yang baru satu tahun lebih saya jalani. Tantangan dalam tugas itu memberi pengalaman yang



**Mengikuti Pendidikan SESKO TNI - AD 1997**

sangat berharga, karena Opslihkam itu bukan hanya menjadi perhatian di dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Sebagaimana diketahui, sejak Opslihkam belum diberlakukan, sampai dengan Operasi itu dilaksanakan, hotel-hotel di Aceh, khususnya di Lhokseumawe (Aceh Utara), dipenuhi oleh para pewarta dari dalam dan luar negeri. Mereka sangat antusias hendak meliput pelaksanaan operasi di daerah konflik itu. Begitu Opslihkam Darurat Militer dinyatakan diberlakukan oleh Presiden Ibu Megawati (melalui Keppres Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), maka kontak tembak antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun terjadi di pelbagai tempat. Korban kontak tembak mulai berjatuhan.

Sejak saat itu, saya mulai kurang tidur. Selain tidak henti-hentinya menyampaikan informasi tentang jalannya operasi, saya juga harus menjawab pertanyaan/konfirmasi para pewarta yang bisa datang setiap saat. Begitu intensnya

pelaksanaan operasi waktu itu, sehingga dalam sehari saya bisa dua kali menggelar jumpa pers. Tidak jarang pula, saya harus mengklarifikasi pemberitaan yang disampaikan pihak GAM, yang memang harus diluruskan. Saat itu interaksi intens dengan media harus saya lakukan. Hampir setiap hari, baik media cetak maupun elektronik (televisi) memberitakan dan menayangkan pernyataan saya, yang bagaimana pun menuntut saya untuk bekerja dengan *proper*, karena bersentuhan dengan konflik yang rawan dengan isu HAM.

Perhatian media massa juga ditandai dengan seringnya ada permintaan wawancara khusus baik dari media dalam maupun luar negeri, serta adanya kunjungan para Pemimpin Redaksi (Pemred). Di antaranya kunjungan Rombongan Pemimpin Redaksi Media Massa Ibukota, baik dari majalah, koran, televisi maupun radio, yang ingin melihat langsung situasi lapangan. Jika saya melihat nama-namanya (waktu itu), mereka pada umumnya adalah *top leader* dan Redaktur Senior dari masing-masing media tersebut. Karena jumlah mereka cukup banyak, dan akan memasuki daerah konflik yang masih rawan, kedatangan dan kepulangan mereka difasilitasi dengan Pesawat Hercules TNI dari Bandara Halim PK, Jakarta. Karena hotel-hotel di Lhokseumawe sudah penuh oleh pewarta peliput yang menetap di Aceh, dan juga mengingat faktor keamanan, seringkali para pimpinan media massa itu bermalam ditampung di instalasi militer Koops TNI, yang tersebar di beberapa lokasi, tentu dengan fasilitas yang sangat terbatas.

Ada kejadian yang menarik. Pada suatu malam, ada beberapa sosok jenazah prajurit TNI yang gugur akibat terlibat kontak tembak dengan GAM. Seperti lazimnya, sebelum dikirim ke Kesatuan asal, harus diadakan upacara militer terlebih dulu. Sebelum diupacarakan, pada malam harinya, jenazah itu disemayamkan di Aula Kodim Lhokseumawe. Begitu juga pada tengah malam itu. Jenazah yang gugur disemayamkan di Aula Kodim, yang sebagian ruangannya sudah ditempati beberapa orang Pemred yang baru datang dari Jakarta, dan tidur di atas velbed. Meskipun petugas jenazah sudah bekerja sesenyap mungkin, akhirnya para Pemred itu terusik dan terbangun juga karenanya. Maka dalam sekejap terjadilah kegaduhan. Banyak di antara mereka yang mengaku tidak bisa tidur di dekat jenazah. Petugas pun membantu mereka pindah ruang tidur dan bergabung di ruangan lain, yang kebetulan kosong.

Yang menarik, ada dua orang yang nampak tegar, dan sama sekali tidak terusik meskipun tahu ada jenazah di samping tempat tidurnya. Padahal saya tahu, kedua orang tersebut adalah Direktur dan Pemred Media yang cukup terkenal. Pertama, Dirut *LKBN Antara*, Pak Mohamad Sobary, dan kedua, Pemred Majalah Berita *Forum Keadilan*, Noorca M. Massardi. *(Tak terbayangkan bahwa 17 tahun kemudian, saya dan Pak Noorca dipertemukan dalam tugas yang sama sebagai Anggota LSF RI (2020-2024).Ketika kami bersama-sama mengenang dan memperbincangkan peristiwa*

*waktu itu, di antara komentar kami adalah:"Seandainya waktu itu sudah ada teknologi* selfie-selfian*, pasti banyak foto yang disimpan Pak Noorca.")*

Begitu besarnya perhatian media terhadap operasi militer ini, maka apa pun yang saya sampaikan dan diberitakan media-massa, harus dapat dipertanggung jawabkan. Baik kepada internal TNI maupun kepada publik. Apa pun statemen saya tentang dinamika yang terjadi dalam Opslihkam, akan berdampak pada penilaian publik terhadap Kinerja Koops TNI khususnya, maupun pada citra TNI pada umumnya. Jika pernyataan-pernyataan saya baik dan benar, pasti membawa



**Menerima Penghargaan Karya Wira Jati, sebagai penulis Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Terbaik Siswa SESKOAD Angkatan XXX IV, dari KASAD Jenderal TNI R. Hartono. 1997**

manfaat dan aman. Sebaliknya, jika pernyataan-pernyataan saya buruk dan tidak benar, pasti akan dipersoalkan dan mendatangkan mudharat dan kegaduhan. Sementara Opslihkam ini merupakan operasi yang berkaitan dengan kedaulatan Negara, yang tentu juga pasti akan ada risiko pada jabatan. Sementara saya juga merasakan adanya beragam sikap, kebutuhan dan kepentingan dari beberapa media, yang semuanya dapat terbaca dari pola bertanya dan pemberitaan oleh pewarta dan medianya. Oleh karena itu, menyampaikan berita dengan baik, benar dan bertanggungjawab, menjadi keharusan sebagai komitmen yang sungguh-sungguh saya jadikan pedoman.

Prinsip utamanya jangan bohong, dan bersikap bijak itu perlu. Prinsip itu saya peroleh dan saya pelajari dari bincang-bincang dengan teman-teman pewarta

senior. Alhamdulillah, amanah itu dapat saya laksanakan sebagaimana mestinya, hingga akhir masa tugas. Setidaknya, saya mencatat pernyataan *Media Watch* waktu itu, bahwa pemberitaan Opslihkam di Provinsi NAD dikuasai oleh TNI. Saya memaknai positif pernyataan itu. Setidaknya, saya telah melaksanakan tugas setahun lebih (2003-2004), sebagai Dansatgaspen / Jubir Koops TNI dengan aman sampai selesai.

Pada akhir masa tugas saya, Opslihkam sendiri belum selesai. Dan, suasana konflik masih terjadi meski intensitasnya sudah jauh menurun dan situasi kian membaik.



**Bersama Perwira Siswa SESKO TNI-AD dari Australia, Pakistan, Malaysia dan Srilanka**

Dalam perjalanan pulang, saya berdoa semoga konflik di Provinsi NAD dapat segera diselesaikan. Alhamdulillah, pada akhirnya konflik itu telah berlalu. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), telah menjadi provinsi yang maju pesat dan penuh kedamaian, sebagai bagian utuh dari NKRI, sebagaimana yang kita saksikan dan rasakan saat ini.

Beberapa waktu setelah purna tugas sebagai Dansatgaspen/Jubir Koops TNI, saya mendapat anugerah kenaikan pangkat, dari Letnan Kolonel menjadi Kolonel, karena syaratnya memang sudah terpenuhi. Jabatan saya pun berganti dari Kadislisapen menjadi Kepala Dinas Penerangan Umum (Kadispenum) Puspen TNI. Masih satu level.

Ada kenangan yang tak terlupakan. Beberapa hari setelah ditetapkan naik pangkat, pimpinan saya, Kapuspen TNI, tidak serta merta menyematkan tanda pangkat baru saya. Sampai kemudian saya mendapat tugas mendampingi beliau, bersama beberapa orang pejabat Mabes TNI lain, dalam kunjungan kerja ke

Koops TNI di Provinsi NAD, tempat tugas yang belum lama saya tinggalkan. Tanpa diberitahu sebelumnya, dalam sebuah acara nonformal di Markas Komando Operasi TNI itu, Kapuspen TNI, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (terakhir berpangkat Letjen dengan jabatan Wamenhan), menyematkan tanda pangkat baru saya, disaksikan beberapa pejabat yang hadir di situ. *Surprise* rasanya.

Dengan telah kembali bertugas di Jakarta, saya memeroleh kembali kesempatan melanjutkan program studi S3 saya di FISIP Universitas Indonesia, yang selama satu tahun lebih saya tinggalkan. Akhirnya, Program S-3 tersebut dapat saya selesaikan dan saya dinyatakan lulus pada 2007. Tak lama setelah itu, saya mendapat promosi jabatan sebagai Sekretaris Pusat Penerangan TNI. Itulah jabatan terakhir saya di Mabes /Puspen TNI.



**Mendapat tugas sebagai *Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) / Jubir Koops TNI* dalam Ops Darurat Militer di Propinsi NAD 2003**



**Doorstop dengan berbagai media yang senantiasa siap meliput Ops Darmil di Propinsi NAD**

Suatu hari, ketika saya baru keluar dari rumah dan hendak berjalan-jalan pada hari libur bersama istri dan anak-anak, termasuk anak saya yang masih Taruna Akmil, tiba-tiba HP saya berdering. Awalnya saya merespon dengan santai panggilan tersebut, sambil tetap mengemudikan mobil. Tetapi ketika yang menelepon saya menyebutkan namanya, saya pun sontak bersikap sempurna, dan menjawab *SIAAP!!* sambil menepikan mobil ke tempat yang aman. Yang menelepon saya adalah Mayjen TNI Budiman, Sekretaris Militer Presiden (waktu itu). Terakhir, jabatan beliau adalah Kepala Staf TNI-AD (Kasad). Beliau memberi petunjuk dan arahan, agar malam hari itu pukul 19.30 WIB, saya datang menghadap di Pendopo Kediaman Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Bogor. Waktu itu, Presiden SBY baru saja dilantik untuk masa jabatan keduanya sebagai Presiden RI periode 2009-2014. Meskipun petunjuknya cukup jelas, masih ada perasaan belum yakin, dan rasanya

banyak yang ingin saya tanyakan. Tetapi hanya ada dua pertanyaan singkat yang sanggup saya kemukakan: *"Mohon petunjuk, berpakaian apa dan membawa apa?"* Petunjuknya, memakai baju batik dan membawa Daftar Riwayat Hidup. Saya pun segera balik kanan. Rencana makan bersama keluarga di luar, saya batalkan. Kami kembali pulang untuk mempersiapkan dan melaksanakan petunjuk tersebut.



**Sebagai Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI. Selalu berdekatan dengan pewarta.**

Ketika malam itu saya datang di Cikeas, ternyata sudah ada beberapa orang yang datang dipanggil menghadap Bapak Presiden. Dua di antaranya saya kenal dekat, karena pernah menjadi atasan langsung saya, yaitu Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Kapuspen TNI dan Jenderal Goerge Toisutta, mantan Pangkoops TNI. (*Belakangan saya tahu, Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin. diangkat sebagai Wamenhan dan Jenderal George T. sebagai Kepala Staf TNI-AD*). Malam itu saya mendapat giliran terakhir. Panggilan terakhir sebelum saya, berakhir pukul 23.00 wib. Karena waktu sudah larut malam, Mayjen Budiman memberitahu, bahwa pemanggilan untuk saya menghadap Bapak Presiden ditunda, sampai waktunya nanti akan dipanggil kembali. Saya pun pulang dengan ketidak tahuan saya. Apakah sebenarnya tujuan pemanggilan untuk saya itu? Karena itu saya tidak pernah menceritakan kepada siapa pun ihwal tersebut, kecuali kepada istri dan anak-anak.

Enam hari kemudian, saya dipanggil kembali untuk menghadap Bapak Presiden. Kali ini tempatnya di Istana Kepresidenan. Waktunya juga malam hari pukul 20.00 WIB. Ketika saya datang, di ruangan tersebut sudah ada beberapa orang. Sebagian sudah saya kenal, sebagian lagi belum. Ada juga beberapa orang Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, yang saya kenal. Begitu Bapak Presiden hadir ke ruangan dan mengawali pengarahannya, beliau langsung menyapa nama saya dan meminta saya memperkenalkan diri. Selanjutnya, malam itu kami mendapat *briefing* dan arahan langsung dari Bapak Presiden, tentang amanah tugas yang akan kami emban. Malam itu juga saya baru mengetahui dan mendapat kejelasan. Saya

mendapat kehormatan diberi amanah jabatan sebagai Staf Khusus Presiden (SKP) Bidang Publikasi dan Dokumentasi. Petunjuk akhir malam itu adalah, agar kami mempersiapkan diri. Dan, mulai besok pagi pukul 10.00 WIB, saya bersama tujuh orang SKP lainnya, sudah harus berkantor di Istana Kepresidenan.

Acara malam itu selesai pukul 23.00 WIB malam, dan saya pulang sampai di rumah pukul 23.45 WIB. Setiba di rumah, saya membangunkan istri dan anak-anak. Lalu saya jelaskan kepada mereka. Intinya, mulai besok, saya tidak berkantor lagi di Mabes TNI Cilangkap, melainkan bertugas di Istana Kepresidenan, sebagai Staf Khusus Presiden. Mereka hanya termangu-mangu, dan tampaknya tidak serta merta percaya. Maklum, semuanya terjadi dengan cepat.

Esok paginya, saya datang ke kantor Puspen TNI lebih pagi dari biasanya. Saya ingin menyempatkan dan memanfaatkan waktu kurang lebih dua jam, untuk melapor kepada pimpinan, dan pamitan kepada teman-teman di Puspen TNI. Alhamdulillah, pukul 08.30 WIB selesai, dan saya langsung meluncur ke Istana Kepresidenan, untuk mengawali tugas di sana. Rasanya, semua berlangsung begitu cepat, bagaikan mimpi.

Ketika pagi itu menginjakkan kaki di Istana Kepresidenan, saya menuju ruang kantor saya. Saya jadi teringat ketika pada 1981, sebagai Ketua Umun KMA-PBS IAIN Sunan Ampel, Surabaya, saya pernah memeroleh kesempatan mengunjungi dan berkeliling di sekitar Istana Kepresidenan. Maka dengan jabatan baru itu, saya akan berkantor tiap hari di Istana Kepresidenan tersebut. Jabatan itu telah memberi banyak pengetahuan, pengalaman serta wawasan yang sangat berharga bagi saya. Sebagai Staf Khusus Presiden, bersama Staf Khusus Presiden lainnya, agenda harian



**Bersamaan Kapuspen TNI dan rekan-rekan wartawan dalam kunjungan tugas ke daerah**



**Sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi. Bersama Spri Presiden Kolonel Kustanto mendapat arahan langsung Bapak Presiden**

kami tentu melekat dengan kegiatan Presiden. Sementara sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, saya bertanggung jawab atas bagaimana setiap kegiatan dan pernyataan Presiden dapat menjadi materi informasi, publikasi dan dokumentasi yang terkelola dengan baik. Alhamdulillah, tugas itu dapat saya laksanakan dan pertanggungjawabkan. Sederet panjang buku, mulai dari buku *Himpunan Pidato Presiden; Presiden dalam Gambar*, hingga beberapa judul buku tematik yang kami kerjakan bersama para asisten dan pembantu asisten saya, terpajang rapi di Ruang Perpustakaan Istana Kepresidenan. Baik di Jakarta, Bogor, Jogjakarta maupun di Bali. Juga tersimpan di Gedung Arsip Nasional. Dalam jabatan ini pangkat terakhir saya adalah Mayor Jenderal (Mayjen) TNI.

Salah satu kenangan yang tak terlupakan adalah, saat saya mendapat tugas menyampaikan tausiah di depan dua Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres), saat suhu politik memanas dalam Pilpres 2014. Dengan hanya ada dua Capres dan Cawapres (Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa), terasa benar pengaruh mereka dalam memanasnya suhu politik saat itu. Pada sebagian masyarakat, timbul perasaan seperti terbelah dalam dua kelompok pilihan Capres-Cawapres yang berhadap-hadapan. Di tengah hangatnya situasi politik, itu muncul sebutan "Cebong" dan "Kampret." Sebutan yang dimanfaatkan masing-masing pihak untuk saling mengolok, dan menyindir

satu sama lain. Situasi menghangat itu masih sangat terasa saat penghitungan suara. Sehubungan dengan keadaan tersebut, dan untuk menurunkan suhu politik menjelang penghintungan akhir (22/7/2014) hasil Pilpres, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang kedua Capres-Cawapres, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa. Saat itu, dalam acara buka puasa bersama di Istana Negara pada Minggu, 20 Juli 2014.

Dua hari menjelang acara tersebut, saya dipanggil Bapak Presiden. Tidak saya duga, saya diberi tugas untuk menyampaikan tausiah pada acara buka puasa bersama tersebut. Meskipun agak kaget dan tidak menduga, tetapi tidak ada jawaban yang saya sampaikan kecuali kata: "S*iaap*." Bapak Presiden hanya menjelaskan



**Tanggal 18 Nopember 2008, kesempatan pertama kalinya dipanggil menghadap langsung Bapak Presiden SBY di Istana Negara. Diminta memperkenalkan diri, untuk kemudian mendapat briefeng dan penjelasan tugas sbg Staf Khusus Presiden (SKP), bersama SKP lainnya.**

urgensi acara tersebut, tetapi tidak memberi arahan apapun tentang materi tausiahnya. Sore hari berikutnya, menjelang malam pelaksanaan, saya dipanggil kembali menghadap Bapak Presiden. Saya ditanya, apa materi yang akan saya sampaikan. Sambil membawa catatan kecil, saya sampaikan substansi materi tausiah yang akan saya sampaikan. Beliau menyimak dengan serius dari awal sampai akhir, tetapi tidak memberi koreksi apapun. Hanya mengangguk-angguk. Dan, itu saya tangkap sebagai tanda menyetujui. Yang pasti saya tidak berbicara tentang politik, tetapi tentang Hikmah Ibadah Puasa dan diturunkannya Al-Quran bagi kehidupan manusia, dan saya akhiri dg sabda/hadits Rasulullah SAW yang artinya : Hendaknya kalian hati-hati dengan masalah kebenaran (kejujuran),



**Mendapat Pengarahan Tugas dari Bapak Presiden**

karena hanya kebenaran yang akan membawa kebaikan, dan hanya kebaikan yang akan membawa ke surga. Sampai akhirnya acara buka puasa bersama itu dilaksanakan. Acara itu dihadiri Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Capres-Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa, para Menteri KIB II, serta para tamu undangan khusus lainnya. Tidak ketinggalan para pewarta media massa yang meliput acara tersebut. Sejujurnya, tugas dan suasana saat itu cukup mengesankan bagi saya.

Sepanjang karier dan jabatan aktif di TNI, plus utamanya saat menjadi Staf Khusus Presiden, sesuai kepentingan tugas dan jabatan, saya memeroleh kesempatan mengunjungi tidak kurang dari 23 negara. Yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Hongkong, Kamboja, China, Laos, Arab Saudi, Abu Dhabi, Mesir, Fiji, India, Pakistan, Nigeria. Turki, Norwegia, Australia, Belanda, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Dan selama berkarir dalam dinas TNI aktif, termasuk di Istana Kepresidenan, saya mendapat 10 anugerah Satya Lencana dan Bintang Jasa, yaitu Satya Lencana (SL) Dwidya Sistha, SL. Seroja, SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV. SL Dharma Nusa, SL Wira Siaga, Bintang Kartika Eka Pakci Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya dan Bintang Jasa Utama.

Saya juga merasa patut bersyukur, karena di luar jabatan dalam birokrasi pemerintahan, saya sempat memeroleh beberapa pengalaman pekerjaan dan kegiatan di instansi nondepartemen, serta kegiatan sosial, yang memperkaya teman dan memperluas wawasan. Antara lain, sebagai Ketua Umum Keluarga Mahasiswa dan

Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) IAIN Sunan Ampel, Surabaya (1981-1983); Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya (1982-1984); Dosen Sosiologi Komunikasi UPN Jakarta (2008-20015); Dosen Tamu di Sesko TNI-AL; Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II (2010-2013); Komisaris PT PLN (2013-2014); Anggota Dewan Pakar PP KMA-PBS (2012-2015); Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) (2012-2017); Anggota Majlis Pertimbangan PB-IKA PMII (2018-2023); Ketua Pusat Kajian Bidang Ideologi, Dewan Pakar KMA-PBS (2019-2023); Anggota Dewan Kehormatan DPP-Partai Demokrat (2020-2025); Wakil Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) (2021-2026); Anggota Dewan Penasehat IKADI (2022-2027); Wakil Ketua Departemen Kesejahteraan DPP-PEPABRI (2023-2028), serta Khatib Jum'at dan Id di beberapa masjid, antara lain di Masjid Baiturrahim Istana Kepresidenan dan Masjid Istiqlal.



**Lapran Kenaikan Pangkat**

Setelah selesai betugas sebagai Staf Khusus Presiden (2009-20014) dan pensiun dari TNI, seperti air mengalir, saya memeroleh kesempatan mengabdi sebagai Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) periode 2015-2019.

Ada pengalaman yang tak terlupakan berkaitan dengan film pada 1973. Suatu hari, saya masuk gedung bioskop dan nonton film gratis, karena terjebak kerumunan dan berkeringat basah kuyup. Kisahnya, hari itu giliran sekolah saya masuk siang. Karena sesuatu hal, kami dipulangkan lebih cepat dari biasanya. Mengingat hari masih siang, saya iseng mampir dulu main-main di Alun-Alun Kota Blitar, sebelum kemudian belok ke Gedung Bioskop Dipayana, yang tak jauh dari Alun-alun. Awalnya, saya hanya ingin melihat-lihat poster dan judul-judul film yang akan segera main. Saya memang suka menonton film. Tapi siang menjelang sore hari itu, tidak seperti biasanya, di teras gedung bioskop dipenuhi penonton, yang



**Mendapat arahan tugas dari bapak Presiden**

berdesakan menunggu jam masuk. Banyak orang tua yang mengajak anak-anaknya, karena klasifikasi filmnya memang untuk semua umur. Saya pun tertarik untuk menonton, dan mencoba antre untuk membeli tiket. Namun, belum sampai mendapat giliran, ternyata tiket sudah habis terjual.

Di tengah padatnya kerumunan penonton, tibalah waktunya pintu masuk dibuka. Penonton pun berdesakan menyerbu masuk. Saya, yang terjebak di dalam desakan kerumunan, dan badan saya masih kecil, sulit untuk keluar dari kerumunan. Saya juga melihat petugas pintu masuk kewalahan memintai tiket penonton. Sehingga banyak yang masuk tanpa sempat menyerahkan tiketnya. Sementara pintu masuknya sendiri memang cukup lebar, tidak seperti gedung bioskop sekarang. Saya yang tidak bertiket pun terbawa arus sampai masuk ke dalam gedung bioskop. Ketika sudah berada di dalam, saya sempat berdiri termangu dengan hati yang gundah oleh perasaan bersalah, karena tidak membeli tiket. Di tengah kegalauan hati itu, ada orangtua yang sudah duduk di kursi dengan anaknya, yang menarik saya dari kerumunan orang, untuk duduk di samping anaknya. Waktu itu tempat duduknya bebas, tergantung siapa yang datang lebih dulu, dan tidak bernomer kursi. Orang tua tersebut sempat bertanya-tanya, tetapi untung tidak ada pertanyaan yang menggangu ketenangan saya. Syukurlah, film segera diputar. Saya berusaha menenangkan diri dan berupaya menikmati sampai film berakhir.

Kenangan dari kejadian itu, sempat memunculkan persasaan bersalah dan dosa, menonton tanpa membayar tiket. Namun, pada akhirnya muncul juga pertanyaan

dalam hati, apakah peristiwa itu merupakan isyarat dan punya andil untuk kemudian hari mengantarkan saya menjadi Anggota Lembaga Sensor Film? *Wallahu a'lam.* Setidaknya, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan berikut ini.

Pertama kali saya menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF) terjadi pada 2002-2005, karena saya ditugaskan menggantikan Kolonel Inf Tri Budhoyo, Wakil dari Mabes TNI, yang telah habis masa keanggotaannya, dan sudah memasuki masa pensiun. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film, disebutkan bahwa LSF beranggotakan paling banyak 45 orang, terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan wakil-wakil masyarakat. Oleh karena itu, pengangkatannya sebagai anggota, tanpa melalui proses seleksi, melainkan atas usul dan perintah Pimpinan masing-masing instansi dan organisasi. Karena jumlahnya banyak, maka tidak setiap hari semua anggota bisa masuk kantor. Masuk dan menyensor film dan iklan film pun hanya bisa sesuai jadwal yang sudah diatur sebelumnya.

LSF pada masa itu juga sering dipredikati sebagai lembaga gunting film. Tidak salah memang, karena dalam kerja teknisnya, bagian-bagian film yang dinilai tidak layak tayang, dicatat dan langsung dipotong dengan mesin potong yang setiap hari siap



**Kenangan bersama Prof. Dr. Firmanzah (Alm) saat kunjungan tugas ke Inggris. 2014**



**Presiden RI Ibu Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan audiensi Anggota LSF 2003-2005**

beroperasi. Materi filmnya pun masih dalam bentuk pita seluloid, sehingga mudah untuk digunting. *Power* LSF dalam perfilman saat itu, dapat terbaca jelas pada pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, disebutkan : "*Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film: (a) diluluskan sepenuhnya ; (b) dipotong bagian gambar tertentu; ditiadakan suara tertentu (c) ditolak seluruh film untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan".*

Ada peristiwa penting yang terjadi pada 2008, yang menurut saya, itu termasuk peristiwa bersejarah. Beberapa orang sineas yang menamakan dirinya Masyarakat Film Indonesia (MFI) mengajukan *judicial review* atau pengujian kembali terhadap materi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka bertindak untuk dan atas nama dirinya sebagai "perorangan warga negara Indonesia" yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, berkaitan dengan penyensoran terhadap beberapa produk film mereka oleh Lembaga Sensor Film. Mereka mendasarkan aduannya, antara lain pada pasal 28C ayat (1) dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang substansinya berkaitan dengan hak mengembangkan diri, khususnya dalam bidang seni dan budaya (pasal 28C), dan hak untuk berkomunikasi dan memeroleh saluran informasi melalui segala saluran yang tersedia (Pasal 28F). Tuntutan itu akhirnya masuk proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dan memakan waktu cukup lama.

Bersama Anggota LSF lainnya, saya pun harus berulangkali menghadiri panggilan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Para pihak, dalam mempertahankan argumennya, juga sama-sama menghadirkan saksi ahli masing-masing. Lembaga Sensor Film sebagai representasi Pemerintah meng-*counter* argumentasi teman-teman sineas antara lain, dengan mengangkat Pasal 28J ayat (1), yang substansinya "tidak ada kebebasan yang tanpa batas," dan ayat (2) yang substansinya adalah, "untuk memenuhi tuntutan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, maka kebebasan berkreasi juga harus memenuhi pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum." Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, antara lain, substansinya mengatur tentang pembatasan tersebut.

Setelah memakan waktu beberapa bulan, tepatnya pada Rabu, 30 April 2008, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan *"menolak sepenuhnya*




*permohonan pemohon".* Namun demikian dalam amar putusan tersebut, Hakim MK terlebih dulu menyampaikan kesimpulannya: *"bahwa Undang-Undang Perfilman yang berlaku saat ini, termasuk ketentuan yang mengatur sensor dan Lembaga Sensor Film, sudah tidak sesuai dengan semangat zamannya, sehingga sangat mendesak untuk dibentuk undang-undang perfilman yang baru, beserta ketentuan mengenai sistem penilaian film yang baru yang lebih sesuai dengan semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia..."*

Dengan demikian, meskipun keputusan Hakim MK menolak sepenuhnya



**Kenangan bersama Komisaris PT PLN 2013**

permohonan pemohon, tetapi upaya *judicial review* teman-teman sineas tersebut, telah membuka pintu evaluasi terhadap UU No. 8/1992 tentang Perfilman. Saya pribadi memandang peristiwa itu membawa hikmah kebaikan dalam dunia perfilman. Di satu sisi, kejadian itu memang meneguhkan eksistensi Lembaga Sensor Film, tetapi juga memperingatkan bahwa sudah waktunya ada koreksi dan penyesuaian Undang-Undang, yang memayungi dunia perfilman agar selaras dengan tuntutan zamannya, termasuk Lembaga Sensor Film. Responnya juga nyata. Karena dalam kurun waktu yang relatif tidak lama, telah lahir dan ditetapkan undang-undang tentang perfilman yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Namun demikian, Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, baru ditetapkan lima tahun kemudian, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Maka sejak saat itulah proses penyesuaian dan perubahan dimulai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketika saya diberi kesempatan menjadi Anggota dan diangkat menjadi Ketua LSF (2015-2019), yang pertama kali saya pikirkan adalah amanah untuk bersama 16 Anggota LSF lainnya, mengawal masa transisi pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film tersebut. Yang pasti, dalam keduanya terkandung amanat perubahan, yaitu semangat dan tatanan baru dalam perfilman, dan khususnya tentang Lembaga Sensor Film. Ada perubahan yang signifikan dari masa sebelumnya, baik struktural maupun kultural.

Dulu, anggota Lembaga Sensor Film (LSF) berjumlah 45 orang. Mereka berasal dari perwakilan pelbagai instansi Pemerintah (sipil, militer dan Kepolisian RI), serta organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan organisasi profesi lainnya. Namun,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU No. 33/2009), dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 (PP No. 18/2014) tentang Lembaga Sensor Film (LSF), anggota LSF ditetapkan hanya berjumlah 17 orang. Lima orang dari perwakilan Pemerintah, dan 12 orang perwakilan masyarakat, dengan pelbagai latar belakang keahlian/disiplin ilmu yang diperlukan.

Bila pada masa lalu pengangkatan Anggota LSF dilakukan tanpa melalui mekanisme seleksi, maka berdasarkan UU No. 33/2009, para calon anggota LSF terlebih dulu diseleksi oleh Pantia Seleksi (Pansel), dan Pansel lalu memilih serta menyerahkan 34 nama calon anggota LSF. 24 orang unsur masyarakat + 10 orang unsur pemerintah /kementerian) ke Presiden dan Presiden meyerahkan ke DPR untuk mendapat pertimbangan melalui fit and proper test. DPR menyerahkan hasil pertimbangannya sebanyak 17 nama kepada Presiden dan kemudian dilantik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai mandataris Presiden. Seiring



**Penyerahan buku "Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film" dari Ketua LSF kepada Mendikbuk, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, pada Peringatan 100 Tahun Sensor Film.**

perkembangan dan untuk membantu tugas Anggota, diangkat pula 34 orang Tenaga Sensor (TS) yang membantu Anggota LSF dalam penyensoran dan pemantauan film dan iklan film.

Ketika pada 2014 dibuka seleksi penerimaan anggota LSF periode 2015-2019 (sesuai ketentuan UU No. 33/2009), saya masih menjadi anggota LSF (2009-2012), yang diperpanjang sampai 2014, saat PP No. 18/2014 ditetapkan). Saya juga baru memasuki masa pensiun dari TNI. Jadi, saya memenuhi syarat untuk

ikut seleksi atas nama pribadi sebagai perwakilan masyarakat. Saya pun mendaftar dengan kompetensi di bidang Hankam. Setelah menjalani proses seleksi yang cukup panjang, saya bersama 16 orang lainnya dinyatakan lulus. Namun, menjelang pelantikan, ada satu orang yang mengundurkan diri. Komposisinya, sebagian dari petahana (*incumbent*) termasuk saya, dan sebagian besar lainnya orang baru. Dalam pemilihan Ketua yang dilakukan Sidang Pleno Anggota, saya terpilih sebagai Ketua LSF (2015-2019).

Sebagai Ketua bersama 16 Anggota lain dalam periode ini, selain melanjutkan tugas dan fungsi yang sudah ada, kami juga harus merumuskan formulasi Paradigma Baru yang diamanahkan UU No. 33/2009 dan PP No. 18/2014 tersebut. Saya sering menyampaikan ihwal pentingnya *continuity & change* (keberlanjutan & perubahan), untuk memastikan bahwa LSF sebagai lembaga regulasi negara yang telah lama ada, harus terjaga eksistensi dan nilai-nilai historisnya; nilai *intrinsik* maupun *ektrinsik*nya; dan harus sejalan dengan tuntutan perkembangan demokrasi. Oleh sebab itu, perubahan dan perbaikan juga merupakan sebuah keniscayaan.

Ada beberapa hal yang kami pandang sebagai amanah yang perlu dirumuskan dan diambil langkah-langkah implementasinya.

*Pertama,* Terkait dengan *positioning* LSF yang ditegaskan Pasal 58 ayat (1) UU No.



**Menyambut kehadiran Mendikbud Prof. Dr. Muhadjir Effendy beserta Ibu dalam acara Anugerah LSF 2018**




**Bincang-bincang Perfilman program di Bingkai Inspirasi**

33/2009, bahwa Lembaga Sensor Film bersifat tetap dan *independen.* Kata independen yang tidak ada dalam undang-undang sebelumnya, mengamanatkan bahwa sebagai lembaga regulator, LSF harus mampu memposisikan diri dan mengambil jarak yang tepat, dalam hubungannya dengan *stakeholder* atau para pihak yang berkepentingan. Baik dalam hubungan struktural, fungsional maupun kultural. Sehingga, harus dipastikan tidak ada konflik kepentingan yang mengganggu eksistensi dan kredibilitas LSF sebagai lembaga regulator. Baik oleh *strong power*-nya kekuasaan (kritik masa lalu), maupun oleh kepentingan-kepentingan *stakeholder* lainnya, yang memungkinkan adanya euforia (evaluasi dari perjalanan reformasi).

*Kedua,* Perubahan kultural jam kerja, dari sebelumnya tidak penuh waktu menjadi penuh waktu, ternyata belum serta merta diikuti dengan penyesuaian penggajian maupun hak-hak lainnya. Inilah ujian transisi pertama yang harus kami hadapi. Kami memahami, bila keadaan itu mengundang ketidaknyamanan di antara teman-teman Anggota, khususnya yang telah memutus kontrak dengan tempat kerja sebelumnya. Meskipun, semestinya urusan dukungan administratif semacam itu bukan tugas pokok Ketua/Anggota LSF, tetapi hal itu tetap menuntut kami untuk turun tangan langsung mendampingi Kepala Sekretariat dalam menyelesaikan urusannya. Dengan upaya yang sungguh-sungguh, akhirnya tujuh bulan kemudian, urusan penyesuaian penggajian dan hak-hak lainnya dapat diselesaikan.*Ketiga*, Adanya amanah perubahan sebagaimana diamanatkan UU No. 33/2009 tentang Perfilman, dan PP No. 18/2014 tentang LSF, perlu dirumuskan dan ditegaskan apa dan bagaimana yang disebut sebagai Paradigma Baru LSF itu. Kami menangkap ada empat butir penting terkait paradigma baru

tersebut, yang substansinya hendak meneguhkan eksistensi dan komitmen LSF atas tugas pokok, *positioning* dan semangat perubahannya. 1). Seiring dengan nilai strategis film bagi ketahanan budaya bangsa, LSF diamanati tugas untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. 2). LSF harus berperan nyata sebagai penerang dan pendorong bagi semakin berkembang dan produktifnya film nasional. Dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) waktu itu menekankan agar LSF berperan sebagai *mercusuar* dalam dunia perfilman. 3). LSF harus mengedepankan *prinsip dialog* dengan menempatkan masyarakat perfilman sebagai mitra dalam upaya bersama memajukan perfilman nasional. 4). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menghadirkan kian murah dan mudahnya mengakses informasi, termasuk karya sinematografi (film), LSF diamanati untuk memberdayakan



**Pertemuan dengan Netherlands Film Fond, di Belanda.**

masyarakat agar memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam memilah dan memilih tontonan dengan baik (Budaya Sensor Mandiri). Itulah paradigma baru atau komitmen LSF yang sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Baik untuk kepentingan internalisasi maupun ekternalisasi. Diskusi dan perdebatan tentu sering kami hadapi, terkadang terjadi cukup keras. Bagi saya, semua itu memang diperlukan agar masa transisi dapat kita lewati dengan meninggalkan fondasi *positioning* yang kuat. Dan, jika ada perubahan dan perbaikan, maka perubahan dan perbaikan itu adalah milik bersama.

Dengan mengacu pada keempat paradigma di atas, di samping melaksanakan tugas pokok penyensoran, kami juga harus bekerja keras untuk meletakkan dasar-dasar utamanya. Dengan kata lain, di balik rumusan Paradigma Baru tersebut, ada beberapa tugas terkandung yang harus dirumuskan dan diimplementasikan. Terkait dengan paradigma pertama dan keempat, yaitu tugas perlindungan dan pendampingan masyarakat, LSF harus terus meningkatkan profesionalisme dalam



**Ketika adegan itu memang lucu, kamipun jadi tertawa. Dalam Anugerah LSF 2018**

pelayanan tugas penyensoran, dan banyak melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi hukum, serta melakukan sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) di tengah-tengah masyarakat.

Agar literasi dan sosialisasi BSM tidak hanya berkembang sebagai wacana, tentu diperlukan adanya buku panduan sebagai pedoman. Maka disusun dan diterbitkanlah buku *Dasar Pemikiran Budaya Sensor Mandiri, Upaya Melindungi Masyarakat Dari Dampak Negatif Film.* Buku sederhana itu diharapkan dapat memberi pemahaman dan meyakinkan masyarakat tentang pentingnya Budaya Sensor Mandiri, dan pentingnya kegiatan sosialisasinya. Sementara, ihwal bagaimana seharusnya Budaya Sensor Mandiri disosialisasikan dan dikembangkan, maka disusunlah buku *Kebijakan Sensor Film dan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.*

Terkait dengan paradigma kedua, yaitu amanah peran mendorong perkembangan film nasional, LSF juga melakukan sosialisasi tentang budaya dan kearifan lokal, yang merupakan kekayaan budaya bangsa dalam ke-Indonesiaannya, yang sangat penting untuk diangkat dalam karya sinematografi. Sejalan dengan itu, dan sesuai amanah UU No. 33/2009 tentang Perfilman, pasal 58 ayat 4, dan PP No. 18/2014 tentang LSF, Pasal (3), (4) dan (5), LSF mulai merintis pembentukan LSF Perwakilan Daerah. Melalui kajian yang mendalam tentang urgensi dan produktivitasnya, ada beberapa daerah yang dinilai perlu menjadi prioritas. Dari 13 Provinsi yang masuk dalam nominasi, ada dua provinsi yang masuk prioritas. Yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Maka dimulai pembentukan perdananya, yaitu LSF Perwakilan Jawa Timur di Surabaya. Setelah mendapat pengesahan dari Mendikbud, dilanjutkan dengan seleksi penerimaaan Tenaga Sensor (TS). Sesuai kebutuhan, dipilihlah 7 orang TS, yang dilantik pada Selasa, 16 Mei 2017, di LPMP Jawa Timur, yang kemudian ditetapkan sebagai kantor LSF Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur. Sejak hari itu pula LSF Perwakilan Jawa Timur beroperasi.

Terkait dengan paradigma ketiga, maka LSF senantiasa membangun dan mengedepankan dialog yang konstruktif dengan pemilik film dan iklan film, dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Arah dialog itu adalah menuju adanya suasana saling memahami dan menghormati tugas dan fungsi masing-masing, agar terbangun kesamaan nilai dan persepsi, atas materi film dan iklan film yang disensor, yang menjadi objek dan subjek dialog tersebut.

*Keempat,* Pasal 62, ayat b, UU No. 33/2009 tentang Perfilman, menegaskan bahwa LSF dibantu oleh tenaga sensor (TS) yang memiliki *kompetensi* di bidang penyensoran. Pertanyaannya bagaimana dan siapa yang merumuskan standar kompetensinya. Pada akhirnya kami harus menerima bahwa ini juga termasuk salah satu tugas LSF. Oleh karena itu, dengan berkonsultasi dan kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dibentuklah Panitia Teknik Uji Kompetensi (PTUK) LSF-BNSP. Dari kerja sama itu tersusunlah Skema Sertifikasi Okupasi Tenaga Sensor Film, yang kemudian ditetapkan dan disahkan oleh Ketua BNSP (Ir. Sumarna F.A. Abdurrahman, Msc) bersama Ketua LSF, pada Selasa, 24 April 2018. Skema itu digunakan untuk sertifikasi profesi dalam ruang lingkup perfilman sub bidang sensor film, yang mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menakertrans RI Nomor Kep.273/Men/X1/2011 tentang



**Bersama Sekjen, Dirjen Kebudayaan dan pejabat Kemendikbud lainnya saat menghadiri FFI 2017 di Menado**




**Bersama aktris dan aktor film Christine Hakim dan Reza Rahadian sebelum bincang-bincang perfilman di acara dialog Layar Perak.**

Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kebudayaan Bidang Perfilman Sub Bidang Sensor Film Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi itu dibentuk untuk memastikan adanya acuan kompetensi profesi Tenaga Sensor film. Sebagai tindak lanjutnya, LSF kemudian mengirim 7 orang anggota LSF untuk mengikuti pelatihan, dan telah lulus sebaga Asesor bagi Tenaga Sensor.

*Kelima*, Untuk menjawab kritik dan pertanyaan *stakeholder* dan masyarakat yang sering muncul dalam pelbagai forum dialog dan diskusi tentang bagaimana standar LSF dalam menetapkan kelayakan film dan penetapan klasifikasi usia, LSF berupaya menyusun buku Pedoman dan Kriteria Penyensoran, dan Penggolongan Usia Penonton. Buku yang semula hanya disiapkan sebagai buku pedoman produk LSF, namun untuk kepentingan yang lebih besar, dengan penambahan substansi dan melalui proses uji publik dengan *stakeholder* terkait, akhirnya pedoman itu diangkat dan ditetapkan sebagai Peraturan Menteri. Yakni, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.* Peraturan Menteri ini bernilai penting, sebagai panduan sarana penyamaan pemahaman dan persepsi antara LSF dengan pelaku usaha dan pegiat perfilman, serta masyarakat pada umumnya, ihwal bagaimana

LSF menetapkan kelayakan sebuah film dan menetapkan klasifikasi usianya.

*Keenam,* Untuk memperkuat posisi kelembagaan, dilaksanakan kajian tentang Posisi Kepala Sekretariat LSF yang berada dalam Eselon 3. Posisi itu terasa membatasi kesetaraan LSF dengan institusi serupa, yang beban tugasnya sama, atau bahkan di bawahnya, tetapi eselonisasi sekretariatnya lebih tinggi. Dampak eselonisasi itu cukup dirasakan dalam urusan protokoler dan penggajian. Oleh karena itu, LSF terus berjuang untuk peningkatan dan penguatan eselonisasi kelembagaan, dengan mengusulkan peningkatan eselon Sekretariat LSF, dari Eselon 3 menjadi Eselon 2. Melalui pelbagai kajian, akhirnya tersusun juga naskah akademiknya. Memang tidak begitu mudah untuk menyelesaikannya.

*Ketujuh,* Untuk meningkatkan kredibilitas, transparansi dan kualitas fungsi




**Mendikbud, Sekjen, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Ketua LSF-RI dan pejabat Kemendikbud lainnya dalam acara Peluncuran AFI 2016.**

pelayanan, LSF membangun e-*Sias* (Sistem Administrasi Elektronik) yang peluncuran perdananya dilaksanakan pada Kamis, 12 Desember 2019. Tujuan pengadaan *e-Sias* itu adalah untuk membangun sistem palayanan penyensoran yang cepat, mudah dan transparan. Melalui *e-Sias* para pelaku usaha dan pegiat perfilman, dapat memantau langsung tentang proses materi film dan iklan film yang disensorkan, sekaligus mengetahui berapa beaya penyensorannya. Sistem itu cukup penting dalam peningkatan kualitas pelayanan yang lebih profesional, sesuai tuntutan perkembangan yang ada, serta mencegah adanya isu maupun tindak percaloan dalam proses sensor film.




**Foto bersama di kantor Nederland Film Fond, Den Haag, Belanda - 2023**

*Kedelapan,* Untuk memperkaya makna dan implementasi paradigma baru, LSF menggelar Forum Diskusi dengan melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan perfilman. Kegiatan itu sekaligus untuk memperingati momentum 100 Tahun perjalanan Sensor Film (1916-2016). Dengan mengangkat tema besar "*Masyarakat Sensor Mandiri Wujud Kepribadian Bangsa"* sebagai acuannya, diharapkan wacana yang berkembang dalam pelbagai perspektifnya, juga dapat mempertemukan pemahaman, bahwa perubahan yang lebih baik dimungkinkan terjadi, hanya bila manusia dan masyarakat Indonesia melek media dan memiliki media literasi yang baik. Memerhatikan berharganya pelbagai pemikiran yang tertuang dalam forum tersebut, maka LSF merasa penting mendokumentasikannya dalam sebuah buku bunga rampai, yang untuk penguatannya juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Pemikiran-pemikiran yang sangat berharga tersebut, kami rangkum dan terbitkan dalam sebuah buku berjudul *Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film.* Buku itu diluncurkan bersamaan dengan acara Peringatan 100 Tahun Sensor Film, yang dihadiri dan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy pada Jumat, 18 November 2016.

*Kesembilan,* Untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pegiat dan pelaku usaha Perfilman, atas kepatuhan mereka dalam melaksanakan Sensor Film dan penerapan budaya sensor mandiri dalam karya-karyanya, LSF menggagas perlunya program *"Anugerah LSF"*. Sebagai gagasan baru, tentu tidak serta merta gagasan tersebut dipahami dan diterima, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, sebagai program baru, hal itu terkait dengan program penganggaran dan persoalan teknis lainnya. Secara eksternal, ada yang mempertanyakan tentang kemungkinan adanya duplikasi dengan anugerah-anugerah serupa yang telah ada. Dengan upaya yang sungguh-sungguh, akhirnya hal-hal tersebut dapat

diatasi dan dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya, "*Anugerah LSF*" yang pertama dapat dilaksanakan pada 2017.

Demikianlah, langkah-langkah yang kami lakukan sebagai Ketua LSF bersama 16 Anggota lainnya, dalam mengawal masa transisi pergantian dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, serta dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang LSF, ke Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, sepanjang masa bakti 2015-2019. Masa empat tahun tentu bukan waktu yang cukup untuk memperjuangkan sebuah gagasan. Namun



**Dengan Mendikbud Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy dalam peringatan 100 Tahun Sensor Film. Tahun 2016**

setidaknya, sudah cukup untuk membangun sebuah fondasi bagi paradigma baru tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film yang independen, di tengah perubahan dan demokratisasi sesuai amanah Reformasi 1998 serta memperhatikan tantangan era digital. Oleh karena itu, saya merasa yakin dan percaya kepada Anggota LSF (2020-2024), di bawah kepemimpinan Pak Rommy Fibri Hardiyanto, dalam mengawal *continuity & change* (keberlanjutan & perubahan) dan mampu membawa LSF menjadi lebih baik lagi.



## JATI DIRI:

**Nama Lengkap**: Ahmad Yani Basuki

**Tempat & Tanggal Lahir**: Blitar, 5 Maret 1956

**Anak Nomor:** 4 dari 6 bersaudara

**Nama Orang Tua:** Padhoni & Hj. Atmah.

**Nama Istri :** Nurul Fauzah

**Nama Anak :** 1. dr. Aulia Putri Nurjannah + Mayor Inf. Miftahul Khoir
2. Kapten Inf. Dimas Agung Fatahillah STHan + Karina Hafidha
3. Letda Laut (H)Ali Azhar Hidayatullah, S.H + R. Candy Andhika

**Nama Cucu :** 1. Ghaziah Afiqah Putri,
2. Ghaisan Ibnu Khair
3. Rafandra Zehan Azhar,
4. Kiera Aqmarina Elham

## RIWAYAT PENDIDIKAN

**Pendidikan Umum**

1969 Sekolah Rakyat Negeri Mangunan, Udanawu, Blitar

1973 Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun, Blitar

1975 Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun, Tulungagung

1982 Program S-1 Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, Surabaya

2002 S-2, Manajemen Pembangunan Sosial, FISIP-UI 2007

S-3, Sosiologi Militer FISIP UI

**Gelar : Dr., MSi.**

**Pendidikan Militer**

1984 Sekolah Perwira Wajib Militer

1984 Kursus Perwira Ajudan Jenderal

1985 Kursus Perwira Pembina Mental

1992 Kursus Lanjutan Perwira

1994 Kursus Lanjutan Perwira

2007 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD)

**Riwayat Kepangkatan**

1984 Letnan Satu (Lettu)

1991 Kapten

1995 Mayor

1999 Letnan Kolonel

2004 Kolonel

2009 Brigadier Jenderal TNI

2013 Mayor Jenderal TNI

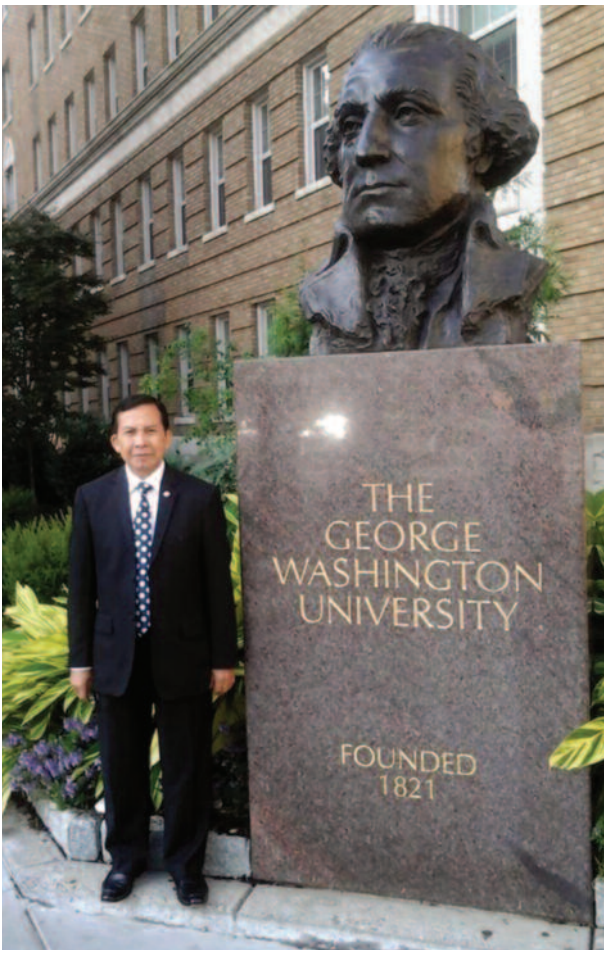

# RINGKASAN

## Mayjen TNI (Pur) Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si.

Mimpi pun bisa berubah di tengah jalan. Begitulah yang dialami Mayjen TNI (Pur) Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si. Kelahiran Blitar, 5 Maret 1956, ini menamatkan PGAN 6 Th (1975), dan kuliah di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel (1982), sesuai impiannya untuk menjadi Guru dan Dosen. Mimpinya sempat ia nikmati beberapa tahun, hingga datang tantangan baru: panggilan menjadi Prajurit TNI.

Lulus menjadi prajurit TNI (1984), tak menyurutkan mimpi akademisnya. Ia menuntaskan program studi S-2 Manajemen Pembangunan Sosial (2002) dan Program Studi S-3 Sosiologi (2007) di FISIP Universitas Indonesia. Semangat akademisnya ternyata beririsan dengan aktivitas menulisnya. Mulai dari menjadi Pemred Majalah Kampusnya, hingga bertugas di TNI. Sesuai jabatannya, saat di Dispen TNI-AD, ia sempat menjadi *Speechwriter* Pimpinan TNI-AD. Tulisan kritisnya mendapatkan penghargaan Juara I Lomba Karya Tulis Sospol ABRI TA 1994/1995. Dan, di pendidikan Sekolah Staf dan Komando (SESKO) TNI-AD, ia mendapatkan penghargaan *Karya Wira Jati* sebagai penulis Kertas Karya Perorangan (Taskap) terbaik.

Jabatannya di lingkungan TNI antara lain, Perwira Pembina Mental di Yonkav-5, Yonif 412 dan Rinifdam II/SWJ (1984-1993). Beberapa jabatan selama bertugas di Puspen TNI adalah Kadis Analisa Penerangan (2002-2004), Komandan Satuan Tugas Penerangan/ Juru Bicara Komando Operasi TNI (2003-2004), Kadis Penerangan Umum (2004-2008) dan Sekretaris Pusat Penerangan TNI (2008- 2009). Tugasnya di luar struktur TNI adalah sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi (2009-2014).

Pada 2003, sebagai Wakil dari Institusi Mabes TNI, ia ditugaskan menjadi Anggota LSF periode 2002-2005, menggantikan Kolonel Inf. Tribudoyo. Ketika pada 2014 dibuka seleksi Anggota LSF 2015-2019, karena statusnya sudah pensiun dari TNI. ia mendaftar dan lulus menjadi Anggota LSF, atas kompetensi pribadinya di bidang Hankam, dan terpilih sebagai Ketua LSF (2015-2019). Ia pun terpilih kembali sebagai Anggota LSF (2020-2024), sekaligus menjadi Ketua Komisi II Bidang Pemantauan, Hukum dan Advokasi.



# Adaptif dan Kolaboratif

**Andi Muslim**
Ketua Subkomisi Media Baru

Keberadaan saya di Lembaga Sensor Film (LSF) periode 2020-2024 adalah sebagai wakil dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), yang merupakan salah satu unsur dari Pemerintah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 18/2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF), anggota dari unsur Pemerintah terdiri atas kementerian / lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan 1 (satu) orang; b. kebudayaan 1 (satu) orang; c. komunikasi dan informasi 1 (satu) orang; d. agama 1 (satu) orang; dan e. ekonomi kreatif 1 (satu) orang.

Di LSF, karena minat utama saya pada ilmu komunikasi, maka saya kemudian ditunjuk menjadi Ketua Subkomisi Media Baru. Suatu tantangan yang seru dan sangat menegangkan. Terutama karena sebagai anggota dari generasi milenial di LSF, media sosial (medsos) merupakan media komunikasi yang tidak bisa dihindari di era transformasi *second media age* ini.

Dalam industri perfilman gempuran digital juga terjadi. Hal ini menjadi tugas berat bagi LSF dalam menjalankan peran sebuah lembaga negara yang menjalankan tugas penyensoran film dan iklan film sebelum ditayangkan. LSF memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan literasi melalui cara yang lebih mengena kepada masyarakat tanpa menimbulkan kesan kaku. Luwes tapi berisi.





**Dengan Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto**




**Kunjungan dan penjelasan ihwal Budaya Sensor Mandiri LSF**

Perkembangan teknologi informatika di dunia saat ini telah dan akan mengubah lansekap dan pola konsumsi konten serta tayangan. Film-film yang ditayangkan ke khalayak umum melalui media layar lebar di bioskop dan layar kaca di televisi, kini harus bersaing dengan pelbagai tayangan di layar gawai / *gadget*. Hal itu merupakan fenomena yang sangat menarik. Segmen pasar menjadi semakin terkelompok dalam varian yang semakin banyak. Namun, karena setiap media memiliki karakter, kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka setiap media menghadirkan pengalaman yang berbeda pula. Dengan demikian, pada akhirnya setiap media akan tetap memiliki audiensnya masing-masing.

Merujuk pada teori media sosial dalam perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi, dalam pemanfaatan media sosial ada tiga bentuk yang mengarah pada makna bersosialisasi yaitu pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*), dan kerjasama (*cooperation*). Hal serupa juga diterapkan dalam pemanfaatan media sosial LSF selama kurun waktu tiga tahun ke belakang. Pengelolaan media sosial LSF selama 2020 fokus pada pengenalan profil LSF kepada audiens dengan kemasan konten yang sifatnya menarik *followers*. Contohnya melalui konten-konten kuis yang menawarkan hadiah-hadiah menarik.

Berlanjut ke tahun 2021, pengelolaan media sosial berkembang tujuannya menjadi komunikasi. LSF mulai rutin menghasilkan konten-konten yang lebih atraktif dan mengena dengan usia target audiensnya. Tujuannya adalah agar



**Bersama para mahasiswa magang media sosial LSF**

informasi yang ingin disampaikan dapat diterima oleh followers. Contohnya melalui konten-konten TikTok dan konten *Panduan Film* di Instagram yang mengemas informasi dengan cara kekinian agar dapat dikomunikasikan kepada target *followers.*

Dulu kita menggunakan media *mainstream,* seperti suratkabar, majalah, radio dan televisi, untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi. Namun sekarang, dengan berkembangnya teknologi informatika, semua sudah bisa hadir di genggaman tangan. Wajar bila saya kemudian berusaha mengembangkan akun-akun media sosial milik LSF seperti *YouTube, Twitter (*kini *X), Instagram, facebook,* dan *TikTok.* Tak ayal, akun Instragram LSF, misalnya, yang sebelumnya stagnan di kisaran 1000 *followers,* saat ini sudah tembus lebih dari 12 ribu *followers.* Sementara akun TikTok yang usianya belum genap setahun, kini telah memiliki lebih dari 2.000 *followers*.

Melalui medsos yang menjangkau usia pengguna 15 - 35 tahun, LSF mengajak masyarakat untuk memahami tontonan dengan baik dan benar. Terutama karena salah satu tugas dan fungsi LSF adalah meneliti, menilai dan menetapkan klasifikasi atau penggolongan usia bagi setiap materi tontonan yang disensorkan, sebelum dapat ditayangkan ke khalayak umum.

Melalui penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), LSF menetapkan klasifikasi usia untuk penonton semua umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+) dan 21 tahun ke atas. Karena itulah, investasi sosial budaya yang dilakukan LSF adalah menuju kepada pemahaman manusianya sebagai

(calon) penonton terhadap pelbagai tontonan yang beredar di bioskop, televisi, cakram digital dan jaringan informatika. Sehingga, kendati pelbagai jenis tayangan beredar secara liar, maka bila seseorang sudah paham akan wilayah atau batasan usianya, maka dia tidak akan menontonnya bila tontonan itu tidak sesuai dengan klasifikasi usianya.

Menggunakan dan memanfaatkan pelbagai media sosial yang ada dan terbaru, merupakan salah satu upaya LSF untuk tetap relevan dengan *trend* dan isu terkini di masyarakat. Dalam pengelolaan pelbagai platform media sosial LSF, selain didukung tim kreatif internal, saya juga dibantu para mahasiswa magang, yang merupakan program yang diselenggarakan LSF sejak 2020, dan yang hingga September 2023 merupakan angkatan yang kesembilan.

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai wadah aktualisasi dan penerapan ilmu bagi maha-



**Bersama tim CGV ihwal Kampanye Budaya Sensor Mandiri LSF dan GPBSI**

siswa tidak luput dari perhatian LSF. Selama tahun 2020 sampai dengan 2022, LSF turut ambil bagian mendukung program MBKM dengan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk magang di LSF.

Tercatat dari 2020 sampai dengan 2022, sekitar 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia yang mengikuti program magang di LSF. Para mahasiswa magang ini ditempatkan di pelbagai bidang tugas yang ada di LSF, salah satunya Subkomisi Media Baru. Kehadiran mahasiswa magang ini memberikan warna baru dalam pengelolaan media sosial LSF. Ide-ide segar dengan pengemasan yang interaktif dan penggunaan bahasa yang seusai dengan keseharian mereka, menjadikan konten-konten yang dihasilkan lebih berwarna tapi tetap sarat informasi. Hal ini dapat mereduksi jarak LSF sebagai entitas lembaga pemerintah dan masyarakat, melalui bahasa yang memang dekat dengan kehidupan keseharian orang banyak.




**Produksi Iklan Layanan Masyarakat LSF**

Menurut saya, program magang itu sangat baik bagi kedua belah pihak. Bagi pihak kampus,




**Wawancara media saat kampanye Gelora Asean Games 2018.**




**Diskusi publik bersama para influencer di Jogjakarta.**

akan dapat memenuhi program magang yang merupakan bagian dari kurikulum merdeka. Dan, bagi para mahasiswa, melalui program magang tersebut, mereka mendapatkan pembelajaran yang sangat baik di dunia kerja nyata, yang dapat mereka bandingkan dengan ilmu yang mereka terima dari kampus. Mereka akan mendapatkan banyak hal menarik sebagai bekal bagi dunia pekerjaan yang kelak mereka inginkan atau dapatkan.

Para mahasiswa yang bekerja magang di LSF merupakan sumber pencerahan, antara lain, dalam pengemasan bahasa populer yang sedang tren di kalangan mereka. Artinya, LSF dapat mereduksi jarak sebagai entitas lembaga pemerintah dengan masyarakat, melalui penggunaan bahasa yang dekat dengan kehidupan keseharian orang banyak. Dengan demikian, akan meleburkan batas generasi, batas budaya, dan batas nilai sosial yang menjadi pembelajaran bagi kedua belah pihak.

Berkat kehadiran generasi muda para mahasiswa yang energi, semangat, dan kreativitasnya luar biasa itulah maka program-program komunikasi LSF menjadi lebih menarik. Semangat dan kreativitas para mahasiswa yang bertemu dengan batasan-batasan regulasi lembaga pemerintah, akhirnya dapat menemukan titik pijak yang sama, untuk menghasilkan ramuan yang tepat guna, dalam mengemas pesan komunikasi audio/visual LSF. Suatu hal yang merupakan pengalaman




**Pembicara dalam program Literasi Digital bersama Ditjen Aptika Kominfo**



**Narsum Cakap Digital bersama Ditjen Aptika Kominfo dan tim komunikasi Keraton DIY**

menarik dan unik, tidak hanya bagi para mahasiswa, tapi juga bagi para anggota LSF, khususnya yang berada di Subkomisi Media Baru.

Minat dan ketertarikan saya pada ilmu komunikasi, tentu bukan hanya karena saya memiliki bakat di bidang seni grafis dan desain. Tapi, karena saya memang telah mengenyam pelbagai pendidikan di bidang komunikasi. Gelar S.Ds. (Sarjana Desain), misalnya, saya peroleh dari Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB). Kemudian S-2 Ilmu Komunikasi saya peroleh dari FISIP-UI.

Saya juga sering berpindah pekerjaan, sebelum kemudian bekerja di Kemenkominfo. Bila dihitung, saya sudah bekerja selama 22 tahun di industri kreatif. Mulai dări Founder Brand X (Brand & Branding Consultant), Assistant Manager for Marketing Communication di Gran Melia Hotel Jakarta, dosen di Institut Bisnis Nusantara dan Yayasan Akuntansi Indonesia, Head of Communication Division Gibbon Foundation Bogor (Branding Designer), serta di Makki Makki Branding Consultant Jakarta. (urutannya dibalik)

Semasa kuliah, saya sangat aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Antara lain menjadi Anggota Keluarga Mahasiswa Seni Rupa Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, lalu menjadi Direktur Humas Ganesha TV Unit Campuss ITB, dan terakhir




**Pesta Rakyat-Dukung Bersama Kampanye Asean Games 2018**

menjabat Presiden Ikatan Pemuda-Pemudi Desain Grafis, Desain Komunikasi Visual ITB.

Pengalaman penting dan sangat berkesan bagi saya adalah saat saya ditunjuk sebagai Wakil Ketua Diseminasi Asian Games 2018, dan selanjutnya menjadi Ketua Tim Komunikasi Asian Para Games (2018). Saya dipercaya mengelola perencanaan anggaran sampai program. Itu luar biasa besar bagi saya. Terutama ketika diangkat sebagai juru bicara, yang memungkinkan saya bertemu dengan banyak pewarta, tampil di pelbagai media televisi dan media cetak, untuk menyuarakan gelora Asian Games.

Selama menjadi Anggota LSF, sebelum dan sesudah jam kerja, dan terutama pada hari libur, saya selalu menyalurkan hobi menonton, terutama ke bioskop. Nonton di rumah tentu oke, tetapi akan lebih seru jika datang ke bioskop. Karena

suasana di dalam gedung bioskop sangat berbeda ketimbang di rumah, dan saya senang mengamati dan memperhatikan apa dan bagaimana reaksi para penonton saat berada di dalam studio.

Selain hobi menonton, jadwal olah raga saya juga cukup padat. Dari *cardio* hingga *full body workout*. Salah satu olah raga yang paling saya gemari adalah *push up*. Gerakan *compound* ini mengaktifkan banyak otot, baik otot besar maupun otot kecil, pada saat yang bersamaan. *Push up* juga membantu membetulkan postur tubuh melalui beberapa variannya. Mulai dari *regular push up, incline push up, decline push up, diamond push up* hingga *archery push up.*

Selama bekerja sebagai Anggota LSF hingga tahun keempat ini, dan setelah saya



**Di depan para mahasiswa ihwal peran media sosial bagi komunikasi pemerintah.**

mengamati fenomena yang terjadi akibat kecepatan perkembangan teknologi informasi, saya sampai pada kesimpulan dan saya percaya, saat ini kita sudah harus segera meninggalkan *mindset* kompetisi. Sebab, pada kenyataannya, perkembangan teknologi dan informatika telah membolehkan kita untuk membuka jendela peluang seluas-luasnya untuk berkolaborasi, tumbuh bersama, serta saling menopang untuk kepentingan yang lebih besar.

Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia dan perkembangan teknologi informatika secara umum, merupakan proyeksi pola konsumsi konten masa depan, yang ujungnya nanti masih belum bisa kita bayangkan akan seperti apa. Kita juga tidak akan tahu apa dan bagaimana *trend* pola komunikasi dan konsumsi konten dan tayangan kita pada masa datang.

Yang jelas, setiap netizen harus siap dan harus memahami betul akan konsep

egaliter di strata media sosial global saat ini. Yakni, semua orang dapat berkomunikasi dengan siapa pun dari mana pun dan kapan pun. Dan, itulah yang harus diantisipasi dan direspons oleh regulator, dalam hal ini Pemerintah. Oleh karena itu, masa depan komunikasi publik Pemerintah akan dan harus selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi informatika, dan itu merupakan tantangan besar yang sangat menarik.



**Bersama Tissa Biani dan tim saat produksi Iklan Layanan Masyarakat**

## JATI DIRI:

**Nama Lengkap**:
Andi Muslim S.Ds., M.Si
**Tempat & Tanggal Lahir**:
Jakarta, 8 Februari 1980
**Nama Orang Tua:**
Andi Fathoeddin & Rafiah

## RIWAYAT PENDIDIKAN

**1986 - 1992**: SD 17 Jakarta
**1992 - 1995** : SMP 46 Jakarta
**1995 - 1998** : SMA 28 Jakarta
1998 - 1999 : Advertising dan Communication - Interstudi Jakarta
**1999 - 2004** : Desain Komunikasi Visual - Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB
**Gelar**: S.Ds. (Sarjana Desain) dari FSRD ITB
**2012 - 2014** : Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana FISIP-Universitas Indonesia.



# RINGKASAN

## Andi Muslim S.Ds.,M.S

Sesuai minat dan *passion*-nya pada ilmu komunikasi, Andi Muslim, S.Ds., M.Si adalah Anggota LSF unsur pemerintah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kelahiran Jakarta, Jumat, 8 Februari 1980, ini telah mengenyam pelbagai pendidikan di bidang komunikasi, antara lain, di Jurusan Advertising di Interstudi, Jakarta, S1 Sarjana Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, dan studi S2 Ilmu Komunikasi, di Universitas Indonesia.

Andi, yang penampilannya paling *fashionable* di LSF, ini pernah menjabat Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Media di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo. Tak aneh bila ia berperan aktif dalam pelbagai kegiatan komunikasi publik pemerintah, antara lain sebagai Koordinator Satgasus Government Public Relations, yang merupakan implementasi Inpres 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik. Ia juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Diseminasi perhelatan olah raga akbar Asian Games 2018, dan selanjutnya menjadi Ketua Tim Komunikasi Asian Para Games (2018).

Pada Jumat, 8 Mei 2020, pria berdarah Bugis-Lombok, ini dilantik sebagai Anggota LSF periode 2020-2024. Wajar bila anggota paling "milenial" ini kemudian ditunjuk menjadi Ketua Subkomisi Media Baru, khususnya untuk *rebranding* LSF, melalui pelbagai kanal dan akun media sosial LSF. Di tangannya, lembaga negara ini dapat menjalin komunikasi yang setara dan sebahasa dengan generasi baru, dalam rentang usia 15-35 tahun, sebagai penerus eksistensi bangsa ini, terutama yang bergiat di dalam ekosistem perfilman Indonesia.


JAKARTA FILM WEEK 2022

# Dari Film Untuk Film

**Arturo Gunapriatna**
Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi

*betapa panjang perjalanan*
*kita tak pernah istirahat*
*betapa panjang ini perjalanan*
*betapa panjang bayangan TUHAN ....*

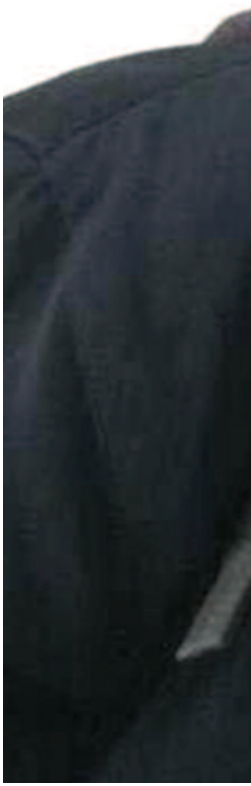

Syair lagu dari pementasan Teater Ketjil Arifin C. Noer berjudul *Dalam Bayangan Tuhan* (1979), ini sudah menjadi bagian yang tersimpan dalam memori saya. Bahwa berteater adalah salah satu perjalanan hidup saya yang sangat penting. Dimulai dari menjadi kader Karang Taruna di kampung saya Pisangan Lama, dengan latihan dasar 'Kepemimpinan' di Kelurahan Pisangan Timur. Dari situ saya merasa memiliki tanggung jawab membina remaja sekitar tahun 1970-an.



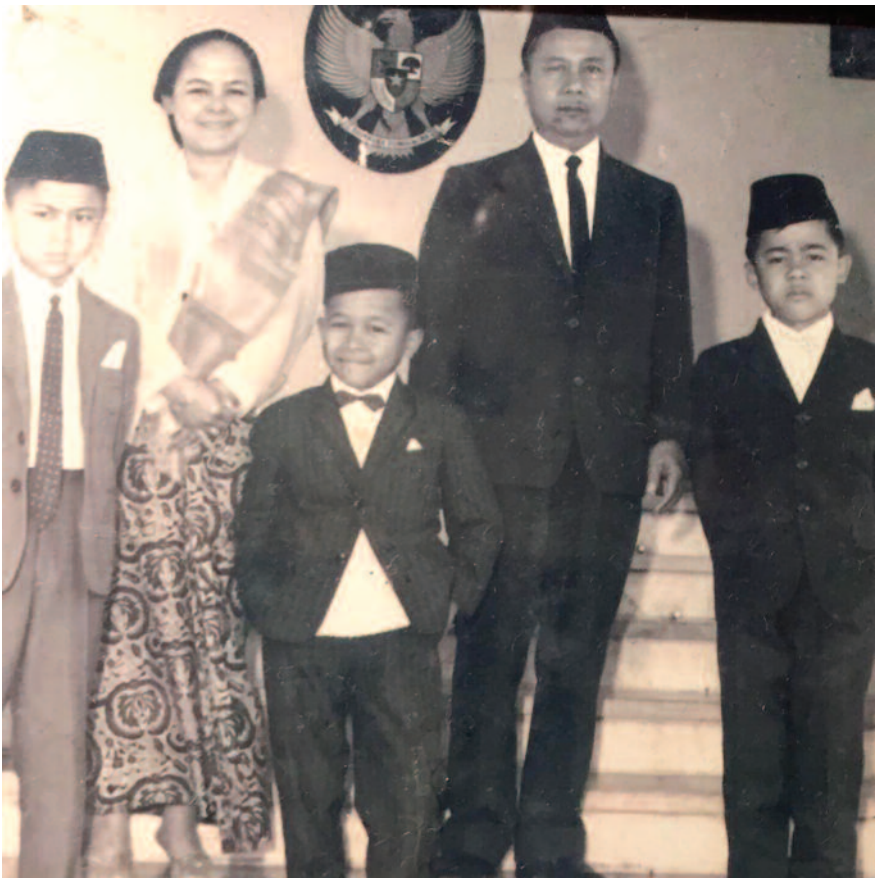

**Di KBRI Addis Ababa - Ethopia.** Ibu Bapak, saya (tengah) dan dua abang saya. Sementara empat kaka lainnya tinggal di Indonesia karena sekolahapak

Awalnya saya membentuk grup vokal Mandefro. Saat itu, di kalangan anak remaja kelas menengah memang sedang *trend* menyukai *vocal group* (*folk-song*). Itulah awal saya memasuki dunia kesenian. Dan, karena sudah terlanjur *kecebur,* akhirnya saya mengisi waktu sekolah saya dengan bergabung ke kelompok Teater Gelanggang Remaja Jakarta Timur (Teater GRJT). Waktu itu, saya ikut Murni Rajagukguk yang cantik, yang tak lain adalah tetangga dan kakak kelas saya di SMP. Di situ saya berkenalan dengan Syarifudin Ach seorang pewarta sekaligus penyair muda bersama aktor teater Dorman Borisman. Saat itu, Dorman juga sudah bergabung dengan kelompok Teater Ketjil pimpinan penulis lakon dan sutradara Arifin C Noer (10 Maret 1941 - 28 Mei 1995). Dorman pun sudah mulai menjajaki keaktorannya di dunia film.

Di Teater GRJT itulah saya mengasah bakat dan minat kesenian saya. Baik sebagai aktor, figuran, koordinator kepustakaan, artistik, penata kostum dan lain-lain. Dari situ pula saya mengenal Taman Ismail Marzuki - Pusat Kesenian Jakarta (TIM-PKJ), di mana kami harus mengapresiasi pertunjukan-pertunjukan Teater Ketjil Arifin C Noer, Bengkel Teater Rendra, Teater Mandiri Putu Wijaya dan lain-lain. Sebelum kemudian ikut berkompetisi di ajang Festival Teater Remaja (FTR) Jakarta era 1970-an sampai awal 1980-an. Tidak hanya teater, kita juga wajib menghadiri pelbagai pameran lukisan, diskusi kebudayaan, pertunjukan tari, film dan lain lain.

Berkat keintiman saya dengan dunia teater itulah atas arahan guru teater saya, almarhum Syarifudin Ach, saya kemudian didorong untuk masuk ke Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ) yang kelak menjadi Institut Kesenian Jakarta (IKJ), jurusan Sinematografi. Akhirnya minat dan tujuan hidup saya mulai beralih, dari teater ke dunia film, yang lebih menantang. Karena kesibukan kuliah dan merintis karir di film, dunia teater akhirnya saya tinggalkan, walau sekali-sekala masih ikut main dan membantu beberapa produksi Teater GRJT. Grup yang berkat kemenangan tiga kali berturut-turut di FTR Jakarta, kemudian dinobatkan sebagai



**Di Keraton Solo.** Bersama Garin Nugroho dan tim SET saat syuting Bulan Tertusuk Ilalang (1995)



**Di Teater Arena TIM.** Bersama Dorman Borisman, Hari Patakaki dalam pementasan Don Juan oleh Teater Jakarta Timur (1985)

grup senior dan harus mengisi agenda pertunjukan teater di TIM.

Meninggalkan dunia teater adalah pilihan dalam meniti profesi saya, hingga saya malang melintang di dunia film, sampai mencapai profesi yang lumayan mapan dalam hidup saya. Setelah lulus LPKJ-IKJ, saya memulai karir di dunia film dengan mencoba peruntungan di Pustekkom Dikbud (Pusat Teknologi Komunikasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), sebagai tenaga honorer editor film. Saya memilih bekerja di Pustekkom karena saya merasa masih harus banyak belajar tentang teknologi film yang saya minati, sebab di lembaga itu peralatan film dan televisinya terbilang mutakhir berkat bantuan dari USAID (Amerika Serikat).

Pada perjalanan awal itu saya mengerjakan beberapa film dokumenter untuk Pustekkom. Dan yang membanggakan, saya sebagai editor bersama dengan sutradara, untuk pertama kalinya telah mengangkat nama Pustekkom ke kancah perfilman Indonesia pada 1983. Saat itu, salah satu karya saya berjudul *Laor*, memenangi Festival Film Indonesia (FFI) untuk kategori Film Dokumenter Pendidikan, yang mengangkat anak SMA di Ambon, Ravenska, juara pertama Lomba Karya Ilmiah Peringkat Remaja (LKIPR) tingkat Nasional.

Selanjutnya bersama Arswendo Atmowiloto (alm), saya menyelesaikan *dummy* film serial pertama kerjasama TVRI - Dikbud berjudul *Aku Cinta Indonesia* (ACI). Dari *dummy* itulah akhirnya serial *ACI* dibuat dalam beberapa seri lepas. Kisahnya tentang dunia siswa SMP, dan serial itu kemudian menjadi salah satu tayangan populer di TVRI. Toh, karena saya tidak ingin menjadi pegawai negeri, dan sebagai anak muda saya masih ingin bebas, maka tawaran dari kepala Pustekkom untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta disekolahkan ke Syracuse University, Amerika Serikat, dengan "gagah dan bodohnya" saya tolak!

Dari Pustekkom saya meniti karir ke industri film sebagai tenaga lepas (*free-lance*). Awalnya menjadi asisten Benny MS, editor senior di Parkit Film milik Ram Punjabi, sebelum kemudian menjadi asisten para editor senior lainnya (Karsono Hadi, Efendy Doyta, Norman Benny dll). Juga menjadi asisten editor beberapa sutradara dengan pelbagai *genre* film, terutama *action, drama,* dan *komedi.*

Berkat lingkungan profesi itulah saya kemudian mengenal dekat sutradara film



**Melatih anak-anak bermain teatr di Teater Jakarta Timur**

senior seperti MT Risyaf, Arizal (11 Januari 1943 – 18 Mei 2014) dengan komedi Warkop-nya, Sophan Sophiaan (26 April 1944 – 17 Mei 2008), Chairul Umam (4 April 1943 – 3 Oktober 2013), Bobby Sandy (*Cinta di Balik Noda*), Slamet Rahardjo (*Kodrat*) dan akhirnya menjadi asisten editor *full* saat mengedit film karya Nya' Abbas Akup (22 April 1932 – 14 Februari 1991) berjudul *Semua Karena Ginah*. Berkat perkenalan saya dengan (alm) Nya' Abbas Akup-lah saya kemudian dipercaya untuk menjadi editor penuh dalam film berikutnya di Parkit Film *Cintaku di Rumah Susun,* yang mendapatkan nominasi editor terbaik pada Festival Film Asia Pacific di Bangkok (1987), dan kemudian film *Kipas-kipas Cari Angin*.

***... betapa panjang perjalanan ....***

Garin Nugroho, adik kelas saya di LPKJ-IKJ, adalah sosok muda cerdas berwawasan dan memiliki idealisme tinggi dalam pembuatan film. Terbukti, beberapa film dokumenternya telah memberikan warna baru dalam dunia film dokumenter, sejak dokudramanya *Tepuk Tangan* memenangi Piala Citra FFI untuk



**Makan ramen di Kyoto bersama Garin, mengiringi Surat Untuk Bidadari, Tokyo International Film Festival , dapat Golden Award kategori Young Film Director.**

kategori dokumenter. Pertemanan dan persahabatan saya dengan Garin bisa terjalin, terutama karena kami memiliki idealisme yang sama. Saya lalu mendampingi film layar lebar pertama Garin *Cinta Dalam Sepotong Roti* produksi PT Prasidi Teta Film, sekaligus menjadi tim kreatifnya dalam mengolah *story telling* / skenario. Pada FFI 1991, film itu memenangi Piala Citra sebagai Film Terbaik, dan meraih beberapa Piala Citra lainnya, termasuk Editor Terbaik untuk saya.

Kecocokan dalam membuat film-film "khusus" itu membuat saya juga menjadi tim kreatif / co-director / editor pada film Garin berikutnya yang juga diproduksi Prasidi Teta Film, *Surat Untuk Bidadari* (1995). Film yang berlokasi di tanah Sumba, itu mengangkat tema masuknya budaya popular Barat dalam budaya tradisi Sumba. Film itu juga merupakan debut bagi Garin Nugroho, untuk berlaga di kancah festival-festival film internasional. *Surat Untuk Bidadari* antara lain, memenangi pelbagai kategori penghargaan di Berlin Film Festival, Locarno Film Festival, Tokyo International Film Festival, Asia Pacific Film Festival di Vietnam, dan lain-lain. Selanjutnya hampir di semua karya film Garin saya selalu terlibat. Baik sebagai editor, co-director, atau coaching pemain (casting Director). Misalnya dalam film *Bulan Tertusuk Ilalang, Rindu Kami Pada Mu, Puisi Tak Terkuburkan, Under The Tree* dan *Opera Jawa.* Juga dalam sebagian besar proyek film dokumenternya seperti *Anak Seribu Pulau* (Miles Production). Bahkan, saya menjadi sutradara salah satu seri itu yang berjudul *Pecilen dari Indramayu.*

Kebersamaan dengan Garin Nugroho akhirnya mengilhami kami membuat semacam tempat Workshop Film yang kami beri nama Sains Estetika Teknologi (SET), bersama Riri Riza, Yadi Sugandhi, dan Nan T. Achnas. Dalam perjalanannya, SET sempat timbul tenggelam terutama dengan terjadinya perubahan politik di negeri ini pada 1998-1999 (Reformasi). SET akhirnya berubah bentuk menjadi

rumah produksi PT SET Film yang melahirkan Visi Anak Bangsa, sebuah lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang mendapat dana dari USAID untuk membuat beberapa iklan layanan masyarakat sebagai *"civic education"* menyambut Pemilu pertama era Reformasi (1999). Dan, yang paling fenomenal dari karya Visi Anak Bangsa adalah iklan *"Inga-Inga bapesta rame-rame"* tentang pemilu.

SET kemudian membuat beberapa film iklan layanan masyarakat, dokumenter, dan film televisi pesanan instansi pemerintah maupun swasta. Antara lain, PLN, Jasa Marga Tol, Kemenkumham, DAAI TV, Indofood, PT Djarum dan lain-lain. Biasanya, saya bertindak sebagai sutradara, co-sutradara, supervisi post, dan tim kreatif. Film dokumenter karya SET yang cukup menjadi *trendsetter* televisi adalah *Pustaka Anak Nusantara* milik Indofood. Yakni, dokumenter anak dari 32 provinsi di Indonesia yang mengusung isyu multikulturalisme, dilanjutkan dengan *Ensiklopedia Anak Nusantara,* bekerja sama dengan Kompas TV. Selain produk dokumenter dan iklan, SET juga membuat beberapa video clip para penyanyi populer saat itu, seperti Krakatau, Yana Julio dan Katon Bagaskara. Videoklip lagu *Negeri di Awan* milik Katon Bagaskara memperoleh beberapa penghargaan dalam ajang sayembara videoklip PT CUT Jakarta termasuk editing .

Berkat keterlibatan saya di SET, saya banyak mengenal tokoh muda di bidang politik, yang sebelumnya merupakan aktivis penggerak reformasi, seperti Hinca Panjaitan, Indra J. Piliang, Yudi Chrisnandi, dan Agus Pambagio. Dari pergaulan



**Bersama Garin menerima Netpac Award** - Special Mention (Winner) (2003) dari sutradara Gillo Pontecorvo (TheBattle of Algiers) untuk film Aku ingin Menciummu Sekali Saja (The Birdman) di Netpac Film Festival di Roma



Sebagai anggota Senat IKJ bersama Prof . Sardono W Kusumo

itulah saya mulai mengenal dunia politik nasional maupun internasional karena bersentuhan dengan USAID.

Yang menarik, perjalanan saya bersama Garin dengan SET-nya – entah kenapa komunitas ini bernama SET – yang awalnya tanpa sadar logonya berlambang "burung ababil dari neraka", karena ditegur seorang kyai, lalu diubah logonya menjadi "katak hijau" binatang amphibi yang hidup di dua alam. Dan SET ternyata kok secara bunyi seperti "Seth" yang dalam narasi agama samawi, adalah seorang nabi, anak Adam as, selain Habil dan Qobil, yang memiliki pengetahuan, ilmu kehidupan dan ketakwaan. Itu mungkin kebetulan-kebetulan yang tidak Garin dan saya sadari, saat melabeli komunitas itu bernama SET. Tapi ketika seorang pewarta senior Kompas yang sedang meliput syuting *Opera Jawa*, dan melihat kekompakan saya bekerja dengan Garin, bertanya pada saya mengapa saya tidak mau menjadi sutradara seperti Garin, langsung saya jawab dengan spontan: "Kenapa sih kita harus selalu menjadi manusia nomor satu? Saya hanya ingin menjadi orang nomor dua. Saya hanya ingin menjadi "sahabat" dari orang yang "istimewa" seperti Garin. Bahkan seorang nabi pun perlu sahabat yang menjaga, dan mendukung agar pikiran atau misinya tercapai di kalangan masyarakat"

***…..kita tak pernah istirahat…..***

Selain di SET Production, selaku *professional freelance filmmaker*, saya beberapa kali menjadi editor film industri *mainstream*. Antara lain film *genre* remaja *Isabela, Valentine, Irisan-Irisan Hati, Cinta Anak Zaman* dan *Lupus.* Saya juga sempat menjadi sutradara dan editor untuk beberapa film *action,* antara lain *Babad Tanah Leluhur* (nominee Editor Terbaik FFI 1993), *Si Rawing,Gadis Metropolis2* dan yang paling fenomenal adalah *Gairah Malam, genre action sex* yang meraih 600 ribu penonton dan saat itu dianggap sebagai *box office*. Kemunculan film-film bertema sensual pada akhir 1990-an itu tak lain karena film layar lebar mulai ter-



**Di JAFF 2016, bersama Ifa (Directur JAFF), Rafi Buwani (Sutradara), dan Masbeth Ismail (sutradara).**

saingi oleh industri televisi swasta yang mulai ramai.

Dalam industri televisi, perjalanan saya juga panjang. Sempat menyutradarai beberapa seri film anak, antara lain *Sahabat Pilihan, Nyi Cemplon, Kisah Sebening Kasih, Seindah Bunga Teratai* produksi DAAI TV dan film *genre action* petualangan *Perjalanan,* dengan pemain Tamara Bleszynski, Ari Wibowo dan Primus, milik Multi Vision Plus (MVP). Menjelang reformasi 1997-1998, setiap kali tayang di televisi selalu masuk dalam peringkat 10 besar sinetron kesukaan publik. Karena tuntutan pragmatis kebutuhan keluarga, kiprah saya di industri televisi terus berlanjut, dan saya memutuskan untuk bekerja tetap di Rumah Produksi Avicom Prima sebagai manajer post produksi sekaligus *quality control* (QC) pada 2001-



**Bersama Christine Hakim dan Noorca M. Massardi usai wawancara untuk Podcast LSF "Action...Nihil!"**

2004, sambil tetap membantu SET pada sore/malam hari. Kerja menetap dengan kerutinan waktu yang membosankan, tentu membuat saya harus membiasakan diri. Syukur sebagai senior SET (Komisaris), saya kadang masih bisa *nyambi* bikin film iklan, dan lain-lain. Dan, itu cukup melelahkan karena harus datang setelah jam kantor di Avicom usai.

Selain di industri film dan televisi, sejak 1995 saya diperbantukan sebagai asisten dosen editing Soemardjono di FFTV-IKJ. Konon Pak Soemardjono (31 Maret 1927 - 28 Agustus 1998) adalah militer di belakang layar, bekas anak buah Mayor Jenderal Ali Moertopo (23 September 1924 – 15 Mei 1984). Setelah meraih S2 Seni Urban di IKJ Pasca Sarjana, sekitar 2014 -2015, saya sempat diperbantukan mengajar di FISIP UI – Komunikasi, dan di Vokasi Komunikasi UI.

Saya mengenal Lembaga Sensor Film (LSF) secara langsung ketika saya memprotes hasil penyensoran terhadap film produksi SET *Mencari Madonna* karya sutradara John De Rantau, yang mengangkat isyu penyakit HIV / AIDS di Papua. Kami protes terhadap LSF karena ada pemotongan gambar kelamin ketika seorang dokter sedang menerangkan bahaya HIV sebagai penyakit kelamin. Saya yang kebetulan ditugaskan oleh SET untuk melakukan dialog, dan bertemu Ibu Titi Said, Ketua LSF saat itu. Kami protes karena kami menganggap gambar kelamin pada adegan pelajaran seks oleh dokter, masih kontekstual dengan tuntutan cerita. Terutama karena film tersebut memang ditujukan untuk pembelajaran seks di tingkat remaja melalui film.

Dari peristiwa itulah saya menganggap perlu ada orang film atau orang yang mengerti film, yang mampu memahami dan membaca film di LSF. Sebuah lembaga negara penentu keberlangsungan dan kehadiran film di hadapan publik. Pada akhir dialog dengan Ibu Titi Said, terlontar pertanyaan, adakah perwakilan orang film di lembaga sepenting itu dan mungkinkah kami bisa menjadi perwakilan orang film di lembaga itu?

***…betapa panjang ini perjalanan….***

Jonathan Black dalam pengantar bukunya *Sejarah Dunia Yang Disembunyikan* (terjemahan dari *The Secret History of the World* - 2007) menyatakan:

*"...Saya telah mencoba untuk menjauh dari pemikiran sekarang ini bahwa perkumpulan-perkumpulan rahasia, merupakan komplotan yang beranggotakan orang-orang tua jahat, yang berkonspirasi untuk menguasai dunia. Saya mengatakan, di luar pengertian laki-laki atau perempuan, muda atau tua, mereka adalah penjaga arus bawah tanah yang misteri, yang mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada kita – terutama sekarang, ketika agama yang ada gagal mengatasi naiknya materialisme."*




**"Tuhan baru kalian itu, HP " dalam acara BSM di salah satu pesantren Ciamis, Jawa Barat.**

Kutipan di atas bukan ingin menyamakan LSF dengan "perkumpulan rahasia" atau perkumpulan "arus bawah tanah yang misteri", tidak sama sekali. Perjalanan saya ke LSF dan kemudian mengalami sendiri kehidupan di dalamnya, adalah cerita panjang yang menurut saya menarik: antara biografi, fiksi dan misteri…

Pada periode awal berlakunya undang-undang perfilman yang baru, yakni UU No. 33 Tentang Perfilman Tahun 2009, yang menggantikan UU No. 8 tentang Perfilman Tahun 1992, saya sedang menjadi anggota panitia FFI 2013. Kantor kepanitiaan FFI itu berada di Gedung Film, Jl. MT Haryono kav 47-48, Jakarta Selatan, tempat yang sama dengan kantor Lembaga Sensor Film (LSF) waktu itu.

Dalam pergaulan sebagai panitia, ada yang menyarankan agar saya mendaf-

tarkan diri sebagai anggota LSF, karena sebentar lagi akan ada pergantian anggota. Lalu saya bertanya pada teman orang film senior yang sudah lama hilir mudik di Gedung Film. Tapi jawabannya menyiratkan untuk apa di LSF, honornya kecil dan tidak penting. Jawaban itu justru menjadi tantangan bagi saya untuk mencari tahu bagaimana dan kenapa LSF begitu tertutup. Akhirnya saya mengetahui persyaratan lamaran dan jadwal terakhir memasukkan lamaran.

Dengan kondisi setengah hati, tanpa peduli diterima atau tidak sebagai anggota LSF periode 2015-2019, saya pun mengantarkan sendiri surat lamaran saya ke kantor LSF. Keinginan menjadi anggota LSF itu diawali semata ingin mencoba sekaligus melihat dunia film dari sudut pandang Negara. Sebelumnya saya menjadi



**Usai Rapat Dengar Pendapat LSF Periode 2015-2019 dengan Komisi DPR RI**

salah seorang yang menginisiasi kelahiran Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan itu menjadi pintu masuk bagi saya dalam melihat "politik perfilman" yang diinginkan Negara. Karena itu, menjadi "pejabat" di LSF menjadi semakin penting bagi saya, sehingga saya memutuskan untuk mencoba masuk ke dalamnya. Walau sesungguhnya itu merupakan *paradox* dengan sikap-sikap saya selama ini yang menjunjung tinggi "kebebasan berekspresi."

Lamaran sudah masuk, dan saya kembali ke dunia film yang baru memiliki BPI dengan ketua beserta anggotanya. Walau saya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya merasa masih ada teman-teman yang sepaham dengan saya, sehingga bisa ber-

komunikasi dengan mereka mengenai segala ihwal tentang perfilman. Dari kawan anggota BPI, saya malah diberi tahu ada undangan untuk wawancara bagi penerimaan calon anggota LSF. Padahal tidak ada undangan ke rumah, ataupun ke email saya. Ternyata, dalam daftar calon peserta yang harus ikut wawancara, nama saya disamarkan, dengan hanya mencantumkan nama belakang saya saja yang kurang dikenal, tentu dengan harapan agar saya tidak datang dalam wawancara.

Entah kenapa saya kok tidak diharapkan masuk menjadi anggota? Entah kekuatan apa yang mencoba melawan saya. Dan, entah kekuatan misteri apa pula yang kemudian menolong saya. Akhirnya saya ikut test wawancara langsung dengan Ditjen Kebudayaan saat itu, Pak Dr. Katjung Maridjan, bersama Ketua BPI Alex Komang (17 September 1961 - 13 Februari 2015) dan Dr.MQ Wisnu Aji Med. dari Biro Umum Kemendikbud. Alhamdulillah wawancara berjalan lancar dan sukses. Tapi itu belum selesai. Kesibukan pergantian rezim menjadikan urusan LSF simpang siur. Karena saya juga tidak begitu antusias, dan kabar beritanya juga tidak ada, maka saya pun ikut syuting dengan Garin Nugroho untuk film *Aach… Aku Jatuh Cinta!* sebagai *casting director*. Saya ikut sejak dari persiapan sampai syuting. Setelah syuting berjalan dua minggu di Jogjakarta, tiba-tiba ada panggilan telepon dari Sekretariat LSF, yang meminta agar saya segera ke Jakarta, untuk mengikuti *fit and proper test* dengan Komisi 1 DPR RI.

Singkat cerita, dari Jogja dengan kereta malam saya ke Jakarta dan langsung menuju ke gedung DPR, untuk *fit and proper test* dengan Komisi 1 DPR RI, dengan Tantowi Yahya sebagai ketua sidang. Memasuki sesi saya, Tantowi malah memuji pengalaman film saya yang agak berlebihan, padahal secara pribadi saya tidak banyak mengenal Tantowi. Tapi dia kok seakan membantu agar saya lolos, sehingga saya dengan mulus dan santai menjawab semua pertanyaan anggota DPR dari semua fraksi. Saya merasa tanpa beban, karena saya memposisikan diri tidak terlalu berambisi untuk lolos seleksi. Selesai dari DPR, hari itu juga saya langsung naik kereta malam menuju Jogja untuk melanjutkan syuting film Garin. Lalu saya lupakan LSF….!

Ternyata dalam perjalanan ini akhirnya saya terpilih menjadi Anggota LSF Periode 2015-2019. Tugas awal tentunya penuh dinamika, banyak perbedaan, saling mengasah dan mengasih sesama anggota, dan mencoba melihat film dari segala sudut pandang. Tapi entah terbentuk dari mana, saya kemudian harus memposisikan diri sebagai wakil banyak orang dari industri film dan televisi. Sehingga, saya harus memperjuangkan aturan-aturan baru yang dapat melindungi karya-karya film apapun bentuknya. Karena saya percaya, media film adalah media terpenting di masa depan, terutama melihat perubahan peradaban media digital yang

sedang memasuki negeri kita.

Tanpa terasa periode pertama akan selesai. Tapi keramaian politik pemilihan presiden dan pemilu legislatif, mengakibatkan anggota Lembaga Sensor Film harus diperpanjang masa tugasnya. Keinginan lanjut atau berhenti menjadi gangguan dalam pikiran saya. Karena telah sekian lama saya meninggalkan lapangan kreatif, dan sekian lama mencoba menjadi "birokrat" yang dinilai sinis oleh teman-teman film, dan sekian tahun menjadi orang yang kehilangan kebebasan kesenimanan.

Dalam suasana gundah gulana, beberapa anggota sejawat menyarankan agar saya tetap mencoba lagi mendaftar untuk periode kedua. Karena secara peraturan memang dibolehkan. Ditambah dengan dukungan teman-teman film yang mengharapkan kehadiran saya di LSF. Termasuk teman-teman yang dulu berjuang di SET maupun teman seperjuangan yang sekarang bergiat di *Ring 1* Pemerintahan. Dan yang paling membikin bingung sekaligus menetapkan hati untuk lanjut adalah, datangnya pesan-pesan misterius, yang muncul di tengah sunyi malam. Bisikan-bisikan lembut yang menyampaikan bahwa akan ada cobaan lagi. Akan ada peristiwa besar di dunia yang masih berhubungan dengan politik global. Persaingan Amerika Serikat dengan China yang berimbas ke negeri ini, termasuk penguasaan media dan hal lain. Akhirnya, dalam situasi antara mimpi dan kenyataan, dan atas dukungan keluarga, saya kembali mendaftar untuk menjadi anggota LSF periode kedua (2020-2024). Apakah akan mulus-mulus saja menuju perjalanan berikutnya … ?

***… betapa panjang bayangan Tuhan …***

Kelolosan sebagai anggota LSF 2015-2019, setelah saya lihat kembali, bisa jadi hanya merupakan suatu keberuntungan, atau takdir hidup yang "menugaskan" saya untuk berperan di lembaga ini. Bukan peran besar, tapi mulai terasa sedikit-demi sedikit lembaga ini ditengok masyarakat film, para pemerhati film, dan sebagian kecil masyarakat umum.

Perjalanan menuju periode kedua, ternyata bukan jalan yang mulus-mulus saja, tapi penuh drama dan keajaiban baru dalam hidup saya. Diawali dari tulisan di Majalah Internal LSF *Sensor: "Kanan Kiri Oke"* kajian saya tentang generasi milenial terhadap budaya populer yang mengusung ideologi kanan, dan kiri. Tulisan itu ternyata sampai ke salah seorang politisi dari fraksi yang populer di zaman Orde Baru (Orba). Saya pun dipanggil secara personal untuk menanggapi isyu kalau di LSF periode ini disusupi orang-orang berideologi "kanan."




**Hobi membaca didampingi istri tercinta Herliya**

Dengan diantar anggota senior LSF, saya menghadap di ruang pribadinya di gedung DPR RI. Pusinglah saya. Seorang seniman naif tiba-tiba masuk arus politik dan isyu yang saya tidak pahami. Ternyata tulisan saya itu berkembang menjadi isyu ideologi "kanan" mendominasi LSF, yang menurut saya LSF adalah lembaga biasa saja, yang mestinya kurang strategis dalam *frame* politik negara yang lebih besar. Saya disuruh menunjuk siapa saja orang-orang yang berideologi "kanan" itu. Tentu saja saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Karena, selain tidak etis, saya juga tidak mengerti persoalan yang dia maksud. Karena didesak terus, akhirnya saya hanya menjawab diplomatis, bahwa saya tidak paham, dan lembaga sebesar DPR, mestinya punya mekanisme untuk mencari tahu. Mulai dari rekam jejak akademik, jejak digital, dan hiruk pikuk peristiwa yang membangkitkan gerakan radikalisme dan intoleransi, dan lain-lain.

Akhirnya si anggota paham bahwa saya bukan orang yang cerdas untuk tahu soal itu, tapi saya hanya bekas pembuat film yang naif, sekaligus dosen pengajar film. Saya dengar dari obrolan sejenak dengan sebagian anggota fraksi di Komisi 1, konon DPR harus lebih selektif pada pemilihan anggota baru LSF periode berikutnya. Ternyata untuk calon anggota LSF periode 2020-2024, peminatnya bertambah tiga kali lipat. Yang mendaftar datang dari pelbagai kalangan, termasuk mantan birokrat, mantan anggota TNI / Polri, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), selain orang-orang film sendiri, dan lain-lain.

Seleksi pun dilakukan beberapa tahap. Mulai dari *assesment*, test psikologi, wawancara, sampai *fit and proper test* oleh Komisi I DPR RI. Melihat persaingan yang tambah banyak, ditambah tidak punya akses pada orang-orang politik maupun "orang dalam" di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), saya mulai pesimistis bisa lolos di periode ini. Akhirnya kembali saya jalani saja semua proses itu dengan santai. Mencoba keberuntungan tanpa harus melalukan *lobby,* mencari tahu, belajar keras, seperti yang telah dilakukan teman-teman lain.



**Bersama cucu pertama Kelana Shula Daruri**

Tapi pada suatu malam, di ruang khusus, secara serius, dalam bisik-bisik misteri, saya "melapor" dengan khusuk. Kalau memang saya harus bertugas kembali di lembaga ini, tuntunlah saya. Dibarengi dengan latihan spritual, fisik, dan fokus, karena usia yang mulai lanjut, untuk menghadapi semua ini. Ternyata, sikap pasrah dan keikhlasan, berserah diri terhadap apapun tugas yang diberikan, kita harus siap menjalaninya, walau dengan ketidak sempurnaan. Puncak kepasrahan saya, pada sesi wawancara dengan pejabat SDM Kemendikbud yang disegani, terlontar ucapan saya: "Ibu, tidak penting saya diterima atau tidak, tapi tolong Ibu pilih orang-orang yang amanah, karena kekuasaan yang dimiliki anggota LSF, kalau tidak dibarengi dengan kebijaksanaan, karya film itu adalah tempat bergantungnya nasib sekian banyak orang kreatif, sekian banyak keluarga istri dan anak

di belakangnya, yang bergantung pada produk film itu." Selesai wawancara, sahabat saya yang ikut mendengar wawancara itu, langsung mengirim pesan WA ke saya: *"Ibu itu nanya siapa orang itu, terus gue jawab "orang gila."* Itulah suasana awal seleksi keanggotaan dengan perasaan saya yang sudah pesimistis untuk lolos seleksi, dan melanjutkan kerja rutin sisa tugas-tugas di LSF.

Ternyata "takdir" masih berpihak kepada saya. Dari ratusan lebih pendaftar, terpilih 34 nama calon anggota baru LSF, dan nama saya termasuk di dalamnya. Bisa menyisihkan orang-orang yang kuat mengakses orang dalam, yang dekat dengan partai besar, dan lain-lain. Tapi selanjutnya, datang kebingungan kedua. *Fit and proper test* dengan Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.



**Bersama cucu kedua: Kalea Senna Daruri**

*Boro-boro* punya kenalan politisi - kecuali seorang aktris cantik anggota DPR - terhadap dunia politik saya buta-buta melek. Melihat kawan-kawan lain "bergerliya" mendekati para politisi, saya hanya bisa pasrah. Paling sederhana, saya memberi info pada teman-teman eks SET di WA group atas lolosnya saya, dan selanjutnya akan menghadapi DPR.

Malam hari yang sunyi, saya tetap melakukan komunikasi rahasia dan khusuk, dengan bisik-bisik meminta tuntunan pada kekuatan misteri ini, dengan intens, tanpa mengharapkan balasan langsung.

Menjelang hari-hari penentuan dengan DPR, kurang lebih dua hari menjelang hari H *fit and proper test,* tiba-tiba ada telepon dari kawan lama SET, yang namanya saja sudah tidak ada lagi di memori saya. Dia memberitahu bahwa ada dua orang anggota DPR dari partai besar berpengaruh yang ingin ketemu. Itulah ternyata jawaban dari bisik-bisik rahasia tengah malam, bukan usaha mencari *lobby* partai politik, tapi saya malah dicari untuk persiapan *fit and proper test*. Dari pertemuan tersebut saya diyakinkan kalau partainya akan memilih saya. Lalu mereka meminta info tentang 34 nama orang-orang yang pantas duduk di LSF ke depan. Tapi saya juga diharuskan melobi partai lain kalau punya kenalan. Dari obrolan singkat



**Kedua cucu tercinta Kelana Shula Daruri dan Kalea Senna Daruri**

waktu maghrib sambil berbuka puasa Kamis, saya bersyukur dan merasa aneh dengan keajaiban fenomena itu.

Akhirnya, pada hari *fit and proper test* itu presentasi dan jawaban-jawaban saya sepertinya lancar, karena dibantu pengalaman kerja saya di LSF, sehingga tahu persis peta permasalahan di LSF. Hanya satu fraksi partai besar yang mengincar kelemahan saya, yakni posisi saya sebagai dosen tetap, yang dinilai menjadi sedikit ganjalan. Di perjalanan pulang ke rumah, masih di jalan raya, masuk WA dari seseorang misterius, yang memberi selamat: "Nama Bapak sudah terpilih jadi anggota LSF periode berikutnya."

Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur dalam hati, sekaligus beban baru, karena tugas harus dilanjutkan, dengan paradigma baru hasil bisik-bisik misteri tengah malam. Setiba di rumah HP berbunyi. Orang misterius lain memberi info, kalau nama saya hampir digagalkan oleh salah satu partai besar lama, yang melobi DPR, karena saya dianggap pernah membuat aturan LSF yang seakan tidak mendukung industri TV. Tapi si misterius itu katanya membela saya, karena kesalahpahaman group TV tersebut. Dia menerangkan justru dengan aturan baru LSF itu saya sesungguhnya ingin membenahi ekosistem industri televisi, dan dia mengaku tahu siapa saya, bahkan si misterus itu juga mengaku pernah bekerja dan belajar dari saya di SET.

Dari orang lain juga saya mendapat bocoran bahwa hampir semua fraksi ternyata memberikan suara ke saya, sehingga agak sulit untuk menjegal saya. Saya merenung, saya bingung, kenapa perjalanan ini sangat misterius, dan penuh kerahasiaan yang aneh.

Lagi merenung sambil nonton di studio film *Oppenheimer*, yang penuh intrik politik, dan konspirasi sejarah pembuatan bom atom pertama, saya disadarkan oleh Kang Noorca M. Massardi, yang menagih tulisan minibiografi untuk buku akhir tahun selesainya tugas anggota LSF Periode 2020-2024. Saya terbangun kaget, dan langsung menjawab kalau di depan laptop ini saya baru saja selesai menuliskannya, tapi saya masih mau membaca lagi untuk memeriksa ulang.

Setelah saya baca, jadinya tulisan ini seperti biografi, bercampur dengan fiksi, khayalan konspirasi, dan drama-drama sinetron. Inilah akibatnya kalau seniman disuruh bikin biografi sendiri. Jadinya ya seperti ini. Untuk para pembaca, nikmati saja, tak usah dipercaya. Karena ini bukan karya ilmiah, atau testemoni, ini hanya sebuah karangan.

Tapi dari tulisan ini saya mau mencoba mengingatkan, bahwa perjalanan hidup terus berputar, penuh konspirasi rahasia, penuh mistik yang misterius, namun peradaban terus berubah. Lembaga sekecil LSF pun harus berbenah ke depan. Sebab, dari film-film yang kita tonton, dan pengalaman yang kita jalani, ada kode-kode rahasia, yang memperingatkan kita ihwal masuknya peradaban baru "digital" dengan bahasa baru berupa gambar atau media audio visual milik generasi baru … Dan LSF harus siap menghadapinya.

Seperti yang diramalkan penulis Israel Yuval Noah Harari dalam bukunya *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow* (2015), dunia ke depan akan dikuasai oleh manusia yang memiliki kecakapan digital, dan kreativitas, yang tidak bisa digantikan oleh *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan).

Selamat Bekerja Anggota Lembaga Sensor Film yang akan datang !

Catatan kecil ini saya tutup dengan melirihkan sebuah puisi saya, agar saya selalu sadar untuk apa tujuan hidup ini:

*Hidup adalah bunyi gemericik*
*Yang mati begitu kita nyepi*
*Bernyanyilah… bernyanyi lirih*
*Dan esok kita sambut pesta Tuhan*
*Dengan bunyi-bunyi hati… …*

**Senayan, 25 Juli 2023**

# FILMOGRAFI


SAKSIKAN TAYANGAN
ACI
TVRI


Cintaku


ZORAYA PERUCHA EL MANIK
Ginah


RAJA EMA

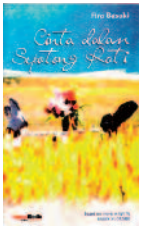
Cinta dalam Sepotong Roti

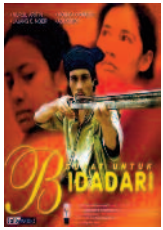
IDADARI




Rindu Kami PadaMu


OPERA JAWA






ENSIKLOPEDIA


KATON
Negeri Di awan


Isabella


Valentine


IRISAN IRISAN HATI


Cinta Anak Jaman


LUPUS
LUPUS V
LUPUS
LUPUS
LUPUS
LUPUS


Tanah Tanah Leluhur 2


RAWIN


Gairah MALAM


MENCARI
MADONNA


Aduh... Akal Salah Cinta

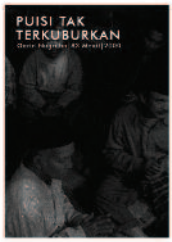
PUISI TAK
TERKUBURKAN

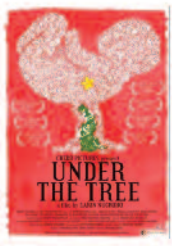
UNDER
THE TREE


Irisan Sebening Kasih
EPISODE 1-8


DRAMA KISAH NYATA
SEINDAH BUNGA
TERATAI
SABTU & MINGGU
19.00 WIB

## JATI DIRI:

**Nama Lengkap**: Arturo Gunapriatna P

**Tempat Tanggal Lahir**: Buenos Aires, Argentina, 26 Februari 1959

**Nama Orangtua**: H. Epon Pradjawisastra

**Anak**: Bungsu dari 7 bersaudara

**Nama Istri**: Herliya

**Nama Anak**:

1. Mayang Gentra Asih
2. Mila Gemalasari
3. Mariam Gesti Pratiwi

**Nama Cucu**: Kelana Shula Daruri, Kalea Senna Daruri

## RIWAYAT PENDIDIKAN

**1971** : SDN Kebon Sereh 01

**1974**: SMPN 14 Jakarta

**1977** : STM 05 (Instruktur)

**1999**: Institut Kesenian Jakarta - S1

**2016**: Institut Kesenian Jakarta - S2

**Gelar**: Sarjana Seni, Master Seni



# RINGKASAN

## Arturo Gunapriatna

Duduk di LSF mewakili unsur masyarakat bidang perfilman, Arturo Gunapriatna yang akrab dipanggil "Kang Atung," menuntaskan pendidikan S1 dan S2 di Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Sejak 1988, pria kelahiran Buenos Aires, Argentina, pada Kamis, 26 Februari 1959, ini mengajar di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Dan, sejak 2011 ia juga pernah mengajar di Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Komunikasi Universitas Indonesia.

Ayah tiga anak dan kakek dari dua cucu ini, menjadi Anggota LSF Periode 2015-2019 dan 2020-2024, dan kini menjabat Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi LSF. Mengawali kesenimanan dari dunia pertunjukan teater, sebagai editor film senior, Kang Atung sudah terlibat dalam produksi puluhan film layar lebar dan sinetron. Baik sebagai tim kreatif, editor, sutradara, co-director dan bahkan pemain. Oleh sutradara Nya' Abbas Akup ia dipercaya menjadi editor penuh untuk film *Cintaku di Rumah Susun,* yang mendapatkan nominasi editor terbaik pada Festival Film Asia Pacific di Bangkok (1987), dan kemudian film *Kipas-kipas Cari Angin*.

Bersama Sutradara Garin Nugroho ia antara lain terlibat dalam film *Cinta Dalam Sepotong Roti* (1991), *Surat Untuk Bidadari* (1995), *Bulan Tertusuk Ilalang, Rindu Kami Pada Mu, Puisi Tak Terkuburkan, Under The Tree* dan *Opera Jawa.* Kang Atung juga sangat berperan dalam sebagian besar proyek film dokumenter seperti *Anak Seribu Pulau* (Miles Production).


Arturo Gunapriatna
DARI
FILM
UNTUK
FILM



# Kehadiran LSF pada Era Digital Tetap Strategis

**Ervan Ismail**
Anggota/Wakil Ketua LSF

*Kotabaru gunungnya bamega ! bamega ombak manampur di sala karang !* (Bahasa Banjar: Kotabaru gunungnya berawan ! berawan ombak mendebur di sela-sela batu karang !). Begitulah awal lirik lagu daerah Banjar berjudul *"Paris Barantai"* yang menggambarkan Kotabaru, kabupaten terluas di Kalimantan Selatan.

Saya sendiri, Ervan Ismail, lahir di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, sebuah pulau yang terpisah di ujung selatan-tenggara daratan Kalimantan. Sejak dulu, Kotabaru menjadi tempat bermukim beragam suku bangsa. Antara lain, Suku Banjar, Bajau, Bugis, Dayak, Jawa, Makassar, Mandar, Tionghoa dan lainnya. *Tagline* daerah ini adalah "*Sa-ijaan*" yang dalam bahasa Banjar berarti semufakat, satu hati dan seiya sekata.

Saya anak ketiga dari lima bersaudara, lahir dari keluarga pegawai negeri sipil Drs. H. Djuni Anang Ismail, MM dan Dra. Hj. Djauriah. Sebagaimana orang pulau, kuliner laut menjadi sumber gizi utama bagi kami sekeluarga, yang dibesarkan dalam tradisi Banjar. Kedua orangtua saya memang *urang* Banjar kelahiran Desa Amparaya, Kandangan, Kalimantan Selatan. Dan, sejak kecil, saya dibesarkan dalam lingkungan pesisir pantai, hutan, dan sungai. Saya juga melihat dan merasakaan perbedaan ragam suku dan adat istiadat.

Karena megikuti mobilitas orangtua, saya kemudian mengenyam pendidikan

sekolah dasar di SDN Mawar, Banjarmasin, lanjut ke SMPN 1 Banjarbaru, dan saya hampir selalu mendapatkan peringkat terbaik di kelas. Semasa sekolah dasar, saya sering menyambangi studio radio siaran di seberang rumah, sehingga sejak kecil saya sudah mengenal dunia musik dan penyiaran.

Ketika menamatkan pendidikan menengah jurusan Biologi di SMAN 2 Banjarmasin, saya tidak pernah lagi mendapatkan peringkat terbaik di kelas, meskipun kemudian lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada 1989, dan diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Semasa sekolah menengah, saya mulai menekuni musik dan olahraga. Sejak kecil saya memang sudah ikut berlatih di perguruan karate Kyokushinkai di Martapura, dan bahkan ketika SMP sempat menjadi juara kedua ganda putra Kejuaraan Tenis Meja Antar Instansi se Banjarbaru. Saya juga gemar main gitar dan mengorganisir kelompok vokal di SMP dan SMA. Kami tampil di pelbagai acara sekolah, meskipun tidak pernah ikut kursus musik secara formal. Semasa SMA, band sekolah kami, SMADA Banjarmasin, pernah menjadi *runner-up* band terbaik pada Festival Musik Kampus Kalimantan Selatan, dan saya menjadi gitarisnya. Dan, sebagaimana remaja pada umumnya, saya banyak menggemari ragam kegiatan anak muda seperti *camping* dan bertualang ke alam bebas.



**Di sela kegiatan BSM, menyempatkan diri menikmati alam berenang di perairan Pulau Kanawa, Labuan Bajo**

Meskipun diterima di kampus negeri, saya kemudian meninggalkan Banjarmasin dan melanjutkan pendidikan S1 di FISIP Universitas Jayabaya, Jakarta, jurusan Hubungan Internasional. Pada masa awal kuliah, saya tinggal di rumah paman di kawasan Senayan dan Perumnas Klender. Saya masih mengalami naik transportasi umum bus Metro Mini, Kopaja, serta PPD dengan segala dinamikanya. Selanjutnya karena sudah mulai aktif di pelbagai kegiatan dan organisasi mahasiswa, saya kemudian memilih kos di wilayah Cempaka Putih Timur, yang dekat dengan kampus Jayabaya.




**Program Peduli Anak Bangsa yang saya gagas (ke empat dari kiri atas) semasa menjadi aktivis mahasiswa**

Saya mulai aktif berorganisasi sebagai Kabid Eksternal Senat Mahasiswa FISIP 1991/1992, dengan program andalan Peduli Putra Bangsa, yang mengorganisir donasi mahasiswa untuk membantu anak sekolah kurang mampu di sekitar kampus.

Saya juga menjadi Ketua Pelaksana kegiatan Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII) pada 1993 di Jakarta. Acara itu dihadiri perwakilan mahasiswa jurusan Hubungan Internasional seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya terpilih sebagai Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FISIP periode 1992/1993, sekaligus menjabat Bendahara Umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Universitas Jayabaya.

Untuk organisasi ekstra kampus saya masuk HMI dan sempat menjadi Peng-



**Dilantik Rektor sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa**

urus HMI Cabang Jakarta Cilosari pada 1994/ 1995. Selain itu, saya juga tetap menggeluti dunia Seni dengan menjadi Wakil Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Seni dan Vokal. Pada masa mahasiswa saya sering menjadi perwakilan kampus untuk menghadiri pelbagai kegiatan seminar, lokakarya, pelatihan, dan ragam kegiatan pertemuan nasional kepemudaan dan kemahasiswaan di Indonesia.

Menjelang akhir studi, saya sempat merintis usaha PD Putera Bangsa di kawasan Pondok Kelapa, yang kemudian berkembang dan bersama teman-teman mahasiswa mendirikan workshop usaha perkayuan di kawasan Bekasi Utara. Saya juga sempat menjadi Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang Bekasi. Usaha itu kemudian tidak berlanjut akibat krisis moneter. Saya pun mendalami dunia jurnalistik dengan menjadi pewarta di Harian *Republika* dan, kembali melanjutkan studi S2 Manajemen Komunikasi di Universitas Indonesia. Pada masa inilah romansa bersemi dengan teman kuliah di Salemba. Dukungan teman-teman sekelas yang turut mendorong kedekatan dengan seorang professional Public Relations Officer kelahiran Surabaya, Siti Dewi Sri Ratna Sari yang juga alumni sastra Perancis UI. Kisah asmara yang kemudian berakhir diujung pelaminan. Sehingga dosen pembimbing tesis saya Prof. Sasa Djuarsa Senjaja, Ph.D ketika itu menyebutkan bahwa Ervan ini mendapat dua hasil kuliah di UI sekaligus, yaitu ijazah dan ijabsah.

Pada masa itu pula, saya menjalani aktivitas sebagai karyawan marketing Radio




**Wisuda di UI di dampingi Ratna, teman kuliah yang menjadi teman hidup**

Trijaya FM, sampai menyelesaikan tesis riset *niche market* "Kompetisi Radio Siaran FM di Jakarta". Pimpinan Radio Trijaya FM yang berkantor di kawasan RCTI Kebon Jeruk, kemudian mempercayakan saya menjadi Koordinator Marketing, Promotion, dan Public Relations Trijaya Group, yang membawahkan Radio Trijaya dan ARH di Jakarta, SCFM Surabaya, Prapanca FM Medan dan kemudian Trijaya Semarang, Trijaya Jogjakarta serta Trijaya Bandung.

Pada masa itu, Radio Trijaya 104,7 FM Jakarta, yang bergeser menjadi 104,6 FM akibat penataan frekuensi radio, menjadi salah satu radio papan atas di Indonesia. *Positioning* Trijaya dengan *tagline "more than just music"* itu memiliki citra dan penerimaan yang sangat baik di kalangan pendengarnya, yang terdiri dari kaum profesional muda, serta kalangan pengiklan, yang menjadi sumber hidup utama bagi radio komersial. Bekerja di bidang penyiaran itu telah menanamkan budaya penghargaan terhadap waktu yang sangat tinggi. Demikian pula kemampuan membangun relasi dengan ragam *stakeholder* menjadi sangat terasah.

Saya kemudian melanjutkan karir menjadi Managing Director Vima Commu-



**Saya (mengangkat tangan) bersama Tim Trijaya FM dalam acara "Kuis Siapa Berani" bersama Helmy Yahya dan Alya Rohali**

nications yang menangani periklanan, promosi dan *event management*. Dunia periklanan sangat menajamkan kemampuan kreatif dan kerjasama tim untuk mencapai tujuan. Saya juga diminta menjadi pengajar sebagai dosen praktisi di Fikom Universitas Mercu Buana, serta menjadi konsultan komunikasi yang menangani penelitian dan kehumasan pada beberapa kementerian.

Sekitar tahun 2009, saya diminta oleh Ketua KPI Pusat sekaligus dosen pembimbing Prof. Sasa Djuarsa Sendjaja (alm) untuk menginisiasi pendirian KPID DKI Jakarta, yang waktu itu belum juga terbentuk, sebagaimana provinsi-provinsi lain di Indonesia, yang merupakan amanat dari UU No. 32/2002 tentang Penyiaran.

Saya bersama tim kemudian membuat naskah akademik, merancang proposal pendirian, dan melakukan lobi ke Pemda DKI dan DPRD DKI selama dua tahun, sehingga akhirnya mendapat persetujuan dari Gubernur DKI Fauzi Bowo dan pimpinan DPRD DKI untuk mendirikan KPID DKI Jakarta. Setelah mengikuti seleksi Pansel, saya pun terpilih sebagai komisioner dan dalam rapat pleno dipilih sebagai Wakil Ketua KPID DKI Jakarta periode 2011-2014.

Pada masa awal berdirinya KPID, bersama tim kelembagaan KPID DKI Jakarta,




**Saya (kiri) bersama para Juri: Bens Leo, Trie Utami dkk pada event festival musik yang dikelola Vima Communications**



**-Bersama Menteri Perhubungan Jusman Syafei Jamal ketika saya menjadi Ketua Tim Konsultan penyusunan Renstra Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhuhungan Ri**



**Saya bersama Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat audiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta di Balaikota**

kami menata organisasi dengan membangun struktur organisasi beserta kelengkapan sumber daya manusianya, termasuk menyiapkan kantor dan infrastrukturnya. Pada periode ini juga KPID DKI memulai proses digitalisasi Penyiaran di Indonesia menuju mekanisme ASO (*Analogue Switch-Off*).

Dalam rangka mengawal proses digitalisasi penyiaran, itulah saya mengikuti kegiatan Internet Protocol/IPTV World Forum di London UK (Maret 2012), Studi Banding Ruturk TRT Ankara Turki (2012), Mengikuti Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia (Casbaa) di Hongkong (2012), dan menghadiri International Digital Multimedia Technology Exhibition & Conference Singapore (Juni 2014).

Selanjutnya pada periode kedua, saya kembali terpilih sebagai komisioner KPID DKI Jakarta masa bakti 2014-2017. Pada periode ini KPID DKI melaksanakan proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Pengawasan Program Siaran untuk Perpanjangan Izin Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Televisi dan Radio yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta.

Pada akhir masa bakti di KPID DKI Jakarta, saya diterima studi doktoral S3 Komunikasi Pembangunan di IPB University Bogor, kembali berduet satu kelas sebagai pejuang disertasi bersama mantan pacar, Siti Dewi Sri Ratna Sari. Pada November 2022, dalam sidang terbuka promosi doktoral, saya berhasil lulus dengan judul disertasi *Komunikasi Digital dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil*. Pada masa studi dihasilkan beberapa karya ilmiah berupa artikel di jurnal nasional dan internasional,



**Memainkan lightsabre merah bersama karakter film Star Wars di Walk of Fame Hollywood**

menulis opini di media, dan menerbitkan buku bertajuk *Manajemen Program Komunikasi dan Diseminasi Informasi Pembangunan*. Saya juga dipercaya menjadi Ketua Koordinator Daerah Jakarta Raya organisasi Forkapi (Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia).

Pada Mei 2020, kami dilantik sebagai Anggota LSF (Lembaga Sensor Film) RI periode 2020–2024 sekaligus terpilih sebagai Wakil Ketua LSF RI, mendampingi Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto. Selain akktif melakukan tugas penyensoran, saya juga membangun silaturahmi dengan beragam *stakeholder* seperti KPI, lembaga penyiaran televisi, kampus, dan *stakeholder* lain di pelbagai daerah. Saya juga membantu jalinan kerjasama berupa penandatangan MOU LSF dengan KPI Pusat, KPID DKI Jakarta, KPID Jawa Barat, dan KPID Jawa Tengah. Dan, pada November 2022, saya memimpin delegasi LSF dalam Studi Banding tarif sensor dan konten film ke Lembaga Rating Film Jepang (EIRIN), serta Japan Foundation.

Selain menjalani fungsi pimpinan sebagai Wakil Ketua dalam mendampingi Ketua LSF, saya juga menjalankan kewajiban menjadi bagian dari tim sensor film di studio. Tugas menyensor film dan iklan film cukup berat dan menantang, karena selain melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film, LSF juga berupaya mendukung kemajuan perfilman nasional, serta mengembangkan potensi-potensi Indonesia melalui film. LSF harus menjadi lembaga yang humanis, berusaha memiliki citra yang baik, dengan cara menjalin hubungan baik dengan




**Mewakili LSF menerima penghargaan peringkat pertama Terbaik Badan Publik kategori Lembaga Non-struktural Menuju Informatif 2023 dari Komisi Informasi Pusat**



**Ervan, Lubvna, Ratna, Boi di Twin Towers**

para pemangku kepentingan di kalangan industri terkait.

Bagi saya, LSF tidak boleh menjadi lembaga yang menakutkan, jangan menjadi musuh, jadilah mitra. Karena, selain melakukan penyensoran dan menentukan klasifikasi usia, LSF pun punya tugas mengembangkan perfilman Indonesia. Tugas dan fungsi LSF memang melindungi masyarakat dari pengaruh buruk film, tetapi yang baik harus terus kita dorong. Sebab, jika sebuah film sukses, maka produsen film akan berkembang positif, karena akan punya modal pengalaman dan kapital yang lebih baik utuk produksi film selanjutnya.

Di tengah kesibukan di LSF, itulah saya sempat menyelesaikan disertasi dengan tema Komunikasi Digital. Dalam sidang promosi doktor itu salah satu jasa yang sangat penting

dalam pengembangan pariwisata di pulau kecil adalah penyediaan homestay dari warga lokal bagi wisatawan, dan ketersediaan infrastruktur serta pemanfaatan komunikasi digital. Pada acara pelepasan wisudawan, saya diminta Dekan FEMA IPB menyampaikan pidato sebagai wisudawan terbaik Pascasarjana FEMA IPB yang lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Menjadi anggota LSF, menurut saya, adalah upaya menyandingkan ilmu komunikasi akademik dengan realitas obyektif ekosistem perfilman di sebuah negara, untuk tujuan pemajuan kebudayaan serta kebermanfaatannya bagi masyarakat. Saya menerapkan motto hidup "Kerjakanlah Sesuatu Sebaik Mungkin". Sebab, menurut saya, mengerjakan sesuatu itu harus sebaik mungkin, sehingga kita merasa maksimal. Jika kita bersungguh-sungguh, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika setengah-setengah, pasti akan ada penyesalan. Tapi jika kita sudah bersungguh-sungguh, tapi kemudian gagal, maka kita tidak akan merasa kecewa. Dalam prosesnya kita harus terus mencari dan mendapat passion dari pekerjaan tersebut. Prinsip "work hard play hard" akan memudahkan kita untuk melakoninya. Dukungan dari keluarga juga menjadi dorongan sangat penting dalam kehidupan. Do'a dan kasih sayang istri Dr. Siti Dewi Sri Ratna Sari, S.S., M.Si beserta kedua buah hati kami M. Ansel Primavandra Ismail dan Lubvna Letisya Azzahra menjadi motivasi yang tiada henti untuk terus maju meraih prestasi.




**Membudayakan pantun saat menyampaikan sambutan acara sosialisasi Budaya Sensor Mandiri pada kelompok mahasiswa, pelajar, komunitas di kota Sorong, Papua Barat**

Kehadiran LSF pada era digital tetaplah strategis. Sebab, orang tidak bisa lepas dari perangkat smartphone yang menyalurkan ragam konten narasi, audio, video yang semuanya berdampak pada pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Ada segmen masyarakat yang sudah memiliki daya nalar dan kritis dalam mencerna film ataupun konten, tapi ada sebagian lainnya yang belum, utamanya terkait rentang usia. Di sinilah sentuhan negara hadir, tentu dalam kadar yang harus pas, karena perubahan sosial dan perkembangan teknologi di masyarakat bergerak dinamis.

## JATI DIRI:

**Nama Lengkap**: Ervan Ismail
**Nama Ayah**: Drs. H. Djuni Anang Ismail, MM
**Nama Ibu**: Dra. Hj. Djauriah
**Anak**: Nomor 3 dari 5 bersaudara
**Nama Istri**: Dr.Siti Dewi Sri Ratna Sari, M.Si
**Nama Anak**: M. Ansel Primavandra Ismail dan Lubvna Letisya Az-zahra

## RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN Mawar, Banjarmasin (1977-1983), lanjut ke SMPN 1 Banjarbaru (1983-1986)
SMAN 2 Banjarmasin, jurusan Biologi/A2 (1986-1989)
S1 di FISIP Universitas Jayabaya, Jakarta (1989-1994)
S2 Manajemen Komunikasi di Universitas Indonesia (1996-1999)
S3 Komunikasi Pembangunan di IPB University Bogor (2017-2022)

## RIWAYAT KARIR

Koordinator Marketing, Promotion, dan Public Relations Trijaya Group (1997-2004)
Managing Director Vima Communications (2004-2007)
Dosen Fikom UMB (2002-sekarang)
Komisioner / Wakil Ketua KPID DKI Jakarta (2011-2014)
Komisioner KPID DKI Jakarta (2014-2017)
Anggota / Wakil Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) (2020-2024)

## RIWAYAT PENGALAMAN

Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang



Bekasi - Pewarta di Harian Republika - Konsultan komunikasi, peneliti komunikasi, praktisi kehumasan - Pendiri KPID DKI Jakarta (2011) - Internet Protocol/ IPTV World Forum di London UK (Maret 2012) - Studi Banding Kelembagaan di RTUK & TRT Ankara Turki (2012) - Studi Banding Digitalisasi Penyiaran di KCC Korea Communication Commission South Korea (2013) - InterBEE, Media Exhibition Event & Conference, Makuhari Messe Japan (2013) - Cable and Satellite Broadcasting Association of Asia (Casbaa) di Hongkong (2012) - International Digital Multimedia Technology Exhibition & Conference Singapore (2014). - Ketua Koordinator Daerah Jakarta Raya organisasi Forkapi (Forum Komuikasi Pembangunan Indonesia) (2021-2024)

**KARYA**

- Buku Manajemen Program Komunikasi dan Diseminasi Informasi Pembangunan
- Disertasi Komunikasi Digital dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil
- Artikel Opini; Industri Penyiaran (Republika); Retaknya Modal Sosial Pembagunan di Era Digital (detik.com), serta artikel ilmiah di jurnal nasional dan internasional

# RINGKASAN

## Dr. Ervan Ismail M.Si

Lahir di Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Selasa, 12 Januari 1971, Ervan Ismail, M.Si adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Lelaki dengan dua anak ini hobi bermain musik, membaca, olahraga, nonton, serta traveling.

"Kerjakanlah segala sesuatu sebaik mungkin" adalah motto hidup dari lulusan S2 Universitas Indonesia jurusan Manajemen Komunikasi ini. Ia pernah menjadi Reporter Harian Umum *Republika*, Head of Marketing / Promotion / Public Relations Radio *Trijaya* Group (Jakarta-Surabaya-Medan-Semarang-Jogja-Bandung), Managing Director Advertising Agency Vima Communications, Jakarta, Konsultan dan Peneliti Komunikasi, pendiri dan Komisioner KPID DKI Jakarta dua periode (2011-2014 dan 2014-2017).

Dosen Fikom Universitas Mercu Buana, Jakarta, ini juga pernah aktif di sejumlah organisasi. Antara lain, Ketua Bidang Eksternal Senat Mahasiswa FISIP UJ (1991-1992), Wakil Ketua Umum UKM Seni dan Vokal UJ (1991-1992), Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP (1992-1993), Pengurus HMI Cabang Jakarta, Pengurus HIPMI Cabang Bekasi, Wakil Ketua KPID DKI Jakarta, dan Ketua Korda Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia-Forkapi Jakarta Raya. Sejak Jumat 8 Mei 2020 ia dilantik sebagai Anggota LSF (2020-2024) sekaligus terpilih sebagai Wakil Ketua LSF.



Fetrimen Zubir



# Film Media Efektif bagi Pembelajaran

**Fetrimen Zubir**
Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi

Tanah kelahiranku adalah ngarai yang dikelilingi bukit jantan di barat, dan bukit betina di timur, yang menjadi irisan dari Bukit Barisan. Nagari di dataran rendah lahan pertaniannya sangat subur karena dialiri dua sungai besar. Sungai Batang Bayang di barat, airnya mengalir dari kaki bukit jantan, dan konon bersumber dari Danau Singkarak, Solok. Sedangkan di timur mengalir Sungai Bayang Sani yang berasal dari air terjun, yang oleh warga disebut *"sarasah"* (tempat bidadari bercengkrama ketika fajar menyingsing), dan berasal dari kaki anak Bukit Betina.

Secara geografis, karena berada di tengah, Nagari ini menjadi pusat "peradaban" yang memadukan budaya selatan dan budaya utara. Di utara, sikap dan perilaku para "anak gunung" lebih mengutamakan "rasa." Juga dalam membangun relasi dan koneksi. Sehingga, nilai-nilai agama Islam (memang 100% penduduknya beragama Islam) menjadi faktor utama dalam mengembangkan nilai budaya. Mereka berargumen berdasarkan dalil *naqli*, yang akan memudahkan lawan bicara untuk percaya. Tradisi mengkaji kitab dan ilmu agama pun lebih dominan, sehingga tak mengherankan bila daerah ini banyak melahirkan ulama.

Sedangkan di selatan, para "anak pantai" yang intens berkomunikasi dengan "masyarakat luar," gaya berkomunikasinya lebih menggunakan "logika". Semua ungkapan yang diterima, baik langsung atau hanya kabar angin, akan dicerna dengan dalil *aqli*. Apabila dianggap logis dan dapat diterima akal sehat, maka kabar itu akan dianggap benar. Karakter "anak pantai" itu membudayakan nilai

kearifan lokal. Masyarakatnya mentradisikan nilai yang selama ini berkembang, seperti nilai dan karakter budaya Minangkabau, yang mengajarkan sastra, petatah petitih, dan lain sebagainya.

Budaya "anak gunung" dan "anak pantai" itu, berintegrasi dalam budaya Nagari karena posisinya yang di tengah, dan merupakan tempat pertemuan para cendekia, baik yang dari selatan maupun utara. Sebagai bagian dari alam Minangkabau, musyawarah dalam mencari pemufakatan yang dilakukan para tetua (ninik mamak), alim ulama, dan cerdik pandai, untuk melaksanakan suatu kesepakatan, Nagari ini tempat ideal dalam bermusyawarah. Sebelum ada bangunan yang seperti sekarang, untuk menandai tempat bermusyawarah, maka ditanamlah pohon beringin. Di Nagari ini ditanam tiga batang pokok pohon beringin yang dinamakan Batang Baringin Nan Tigo. Itu menandakan bersatunya para alim ulama, ninik mamak dan cerdik pandai, yang biasa disebut *"Tungku Tigo Sajarangan"*. Di bawah batang beringin itulah para *"tungku tigo sajarangan"* berapat, sehingga tempat kelahiranku itu dikenal dengan nama "*Koto Berapak*" (Tempat Rapat).

Koto Berapak merupakan "*pusek jalo pumpunan ikan Bayang Nan Tujuah*" atau pusat mencari pemufakatan di tujuh Nagari di Kecamatan Bayang, dan menjadi induk atau Ibu Nagari, tempat "*Berapak"* (berapat) mencari permufakatan untuk pelbagai keputusan adat. Ketetapan yang akan diteruskan sebagai tauladan bagi generasi yang akan datang. Maka Koto Berapak merupakan pusat jala, bukan hanya Ibu Nagari, tetapi juga pusat kegiatan utama yang mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Nagari Bayang Nan Tujuah. Bila pada zamannya ditandai dengan Baringin Nan Tigo Batang, namun sekarang lokasi itu ditandai atau telah menjadi *"Balai Rabaa"* (Pasar Rabu), pasar satu-satunya bagi penduduk Bayang Nan Tujuah. Sementara di Nagari Koto Berapak sendiri, terdapat empat suku yaitu Melayu, Tanjung, Caniago dan Jambak.

Pertengkaran, pertikaian, dan pergulatan pemikiran di antara para alim ulama yang menggunakan dalil *naqli*, para ninik mamak yang menggunakan dalil budaya, dan cerdik pandai yang menggunakan dalil *aqli,* kadang berimbas pada suku dan kaum masing-masing sesuai latar belakang budaya yang ikut berembuk. Dialektika *"syara mengata adat memakai"* menjadi tolak ukur pengambilan kebijakan untuk diteladani suku dan kaum. Bila dialektika tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka yang bersalah adalah ninik mamak dan orang tua terutama orang tua perempuan, karena memang pintu utama untuk kebajikan berada di pundak seorang "Ibu". Goresan luka yang ditorehkan anak kemenakan, tidak hanya dirasakan ninik mamak tetapi akan dirasakan juga oleh satu suku dan kaum.

Hal itu terjadi, tidak hanya karena persoalan adat istiadat dan budaya, tetapi terkait juga dengan peristiwa politik kebangsaan. Umpamanya, peristiwa politik kebangsaan yang terjadi di Jakarta, akan berimbas pada dialektika antara "anak gunung" dan "anak



**Kampanye Budaya Sensor Mandiri di Samarinda Kaltim**

pantai", antara penggunaan "rasa" dan "logika." Memandang peristiwa yang terjadi, itu walaupun diadakan musyawarah, menyepakati langkah yang diputuskan untuk melindungi Nagari, namun bara dalam sekam akan berasap juga di luar arena musyawarah. Jika peristiwa politik di Jakarta diselesaikan dengan keputusan politik, maka penyelesaian sengketa politik akan selesai dengan pergulatan pemikiran dalam pemilihan politik, yang akan menjadi dosa turunan di Nagari ini.

Anak-anak yang tidak mengalami peristiwa tersebut, akan mendapat hukuman sosial dari orang tua yang mengalami peristiwa tersebut. Apatah lagi berada pada sudut karakter budaya yang berbeda. Pergulatan "dosa turunan" terjadi dari generasi ke generasi. "Tersisih di tempat yang sepi," dan "tenggelam di air yang dangkal," menjadi budaya yang tak terelakan. Apalagi bila dalam perbedaan pilihan tersebut, salah satunya memiliki kekurangan dalam segi materi, dan pendidikan serta perlindungan yang dilakukan ninik mamak dianggap lemah, maka hinaan dan cercaan akan menjadi sarapan setiap hari. Kesalahan yang tak pernah dilakukan generasi berikutnya, akan menjadi objek penasaran bagi penderita. Maka, untuk menghindari konflik, merantau merupakan salah satu solusi dan pilihan yang dianggap tepat.

Di tengah perbedaan, pergulatan pemikiran dan pengaruh antara "rasa" dan "logika", itulah aku terlahir di Nagari ini pada 23 September 1977, sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara, dan diberi nama Fetrimen. Ibuku (*amak*) bernama Rosani, berprofesi sebagai pendidik (guru) madrasah dan memiliki




**Kampanye Budaya Sensor Mandiri di Mamuju, Sulawesi Barat**

budaya berpikir mengutamakan "rasa," bersuku Melayu dan keturunan asli Koto Berapak. Sedangkan Ayah (*abak*) bernama Zubir Jambak, seorang petani yang tempat tinggal kedua orang tuanya (kakek nenekku), tidak jauh dari pantai, dan cenderung berpikir menggunakan "logika."

Secara ekonomi, keluarga kami bukan keluarga yang miskin. Sebagai orang bersuku Melayu, kami memiliki sawah ulayat atau tanah pusaka yang diperoleh turun temurun dari ninik mamak kami. Sebagai penganut keturunan matrilineal, sawah ulayat itu digunakan oleh kemanakan perempuan, tetapi dikuasai oleh mamak laki-laki. Sawah ulayat yang dimiliki kaum kami sangat luas melawati batas Nagari ke arah selatan. Sebagai anak, cucu, dan kemenakan perempuan yang pertama, amak-ku mendapat bagian paling luas dan berada di beberapa tempat. Amak juga tahu di mana saja letak sawah dan tanah ulayat yang ditinggalkan mamaknya yang sudah mendahului, tetapi belum memberitahu posisi tanah ulayat karena amak memegang ranji. Secara sosial, keluarga kami memiliki status yang terhormat. Sebab, selain amak yang menjadi pegawai negeri sebagai guru di suatu madrasah, kebanyakan *mamak* (paman dan sepupu laki-laki amak) menjadi ustadz dan guru mengaji.

Meskipun demikian, dalam menjalani roda kehidupan yang bergaris suratan takdir, kami mengalami perjalanan yang berliku, bertikungan tajam, menanjak, bahkan seolah tak bertepi. Apalagi ketika amak mengalami sakit bertahun-tahun, pasca sepeda ontel yang mengantarkan amak mengajar di madrasah, bersenggolan

dengan kuda bendi berkusir *"tuan alah"* alias dukun sakti mandraguna. Tetapi amak tidak percaya kalau karena ulah dukun sakti itu maka amak sakit. Amak menyatakan bahwa ini memang suratan takdir yang harus dilewati.

Perjalanan kehidupan semakin berliku, "tersisih di tempat yang sepi" dan "tak menggenapi yang kurang." Sawah-sawah yang menjadi bagian amak, banyak tergadai karena memang tidak boleh dijual. Kisah berlikunya perjalanan hidup, ternyata bukan hanya kami yang mengalami. Belakangan, menurut cerita para sesepuh, hampir semua anak Nagari kami mengalami perjalanan hidup yang berliku, sebagai akibat dari "Peristiwa 1958" (Perbedaan persepsi antara Pusat-Daerah) di Minangkabau. Pada 15 Februari 1958, itu di Padang diumumkan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), yang menyatakan penolakan terhadap kebijakan Pemerintahan Pusat Republik Indonesia. Akibat langkah taktis yang dilakukan PRRI itu, maka masyarakat di Sumatera Barat umumnya dan Nagari kami khususnya, mengalami kesulitan dalam perekonomian dan "memaksa" anak-anak mudanya merantau. Perekonomian anak Nagari baru mulai mengalami perubahan pada awal 1990, ketika generasi kedua dan ketiga yang pergi merantau ke berbagai daerah, kembali ke kampung halaman dan ikut membangun Nagari.

Sebelum masuk sekolah dasar, aku sudah lancar membaca karena sering mendampingi dan mendengarkan amak mengajar kakak-kakakku membaca, setelah mengaji selepas maghrib. Bila ada kakakku yang malas belajar, amak tidak segan untuk "*menggutie*" paha bahkan memukul kakinya. Akibatnya aku termotivasi untuk belajar membaca agar tidak kena "*gutie*". Saat masuk sekolah dasar, aktivitasku berjalan biasa dan normal, seperti anak-anak lain bersekolah walau dalam keterbatasan. Pada hari pertama masuk sekolah, amak sudah menasehati dan "mencuci otak-"ku dengan ucapan "Melihat kebenaran itu bukan hanya berdasarkan "keyakinan rasa." Jika hanya berlandasan "keyakinan rasa" maka itu taklid buta namanya. Sebaliknya, kebenaran itu bukan hanya dicerna dengan "logika," karena kalau hanya menggunakan "logika" maka keangkuhan yang berkuasa. Belajarlah! Amak tidak berharap kamu menjadi siapa, tapi amak hanya ingin tahu bagaimana kamu menjadi apa." Lalu aku menjawab, "Bagaimana caranya mak?!" Amak menjawab: "Belajarlah untuk mengisi "logikamu" dan mengajilah untuk mempertebal "rasamu".

Kata-kata itulah yang memotivasiku untuk belajar di sekolah dari pagi sampai siang, dan mengaji di madrasah dari sore sampai menjelang maghrib. Tentu dengan segala keterbatasan dan hanya dengan satu tujuan yakni, berguna bagi orang lain. Makanya ketika ada pelajaran "mengarang" dalam Bahasa Indonesia di sekolah, aku hampir tidak punya cita-cita, kecuali ingin "berguna bagi agama dan bangsa."

Minat membacaku semakin meningkat. Hampir setiap hari aku mengikuti seorang teman ke rumahnya, hanya untuk membaca koran yang terbit hari itu. Aku membaca tentang berbagai peristiwa yang terjadi. Dan aku baru pulang jika orang tua temanku sudah pulang. Lalu aku berangkat mengaji di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sehingga aku sedikit memiliki sikap kritis dan keberanian.

Semangat belajarku semakin termotivasi karena metode pembelajaran di sekolahku seperti berada di persimpangan. Hukuman fisik menjadi menu yang tak terhindarkan, bila para pembelajar melakukan kesalahan dan kekeliruan. Mereka akan mendapatkan hukuman di luar nalar logika. Tetapi hukuman itulah yang membuat kami menjadi pembelajar yang kuat. Pernah suatu ketika, dua temanku yang melakukan kekeliruan, karena usianya sudah menanjak remaja, saat usia kami sudah sepuluh tahun, kelas empat sekolah dasar, dua temanku itu memang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar. Mereka memperoleh hukuman "sosial", dipermalukan di depan kelas, sehingga aku memberikan motivasi agar kedua temanku itu tetap semangat dan mau belajar membaca. Aku sendirilah yang menjadi mentor mereka membaca.

Di lain waktu, kedua temanku itu kedapatan sedang merokok oleh seorang pendidik di suatu tempat. Esoknya mereka dipanggil dan tentu diberi hukuman dengan menghisap rokok di depan pendidik tersebut. Ketika kesalahan itu berulang kali dilakukan oleh temanku itu, maka mereka diberi hukuman di luar batas kewajaran. Kedua tangan temanku disundut rokok. Dan itu juga terjadi padaku. Suatu saat aku pernah "protes" karena hukuman yang diberikan padaku. Tanpa sadar dan tak sengaja aku mengucapkan kata: "Aku setamat dari sekolah ini tidak akan langsung jadi presiden. Ada proses yang harus aku lewati. Kalau aku dihukum begini, bagaimana dengan jiwa dan perasaanku kalau dipermalukan mentalku?" Pendidik tersebut terdiam. Toh, kendati mendapat hukuman keras di sekolah, kami tidak pernah mengadu pada orang tua, meski kesempatan untuk mengadukan itu selalu terbuka.

Setamat sekolah dasar, aku hampir "dibuang" sama amak untuk sekolah di luar kampung. Salah satu tujuannya adalah Jakarta. Penyebabnya, aku mengikuti ujian Ebtanas di dua sekolah. Satu di sekolah dasar tempat aku belajar pagi, satu lagi aku mengikuti Ebta di madrasah. Karena amak tidak punya biaya mengambil ijazah keduanya, maka amak memilih mengambil ijazah yang dari madrasah. Ijazah madrasah digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Sedangkan ijazah SD sampai sekarang tidak aku tebus. Hasil test ujian masuk SMP bagus tapi karena aku menggunakan ijazah madrasah, maka aku dinyatakan tidak lulus. Rupanya dikotomi pendidikan masih ada. Kemudian amak mengantarkanku untuk melanjutkan sekolah ke Jakarta. Aku pun sudah didaftarkan sekolah di Jakarta. Lalu Amak pulang ke kampung. Namun, tinggal sepekan lagi mau sekolah,



**Menjawab pertanyaan ihwal keresahan pada tayangan film di media streaming di Mamuju, Sulawesi Barat**

amak ternyata berubah pikiran. Aku dipanggil kembali ke kampung dan dimasukkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs), setelah proses pembelajaran berlangsung dua minggu.

Seperti sudah aku ceritakan, setelah banyak tergadai, sawah yang kami miliki tinggal empat petak di kaki Bukit Bendera, yang jaraknya dua kilometer dari rumah arah ke selatan. Karena empat petak sawah itu terletak di kaki Bukit Bendera, maka pengelolaannya jadi tidak normal. Selalu digenangi air sehingga tanahnya berlumpur dan dalam. Bila menyemai, benih tidak tumbuh normal. Setiap musim bertanam, benihnya selalu kurang. Ketika padi belum menguning, segala macam hama datang. Mulai dari wereng sampai celeng hutan, cawe-cawe di sawah kami. Sehingga setiap panen hasilnya tidak maksimal. Dan petani penerima upah, pun enggan bekerja memanen padi kami, karena hasil panennya tidak mencukupi untuk dibagi. Walhasil, kami sekeluarga yang harus mengerjakannya, mulai dari menyemai benih sampai memanen padi.

Ketika kakak-kakakku merantau, hanya tinggal amak, aku dan kakak perempuanku yang membantu amak menyemai benih sampai memanen padi. Semua dilakukan selesai amak mengajar dan aku pulang sekolah. Karena aku sudah di madrasah tsanawiyah, maka waktu mengaji sudah berubah dari semula siang menjelang sore, kini menjadi usai maghrib di surau. Aku pulang dari madrasah pukul 14.00 wib. Dari pukul 14.30 wib sampai pukul 18.30 wib, aku membantu amak di sawah. Pada suatu ketika aku memanen padi hanya berdua dengan *amak*. Aku bercerita bahwa aku mendapat rundungan (*bully*) dari orang



**Menyerahkan kenang-kenangan kepada Bupati Klungkung Bali dalam penjajakan kerjasama membangun Desa Sensor Mandiri**

yang lebih tua dariku. Mereka bilang aku tidak akan menjadi siapapun, karena semua sudah ada yang dipersiapkan. Mulai dari ketua RT sampai presiden sudah ada. Untuk apa rajin-rajin sekolah. *Amak* terdiam.

Ketika hampir tamat di Madrasah Tsanawiyah, sebulan sebelum ujian Ebta, pada tahun kesekian usai memanen padi, kami membuat onggokan padi untuk digiling. Menjelang maghrib, amak mengajakku ke pengairan sawah. Amak menutup aliran air dengan tanah dan volume air itu terus meningkat sampai melewati batas onggokan tanah, sebelum kemudian jatuh seperti air terjun ke hilir. Lalu amak mengatakan, "Kamu lihat air itu, walaupun ditutup tanah dengan rapat, sehingga tidak mengalir dengan lancar, air itu menumpuk dan mencari celah bagaimana supaya bisa mengalir ke hilir. Air mencari jalan sendiri, walau tanpa dibantu. Begitu juga kamu. Yang akan mengubah nasibmu adalah dirimu sendiri,

bukan orang lain." Lalu amak mengutip Qur'an surat Arra'du ayat 11, *"Allah tidak akan mengubah nasib seseorang (suatu kaum) kecuali seseorang (kaum) tersebut yang akan mengubah sendiri"*.

Amak melanjutkan nasehatnya. "Amak sudah tua, amak tidak bisa meninggalkan kamu harta, karena memang amak tidak punya. Amak hanya berharap kamu bisa melanjutkan pendidikan sampai tingkat tertinggi. Dan ilmu kamu itu bukan untuk menjadikan kamu siapa, tetapi siapanya kamu akan mengikuti. Jika kamu punya ilmu dan kamu yang berilmu mendoakan amak dan abak nanti ketika kami sudah tiada." Seraya memandang lekat aku, amak berucap mengutip hadits "*Kejarlah dunia seolah kamu hidup selamanya dan jangan lupa belajar tentang akhirat seolah kamu akan meninggal besok hari.*" Lalu, "Bersungguh-sungguhlah, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menemukan jalannya, *man jadda wa jada*". Mendengar nasehat amak, itu aku pun berjanji dengan suara yang



**Bersama Tim LSF, dalam kunjungan ke EIRIN, LSF-nya Jepang, November 2022**

tertahan hampir tak terucap. "Mak, aku janji akan melaksanakan harapan mak, walaupun jalan yang akan kutempuh jauh lebih terjal dari perjalanan hidup kita saat ini."

Perjalanan "hidup baru" pun dimulai. Sehari setelah ujian Ebta MTs selesai, amak langsung "mengusir" aku agar segera berangkat ke Jakarta, dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan. Amak meyakini, sudah waktunya aku berpisah dengan beliau untuk belajar mandiri. Ijazah MTs yang belum aku terima, akan dikirim lewat pos. Dan aku didaftarkan di Madrasah Aliyah di Rawasari (pelangi di tapal batas). Di madrasah itu perjalanan pendidikanku dimulai tanpa pendampingan amak. Dan itulah cikalku berinteraksi dengan para pendidik yang memuluskan langkahku, untuk melanjutkan pendidikan sampai tingkat tinggi.



Mengenang perjuangan di kaki Bukit Bendera

Selain kegiatan menjadi pembelajar di sekolah dan mengaji di madrasah, dulu aku juga mengikuti kegiatan budaya seperti belajar randai, dan petatah petitih yang diadakan di Nagari pada Jumat malam. Sedangkan pada Sabtu malam kami bersama kawan-kawan sebaya pergi menonton film di bioskop kecil. Film yang kami tonton ditayangkan dari kaset video, karena bioskop satu-satunya di tempat kami, berjarak delapan kilometer dari Nagari. Dari sentuhan tayangan film di kaset video itulah aku banyak belajar tentang penerimaan informasi yang komprehensif. Sesuatu yang tidak diperoleh melalui komunikasi dan dialog di sekolah maupun di masyarakat. Film yang aku tonton pertama kali adalah film laga yang menggambarkan kepahlawanan dan penuntasan kejahatan. Aku masih ingat jalan cerita dan adegannya sampai sekarang, termasuk para pemainnya. Menonton film pun menjadi hobby dan kesukaanku. Terutama film-film laga. Maka setiap akhir pekan aku berusaha menonton film sampai sekarang, sebab banyak pembelajaran dan pesan yang didapatkan dari konten film tersebut.

Belakangan, setelah aku kuliah di program studi pendidikan, aku baru memahami, mengapa film dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Adegan film akan mudah diingat penonton, karena memang film mengintegrasikan metode pembelajaran secara efektif. Proses pembelajaran konvensional (istilah Kabadayi), seseorang hanya mampu fokus paling lama 12 - 20 menit untuk menerima informasi secara verbal. Sedangkan melalui tayangan film penonton lebih fokus untuk waktu yang lebih lama. Proses pendidikan berbasis verbal hanya mampu diingat sebanyak 70 persen dalam waktu 10 menit. Dan 30 persen sisanya hanya sebagai informasi tanpa mampu diingat. Kemampuan organ indera untuk melihat dan mendengar hanya 50 persen. Kemampuan itu bisa meningkat menjadi 80 persen apabila informasi itu diserap dengan cara melihat, mendengar dan mengucapkan. Maka subjek narasi dan visualisasi sebagai alat bantu audio visual film yang ditayangkan, sangat berpengaruh pada penonton. Dalam proses

pembelajaran, film menggunakan pendekatan psikoanalitik (meminjam kata Freud) yang berinovasi dalam menganalisa materi pelajaran secara ilmiah, mempresentasikan kenyataan yang jujur tanpa manipulasi. Film sebagai audio visual yang menggunakan kamera secara teknis sangat efektif dalam mempengaruhi penonton. Karena film juga diciptakan bisa berdasarkan fakta, bukan hanya fiksi, yang memiliki kelebihan dalam memberikan informasi dan pesan dengan cara kreatif.

Perilaku atau kondisi operan seseorang (meminjam istilah Skinner) mendapat rangsangan dari lingkungan untuk mampu bergerak yang ditentukan dengan cara kerjanya. Pengontrolan tingkah laku seseorang melalui bantuan yang bijak dari



**Latihan musik semasa di MAN/SMA**



**Dengan KPID Sulawesi Selatan ihwal pentingnya kolaborasi pengawasan dan pemantauan film di Lembaga Penyiaran**

lingkungan yang relatif besar, mendorong seseorang melakukan monitoring terhadap perilakunya, agar tidak memperoleh stigma sosial. Proses pembelajaran individu mengubah perilakunya berdasarkan konsekuensi dari perilaku tersebut. Contohnya, jika seseorang mendapatkan hadiah setiap kali dia datang tepat waktu ke kantor, maka dia akan cenderung datang lebih sering tepat waktu. Film merupakan salah satu media yang dapat melakukan perubahan perilaku, karena film adalah karya seni budaya yang berguna untuk media komunikasi, yang menyampaikan pesan moral dan etika. Oleh sebab itu, ketika seseorang mampu menangkap pesan moral yang disampaikan konten film, maka akan mampu mengubah perilaku seseorang tersebut. Sebab, adegan dalam film menggambarkan tentang lingkungan yang baik sesuai alur cerita.

Berpijak dari istilah Kabadayi dan Skinner, bahwa perilaku seseorang terkontrol oleh lingkungan dan pemanfaatan media pembelajaran yang tepat guna, dan salah satu media tersebut adalah film, maka aku selalu mengupayakan untuk menonton film. Terutama untuk melihat nilai moral sebagai manifestasi dari fungsi pendidikan. Film yang aku tonton bukan hanya di bioskop tetapi juga film di televisi, termasuk sinema elektronik (sinetron). Penilaianku pada waktu itu, film yang ditayangkan terutama di televisi, belum mampu memberikan fungsi pendidikan dengan baik. Karena masih banyak film yang tayang belum mencerminkan budaya Nusantara dan memberikan nilai negatif pada anak-anak. Banyak film yang masih menggambarkan tentang hal yang sensisitf bagi masyarakat, dan ditayangkan pada waktu *prime time* seperti adegan pornografi, kekerasan, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya, merendahkan harkat dan martabat serta penistaan pada agama dan keyakinan, tindakan melawan hukum yang dapat berdampak negatif pada perilaku penonton.

Aku pikir, tayangan film perlu ada perbaikan, agar fungsi pendidikan dan proses pembelajaran bagi penonton dalam memahami karakter budaya, dapat tertanam dengan baik. Sehingga perilaku penonton akan tergerak untuk lebih baik juga. Apalagi semakin majunya teknologi dan informasi, kian mempersempit sekat pengenalan

budaya asing, yang kadang tidak sesuai karakter budaya bangsa. Berdasarkan hal tersebut, ketika ada peluang untuk bisa berperan aktif untuk melakukan perubahan pesan konten film, maka tersiarnya informasi tentang dibukanya kesempatan untuk ikut menjadi anggota dan tenaga sensor di Lembaga Sensor Film (LSF), sangat menarik minatku. Akupun ikut mendaftar untuk menjadi tenaga sensor.

Selama menjadi tenaga sensor, tugas utamaku adalah membantu anggota dalam melakukan penelitian dan penilaian terhadap judul, gambar, adegan, dialog/ monolog, suara dan teks terjemahan. Karena itulah, selama menjadi tenaga sensor, aku belum mampu melakukan perubahan pesan film secara signifikan. Sebab, ada permasalahan yang belum dapat terselesaikan dalam pemberian penilaian, karena ada benturan regulasi antara pra dan pasca penilaian. Terutama perbedaan penggolongan usia tayangan film antara UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pada perfilman, penggolongan usia dewasa ditentukan 17 tahun ke atas, sedangkan dewasa pada penyiaran adalah 18 tahun ke atas. Film yang dianggap dewasa di perfilman dianggap remaja di lembaga penyiaran. Sehingga film-film dengan penggolongan usia dewasa ditayangkan pada waktu *prime time,* karena klasifikasinya berada di bawah 18 tahun. Selain itu, penayangan film di televisi disesuaikan dengan regulasi penyiaran, sedangkan penetapan surat tanda lulus sensor (STLS) berdasarkan regulasi perfilman. Titik temu perbedaan itu masih terus berlanjut, karena belum ada komunikasi intens antara lembaga yang mengawasi penyiaran dengan lembaga yang menetapkan STLS.

Usai mengabdi sebagai tenaga sensor, aku pun kemudian mendaftarkan diri menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF) dengan tujuan untuk membangun komunikasi dengan para *stakeholder*. Baik dengan para sineas, *filmmaker*, produser maupun dengan *stakeholder* penyiaran. Setelah dilantik menjadi anggota LSF, langkah pertama yang aku usulkan adalah perlunya berkomunikasi dengan *stakeholder* penyiaran, untuk mempersatukan persepsi terkait perbedaan dalam penggolongan usia pada kategori dewasa. Melalui diskusi dan pembuatan perjanjian kesepahaman, ada kesepakatan dengan menggunakan diskresi kedua lembaga negara, bahwa film yang penggolongan usianya tujuh belas tahun oleh LSF dianggap dewasa oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sehingga penayangannya dilakukan pada malam hari.

Mengubah regulasi melalui inisiasi lembaga yudikatif atau eksekutif tentu membutuhkan waktu lama. Namun membangun kerjasama terkait perkembangan kemajuan perfilman yang akan ditayangkan, apalagi kanal-kanal pemutaran film bukan lagi hanya lewat televisi dan bioskop, maka mencari langkah tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif film, diperlukan sinergi antar *stakeholder.* Menghadapi mengguritanya pemutaran film di media *streaming* yang bak tsunami dan belum melakukan proses sensor, diperlukan strategi lain supaya

ada kesadaran bersama untuk melindungi masyarakat. Ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, setelah proses penelitian dan penilaian tentang penggolongan usia dilaksanakan, ketika film sudah tayang di bioskop, televisi dan media *streaming*, maka diperlukan penilaian dan apresiasi masyarakat terhadap hasil penilaian. Tujuannya untuk mengevaluasi hasil penilaian, dan hasil penilaian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan mengembangkan kualitas film di masyarakat. Ketika hasil penilaian tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka ada langkah yang harus ditempuh agar film dapat memberikan dampak positif bagi penonton. Kedua, diperlukan pemberian literasi dan edukasi pada para *filmmaker* dan produser agar dalam merealisasikan kreativitasnya tidak bertolak belakang dengan regulasi yang ada di Indonesia.



**Literasi dan edukasi hukum perfilman pada siswa SMK di Palembang**

Hasil penilaian dan apresiasi masyarakat diinformasikan kepada para *stakeholder* perfilman seperti pemilik film, bioskop, televisi dan media *streaming*, agar secara bersama-sama memberikan pembelajaran tentang nilai dan fungsi pendidikan yang terkandung dalam pesan konten film, untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Literasi dan edukasi dilakukan pada dua tahap. Tahap hulu, literasi diberikan pada para *filmmaker* dan pemilik media terutama media *streaming* dan tahap hilir, literasi diberikan pada masyarakat agar cerdas memilah dan memilih tontonan sesuai dengan penggolongan usia.

Fokus utama yang perlu dilakukan sekarang, Lembaga Sensor Film berkomunikasi intens dan aktif dengan pemilik media *streaming* agar mereka memiliki kesadaran melakukan proses penyensoran film ke Lembaga Sensor Film. Sebab, walaupun media *streaming* berbayar, filmnya dapat ditonton di mana dan kapan saja, sehingga pengontrolan pada masyarakat masih longgar dan lemah. Kesadaran masyarakat menonton film sesuai penggolongan usia juga masih jauh panggang dari api. Di media *streaming*, film ditayangkan tanpa ada aturan waktu. Pemutaran film tergantung pada waktu yang dimiliki penonton. Bahkan film dapat disaksikan di ranah privasi. Kalau film tidak diberikan penggolongan usia, dikhawatirkan film akan ditonton oleh masyarakat yang belum sesuai dengan usianya, sehingga berdampak negatif pada penonton tersebut.

## JATI DIRI:

| | |
|---|---|
| **Nama Lengkap** | **:** Fetrimen Zubir |
| **Tempat & Tanggal Lahir** | **:** Koto Berapak, Jumat, 23 September 1977 |
| **Anak ke** | **:** Bungsu dari 9 bersaudara |
| **Nama Orang Tua** | : Zubir Jambak & Rosani |
| **Nama Istri** | **:** Leni Asnidar |
| **Nama Anak** | **:** 1**.** Bunga Soulmate Fedleni<br>2. Cinta Sakina Fedleni |
| **Medsos** | : IG: @fetrimenzubir - fb: fetrimen |

## RIWAYAT PENDIDIKAN

**1984** : Sekolah Dasar Negeri 03 Koto Berapak

**1984** : Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasar Baru

**1990** : Madrasah Tsanawiyah Negeri Talaok

**1992** : Madrasah Aliyah Negeri 03 Rawasari, Jakarta Pusat

**1997** : Pendidikan Agama Islam Tarbiyah UNISMA (pindahan)

**2008** : Administrasi Pendidikan pascasarjana UHAMKA - S2

**2012** : Administrasi Pendidikan pascasarjana UNJ - S3

**Gelar:** S.Ag**.,** M.Pd

# RINGKASAN

## Dr. Fetrimen Zubir S,AG.,M.Pd

Sebelum menjadi Anggota Lembaga Sensor Film (2020-2024) dari unsur masyarakat, Dr. Fetrimen Zubir, S.Ag., M.Pd pernah menjadi Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film (2016-2020). Doktor Administrasi Pendidikan (S3) di Program Pascarjana Universitas Negeri Jakarta ini, aktif di pelbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Antara lain, Anggota Komisi Pendidikan Kader Majelis Ulama (KPK MUI) Pusat hingga saat ini, Ketua Bidang Transformasi Digital, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Pusat, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (LBH-ICMI Pusat), Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kependudukan, SDGs dan Pengabdian Masyarakat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Majelis Pemberdayaan Wakaf Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MPW PPM), Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (MPW PWM) DKI Jakarta, Ketua Lembaga Kajian Strategis dan Kerjasama Pimpinan Daerah Muhammadiyah (LPSK PDM) Jakarta Timur dan Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (DPP PKPS).

Putra Minang kelahiran Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat, pada Jumat, 23 September 1977, ini adalah lulusan Magister Administrasi Pendidikan (S2) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). Ia juga merupakan Dosen Tetap Persyarikatan di Program Studi yang sama, serta dosen di sejumlah Perguruan Tinggi di Jakarta dan Bekasi. Sebelum berkiprah di Lembaga Sensor Film, ia pernah menjadi Wakil Dekan di Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP Assalam) Bekasi, serta Sekretaris Badan Pembina Harian Institut Bisnis Muhammadiyah (BPH IBM) Bekasi. Selain sebagai Anggota, di Komisi II LSF, ia juga menjabat Ketua Subkomisi Bidang Pemantauan dan Evaluasi.



# Ingin Melindungi Perempuan dan Anak-anak

**Hafidhah Farwa**
Sekretaris Komisi I

Saya, Hafidhah Farwa, lahir di Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Jumat, 12 Agustus 1983. Akrab disapa Fidha, saya anak nomer dua dari tiga perempuan bersaudara. Sejak kecil saya sering mengikuti kegiatan Ayah. Selain mengajar, Ayah yang bernama lengkap Mohammad Musfar, juga punya usaha hasil tani. Jika musim panen tiba, saya ikut memetik hasil pertanian, baik tembakau, kedelai, maupun jagung dan lain-lain, dan kemudian ikut naik truk angkutan.

Ayah dan Ibu memang tidak pernah membatasi aktivitas anak-anaknya selama tidak mengganggu pelajaran sekolah. Kendati demikian, saya bercita-cita menjadi penyelam – bukan karena jago renang, tapi pulau Madura dikelilingi laut dengan banyak ikan dan karang yang bagus. Hampir setiap pekan kami bersama teman–teman bermain di pantai sambil menangkap kerang.

Mungkin saya agak ekstrem berpikir sebagai anak-anak. Sejak kecil saya penasaran kenapa anak laki-laki bisa memanjat pohon kelapa, sedangkan perempuan tidak bisa? Rasa penasaran itu timbul, mungkin karena Kakek punya kebun kelapa di sekitar rumah. Setiap panen kelapa tiba, Kakek membayar orang untuk memetiknya dan mereka semua laki-laki. Lalu saya mencoba memanjat, ternyata bisa. Sejak itu, kalau ibu butuh kelapa atau apapun yang perlu dipanjat, sewaktu-waktu saya yang disuruh. Saya bangga karena merasa setara dengan laki-laki. Pikiran



anak-anak konyol juga ya… he he he. Tapi dari situlah saya kemudian bersemangat untuk mengambil peran lebih jauh, tanpa membedakan jenis kelamin.

Saya berasal dari keluarga yang terbuka, tetapi masyarakat di sekeliling saya, masih banyak yang berpikiran konservatif, dengan mengutamakan kemajuan bagi anak laki-laki, ketimbang anak perempuan. Kalau ada keluarga memiliki anak – perempuan dan laki-laki – prioritas pendidikan hanya diberikan kepada anak laki-laki. Melihat kondisi tersebut, saya merasa prihatin, Sebab, masih ada anak-anak terutama perempuan, yang pendidikannya tidak diperhatikan. Terserah kepada anaknya mau sekolah atau tidak. Kasihan masa depan mereka. Akhirnya, saya




**Mendapat kenang-kenangan dari Komunitas Film MASH di Denpasar, Bali**

mengajak teman seangkatan sekolah untuk bersama-sama membantu pendidikan mereka. Setiap sore kami kumpulkan anak-anak di surau. Kami mengajari mereka menulis, membaca dan pelbagai mata pelajaran layaknya sekolah formal. Karena kami juga ada aktivitas OSIS, maka kami membuat jadwal mengajar secara bergantian. Ada tiga orang pengajar sukarela saat itu, yakni saya sendiri, kakak kandung saya Maltufah Farwa, dan satu orang teman.

Tepat umur lima tahun, saya masuk Taman Kanak-Kanak Bina Anaprasa. Lokasi sekolah itu jaraknya sekitar dua kilo meter dari rumah. Setiap hari saya

diantar Ayah. Kadang juga Ibu. Baru setengah tahun di TK A, Kepala Sekolah yang akrab dipanggil Ibu Arif, menaikkan saya ke TK B, dengan alasan kemampuan belajar saya lebih cepat dari yang lain. Jadi, saya masuk sekolah dasar (SD) pada umur 6 tahun. Namun, mengingat peraturan di sekolah dasar murid SD minimal harus berusia tujuh tahun, maka umur saya pun dinaikkan satu tahun. Sekolah Dasar sampai dengan SMA, saya sekolah di yayasan yang sama yaitu Pondok Pesantren An-Nuqayah. Dan, semasa SMA saya sempat aktif di teater.

Kemudian saya melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Selain masih aktif di teater seperti waktu SMA, saya juga aktif di unit kegiatan mahasiswa/intrakampus, yakni Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M). Programnya sangat aktif. Yaitu melakukan kajian, bedah buku dan belajar penelitian. Namun Ayah meminta saya untuk aktif di organisasi ekstra kampus juga. Akhirnya, pada semester tiga, saya ikut Latihan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.

Pilihan itu sudah saya pikirkan secara matang, karena keluarga saya mayoritas NU termasuk Ibu, sementara Ayah aktif di Muhammadiyah. Adik saya yang saat itu duduk di bangku SMA, aktif sebagai pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama. Saya sendiri aktif di Nasyiatul Aisiyah. Saya merasa betah karena saya mendapatkan peran yang sama ketika bergabung di organisasi. Salah satunya ketika diminta perwakilan untuk mencalonkan kadernya sebagai ketua Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Universitas. Saya mendapatkan rekomendasi sebagai kandidat. Sebagai penikmat organisasi, saya tidak berhenti sampai di situ. Sembari aktif di kampus, saya juga aktif di organisasi kemasyarakatan, terutama organisasi perempuan. Salah satunya adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Melihat saya aktif membela keadilan dan kesetaraan gender, Ketua DPRD Kabupaten Malang saat itu, Ibu Asminin, pun mengajak saya dalam berbagai kegiatan yang dilakukannya. Termasuk menjadi tim konseptor modul kegiatan kaukus politik perempuan. Setelah lulus S1 saya melanjutkan S2 di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), dan lulus pada 2010.

Saya hijrah ke Jakarta karena mendapat mandat sebagai Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Di situlah saya mendapatkan banyak pengalaman berorganisasi secara lebih luas. Teman juga semakin banyak. Terutama dari organisasi yang terhimpun dalam Cipayung Plus. Yakni, gabungan organisasi kemahasiswaan yang terdiri dari GMNI, HMI, PMII, PMKRI, GMKI, IMM, KAMMI, dan HIKMAHBUDHI.

Hampir setiap hari kami mengadakan kegiatan bersama secara bergantian di masing-masing sekretariat. Bersama-sama terlibat dalam menyusun konsep RUU terkait isu-isu perempuan seperti RUU PRT, RUU Pemilu, khususnya pada ke-

terwakilan 30 persen perempuan di parlemen. Persaudaraan itu terus terbangun sampai saat ini. Mayoritas kami aktif sebagai Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI). Dan, saya sendiri mendapat mandat sebagai Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada 2015, saya berkesempatan mewakili perempuan pengusaha Indonesia bersama enam orang lainnya, mendapatkan Fellowship Australia Award Flinders University, Adelaide, Australia. Selama enam bulan di sana terkadang kangen dengan masakan kampung halaman. Untungnya, ada rumah makan khas Indonesia, namanya "Warung Daun." Tempatnya tidak jauh dari Quest, apartemen tempat kami tinggal. Ada pecel lele sebagai menu favorit, tapi memakannya harus mengajak teman, karena lelenya besar banget. Jadi enggak habis kalau dimakan sendirian. Sebagai tugas akhir, saya melakukan penelitian tentang "perempuan pelaku UMKM di Indonesia". Penelitian itu saya perdalam di disertasi yang sedang saya susun, dengan sedikit perubahan sesuai kebutuhan pendidikan.

Saya gemar menonton film, baik melalui televisi maupun bioskop. Di sela-sela aktivitas bekerja dan berorganisasi, saya seringkali menonton bersama keluarga atau teman-teman. Selama aktif sebagai pengurus pusat Perempuan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), kami punya jadwal menonton rutin setiap malam Kamis, setelah rapat mingguan. Jika ada film yang berkaitan dengan nilai-nilai perjuangan, motivasi atau lainnya, kami selalu mengagendakan untuk nonton bersama. Baik secara independen organisasi atau bekerjasama dengan lembaga lain.

Saya hampir tidak pernah ketinggalan untuk menonton film inspiratif tentang perempuan. Baik film dalam negeri maupun film asing. Mulai dari menyuarakan emansipasi perempuan, ketidaksetaraan gender di masyarakat, sampai diskriminasi ras. Film Amerika *Little Women* karya sutradara Greta Gerwig, yang tayang pada 2019, pernah dikaji bersama para aktivis pemuda. Film yang yang cukup ringan, namun mengangkat tema yang cukup mendalam, itu mengisahkan kehidupan empat perempuan pada era perang saudara. Masing-masing mengajarkan kita untuk tumbuh tegar, percaya diri dan optimistis. Kisah itu melawan pemahaman misoginis yang belum kunjung usai. Mencoret stigma masyarakat bahwa perempuan hanya makhluk yang cantik dan manja.

Kemudian film *Hidden Figures* karya sutradara Theodore Melfi, yang tayang pada tahun 2016, dan menceritakan tentang rasisme yang cukup kental di masyarakat Amerika Serikat. Dan masih banyak film lainnya seperti *Kartini, Sokola Rimba, Yuni* dan lainnnya. Tak kalah menarik juga film Bollywood berjudul *Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani,* kisah cinta pemuda dengan latar belakang keluarga patriarkis, yang mencintai gadis bernama Rani, dari keluarga yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Kisah cinta itu putus




**Menyampaikan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dengan Komunitas Film di Palu, Sulawesi Tengah**

nyambung karena perbedaan kultur, namun berbuah manis karena Rani mampu mengubah keluarga budaya patriarki menjadi keluarga yang humanis.

Selain hobby wirausaha, saya juga menekuni aktivitas akademik sejak 2010. Sebagai pengajar, saya seringkali mencari metode yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Di antaranya dengan mengajak menonton film. "Film merupakan alat yang ampuh sebagai media belajar. Selain mengajar di kampus, saya seringkali menjadi fasilitator pada pelatihan pemberdayaan perempuan. Dan, saya kerap memilih film-film yang dapat memotivasi perempuan, seperti *Perempuan Berkalung Sorban*, *Tjoet Nja' Dhien*, *The Iron Lady* dan lainnya. Dengan tontonan tersebut, saya berharap para perempuan mempunyai pola pikir yang lebih maju, dan mengubah sudut pandang, sekaligus menularkannya kepada perempuan lain. Sebab, tanpa disadari, menikmati film dapat membentuk karakter para penonton.

Sejak 2016, saya menjadi Asisten Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Berinteraksi dengan insan penyiaran selalu menarik, dan saya semakin memahami tentang regulasi penyiaran. Televisi membutuhkan kreativitas yang tinggi, agar pemirsa tetap betah mengikuti program-programnya. Terutama bagi lapak program hiburan. Namun harus tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Saat itu, komisioner KPI sangat memperhatikan berbagai aspek untuk memajukan penyiaran, terutama di layar kaca (televisi), yang dapat menyuguhkan tayangan berkualitas, tapi tetap menghibur, dan mendapatkan *rating* yang tinggi.

Menjaga keseimbangan tersebut tentu tidak mudah. Perlu ada komunikasi intensif antara regulator dan *stake holder*. Sebagai apresiasi atas karya-karya berkuali-




**Memandu acara diskusi dalam Rapat Koordinasi LSF di Jakarta**

tas dari Lembaga Penyiaran, setiap tahun KPI mengadakan *"Anugerah KPI."* Pada 2016, "Anugerah KPI" diselenggarakan di Trans7, pada 2017 di SCTV, dan tahun 2018 di RCTI. Selama proses persiapan "Anugerah KPI," itu saya terlibat sebagai panitia, bersama perwakilan dari televisi dan radio. Kegiatan serupa juga ternyata menjadi agenda rutin LSF, yang diadakan setiap dua tahun sekali dalam rangka mengapresiasi Rumah Produksi/*Production House* (PH), TV dan bioskop serta para pihak terkait, melalui pemberian "Anugerah LSF".

KPI dan LSF pun intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dalam keterkaitan tugas serta fungsinya. Kedua lembaga itu saling bekerjasama dalam setiap kegiatan masing-masing dan saling mengikat dengan menandatangani nota kesepahaman (MOU). Sekolah P3SPS rutin diadakan KPI minimal satu bulan sekali. Pada 2018, Mayong Suryolaksono sebagai PIC *(Person In Charge)* mengundang Ketua LSF Ahmad Yani Basuki sebagai pembicara kunci. Beliau menyampaikan bahwa LSF dalam melakukan penyensoran film dan iklan film, tidak lagi memotong tapi melakukan klasifikasi usia, dan mengembalikan kepada pemilik untuk direvisi, bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Oleh sebab itu, film tetap bisa dinikmati secara baik oleh penonton. Dalam meningkatkan layanan publik, LSF telah memiliki Aplikasi Administrasi Sensor Berbasis Elektronik (*e-Sias*). Poin–poin yang disampaikan beliau membuat saya lebih tertarik untuk mengenal LSF lebih jauh. Karena yang ada di benak mayoritas masyarakat, termasuk saya, LSF adalah lembaga yang suka memotong-motong film.

Mengingat film sebagai hiburan bagi masyarakat mampu menembus batas-batas kelas sosial dan lintas usia, maka kemampuan film dalam menjangkau pelbagai

segmen kelas sosial membuat film memiliki potensi untuk memengaruhi khalayak penikmatnya. Nilai strategis film tidak hanya sebagai karya hiburan. Film pun berpotensi menjadi media edukasi, yang dapat mengkomunikasikan pesan pendidikan secara efektif. Bahkan mampu memengaruhi perilaku seseorang.

Saya sendiri bergabung di Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMIWI), organisasi yang merupakan himpunan seluruh organisasi keislaman perempuan Indonesia, yang mensinergikan gerakan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan di ranah publik dan domestik. Salah satu




**Sosialisasi dan Literasi tentang LSF dan Budaya Sensor Mandiri dengan Komunitas Film MASH di Denpasar, Bali.**

program yang digalakkan BMIWI adalah melindungi anggota keluarga terutama anak, terpapar pornografi, yang salah satunya disebabkan oleh tontonan. Melihat kondisi tersebut, saya ingin terlibat berkontribusi dalam regulasi perfilman.

Pada 2019 tepatnya bulan Mei, saya mendapat informasi terkait adanya seleksi terbuka calon anggota Lembaga Sensor Film. Saya tertarik untuk mendaftar dan segera melengkapi persyaratan administrasi. Tahap demi tahap yang dilalui, merupakan pengalaman berharga buat saya, yang termasuk dari lima perempuan yang lolos sampai *fit and proper test* oleh Komisi I DPR RI. Tepat pada Jumat 8 Mei 2020, saya dilantik bersama 16 Anggota lain secara daring, oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Walau saat itu saya tidak bisa

berjumpa di tempat pelantikan, karena dibatasi oleh PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan saat pandemi Covid- 19, namun upacara pelantikan itu tetap berjalan baik dan sangat khidmat.

Pasca pelantikan dilanjutkan dengan rapat pleno Anggota LSF dengan presidium Noorca M. Massardi sebagai anggota paling senior, dan Mukayat Al-Amin, anggota paling yunior. Dari hasil sidang pleno pertama itu, terpilih Rommy Fibri Hardiyanto sebagai Ketua dan Ervan Ismail sebagai Wakil Ketua.

Saat PPKM, aktivitas kantor harus dilakukan dengan bekerja dari rumah (WFH) secara total. Namun karena LSF harus memberikan pelayanan penyen-



**Anggota Komisi I LSF (Ki-Ka): Andi Muslim, Hafidha, Noorca M. Massardi, Tri Widyastuti Setyaningsih, Nasullah (Ketua Komisi I), Rita Sri Hastuti dan Joseph Samuel Krishna.**

soran, maka LSF tetap bekerja di kantor, karena penyensoran tidak bisa dilakukan di rumah. Yang menarik, saat pandemi C*ovid-19* ternyata tidak terjadi penurunan jumlah materi sensor. Bahkan sebaliknya, jumlah materi sensor lebih banyak. Walau kami tidak melakukan sensor film peruntukan bioskop, karena tidak boleh ada aktivitas menonton di sana, namun tontonan televisi dan media informatika meningkat pesat. Sebab, tontonan melalui jaringan internet menjadi alternatif hiburan terbaik, saat semua orang dibatasi untuk keluar rumah.

Pandemi Covid-19 membatasi masyarakat beraktivitas di luar rumah. Jalan umum dijaga sangat ketat bagi para pengendara. Pasca pelantikan, saya menjalankan tugas kantor dengan pulang pergi Jakarta-Subang, Jawa Barat. Awalnya, saya tinggal di sana karena ikut suami yang sedang menyelesaikan sebuah proyek.

Akibatnya, sejak Maret 2020, kami belum bisa kembali ke Jakarta, karena bagi yang datang dari luar kota, harus melalui proses yang sangat panjang. Termasuk dikarantina dengan waktu tertentu. Suatu hari, saat perjalanan ke kantor, dari Subang, saya diperiksa oleh petugas di jalan tol Cikampek, tepatnya di KM 50. Saya sempat meyakinkan petugas bahwa saya harus masuk kantor dengan tugas menyensor film dan iklan film, sesuai nama yang tertera pada surat tugas yang telah ditanda tangani Ketua LSF dan dikirim melalui email. Alasan petugas menolak kami adalah karena mereka tidak mau surat berupa file, tapi harus menunjukkan bukti fisik cetak. Terpaksa saya harus putar balik dan kembali ke Subang.



**Maksi bareng Wakil Ketua LSF Ervan Ismail (paling kiri), para Anggota LSF dan (paling kanan) Intan Isriana (Sekretariat LSF).**

Perjalanan yang lumayan jauh tapi sia-sia, akibat "petugas yang jadul amat, padahal sekarang zamannya elektronik." Sembari kembali ke Subang lagi, saya menelepon Pak Ervan selaku Wakil Ketua LSF, yang selalu *standby* di kantor, dan meminta bantuan untuk menggantikan penyensoran. Subang - Jakarta bukan jarak yang dekat untuk tiap hari pulang pergi, namun situasi dan kondisi itu harus dilalui, apalagi kebetulan saya memang suka jalan-jalan. Jadi punya kesan tersendiri.

Sebagai Sekretaris Komisi I LSF bidang Penyensoran, Dialog, Komunikasi dan Data, hampir setiap saat saya menerima "surat-surat cinta" terkait klasifikasi usia penonton film, dialog film dan lainnya. Dengan penuh tanggungjawab, kami mengupayakan merespon pemohon dengan secepat mungkin, sebagai salah satu standard pelayanan terbaik. Ketua Komisi I, Dr. Nasrullah, seorang ustadz yang



**Lima "Srikandi" LSF di dalam studio sensor memperingati Hari Kartini (Ki-Ka): Saptari Novia Stri, Roseri Rosdy Putri, Tri Widyastuti Setyaningsih, Hafidha dan Rita Sri Hastuti**

kocak, perwakilan dari Kementerian Agama, membuat ritme kerja kita selalu *happy* dengan capaian kerja yang memuaskan. Dalam proses penyensoran, kami mengedepankan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2014 tentang LSF. Pasal 25 menyebutkan bahwa penyensoran film dan iklan film dilakukan berdasarkan prinsip dialogis dengan pemilik film dan iklan film yang disensor.

Menyensor bersama tim yang terdiri dari anggota LSF dan tenaga sensor (TS) di studio sangat kompak. Sesuai amanat peraturan dan perundangan, film dan iklan film yang lulus untuk penayangan di khalayank umum, menjadi tanggung-jawab LSF. Maka dalam menyensor kami dengan seksama menilai dan menganalisis film dari pelbagai perspektif, untuk ditentukan penggolongan usianya. Dalam proses memutuskan klasifikasi terkadang sangat dinamis. Itu merupakan dinamika proses yang dapat menguatkan keputusan kami sebelum menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Ketika menyensor, situasi kebatinan kita juga dapat berubah-ubah, karena *genre* film yang ditonton sangat variatif. Usai menyensor film laga, kami bisa menyensor film horor, atau drama romantis, komedi dan lainnya. Semua film kami nilai dan analisis secara baik, karena selain sebagai regulator, kami juga harus memposisikan diri sebagai penonton (masyarakat), pelaku usaha dan pelaku kegiatan film.

Sebagai regulator, jelas kami menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Nomor

33/2009, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri dan lainnya. Sebagai perwakilan masyarakat, kami harus memastikan para penonton dapat menikmati film secara baik dan nyaman. Sebagai pelaku kegiatan film, kami harus dapat memahami keseluruhan film dari pelbagai perspektif. Kemudian, sebagai pelaku usaha perfilman, bagaimana film bisa dinikmati khalayak ramai dan mendapatkan jumlah penonton sebanyak-banyaknya, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Kehangatan dan kebersamaan tidak hanya dirasakan oleh sesama Anggota LSF. Dengan tenaga sensor, pejabat dan staf sekretariat, termasuk petugas kantor dan satpam, hubungan kami juga sangat dekat. Seluruh elemen merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dan mendukung, demi berjalannya roda organisasi dengan baik. *Branding*, *Organizing* dan *Developing* selalu diterapkan untuk menjaga




**Di "Warung Prihatin" - ruang kerja Pak Kuat Prihatin (Anggota) tempat ngopi dan ngerumpi asyik dengan Anggota LSF: Bu Titta, Bu Rita dan Mbak Wiwid.**

stabilitas organisasi yang visioner. Berkat kerjasama yang baik, LSF pun meraih posisi ketiga predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI pada 2022, untuk kategori Lembaga Negara. Dan, kemudian meraih peringkat kedua pada 2023.

Mengingat Lembaga ini tidak akan mengalami paripurna tugas, namun sebaliknya dengan gempuran media informasi yang semakin tidak bisa dibendung lagi, LSF terus melakukan langkah-langkah strategis dalam menjalankan fungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat, dari dampak negatif yang timbul aki-

bat peredaran dan pertunjukan film. Tentu dalam hal ini LSF tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait, sangat dibutuhkan. Dengan menggalakkan budaya sensor mandiri yang massif, diharapkan masyarakat semakin sadar untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Sehingga dapat mengoptimalkan dampak positif film sebagai salah satu sumber paradaban bangsa.

Ke depan, LSF tentu harus mampu menyesuaikan dengan melakukan reformulasi. Jika tidak, maka generasi bangsa tidak bisa dibendung lagi akan menjadi peniru ulung dari tontonan yang akan terus berkembang. Dalam hal ini, kami juga melakukan kunjungan ke beberapa negara, terutama yang film-filmnya diminati masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah Negeri Matahari Terbit, Jepang. Di sana kami melakukan *sharing* untuk meningkatkan wawasan dan informasi yang relevan mengenai penetapan klasifikasi usia untuk film maupun iklan film. Berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Jepang di Shinjuku,




**Menjadi Narasumber "Kompas TV" Bali di Denpasar, dalam rangka memperingati Hari Film Nasional, bersama Noorca M. Massardi dan host Permana Dewi.**

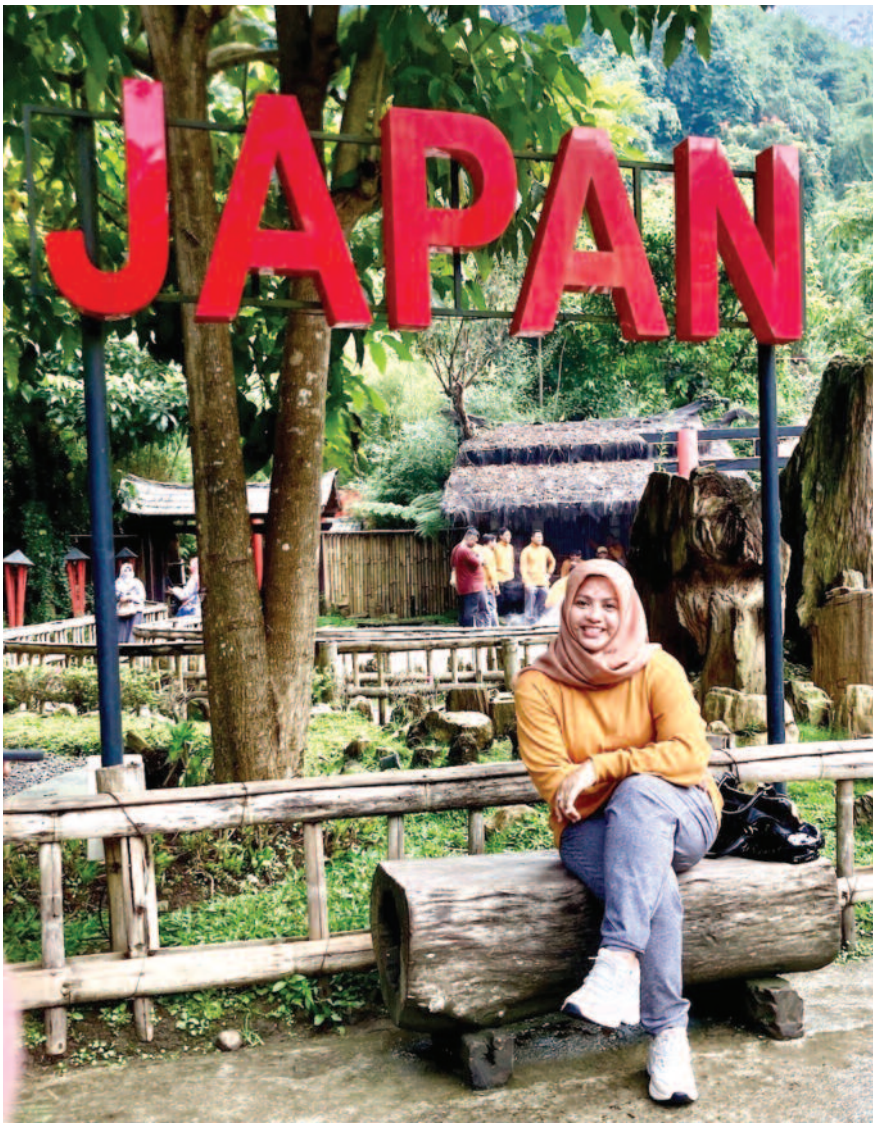


**Santai saat acara Outbound LSF di Lembang, Bandung.**

Tokyo, kami disambut hangat oleh Ny. Meinarti Fauzie sebagai Kepala Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya dan Prof. Yusli Wardiatno selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo. Berikutnya kami melanjutkan diskusi dengan pihak Japan Foundation di kantor pusatnya di Tokyo, serta dengan Eiga Rinri Kikoh (EIRIN). Setelah berdiskusi, kami sama-sama melihat studio penyensoran EIRIN. Ada beberapa ruang studio yang digunakan untuk melakukan penyensoran.




**Berbusana etnis dalam acara "Anugerah LSF 2023" di Studio Indosiar (Ki-Ka): Saptari Novia Stri, Rita Sri Hastuti, Roseri Rosdy Putri, Tri Widyastuti Setyaningsih, Hafidha.**

EIRIN merupakan organinsasi independen nonpemerintah yang bertanggung jawab atas penetapan klasifikasi dan *rating* film di Jepang, dan didirikan sejak 1956. Pada awalnya, EIRIN merupakan otoritas dari pemerintahan Jepang, namun kemudian berubah menjadi perusahaan swasta. Diskusi dengan EIRIN dipimpin Ishikawa Tomoharu (Direktur Utama, Sekretaris Jenderal EIRIN), Yoshihisa Imaida (Hakim/Komisioner EIRIN), dan Makoto Ozaki (Hakim/ Komisioner EIRIN).

EIRIN memiliki 14 orang fungsionaris yang terdiri dari 8 (delapan) anggota yang bertugas khusus dalam menentukan klasifikasi usia. Anggota tersebut dipilih

oleh dan dari pegawai di perusahaan besar (studio) film di Jepang, yang kemudian bekerja secara *fulltime* sebagai pegawai tetap di EIRIN. Anggota yang terpilih harus memiliki bekal kompetensi dan pengalaman di bidang perfilman, dengan batas usia maksimal 68 tahun. Sedangkan enam pegawai lainnya, bertugas sebagai staf keuangan, administrasi pendaftaran film dalam negeri/asing dan supervisor untuk mengkoordinasi administrasi secara keseluruhan.



**Dengan Christine Hakim**

EIRIN membagi klasifikasi usia film dalam empat kategori yaitu : G (General Audience), GP (General Public / Semua Umur), Parental Guidance (Penonton 12+), R 15+ Restricted (Penonton 15+), R 18+ Restricted (Penonton 18+). Kriteria penentuan klasifikasi usianya dilakukan berdasar 8 (delapan) elemen utama yaitu: Tema dan Subjek; Bahasa; Ekspresi Tindakan Seksual; Ketelanjangan; Ekspresi Kekerasan dan Kekejaman; Horor dan Ancaman; Narkotika dan Zat Adiktif; serta Kejahatan dan Pelanggaran. Dengan menekankan perhatian pada perilaku seks, tindak kekerasan dan kekejaman, NAPZA, kejahatan dan pelanggaran hukum. Di luar delapan elemen tersebut, ada ketentuan lain yang mengikat yaitu tentang adegan konsumsi alkohol, yang diberlakukan untuk penonton usia 20 tahun ke atas. Isu terkait LGBT tidak mendapat perlakuan khusus di Jepang, dibandingkan isu yang menyangkut suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Kunjungan tersebut sangat membantu bagi kami sebagai anggota LSF untuk terus melakukan perbaikan sesuai kebutuhan masyarakat, dan selalu menjunjung nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.



Dengan suami Aang Widayanto, dan putra Naresh Azfar Evano



## JATI DIRI:

**Nama Lengkap** : Hafidhah Farwa

**Tempat & Tanggal Lahir** :

Sumenep, 12 Agustus 1983

**Medsos** : IG : fidhafarwa Fb : Hafidhah Farwa

**Nama Orangtua** : Ayah : Mohammad Musfar
Ibu : Siti Munawaroh

**Suami** : Aang Widayanto

**Anak** : Naresh Azfar Evano

## RIWAYAT PENDIDIKAN

S1 : Universitas Islam Negeri (UIN) Malang
S2 : Universitas Negeri Surabaya (UNESA)Fellowship Adelaide University Australia

## RIWAYAT PENGALAMAN

Asisten Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat (2016-2019), Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pilkada Serentak bekerja sama dengan Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers (2017-2018), dan Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu (2019). Sempat menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, sejak dilantik sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Komisi I LSF RI (2020-2024) pada 8 Mei 2020, sementara menghentikan kegiatan mengajar, karena ingin fokus di LSF.

# RINGKASAN

## Hafidhah Farwa

Perempuan kelahiran Sumenep, Madura, Jumat, 12 Agustus 1983, yang akrab disapa Fidha, ini meraih gelar S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Malang (2006), lalu Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) (2010), dan kini tengah menempuh program Doktor pada bidang studi yang sama. Memeroleh beasiswa Special Course Student Flinders University, Australia (2015), sejak 2007 ia menekuni aktivitas akademik sebagai peneliti dan pengampu mata kuliah di Sekolah Tinggi Telematika (STT), serta di beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta.

Sebagai Asisten Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat (2016-2019), ia terlibat aktif dalam Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pilkada Serentak, bekerjasama dengan Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers (2017-2018), dan berlanjut sebagai Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilu (2019). Ia juga aktif di sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, antara lain, sebagai Ketua Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) Pusat, Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI), dan Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI). Sejak 8 Mei 2020, Fidha dilantik sebagai Anggota sekaligus Sekretaris Komisi I, LSF RI (2020-2024).




EMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

# Apresiasi Film & Program TV Sebagai Karya Seni

**Joseph Samuel Krishna**
Ketua Subkomisi Promosi dan Apresiasi

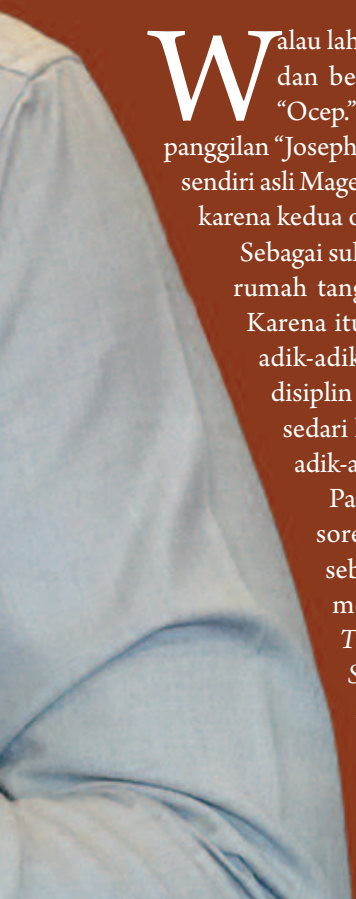

Walau lahir di Jakarta pada Rabu, 18 Mei 1983, namun karena tumbuh dan besar di Bekasi, Jawa Barat, saya mendapat nama panggilan "Ocep." Nama panggilan itu terasa akrab karena sama kerennya dengan panggilan "Joseph" atau "Josh," yang bukan nama asli orang Indonesia. Ayah saya sendiri asli Magelang, sedangkan Ibu dari Jakarta. Dan, saya diberi nama Joseph karena kedua orang tua saya penganut Katolik yang cukup taat.

Sebagai sulung dari tiga bersaudara, kendati di keluarga kami ada asisten rumah tangga, saya diberi tanggung jawab untuk menjaga adik-adik. Karena itulah saya merasa memiliki legitimasi untuk cerewet kepada adik-adik saya, terutama untuk urusan mengerjakan PR, hingga ke disiplin jam makan. Dan, karena kedua orang tua kami bekerja, maka sedari kecil saya sudah bisa dan biasa membuatkan makanan untuk adik-adik. Terlebih saat asisten rumah tangga kami pulang kampung.

Pada dasarnya saya adalah seorang *introvert*. Waktu kecil, pada sore hari saya memang sering bermain bersama teman-teman sebaya. Namun, saya lebih banyak memanfaatkan waktu untuk membaca komik, mendengarkan serial sandiwara radio *Tutur Tinular,* atau menonton rekaman video betacam seri televisi *Dai Sentai Goggle-V* (1982), produksi Toei Company's, sejenis *Power Rangers* pada masa sekarang.




**Podcast dengan narasumber: Hilmar Farid Ph.D, Direktur Jenderal Kebudayaan**

Akhir 1990an, ketika televisi swasta mulai bersiaran nasional, walau masih harus ditangkap dengan menggunakan *decoder*, saya mulai banyak menonton film melalui televisi. Untuk merasakan sensasi menonton film, selain dari TVRI, saya juga bertamu ke rumah teman untuk *nimbrung* menonton, karena saat itu belum banyak pemilik televisi yang menggunakan *decoder*. Seiring waktu, keluarga kami pun bisa menyaksikan film serial dari rumah sendiri, seperti *MacGyver, Tour of Duty,* atau *Miami Vice.* Sementara pengalaman menonton film di bioskop, sudah saya lakukan sejak masih di sekolah dasar, antara lain, menonton film-film *Warkop* dan *Saur Sepuh*.

Ihwal pendidikan, sebagian besar saya tempuh di Bekasi, Jawa Barat. Mulai dari Taman Kanak-kanak Maria Fransiska, SD dan SMP Strada Bhakti Wiyata, kemudian SMU Marsudirini. Baru saat menempuh S1 Hukum, saya kuliah di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat.

Sejatinya, saya tidak pernah terpikir untuk mengambil ilmu hukum sebagai bidang kuliah saya. Karena sedari kecil saya justru bercita-cita ingin menjadi pastor. Bahkan, selulus dari SMP, saya sempat mendaftar ke sekolah seminari, sebelum akhirnya saya urungkan niat itu dan memutuskan melanjutkan ke SMU.

Masa kuliah saya, saya selesaikan dalam empat tahun, tepat pertengahan 2005. Sebelum mendapatkan pekerjaan sesuai ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah, saya sempat bergabung dengan perusahaan *trading* valas. Walau jam kerja saya dimulai pagi dan berakhir sore hari, namun malam hingga dini hari adalah

perjalanan panjang untuk menonton berita luar negeri. Mengingat akun yang saya pegang dalam mata uang US$ Dollar, Swiss Franc, Yen Jepang dan Hongkong Dollar (HK$), maka apa pun yang terjadi di tingkat global, akan sangat berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing itu.

Pada awal 2006 saya diterima bekerja sebagai *corporate legal* di stasiun televisi swasta *TV7*, yang merupakan anak perusahaan Kelompok Kompas Gramedia (KKG), sebelum kemudian diakuisisi Transcorp dan berganti nama menjadi *TRANS7*. Saya ingat betul, tugas pertama saya adalah membantu manajemen untuk mananggulangi robohnya salah satu menara pemancar televisi. Suatu tugas yang luar biasa mendebarkan bagi seseorang yang baru lulus kuliah.

Adapun pekerjaan rutin saya saat itu adalah mempersiapkan pelbagai perjanjian yang diperlukan perusahaan, seperti sewa alat, *sponsorship,* serta perjanjian *talent* (kontrak artis) yang tampil dalam tayangan televisi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, dan 7 (tujuh) jam seminggu. Termasuk pengurusan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) program, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dengan artis atau pihak ketiga, terkait tayangan televisi.

Terkadang saya sering tersenyum ketika melihat nama-nama artis besar yang dulu pernah saya buatkan perjanjian *talent*-nya. Sebut saja nama Sule, Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, hingga band-band papan atas seperti Sheila On 7, Noah (sebelumnya: Peterpan) dan Dewa. Tidak hanya perjanjian dengan artis, sejumlah program juga dulu saya siapkan keperluan legalitasnya. Misalnya, *Bukan Empat Mata* (sebelumnya: *Empat Mata*), *OVJ, Jejak Petualang, Si Bolang,* hingga proses lahir kembalinya karakter si Unyil yang pernah berjaya pada 1980-an dalam program *Laptop si Unyil*. Salah satu pencapaian besar saya di *TRANS7* adalah pada 2009, yakni ketika saya terpilih sebagai *The Best Employee of TRANS7*. Pada akhir 2011, saya pun menyelesaikan pengalaman kerja saya sebagai *Legal Supervisor* di *TRANS7*.

Perjalanan karir saya di dunia televisi berlanjut ke *iNewsTV* (sebelumnya *SunTV*, dan berubah menjadi *SindoTV*), sejak akhir 2011. *iNewsTV* menjadi salah satu televisi berita di bawah naungan MNC Group. Latar belakang keilmuan saya kembali bermanfaat, ketika saya diangkat sebagai Head of Government Relation and Regulatory Affair. Di situ, saya harus banyak belajar, tidak hanya tentang hukum pertelevisian, tetapi meliputi dunia pertelevisian dari sisi bisnisnya, serta peran televisi sebagai media massa elektronik dan corong kebudayaan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi, jaringan *iNewsTV* pun dikembangkan. Bila semula hanya memiliki jaringan sebanyak 26 stasiun televisi, pada akhir 2018 bertambah menjadi 62 jaringan di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan kapasitas diri, sambil bekerja di *iNewsTV*, saya mengambil Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) untuk mendapatkan izin beracara. Dan, saya mengakhiri karir di *iNewsTV* pada Mei 2020, setelah dilantik sebagai

Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia periode 2020-2024.

Sebelum itu, pada pertengahan 2019, saya mendapat informasi ihwal adanya seleksi penerimaan Anggota LSF. Saya mengenal lembaga ini tidak sekadar saat menonton bioskop, tetapi juga karena tugas keseharian saya di televisi. Salah satunya adalah memastikan setiap program yang akan tayang, mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) terlebih dulu dari LSF. Sedikit banyak, saya sudah mendapatkan informasi mengenai hal-hal terkait penyensoran, seperti prosedur, biaya, dan proses waktunya. Adanya keterkaitan antara pekerjaan saya dengan LSF itulah yang menjadi salah satu faktor pendukung bagi saya untuk berganti haluan. Dari sebelumnya bekerja di perusahaan swasta, kemudian beralih kerja ke sebuah lembaga negara yang independen.

Setiap tahapan dalam proses menuju LSF, bagi saya, merupakan pengalaman yang mendebarkan. Mulai dari pengumpulan berkas administratif, menjalani tes demi tes, dipanggil wawancara oleh panitia seleksi, hingga akhirnya melakukan *fit and proper test* di Komisi I DPR RI. Semua itu merupakan sesuatu yang baru buat saya. Apalagi ditambah masa tunggu yang cukup lama yakni, sejak hasil pengumuman hingga jadwal pelantikan. Jadwal itu tertunda akibat terjadinya pandemi Covid-19, yang dinyatakan berlaku nasional sejak Maret 2020. Masa darurat itu merupakan masa-masa penantian tersendiri bagi saya. Deg … deg … an …

Awal Mei 2020, datang jugalah surat undangan pelantikan itu. Saya, bersama 16 rekan lainnya, tepat pada 8 Mei 2020, dilantik oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, sebagai Anggota LSF periode 2020-2024. *And the another journey begin…*

Dilantik sebagai Anggota LSF di tengah pandemi, merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Kami berdiri berjarak, menggunakan *green screen* sebagai latar belakang, mengikuti rangkaian seremoni, hingga akhirnya dilanjutkan dengan pembacaan sumpah atau janji. Walau dilakukan secara *online* atau daring (dalam jejaring), dan tanpa disaksikan oleh keluarga secara langsung, acara pelantikan tersebu tidak berkurang kekhusyukannya. Selesai kegiatan pelantikan, kami lanjutkan dengan rapat pleno perdana untuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan Ketua Subkomisi. Sesuai tradisi, Sidang Pleno pertama itu dipimpin Anggota paling senior, yakni Noorca M. Massardi, dan Anggota paling yunior, yakni Mukayat Al Amin.

Di dalam organisasi LSF, saya kemudian dipercaya menjadi Ketua Subkomisi Promosi dan Apresiasi. Tugas utamanya adalah mengatur "kampanye" LSF di media televisi dan radio, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan *Anugerah LSF*, sebuah ajang pemberian penghargaan kepada film, program televisi, eksibitor (penyelenggara pertunjukan film) seperti bioskop, televisi dan OTT, dan penghargaan kepada tokoh yang memenuhi kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh LSF.

Penyelenggaraan *Anugerah LSF* yang ketiga, dilakukan pada 2021, di tengah masa pandemi Covid-19. Dan itu merupakan *Anugerah LSF* yang perdana. Tidak




**Podcast dengan narasumber: Reza Rahadian dan Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto**

hanya bagi saya, tapi juga bagi Anggota LSF Periode 2020-2024. Dengan keterbatasan tatap muka akibat adanya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai kebijakan pencegahan penyebaran virus Covid-19, *Anugerah LSF 2021* pun diselenggarakan secara *hybrid*. Tayangan dilakukan secara *live delay* di salah satu stasiun televisi nasional, namun dapat disaksikan sacara *daring* melalui platform *youtube* dan *zoom*. Dan, itu tentu memberikan pengalaman tersendiri bagi saya. Seperti kata pepatah: "pengalaman adalah guru yang paling berharga," maka demikianlah yang saya alami.

*Anugerah LSF 2021* mengusung tema *Cerdas Memilah dan Memilih Tontonan*. Tema ini dipilih sebagai wujud implementasi dari Budaya Sensor Mandiri (BSM) yang sedang gencar disosialisasikan LSF, dan sekaligus diharapkan dapat memicu pola pikir positif masyarakat dalam mendukung BSM sehingga tercipta kesadaran masyarakat akan tontonan yang sesuai dengan penggolongan usia.

Dengan tema tersebut, *Anugerah Lembaga Sensor Film 2021* memberikan apresiasi bagi karya film, sinetron, iklan serta eksibitor yang memenuhi kriteria sensor mandiri dengan mengedepankan pendidikan, budaya, serta menjalankan fungsi, tujuan, asas film, dan memberi nilai tambah bagi film yang mendapatkan penghargaan. Selain itu, juga memberikan motivasi agar produksi perfilman semakin baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

**15 KATEGORI PENGHARGAAN ANUGERAH LSF 2021**

Film Bioskop Semua Umur (SU)
Film Bioskop 13 tahun ke atas (13+)
Film Bioskop 17 tahun ke atas (17+)
Film Animasi
Sinetron
Iklan Peduli Pandemi
TV Peduli Pendidikan
TV Peduli Kebudayaan
TV Peduli Nasionalisme dan Kebangsaan
TV Peduli Dokumenter Indonesia
TV Peduli Sensor Mandiri
Bioskop Peduli Sensor Mandiri
Rumah Produksi Sadar Sensor
TV Lokal Sadar Sensor
*Lifetime Achievement*

Pada *Anugerah LSF 2021* terdapat satu kategori tematik yang sesuai keadaan global saat itu, yaitu Kategori Iklan Peduli Pandemi. Melalui kategori itu, LSF memberikan penghargaan pada iklan yang secara masif dan menarik, memberikan sosialisasi mengenai prosedur kesehatan dalam menghadapi Covid-19.

Dalam kurun empat bulan sejak ditetapkan SK Kepanitiaan *Anugerah LSF 2021*, tim kurator yang terdiri dari Tenaga Sensor melakukan kurasi materi untuk menentukan nominasi peraih anugerah semua kategori. Penjurian dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah melakukan kurasi materi menjadi 5 (lima) *nominee* pada masing-masing kategori. Tahap kedua adalah penetapan peraih anugerah dari setiap kategori. Dalam melakukan penilaian, Juri *Anugerah LSF 2021* terdiri dari 17 Anggota LSF, dengan latar belakang masing-masing. Dengan demikian, perbedaan status, gender, pendidikan, pengalaman, bakat, dan profesi setiap anggota itu semakin memperkaya penilaian dalam menentukan peraih anugerah setiap kategori.

**PERAIH ANUGERAH LSF 2021 PER KATEGORI**

Film Bioskop SU: *Doremi & You* - Produksi PT Kerja Baik Kreatif
Film Bioskop 13+: *Ati Raja* - Produksi PT Tujuh Delapan Enam
Film Bioskop 17+ : *27 Steps of May* - Produksi Green Glow Pictures

Film Bioskop Animasi: *Riki Rhino* Produksi Batavia Pictures
Iklan Peduli Pandemi: *ILM Korlantas Muter Dikit* Produksi PT Ratu Media Visual
Sinetron: *Tukang Ojek Pengkolan* Produksi MNC Pictures
TV Peduli Pendidikan: TRANSTV
TV Peduli Kebudayaan: INDOSIAR
TV Peduli Nasionalisme dan Kebangsaan: TVONE
TV Peduli Dokumenter Indonesia: KOMPAS TV
TV Peduli Sensor Mandiri: ANTV
Bioskop Peduli Sensor Mandiri : 21 Cineplex (XXI)
Rumah Produksi Peduli Sensor Mandiri: MNC Pictures
TV Lokal Peduli Sensor Mandiri: DAAI TV
*Lifetime Achievement*: Christine Hakim

Berkat pengalaman bekerja di televisi dan banyak terlibat dalam penyelenggaraan *event on air* maupun *off air,* saya cukup memiliki bekal dalam persiapan *Anugerah LSF 2021*. Kerjasama yang sangat baik antara seluruh tim LSF dengan televisi penyelenggara, menghasilkan acara *Anugerah LSF 2021* yang sangat sukses. Bahkan mendapatkan *share* dua digit menurut perhitungan AC Nielsen, sebuah angka *share* yang terbilang tinggi untuk pelaksanaan acara serupa.

Saat tulisan ini dibuat, kami tengah melakukan pengumpulan materi, penjurian hingga proses penyusunan acara Anugerah LSF 2023 (yang keempat). Pada Anugerah LSF 2023 ini, selain kategori yang sudah ada, LSF menambahkan lima kategori baru sehingga totalnya menjadi 20 kategori.

**LIMA KATEGORI BARU ANUGERAH LSF 2023**
Iklan Komersial Bangga Budaya Bangsa
TV Berjaringan Bermuatan Lokal
OTT Peduli Sensor Mandiri
FTV
Kepala Daerah Peduli Sensor Mandiri

Lantas, apa yang menjadi rutinitas harian di LSF? Menyensor. Proses penyensoran film dan iklan film dilakukan oleh Kelompok Penyensor, yang terdiri dari Anggota dibantu Tenaga Sensor. Penyensoran selalu dilakukan pada jam kerja. Di sinilah letak kenikmatannya. Kami menjadi "penonton" perdana sebelum film dan iklan film itu ditayangkan ke khalayak umum. Baik di bioskop, di lembaga penyiaran televisi, maupun di jaringan informatika.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, LSF




**Kunjungan ke Korea Media Rating Board**

menentukan penggolongan atau klasifikasi usia dalam empat batasan umur. Pertama, semua umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+) dan 21 tahun ke atas (21+). Dan, selama periode ini, tidak pernah ada keraguan bagi kami dalam meneliti, menilai dan akhirnya memutuskan penggolongan usia tertentu, untuk setiap materi film dan iklan film yang disensorkan. Khususnya yang akan ditayangkan di bioskop.

Namun tidak demikian untuk tayangan film / iklan film yang akan dipertunjukkan di lembaga penyiaran televisi. Sebagai lembaga penyiaran, televisi tunduk pada Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 47 UU 32/2002 itu menyebutkan bahwa "Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang". Artinya, selain mengacu kepada Undang-undang tentang Penyiaran, stasiun televisi pun terikat pada tata cara dan persyaratan penyensoran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 33/2009 tentang Perfilman dan peraturan turunannya.

Dinamika dapat terjadi karena adanya perbedaan klasifikasi usia antara Undang-undang tentang Perfilman dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) tahun 2012 yang dikeluarkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam Undang-undang tentang Perfilman, klasifikasi usia dewasa adalah 17+ (tujuh belas tahun ke atas) dan 21+ (dua puluh satu tahun ke atas). Sementara dalam P3SPS KPI, klasifikasi usia dewasa dimulai pada usia 18+ (delapan belas tahun ke atas).

Untuk mengatasi perbedaan klasifikasi usia tersebut, tentu diperlukan kesepahaman dan persamaan persepsi antara LSF, KPI dan pihak televisi, agar tidak menimbulkan kebingungan. Tidak hanya bagi pemilik materi film / iklan film, atau lembaga penyiaran televisi, tetapi juga bagi masyarakat pemirsa televisi.

Sebagai salah seorang Anggota LSF termuda (kelahiran 1983), saya tentu harus lebih mawas diri dan bijak dalam berinteraksi dengan sesama Anggota. Terlebih lagi rekan-rekan saya ini adalah para ahli di bidangnya, dengan latar belakang pendidikan yang tidak main-main. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka sudut pandang kami dalam menilai film / iklan film pun tentu berbeda. Memang dalam beberapa kesempatan, hal itu bisa menimbulkan dinamika yang menarik, namun seringkali perbedaan itu justru sangat memperkaya pandangan lembaga terhadap suatu film / iklan film yang disensorkan.

Saat ini, mungkin LSF adalah satu-satunya Lembaga Negara di Indonesia yang




**LSF pada Broadcasting Expo 2022**




**Sosialisasi BSM di Kep. Bangka Belitung**

paling banyak komisioner (anggota)-nya. *Fun fact*-nya dari kami bertujuh belas, lima orang berasal dari generasi milenial, dan 12 anggota lainnya, yang notabene lebih senior dari saya, ternyata juga tidak kalah "milenial"-nya. Yang menyenangkan, di LSF kami sepakat untuk berbusana dengan *style* yang lebih dekat dengan gaya para insan perfilman dan pertelevisian, agar terhindar dari kesan "terlalu birokratis". Jadi, kami terbiasa menggunakan alas kaki *sneakers* yang dipadupadankan dengan celana jeans, atau atasan *turtle neck* ditambah *blazer* agar tetap terlihat formal sekaligus *smart casual*. Tentu saja di luar busana resmi batik, jas, atau seragam LSF.

Ihwal pengalaman berinteraksi satu sama lain, baik dengan sesama Anggota, dan Tenaga Sensor (TS) maupun dengan Sekretariat LSF, yang paling menarik adalah, di sela-sela selesai penyensoran dan rapat, kami selalu menyempatkan waktu untuk bercengkrama di ruang salah seorang anggota, Pak Kuat Prihatin, yang berasal dari unsur Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Ruangan itu kami beri nama "Warung Prihatin." Mungkin ruangan Pak Kuat itu adalah ruang teramai dan terpenuh, mengingat di situlah kami selalu berbincang hal ihwal yang sifatnya non formal dan non *jobdesc*. Pembicaraan makin hangat bila datang suguhan berupa kudapan jajan pasar yang hampir setiap hari dibawa Ibu Saptari



**Naik angkot, siapa takut??**

Novia Stri, Anggota yang juga berasal dari Kemendikbudristek, serta buah-buahan sehat dari "Mbak Wiwid" Setyaningsih, Anggota dari unsur masyarakat, ataupun oleh-oleh yang dibawa rekan-rekan kami yang kebetulan pulang dari perjalanan dinas. Intinya, "Kalau enggak ada Warung Prihatin *enggak* ramai … !"

Semakin mendalami tugas di LSF, saya kian bisa menikmati film sebagai karya seni. Sebelumnya, saya bukan orang yang *freak* untuk menyaksikan film-film yang baru rilis di bioskop. Dalam setahun, mungkin hanya dua hingga tiga kali saya menonton bioskop. Itu pun dengan *genre* tertentu: film perang dan film *action,* khususnya yang bertema mata-mata atau spionase. Saat itu saya hanya setia pada dua *genre* itu. Saya jenis orang yang setia menunggu suatu film ditayangkan di tv kabel atau di televisi, walau sudah tidak menjadi *trending topic* lagi. Dapat dibayangkan bahwa pihak televisi tentu baru akan membeli hak penayangannya setelah film itu tidak lagi ditayangkan di bioskop. Harganya pun pasti sudah lebih terjangkau bagi stasiun televisi.



**Menjadi salah satu peserta dialog pakar**

Pola pikir dan kegemaran saya pun akhirnya berubah. Sejak bekerja di LSF, setiap hari kami meneliti dan menilai banyak film, program televisi, dan iklan yang disensorkan ke LSF, untuk memperoleh surat tanda lulus sensor (STLS), agar dapat ditayangkan ke khalayak umum. Itu adalah bagian dari pekerjaan kami sebagai anggota LSF. Sehingga, saya yang semula hanya menyukai *genre* perang dan spionase, lambat laun mulai tertarik pada *genre* komedi bahkan *horror* dan *thriller*. Sesuatu yang sebelumnya saya hindari. Sebab, dulu saya berpikir, *ngapain* mengeluarkan uang untuk menonton film dan membeli jajanan di bioskop, kalau hanya untuk ditakut-takuti. Kemudian, saya yang semula selalu setia menunggu film bioskop ditayangkan di televisi, akhirnya malah lebih sering menonton di bioskop. Setidaknya dua kali dalam sebulan saya menonton ke bioskop, baik

karena menghadiri undangan gala *premiere* film, maupun untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga.

Lain halnya dengan program televisi. Sebelumnya, hampir 15 tahun saya bekerja di televisi dengan fokus utama bukan pada program televisi, melainkan dalam aspek pendukung bisnis pertelevisiannya. Seperti dari sisi legal, *regulatory*, perizinan penyiaran, hingga *event* yang diselenggarakan stasiun televisi. Sejak di LSF, saya jadi semakin memperhatikan dan menghargai program televisi sebagai suatu karya seni. Ya, walaupun program televisi mungkin tidak sekompleks film, namun buat saya, itu adalah karya seni juga yang perlu diapresiasi. Saya yang sebelumnya hanya menonton program *hard news*, *soft news* dan *documentary*, sekarang jadi belajar untuk melihat, menikmati, sekaligus meneliti dan menilai sinetron, FTV, hingga program-program *reality show*. Sebagai informasi, semua program televisi memang disensorkan ke LSF, kecuali program jurnalistik dan tayangan *live*.



**Menjadi salah satu pemateri di Sosialisasi BSM**

Salah satu *fun fact* lainnya di LSF, khususnya di dalam studio sensor adalah menjelang siang. Materi sensor yang selalu saya tunggu adalah program kuliner dari televisi. Menariknya, hampir setiap stasiun televisi memiliki program kulineran dengan gaya masing-masing. Nah, program tersebut selalu kami tunggu, karena dapat menggugah selera makan. Tampilan makanan dalam isi program itu menjadi rujukan bagi kami mau makan apa siang itu. Teng! Ketika jarum jam



**Menyempatkan ikut beberapa race half marathon sebagai salah satu hobby.**

menunjukan angka pukul 12.00, kami pun sudah tahu mau makan apa siang itu!

Saat ini kita melihat tontonan, khususnya film, yang begitu beragam. Baik *genre* maupun media penayangannya. Semula, kita hanya menonton film di bioskop, televisi dan cakram digital. Tapi sekarang, kita dapat menyaksikannya melalui layar komputer, telepon genggam, tablet, atau gawai lainnya, dengan kualitas layar dan suara yang terbilang sangat baik. Banyaknya variasi *genre* dan media penayangan film, itu telah memanjakan para penikmat film. Namun sayangnya, masih banyak penikmat film yang menonton film bajakan, baik melalui *link* internet maupun cakram digital bajakan.

Bagi saya, film adalah karya seni yang tidak dapat dihasilkan secara instan. Selain biayanya tidak murah, membuat film juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Baik dari ide, cerita, dan skenario, juga terkait honor para pemain, honor kru, anggaran produksi, bahkan biaya promosinya. Itulah sebabnya, kita harus lebih menghargai film, dengan tidak menonton film bajakan. Apapun *genre* filmnya. Apakah itu *action*, komedi, *thriller*, perang, maupun horror, semuanya layak untuk diapresiasi. Dengan menonton film yang orisinal, selain kita menghargai karya seni, juga merupakan bentuk apresiasi kita terhadap artis, sineas, dan insan film yang terlibat di dalamnya. Harapan saya, semoga penegakan hukum di Indonesia terhadap pelanggaran pembajakan film, dapat dilaksanakan secara lebih tajam dan lebih tegas.

Salah satu tugas kami adalah melakukan sosialisasi tentang Budaya Sensor Mandiri (BSM), menginisiasi pembentukan Desa Sensor Mandiri, dan melakukan literasi tentang hukum mengenai pentingnya karya film / iklan film memiliki STLS (Surat Tanda Lulus Sensor). Kegiatan-kegiatan itu kami lakukan baik secara *daring* (dalam jaringan) melalui *webinar* maupun secara *luring* (luar jaringan), dengan melakukan kunjungan ke pelbagai kota yang memiliki komunitas perfilman dan televisi lokal.

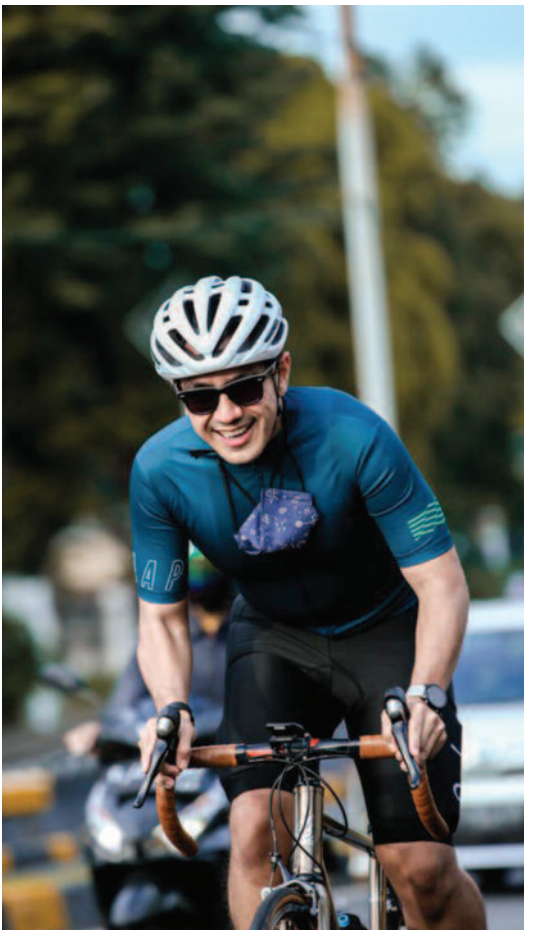

**Bersepeda dan lari olahraga yang saya gandrungi.**

Hal yang menarik adalah, bagaimana kesan pertama rekan-rekan yang kami temui di pelbagai kota di Indonesia, terhadap tugas fungsi dan keberadaan LSF. Banyak yang masih memiliki persepsi bahwa LSF adalah "tukang gunting" film. Tetapi setelah diskusi selama beberapa saat, akhirnya muncul pemahaman baru bahwa, LSF saat ini bukanlah "tukang gunting film" dan bukan pula sosok yang berada di tengah-tengah antara film dengan penonton, serta bukan merupakan lembaga yang menghalangi atau memasung kebebasan berkarya dan berekskpresi.

LSF dalam paradigma baru saat ini adalah sebuah lembaga yang hanya menggolongkan film sesuai klasifikasi umur (calon) penonton, mulai dari SU, 13+, 17+ sampai 21+. Kalaupun para pemilik film berkeberatan terhadap penggolongan usia yang telah ditetapkan LSF melalui penerbitan STLS (surat tanda lulus sensor), para pemilik film yang bersangkutan masih dapat melakukan "banding." Pemilik film dapat mengajukan permohonan dialog, dan memberikan argumentasi serta menyampaikan keberatan terhadap rekomendasi atau

penggolongan usia yang telah ditetapkan LSF. Dengan demikian, dalam melakukan penyensoran, LSF selalu mengutamakan prinsip dialogis. Dan LSF sekarang, sebagai lembaga, sudah berada di samping, bahkan duduk bersama penonton, untuk memberikan tuntunan dalam menonton, serta membantu penonton dalam memilah dan memilih film sesuai klasifikasi usia.

Budaya Sensor Mandiri yang dikampanyekan secara nasional oleh LSF, sejatinya merupakan gerakan yang positif dan semestinya dapat berlanjut, bahkan pada era LSF berikutnya. Sebagai seorang ayah, saya tidak ingin anak saya menonton tayangan yang tidak sesuai dengan usianya. Pembatasan itu tentu tidak bisa dilakukan secara paksa, namun perlu ditumbuhkembangkan sebagai kesadaran individu dari dalam. Harapan saya, siapapun yang melanjutkan tongkat estafet keanggotaan LSF, dapat terus menggemakan gerakan ini, dengan disertai pembaruan sesuai perkembangan zaman.

Selain itu, mengingat perkembangan media massa dan media sosial yang demikian pesat saat ini dan ke depan, kata "sensor" mungkin merupakan kata yang dianggap "kurang ramah" pada era demokrasi. Kata "sensor" cenderung diartikan sebagai pengekangan dan pembatasan kebebasan berekspresi. Saat berdialog dengan para pelaku perfilman dan komunitas perfilman, awalnya terkesan betapa rekan-rekan di dunia perfilman sangat berjarak dalam melihat keberadaan LSF. Seperti ada "jurang pemisah" yang tidak dapat terseberangi di antara kedua pihak. Apalagi, LSF merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 33/2009 tentang Perfilman, dan menggunakan kata "sensor" di dalamnya.

Sekalipun dalam setiap diskusi atau dialog tercipta pemahaman dari para pelaku dan pegiat perfilman tentang tugas dan wewenang LSF, yakni sudah menjadi lembaga penggolongan usia atas setiap materi tayangan yang disensorkan, tetap saja kata "sensor" dalam Lembaga *Sensor* Film itu tidak dapat dihilangkan. Sebab, demikianlah bunyi yang sudah tertulis dalam undang-undang. Sementara kita semua pasti paham, tentu butuh waktu yang tidak singkat untuk merevisi sebuah undang-undang.

Ke depannya, akan menarik apabila dalam revisi undang-undang tentang perfilman, itu dilakukan *exercise* untuk mengubah konsep "sensor" menjadi penggolongan / klasifikasi usia atas film. Akan tetapi, apakah setiap film yang masuk ke lembaga itu hanya akan langsung diberikan klasifikasi usia? Tentu tidak! Setiap materi yang disensorkan wajib diteliti dan dinilai. Mulai dari judul, tema, gambar, adegan visual, dialog/monolog, suara dan teks terjemahan, serta hal-hal lain yang terkait. Namun proses sensor itu bukan untuk melakukan revisi melainkan untuk menentukan kelayakan tayangnya di khalayak umum, dan untuk menetapkan klasifikasi usia penontonnya. Tentu hal ini akan berjalan maksimal bila diiringi peningkatan kesadaran dan budaya masyarakat, dalam memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.

## JATI DIRI:

**Nama lengkap**:
Joseph Samuel Krishna Agung Aditya
**Tempat / Tanggal Lahir**:
Jakarta, 18 Mei 1983
**Nama Orangtua**: Nicklaus Soegito & Brenda A
**Nama Istri**: Yulianti Aina
**Nama Anak**: Gwen Honey Aditya
**Medsos**: IG: joshsamueloffcial

## RIWAYAT PENDIDIKAN

**1989**: Taman Kanak-kanak Maria Fransiska
**1995**: SD Strada Bhakti Wiyata
**1998**: SMP Strada Bhakti Wiyata
**2001**: SMU Marsudirini
**2005**: FH Universitas Tarumanegara
**Gelar**: S1 Ilmu Hukum



# RINGKASAN
## Joseph Samuel Krishna

Lahir di Jakarta, Rabu 18 Mei 1983, tumbuh besar di Bekasi, membuatnya biasa dipanggil "Ocep", walau panggilan "Joseph / Josh" sedari kecil digunakan sejak sekolah. Ayah asli Magelang, sedangkan Ibu dari Jakarta. Anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara ini menjadi penikmat film sejak usia sebelum sekolah. Film yang masih menjadi kenangan hingga sekarang adalah serial televisi Dai Sentai Goggle-V (1982), produksi Toei Company's, sejenis Power Rangers pada masa sekarang. Seiring waktu, ketika decoder mulai diperkenalkan ke masyarakat, dan bertambahnya siaran televisi swasta nasional serta banyaknya bioskop di Jakarta, kian banyak tayangan yang hingga sekarang masih terekam di memori seperti Warkop, Saur Sepuh, MacGyver, Tour of Duty dan Miami Vice.

Menghabiskan waktu sekolah lebih banyak di Bekasi, mulai dari TK Maria Yashinta, SD dan SMP Strada Bhakti Wiyata hingga SMA Marsudirini, aktivitas di Jakarta baru dimulai ketika kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Lulus sebagai sarjana hukum menjadi modal keja sebagai legal officer di salah satu stasiun televisi besar di Jakarta, sebelum kemudian pindah ke grup stasiun televisi lain untuk menambah pengalaman dan mengembangkan diri. Menjabat sebagai Head of Government Relation and Regulatory Affair di stasiun televisi, membuat akrab dengan Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai salah satu stakeholder di bidang perfilman dan pertelevisian. Itulah awal mula ketertarikan pada LSF hingga pada 2019 ikut mendaftar seleksi anggota LSF periode 2020 – 2024. Puji Syukur, pada Mei 2020 dilantik menjadi Anggota LSF (2020-2024) dengan posisi sebagai Ketua Subkomisi Promosi dan Apresiasi LSF. Tugas utamanya adalah melakukan promosi lembaga di pelbagai media, khususnya televisi dan radio, serta menjadi penanggung jawab penyelenggaraan "Anugerah LSF" yang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.



# Dari Birokrat ke Lembaga Sensor Film

**Kuat Prihatin**
Ketua Subkomisi Penelitian
Dan Pengkajian

Saya lahir pada Ahad, 4 Mei 1969 di Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sebagai anak bungsu dari sembilan bersaudara. Krendetan adalah desa kecil di perlintasan jalan antara Purworejo – Jogjakarta, yang posisinya saat ini berjarak sekitar 10 kilometer dari dan ke Bandara Internasional Jogjakarta, Kulonprogo. Karena itulah dalam hati saya membatin, jangan-jangan bandara baru itu sejatinya memang khusus dibangun untuk masyarakat Purworejo, bukan untuk warga Jogjakarta he he he...

Nama saya Kuat Prihatin. Itu memang cukup unik. Karena tidak akan pernah ada orang lain yang punya paduan nama persis seperti nama saya. Bahkan bila diketik di mesin pencari *google* pun pasti tidak akan ketemu. Dan, yang lebih unik lagi adalah, saya sendiri baru tahu nama lengkap saya Kuat Prihatin, justru saat saya mau masuk sekolah dasar. Padahal, sampai saya berdiri di depan pintu sekolah, setahu saya, nama lengkap saya adalah Yatin Teguh Raharjo. Sehari-hari pun, sejak saya kecil, nama panggilan saya adalah Yatin. Rupanya, nama Kuat Prihatin itu pemberian dari Nenek saya, yang langsung dilaporkan ke Catatan Sipil Kantor Kelurahan. Sehingga, nama itulah yang kemudian tercatat di akte kelahiran, dan yang harus selalu tercantum dalam semua dokumen pribadi



Bangga dengan blangkon, di Tokyo, Jepang, November 2022



Literasi dan Edukasi Hukum, di Kendari Mei 2023

maupun Negara. Sementara nama Yatin Teguh Raharjo, ternyata hanya pemberian dari paman saya. Mengingat, waktu saya lahir, Ayah kandung saya sudah meninggal dunia. Makanya sebagai doa, paman memberi nama Yatin Teguh Raharjo, yang artinya anak yatim yang prihatin, teguh, dan sejahtera. Namun, nama itu tidak pernah dicatatkan di dalam dokumen kelahiran. Kalah pamor sama nama pemberian Nenek, yang artinya juga hampir sama.

Jadi bisa dibayangkan, betapa *irked* atau aneh dan ganjilnya kejadian itu. Selama enam tahun saya menghirup udara di dunia desa, sampai hari saya berdiri di depan pintu sekolah, saya selalu menyandang nama Yatin Teguh Raharjo. Tapi begitu saya melangkah melewati pintu itu, lalu saya diabsen, nama saya pun langsung berubah menjadi Kuat Prihatin. Dan, perubahan itu dilakukan tanpa sepengetahuan saya, juga bukan karena keinginan saya. Sehingga, bila sebelum masuk ruangan kelas itu saya adalah diri saya sendiri, namun begitu masuk dan berdiri di dalam ruang kelas, saya sudah bukan saya yang dulu lagi. Nama baru saya pun terasa menjadi *alien,* atau makhluk asing yang merasuk ke seluruh tubuh saya. Untung saat itu, *gen, DNA* dan *antibody* saya, tidak melakukan penolakan terhadap nama yang baru dicangkokkan itu. Saya seperti menikmati metamorfosa menjadi tokoh super Kuat di "Prihatin *verse*." Kalau tidak, pasti saya akan mengalami demam tinggi, dan harus segera bikin

kenduri, upacara ganti nama, dengan bubur merah bubur putih he he he…

Dalam keseharian, saya memang suka bercanda dan ngebanyol. Dan banyolan itu sering kali keluar secara spontan. Bahkan saat saya sedang serius. Bagi saya, bercanda dan *"mbanyol"* itu merupakan ekspresi kegembiraan, sekaligus sebagai cara saya untuk bisa keluar dari suasana kaku, dan menjadi semacam "*ice breaker*". Jadi, suatu kebahagiaan bagi saya, bila saya bisa membuat teman-teman tertawa. Walau sebenarnya saya juga bisa serius, apalagi ketika dihadapkan pada tenggat waktu penyelesaian pekerjaan. Namun demikian, tetap saja suasana itu tidak menghilangkan selera bercanda saya. Sementara saya sendiri sebenarnya takut kalau sampai disebut lucu, karena kalau saya lucu nanti bisa dibeli orang. Kok bisa? Karena anak-anak gadis sekarang, sering membeli sesuatu hanya karena sesuatu itu mereka rasa atau mereka anggap lucu. Bukan karena sesuatu itu memang indah, bagus, atau murah… !

Karena lahir dan besar di desa, maka masa kecil saya pun dilalui dengan melakukan berbagai aktivitas sebagaimana anak-anak desa pada umumnya. Akrab dengan aneka permainan tradisional seperti *patil lele* (ada yang menamai bentik), petak umpet, ular naga, permainan dengan kartu bergambar wayang dan lain sebagainya. Termasuk tentu saja, bermain sepak bola di jalanan. Aktivitas khas anak desa lainnya yang saya lakukan adalah membantu pekerjaan orang tua di sawah. Membersihkan gulma yang disebut *"matun"*, menunggu padi, sampai bersama buruh melakukan *"derep"* atau memanen padi. Setiap aktivitas itu saya lakukan dengan riang gembira dan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Mungkin juga berkat pengaruh nama baru saya yang harus selalu kuat dalam keprihatinan.

Ada kebiasaan yang dilakukan warga saat panen padi di sawah. Tempat yang padinya sedang dipanen, akan didatangi para penjual makanan dan minuman, seperti gorengan dan dawet. Para penjual makanan itu pada umumnya melakukan praktik jual beli dengan sistem barter. Satu mangkok dawet bisa ditukar dengan satu ikat kecil padi. Proses itu disebut dengan "*ngurup*". Belakangan baru saya tahu bahwa *ngurup* itu mungkin berasal dari kata "*corrupt*" atau korup, satu pengertian yang sama dengan korupsi pada saat ini, yakni mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Sebab, padi yang ditukarkan itu sejatinya memang milik yang punya sawah dan bukan milik penderep/penggarap.

Melakukan *ngurup* saat itu biasanya sudah diketahui dan diizinkan para pemilik sawah. Bahkan tidak jarang pemilik sawah yang mengundang penjual dawet, agar berjualan di area sawahnya yang sedang dipanen. Sehingga, *ngurup* itu menjadi sah dan halal. Sementara, sistem pengupahan dari pemilik sawah kepada para penderep, dilakukan dengan mekanisme bagi hasil. Biasanya para penderep diberi seperenam dari total padi yang didapatkan. Tetapi hal itu juga tergantung dari

sikap pemilik sawahnya. Ada juga yang memberikan sepertujuh, bahkan seperdelapan. Pada saat ini, sebagian besar panen padi sudah dilakukan dengan mesin, tetapi melalui mekanisme bagi hasil atau borongan.

Aktivitas lain yang tidak kalah menggembirakan adalah mencari kayu bakar. Karena hal itu bisa dilakukan sambil bermain dan mencari buah-buahan, seperti jambu biji atau jambu mede. Untuk jambu mede, tidak hanya dagingnya yang dimakan, tetapi juga bijinya. Yang menjadi masalah adalah, getah atau minyak yang ada pada kulit biji jambu mede sangat keras dan bisa menimbulkan luka *"dadak"* apabila terkena kulit. Untuk menghilangkan getah pada kulit, jambu mede biasanya cukup diusapkan ke rambut atau telapak kaki, sehingga tidak jarang rambut anak-anak berbau getah kulit biji jambu mede.

Ada satu insiden yang pernah saya alami saat mencari kayu bakar. Ceritanya, pada waktu itu di suatu kebun, saya dan teman saya diizinkan mengambil pelepah kelapa kering, yang masih menempel di pohon kelapa. Setelah saya memanjat di ketinggian, mungkin karena capek atau lemas mengingat sedang berpuasa, terlepaslah tangan saya dari pegangan. Saya pun langsung jatuh dari pohon kelapa yang tingginya kurang lebih 10 meter itu. Gedubrak. Alhamdulillah, tidak ada cedera serius, meskipun saya kemudian harus dirawat lima hari di rumah sakit.

Perkenalan saya dengan tontonan di televisi dimulai sekitar 1974, saat ada tetangga yang membeli televisi hitam putih. Mulai saat itulah menonton acara televisi menjadi menu wajib setiap hari. Biasanya, kegiatan menonton televisi dilakukan sepulang dari mengaji atau pada hari Minggu pagi. Pada saat itu tidak ada pilihan acara atau pilihan stasiun televisi, karena hanya ada satu stasiun televisi publik yaitu TVRI (Televisi Republik Indonesia). Sehingga acara apapun yang ditayangkan, akan ditonton dan dinikmati, mulai dari warta berita, ramalan cuaca, maupun film. Semua anak di kampung saat itu sudah hapal jadwal acara televisi, jam berapa dan hari apa ditayangkan.

Acara televisi terfavorit pada masa itu antara lain: *Ayo Menyanyi* bersama Ibu Sud, *Ayo Menggambar* bersama Pak Tino Sidin, *Boneka Si Unyil*, acara musik *Aneka Ria Safari*, kuis *Berpacu dalam Melodi*, acara olah raga *Dari Gelanggang ke Gelanggang* dan sebagainya. Namun, ada satu acara yang sangat ditunggu seantero negeri, bahkan dunia, yaitu siaran langsung pertandingan akbar antara Juara Dunia Tinju Kelas Berat George Foreman versus penantang Muhammad Ali, pada 30 Oktober 1974.

Diselenggarakan di May Stadium, Kinshasa, ibukota Zaire (sekarang Kongo), Afrika Barat Daya, pertandingan yang dikenal sebagai "Gemuruh di Tengah Hutan" (*Rumble in the Jungle*) itu sangat fenomenal. Sebab, tiga tahun sebelumnya, Ali harus melepaskan gelar juara dunianya kepada petinju muda Joe Frazier, yang mengalahkannya di New York, Amerika Serikat, Maret 1971. Sementara pada



**Bersama Tim LSF, dalam kunjungan ke EIRIN, LSF-nya Jepang, November 2022**

1974 itu Ali sudah berusia 32 tahun sedangkan Foreman yang belum pernah terkalahkan, masih berusia 25 tahun. Suatu pertandingan tak seimbang yang secara teori sulit dimenangkan Ali. Namun berkat strategi *rope a dope* - bersandar pada tali - Ali terus bertahan mengandalkan tali pembatas, dan mau menerima pelbagai pukulan Foreman, sampai lawannya lelah kehabisan tenaga. Nah, pada detik-detik terakhir Ronde kedelapan, Ali akhirnya mampu menyarangkan pukulan balasan yang sangat kuat, hingga Foreman jatuh dan KO *(Knockout)*! Maka mendengar dan membaca begitu terkenalnya nama Ali, saat itu, saya sempat mengira kalau Muhammad Ali itu adalah orang Indonesia, karena namanya terdengar begitu akrab dengan telinga.

Mengingat saat itu awal 1970-an, dan di desa belum ada aliran listrik, maka televisi hanya bisa dinyalakan dengan menggunakan baterai atau accu mobil yang harus di-*charge* setiap kali habis strum. Ada kalanya saat nonton strum accu habis, sehingga gambarnya mulai mengecil dan perlahan-lahan layar mati dan gelap. Menonton televisi di rumah orang lain tentu tidak sama dengan menonton di rumah sendiri, seperti saat ini. Kita tentu harus menjaga kesopanan dan etika serta perlu mengetahui bagaimana *mood* yang empunya rumah. Ada kalanya kita batal menonton, karena yang punya rumah *mood*-nya sedang tidak bagus. Itulah seninya menonton televisi pada masa itu.

Belakangan, karena semakin banyak tetangga yang memiliki televisi, maka pilihan tempat menonton acara televisi juga menjadi semakin banyak. Termasuk menonton televisi umum yang ada di kantor kecamatan. Demikian juga ketika listrik sudah masuk desa, maka menonton televisi tidak lagi menggunakan accu mobil. Mulai 1980-an, kita sudah bisa menikmati cerita-cerita film yang tersaji di




**Bersama pengurus Diaspora Purworejo**

layar kaca. Beberapa serial televisi yang terkenal pada masa itu antara lain *ACI (Aku Cinta Indonesia)*, serta Drama Seri *Losmen Bu Broto,* dan *Rumah Masa Depan.*

Saya masuk Sekolah Dasar Negeri Krendetan pada 1976 dan lulus pada 1982. Di sekolah pada masa itu masih banyak siswa yang belum mengenal sepatu. Saya sendiri baru memakai sepatu setelah duduk di kelas 5. Demikian juga dengan tas sekolah. Kecuali anak perempuan, jarang sekali ada siswa SD yang membawa buku dan perlengkapannya dengan tas sekolah. Karena jarak dari rumah saya ke sekolah sangat dekat, sekitar 300 meter, maka setiap pagi saya biasa ke sekolah pukul 06.00 wib. Sering kali bahkan saya datang lebih dulu dibanding penjaga sekolah. Sehingga, saya suka berisisiatif membuka semua pintu dan jendela, dari ruang kelas 1 sampai dengan ruang kelas 6. Dan, saya masuk sekolah melalui salah satu jendela yang tidak terkunci. Pada saat di SD itulah saya mulai mengenal seni peran. Bahkan sempat ditunjuk menjadi salah seorang pemeran dalam lomba drama antarsekolah dasar tingkat kecamatan, meskipun tidak mendapat juara.

Selepas sekolah dasar, saya masuk di SMP Negeri Bagelen pada 1982 dan lulus 1985. Kebetulan pula letak sekolahnya masih di Desa Krendetan yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari rumah. Selama masa SMP saya pernah ikut serta pementasan teater pada salah satu perayaan di sekolah. Saya bermain bersama Mas Toto Sugriwo, yang saat ini menjadi Sekretaris GPBSI (Gabungan Perusahaan Bioskop se-Indonesia), dan menjadi salah satu produser film nasional. Pada masa ini pula saya mulai naksir pada lawan jenis, kendati belum punya

keberanian untuk mengutarakannya langsung. Kegiatan lainnya saya lalui dengan biasa saja: belajar, olah raga, pramuka, tidak ada yang istimewa. Prestasi akademis pun biasa saja. Tidak menonjol, meskipun juga tidak mengecewakan. Terbukti saya berhasil masuk SMA Negeri Satu Purworejo, yang merupakan SMA favorite saat itu sampai sekarang.

Berbekal nilai Ebtanas yang sebenarnya paspasan, dengan nilai rata-rata 7, saya mendaftar ke sekolah menengah atas favorit SMAN 1 Purworejo dan diterima. Saya mulai belajar di sekolah yang lokasinya cukup jauh dari rumah, dan harus ditempuh dengan kendaraan umum. Dengan pertimbangan efisiensi waktu, tenaga dan biaya, maka diputuskan untuk kost di dekat sekolah dan pulang ke rumah setiap sabtu sore. Lalu saya kembali ke kost pada Senin pagi. Saat itu, saya selalu dibekali dua liter beras dan uang 600 rupiah, yang harus cukup untuk hidup selama satu minggu.

Aktivitas sehari-hari yang saya lakukan selain belajar di sekolah adalah mengikuti kegiatan ekstra kurikuler teater, main sepak bola, dan sesekali nonton film di salah satu gedung bioskop di kota Purworejo. Namun, setelah menjalani masa satu semester, tinggal di kost ternyata tidak memberikan dampak yang baik bagi saya di sekolah. Saya menduduki peringkat terakhir nilai rapor dari 46 siswa satu kelas. Karena itulah saya memutuskan untuk berhenti kost dan pergi pulang rumah-sekolah setiap hari. Sejak itu, secara perlahan nilai-nilai rapor saya pun mulai membaik.

Pada penjurusan program yang dilakukan di kelas 2, saya masuk ke jurusan Budaya atau A4, dan mulai menyukai semua mata pelajaran yang terkait kebudayaan. Antara lain, Sejarah Budaya, Sastra Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Jerman. Saya pun lulus SMA pada 1988.

Selulus SMA, tanpa menunggu lama, saya langsung berangkat ke Jakarta. Bukan untuk mendaftar kuliah tetapi merantau mencari pekerjaan. Saya adalah satu-satunya lulusan SMA yang ketika ditanya oleh wali kelas, menyatakan tidak akan melanjutkan kuliah, dan akan merantau mencari pekerjaan. Pilihan yang realistis waktu itu, karena mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga, meskipun keinginan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi, tetap saya pelihara dan tidak pernah padam. Di Jakarta saya tinggal bersama Kakak tertua, di daerah Karet Belakang, Setiabudi, Jakarta Selatan. Untuk sementara, saya membantu melaksanakan tugas-tugas domestik keluarga kakak saya.

Toh, semua liku kehidupan itu tetap saya lakukan dengan perasaan ringan dan gembira. Tidak menunggu lama, pada September 1988, ada pengumuman pendaftaran pegawai negeri di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Setelah mendaftar dan mengikuti semua rangkaian penyaringan, akhirnya saya dinyatakan lulus seleksi. Dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989,

saya sah sebagai calon pegawai negeri sipil golongan II/a dan ditempatkan di Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berlokasi di Jl. Cilacap no. 4 Jakarta Pusat.

Bekerja sebagai pegawai negeri tidak menyurutkan keinginan saya untuk melanjutkan kuliah. Pada 1991, saya mendaftar kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Yappan Jakarta, di daerah Tanjung Barat, Pasar Minggu. (kini sudah tidak ada lagi) dan mengambil kelas karyawan, dengan waktu belajar sore sampai malam hari, sehingga tidak mengganggu jam kerja. Lulus pada 1996, saya langsung mengusulkan penyesuaian ijazah dan naik golongan ke III/a. Pada 1989 saya pindah ke Depok II Tengah dan tinggal bersama keluarga Paman saya.

Banyak pengalaman yang didapatkan selama bekerja sebagai pegawai negeri. Saya merupakan bagian dari generasi "*babby boomer"* mengalami berkali-kali peralihan teknologi. Cukup piawai menggunakan mesin ketik manual dan masih ingat beberapa merk mesin ketik seperti Oliveti, Royal dan Brother, beralih ke mesin ketik elektrik, akrab dengan berbagai tingkat program Word Star dari WS 4,WS 5, WS6, WS7, Lotus 123, meningkat ke Excel, kemudian berbagai tingkatan program windows. Pernah menggunakan kamera saku analog, kamera digital yang semakin tinggi tingkat kepadatan gambarnya, pelbagai macam media simpan, mulai dari diskets HD, DD, flash disk yang semakin besar daya tampungnya, dan peralatan komunikasi yang berkembang pesat. Mulai dari telepon manual, faksimili, pager, sampai dengan telepon genggam yang saat ini telah berkembang pesat menjadi gawai multiguna. Bertugas sebagai staf di bagian keuangan, juga memberikan pengalaman luar biasa. Saya mulai mengenal pelbagai wilayah di Indonesia, dan hampir semua provinsi sudah saya kunjungi. Kecuali beberapa provinsi yang baru terbentuk sebagai hasil pemekaran.

Pada 1990, secara tidak sengaja saya bertemu kembali dengan Sumarmi, teman perempuan yang pernah saya taksir semasa SMP. Kami bertemu di Kantor Depnaker di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu, Sumarmi sedang mengurus suatu dokumen sementara saya datang ke kantor itu untuk menemui kawan yang bekerja di sana. Setelah pertemuan itu, beberapa waktu kemudian saya memberanikan diri menemui orang tua Sumarmi, dan langsung menyatakan keinginan untuk menikahi Sumarmi. Alhamdulillah, kedua orang tua Sumarmi merestui. Akhirnya, pada 1995 saya dan Sumarmi resmi menikah dengan perhelatan yang digelar sederhana.

Selanjutnya, kami memilih tempat tinggal di sebuah perkampungan di Beji, Depok. Dari pernikahan itu, kami dikaruniai tiga orang anak. Yang pertama perempuan lahir pada Juli 1996, kami beri nama Yulinsa Luthianur "Icha" Hanifa. Saat ini, Icha bekerja di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setelah lulus S1 Jurusan Matematika Universitas Indonesia. Yang kedua, laki-laki, Muhammad




**Salah satu kegiatan Paguyuban Wayah Bagelen, Puworejo.**

Hafizul Baihaqi, lahir pada 2000, dan kini tengah kuliah di jurusan Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jogjakarta. Dan yang ketiga, laki-laki, Haidar Alfianur Hakim kelahiran 2002, kini tengah kuliah di Jurusan Metalurgi, UPN Veteran Jogjakarta.

Adapun Sumarmi, istri saya, setelah kami menikah memutuskan mengundurkan diri dari tempatnya bekerja, di salah satu perusahaan otomotif di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan, setelah 10 tahun fokus mengurus keluarga, sejak 2006 sampai sekarang, istri saya mengajar di sekolah dasar, karena latar belakang pendidikannya adalah sekolah pendidikan guru. Dan, Alhamdulillah sudah diangkat menjadi pegawai negeri setelah lebih kurang 12 tahun mengabdi sebagai guru honor.

Saya mulai meniti karir sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan pangkat pengatur muda golongan II/a pada 1989. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana pada 1997, mendapatkan penyesuaian pangkat menjadi penata muda golongan III/a. Pada 2002, bersamaan dengan terbentuknya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), saya turut beralih tugas ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Saya bertugas di Biro Perencanaan sampai beberapa kali perubahan



**Santai selepas bertugas bersama M Sanggupri Sekretaris LSF, dan Sofyan di Banjarmasin, 2022**

organisasi kementerian. Pada 2007, saya pertama kali mendapat kepercayaan sebagai pejabat struktural, Kasubbag Perencanaan Program di Ditjen Nilai Budaya Seni dan Film, sebelum kemudian beralih tugas ke Subag Pemantauan dan Evaluasi.

Pada 2009, saya mendapatkan promosi jabatan ke Eselon III sebagai Kepala Bagian Umum di Ditjen yang sama, dan kemudian beralih tugas menjadi Kepala Bagian Keuangan pada 2010. Dengan kembalinya nomenklatur kebudayaan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2012, saya menjadi Kepala Bagian Keuangan di Direktorat Jenderal Kebudayaan, dan berkantor di Senayan lagi. Tidak lebih dua tahun menjabat Kepala Bagian Keuangan, pada 2013 saya menjadi Kepala Bagian Umum pada Unit Eselon I yang sama, di Ditjen Kebudayaan. Pada 2015, saya menjadi Kepala Sub Direktorat Program pada Direktorat Kesenian. Jabatan struktural Eselon III itu saya emban selama empat tahun hingga akhir 2019, ketika terjadi perampingan dan penyederhanaan organisasi kementerian, berupa pengurangan jabatan struktural eselon III dan IV. Sesuai arahan Presiden, saya beralih ke jabatan fungsional dan mendapatkan penyetaraan menjadi Perencana Ahli Madya.

Dengan adanya peralihan ke jabatan fungsional tersebut, maka usia pensiun saya bertambah dua tahun, dari semula 58 tahun, menjadi 60 tahun. Dengan

demikian, sesuai perhitungan, saya akan menyelesaikan pengabdian sebagai pegawai negeri sipil pada 2029 ketika usia saya mencapai 60 tahun.

Namun, pada 2020, perjalanan karir saya bergeser ke bidang yang lain, karena ditugasi pimpinan untuk ikut seleksi menjadi Anggota Lembaga Sensor Film (LSF). Setelah melalui tahap konsultasi (semacam *fit and proper test*) di Komisi I DPR RI, akhirnya saya dinyatakan lulus seleksi, dan pada Jumat, 8 Mei 2020, saya dilantik menjadi anggota Lembaga Sensor Film dari unsur Pemerintah, representasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sejak itulah saya secara resmi menjadi Anggota Lembaga Sensor Film periode 2020 - 2024. Tugasnya melakukan penelitian dan penilaian terhadap film dan iklan film yang akan dipertunjukkan ke masyarakat, melalui gedung bioskop, lembaga penyiaran televisi dan jaringan informatika. Sebagai konsekuensinya, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka untuk sementara status saya sebagai pegawai negeri dihentikan dan akan diaktifkan kembali setelah selesai bertugas sebagai anggota LSF.

Apabila dihitung sejak mulai berkerja sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 1 Januari 1989, sampai dengan jabatan terakhir sebelum beralih tugas menjadi anggota Lembaga Sensor Film pada 8 Mei 2020, maka saya sudah menjalani masa pengabdian selama 31 tahun 4 bulan dan 8 hari. Rentang waktu itu tentu merupakan perjalanan panjang dan banyak sekali kisah yang dialami. Misalnya, ihwal bagaimana sesungguhnya bentuk perhatian Pemerintah terhadap pengelolaan kebudayaan selama ini, terutama ketika saya ikut terlibat di dalamnya, dalam pelbagai posisi dan jabatan sebagai ASN.

Menurut saya, pengelolaan kebudayaan tidak terlepas dari empat hal atau *quadrant* dalam satu lingkaran. *Kuadran* pertama adalah mengelola sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan, atau para pelaku kebudayaan. Antara lain, bagaimana meningkatkan kompetensi para pelaku agar profesinya diakui. Selanjutnya dibuat *data base* lengkap ihwal para pelaku kebudayaan tersebut. Bagaimana memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkarya, dan karyanya diapresiasi, sehingga para pelaku tersebut bisa mendapatkan kesejahteraan. Juga, bagaimana memberikan penghargaan dan advokasi kepada para pelaku kebudayaan itu.

*Kuadran* kedua adalah membangun apresiator. Sikap apresiatif dari masyarakat terhadap kebudayaan perlu dibangun, agar mampu menjadi pendorong bagi majunya kebudayaan. Tanpa adanya apresiasi, maka nyala api kebudayaan perlahan akan surut dan padam. Karena itulah, membangun sikap apresiatif terhadap kebudayaan perlu dilakukan sejak usia dini, dengan mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak sejak kecil. Dan, itu bisa dimulai dengan mengajarkan pelbagai macam kesenian, mengajak menyaksikan pameran,

menonton seni pertunjukan dan sebagainya. Diharapkan, sikap apresiatif tersebut bisa tumbuh dan berkembang, yang akan berdampak pada sikap mereka terhadap kebudayaan, saat mereka dewasa.

*Kuadran* ketiga adalah mengelola karya budaya, yang wilayahnya sangat luas, mencakup pelbagai upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan karya budaya. Termasuk di dalam lingkup ini adalah bagaimana memanfaatkan kebudayaan sebagai sarana diplomasi yang akan mendorong meningkatnya harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. *Kuadran* keempat atau yang terakhir adalah pengelolaan fasilitas, sarana dan prasarana kebudayaan. Intinya adalah, bagaimana memenuhi kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan kebudayaan.

Apabila keempat *kuadran* dalam lingkaran tersebut bergerak bersama secara efektif, maka pemajuan kebudayaan akan tercapai. Sehingga sasaran utama terbangunnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin dapat tercipta. Hanya perlu diingat, tugas untuk menggerakkan roda tersebut bukan hanya pada Pemerintah, tetapi menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tentu memiliki peran yang sentral karena berperan sebagai *dirigent* dari orkestrasi pemajuan kebudayaan di Indonesia.

Beberapa kegiatan yang memberi kesan mendalam dan membanggakan bagi saya saat bekerja di lingkungan kebudayaan antara lain adalah, lahirnya *Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS).* Kegiatan itu dilatarbelakangi oleh terbatasnya guru kesenian di sekolah di satu sisi, dan di sisi yang lain, banyaknya seniman di pelbagai daerah yang dapat dioptimalkan perannya untuk terlibat dalam mengisi kekosongan itu. Melalui kegiatan GSMS tersebut, kekosongan guru seniman diisi dengan menerjunkan seniman-seniman setempat untuk mengajar di sekolah pada jalur ekstra kurikuler. Kegiatan GSMS yang melibatkan ribuan seniman tersebut masih berlangsung sampai saat ini.

Berikutnya ada kegiatan pentas ekspresi seniman jalanan. Konsep kegiatan yang dikerjasamakan dengan Institut Musik Jalanan (IMJ) itu adalah memberikan pelatihan kepada seniman (musik) jalanan yang sebelumnya telah diseleksi, untuk selanjutnya diselenggarakan pentas ekspresi, dan ditonton oleh undangan khusus yaitu, para pemilik mal di wilayah Jabodetabek. Hasilnya beberapa mal di Jabodetabek telah menyediakan tempat untuk tampil para seniman jalanan tersebut dan diapresiasi oleh masyarakat.

Ada satu lagi kegiatan yang saya rasa cukup penting yaitu *Bumbung Seni*. Bumbung seni adalah *platform* penyimpanan digital untuk konten audio visual seperti halnya "YouTube". Melalui *platform* yang disediakan oleh Negara, maka Indonesia memiliki platform penyimpanan digital tersendiri, sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk menyimpan karya rekam yang dibuatnya. Sebagai



**Bersama keluarga, Iedul Fitri 2023**

bangsa multikultur dengan kekayaan budaya yang sangat besar, sudah sepantasnya Indonesia memiliki *platform* penyimpanan karya budaya sendiri, tidak mengandalkan platform dari negara lain. Sayangnya, saat ini Bumbung Seni yang sempat berubah nama menjadi *Bumbung Budaya* tersebut tidak dilanjutkan pengembangannya.

Sebagai Anggota Lembaga Sensor Film, saya ditugasi menjadi Ketua Subkomisi Pengkajian dan Penelitian di Komisi III LSF. Subkomisi ini memiliki tugas antara lain melakukan penelitian dan pengkajian pelbagai hal di masyarakat, untuk meningkatkan kinerja Lembaga Sensor Film dalam melaksanakan penyensoran. Sejak awal bertugas pada 2020 sampai dengan saat ini, subkomisi saya sudah melaksanakan tiga kali penelitian. Pertama, survei digital mengenai persepsi masyarakat terhadap Lembaga Sensor Film (2020), Berdasarkan survei tersebut, dari 1.200 responden, sebanyak 95 persen mengenal Lembaga Sensor Film sebagai institusi yang bertugas dan berwenang melakukan penyensoran terhadap film sebelum dipertunjukkan ke khalayak umum. Kedua, melakukan survei nasional mengenai Kinerja Perfilman Nasional dan Budaya Sensor Mandiri pada 2021. Obyek penelitiannya mencakup tiga aspek yaitu, Tujuan Perfilman, Fungsi Perfilman, serta Konten dan Budaya Sensor Mandiri. Jumlah respondennya 1.220 orang yang tersebar di 34 Provinsi dengan metode wawancara langsung secara tatap muka.

Berdasarkan survei tersebut, ada beberapa hal yang cukup menarik. Antara lain,



**Olahraga bersama isteri saat CFD di kawasan Senayan, Jakarta**

televisi masih menempati posisi tertinggi sebagai media yang digunakan untuk menonton film (74,3 persen) dibanding media sosial (12,4 persen), media online (7 persen), dan platform digital (1,3 persen). Kemudian, *genre* film yang paling sering ditonton adalah drama. Mungkin itu terkait dengan banyaknya drama seri yang disajikan di televisi, baik produk nasional berupa sinetron maupun produk impor seperti film seri India. Tentang kepemilikan gawai pintar (*smart phone*), data yang didapat menggambarkan bahwa 62 persen responden memiliki gawai cerdas, yang dapat digunakan untuk menonton film.

Ketiga, adalah survei yang dilakukan di Jabodetabek untuk memotret persepsi remaja terhadap kriteria penyensoran (2022). Dari survei yang dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi (Uhamka Jakarta), didapatkan beberapa fakta antara lain, sebanyak 35 persen responden mengaku tidak diawasi oleh orang tua dalam hal menggunakan gawai dan bermedia sosial. Sebanyak 78 persen siswa mengakses media di ruang pribadi (kamar). Ihwal apakah responden pernah atau tidak pernah membuka konten yang tidak sesuai

dengan klasifikasi usianya, sebanyak 54 persen siswa (didominasi siswa SMA/SMK) mengaku pernah membuka konten yang tidak sesuai dengan usianya. Ihwal apa yang responden lakukan setelah tidak sengaja membuka konten yang tidak seuai usia tersebut, sebanyak 85 persen siswa segera menutupnya (didominasi siswa SD), dan 15 persen meneruskan menonton.

Penelitian terakhir yang tengah dilakukan adalah dalam format campuran (*mixed*) antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan sebagai kelanjutan dan pendalaman dari penelitian sebelumnya. Metode kualitatif dilakukan agar dapat tergali secara mendalam bagaimana dan mengapanya.

Selama mengabdi sebagai Anggota LSF (2020-2024), pada satu sisi, saya melihat LSF adalah lembaga negara yang bertugas memastikan agar film yang beredar dan dikonsumsi masyarakat adalah film yang layak tonton, dan menjaga agar film tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat (baca : penontonnya); namun di sisi yang lain, LSF juga harus turut menjadi bagian dari instrumen negara untuk memajukan perfilman nasional.

Karena posisinya yang demikian itulah maka dalam melaksanakan tugasnya, LSF harus selalu mempertimbangkan kedua hal tersebut secara seimbang. Dengan kata lain, peran LSF sebagai "penjaga" tidak lantas menjadi penghambat bagi kemajuan perfilman di Indonesia. Karena itulah, menjadi anggota LSF bagi saya merupakan suatu kehormatan sekaligus tantangan, karena bisa ikut terlibat secara langsung dalam proses penentuan kelayakan film untuk dinikmati penoton sesuai klasifikasi usia

Sebagai anggota LSF representasi dari Kemendikbudristek, saya berharap agar Budaya Sensor Mandiri dapat disebarluaskan melalui kurikulum pendidikan dan masuk sebagai muatan yang dititipkan dalam mata pelajaran yang relevan. Budaya Sensor Mandiri adalah bagian tidak terpisahkan dari kecerdasan literasi media atau literasi digital, yang sangat penting dimiliki siswa di semua jenjang pendidikan. Terlebih, dengan kian pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi milenial dan Generasi X, Y, Z, yang belum dapat diimbangi dengan instrumen pengawasan yang memadai,

Akhirnya, di sela-sela kesibukan sebagai ASN sekaligus Anggota Lembaga Sensor Film, alhamdulillah saya masih bisa aktif di organisasi sosial kemasyarakatan. Saat ini saya dipercaya menjadi Ketua Umum Paguyuban Wayah Bagelen, yaitu paguyuban yang anggotanya putra-putri dari Bagelen, wilayah budaya di Jawa Tengah, yang kini menjadi wilayah kecamatan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tujuan pendirian paguyuban ini, selain untuk menjaga tali silaturahmi antarsesama wayah Bagelen di pelbagai daerah, juga untuk ikut serta terlibat dalam

memajukan wilayah Bagelen, melalui jalur kebudayaan, sosial, dan perekonomian. Selain itu, saya juga menjadi pengurus paguyuban sejenis dengan lingkup kabupaten Purworejo, yaitu Paguyuban Diaspora Purworejo, dan Paguyuban Pakuwojo, Keduanya memiliki tujuan yang kurang lebih sama dengan Paguyuban Wayah Bagelen. Di kedua Paguyuban tersebut saya duduk sebagai Ketua Bidang Seni Budaya.




**Selepas tugas, di Taman Nasional Baluran, Jatim, 2021**

## JATI DIRI:

| | |
|---|---|
| **Nama Lengkap** | **:** Kuat Prihatin |
| **Tempat & Tanggal Lahir** | **:** Purworejo, 04 Mei 1969 |
| **Nama Orang Tua** | **:** Atmo Sumarto |
| **Nama Istri** | **:** Sumarmi |
| **Nama Anak** | **:** 1. Yulinsa Luthfianur Hanifa |
| | 2. Muhammad Hafizul Baihaqi |
| | 3. Haidar Alfianur Hakim |
| **Medsos** | **:** fb: Kuat Prihatin |
| | IG: @Kuat Prihatin |

## RIWAYAT PENDIDIKAN

**1976 :** SD Negeri Krendetan, Bagelen, Purworejo

**1982:** SMP Negeri Bagelen, Purworejo

**1986** : SMA Negeri I, Purworejo

**1996**: STIA YAPANN, Jakarta - S1

**2011** : STIA Ipwija, Jakarta - S2

**Gelar :** S.Sos. M.M

# RINGKASAN

## Kuat Prihatin

Kuat Prihatin, S.Sos., MM., lahir di Purworejo, pada Minggu, 4 Mei 1969. Pendidikan SD sampai dengan SMA ditempuhnya di Purworejo, sebuah kota kecil di Jawa Tengah bagian selatan, yang juga merupakan kota kelahiran WR. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Purworejo juga sering disebut kota *"pangsiunan,"* karena banyak warganya yang kembali dan menetap di kota kelahiran mereka itu. Selulus SMA, tanpa menunggu lama, Kuat langsung merantau ke Jakarta, mengikuti jejak saudara-saudaranya. Kebetulan, tak lama kemudian ada pendaftaran pegawai negeri sipil. Berbekal ijazah SMA, ia mendaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini Kemendikbud Ristek). Rupanya, nasib baik menghampiri. Ia diterima bekerja sebagai PNS di Depdikbud.

Pada 1989, ia mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan II/A di Ditjen Kebudayaan Depdikbud. Sambil bekerja, Kuat Prihatin melanjutkan kuliah hingga mencapai S1 jurusan Administrasi Negara di STIA Yappann, Jakarta (1996), dan melanjutkan S2 jurusan Management di STIE Ipwija, Jakarta (2011).

Setelah sempat tergabung di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata selama 10 tahun (2002), ia kembali ke Kemendikbud (2012) dengan jabatan pertama sebagai Kasubag Perencanaan Program di Ditjen Nilai Budaya Seni dan Film (2007). Sepanjang karirnya, ia pernah menjadi Kasubag Pemantauan dan Evaluasi, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Umum dan Kasubdit Program Evaluasi dan Dokumentasi di Direktorat Kesenian, serta Perencana Ahli Madya di Ditjen Kebudayaan. Terakhir, ia ditugaskan untuk menjadi anggota Lembaga Sensor Film periode 2020-2024, mewakili unsur Pemerintah dari Kemendikbudristek. Di LSF, selain menjadi Anggota, ia juga menjabat Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian di Komisi III LSF.



# Kontribusi untuk Perfilman dan Masyarakat

**Mukayat Al-Amin**
Sekretaris Komisi III

Lahir di desa Kalen, Kedungpring, Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu, 16 November 1983, saya sulung dari dua bersaudara. Bapak dan Ibu kami berasal dari keluarga petani tulen dan merupakan pasangan pekerja keras. Tak jarang Bapak dan Ibu kami pergi ke sawah dua kali dalam sehari. Berangkat pagi hingga istirahat pulang untuk sholat duhur dan makan siang, lalu petang harinya harus kembali lagi ke ke sawah.

Selain bertani, keluarga kami juga beternak ayam, kambing dan sapi. Bagi petani kampung seperti kami, ternak itu adalah *"Raja Kaya"* atau rajanya kekayaan. Karena selain bisa untuk dijual, kotorannya pun dimanfaatkan untuk pupuk tanaman dan di sawah. Alhamdulillah, hingga saat ini Bapak dan Ibu masih sehat dan terus bertani, meski usia mereka tidak muda lagi. Namun, bila dulu mereka bertani sebagai mata pencaharian utama, sekarang sebagai hiburan masa tua. Dan, karena tubuh mereka terus bergerak dan selalu tersiram cahaya matahari, maka kesehatan mereka pun terus terjaga. Semoga beliau berdua sehat dan bahagia selalu.

Kedua orangtua saya adalah orang hebat meskipun mereka tidak lulus SD / Sekolah Rakyat dan tidak punya satu helai pun ijazah. Namun beliau berdua punya tekad yang kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Mereka tidak ingin anak-anaknya merasakan susah dan





Bersama Presiden Jokowi di Istana Negara

pahitnya menjadi petani, yang harus selaliu bekerja keras, kasar, panas dengan pendapatan tidak menentu. Belum lagi bila hama datang merusak tanaman. Mulai dari belalang, siput, tikus sampai wereng. Kekeringan juga seringkali membuat kami gagal panen. Kesimpulannya: *"Sungguh berat menjadi petani di Indonesia."*

Karena komitmen keras kedua orang tua untuk mensukseskan pendidikan kami hingga sarjana, maka selulus Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) setingkat SD pada 1966, saya kemudian bersekolah di desa dan wilayah lain. Yakni, Madrasah Tsanawiyah Negeri Babat. Lulus pada 1999 saya melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Babat. Sembari sekolah itu saya memperdalam ilmu agama alias "*nyantri*" mondok di Pesantren Muhammadiyah Al-Aqsho, Babat, asuhan K.H. Muhlis Sulaiman. Di situ saya ditempa selama enam tahun (1996-2002). Banyak pengalaman yang saya dapatkan saat mondok. Antara lain, memperoleh bekal bagi kemandirian, keberanian, kedewasaan berpikir, meluaskan pergaulan, kedalaman ilmu beragama, serta kecakapan berorganisasi. Saya dididik, digembleng di pondok, hingga saya semakin matang dan mantab untuk meneruskan pendidikan ke tahap selanjutnya.

Selulus dari MAN Babat pada 2002, saya pindah ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah S1 di Institut Agama Islam (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya. Saya mengambil Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam (PMI). Jurusan itu

relatif baru, dan di Indonesia baru diadakan di tiga universitas atau perguruan tinggi. Selain IAIN Sunan Ampel, Surabaya adalah di IAIN Sunan Kalijaga, Jogja, dan IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain kuliah saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yakni di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), KNPI dan Pemuda Muhammadiyah.

Pendidikan S1 saya tempuh selama empat tahun dan lulus pada 2006. Setelah lulus saya bekerja di sebuah program pemerintah dari Kementerian PU, untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Namanya PNPM P2KP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan / PNPM Mandiri Perkotaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan). Sambil bekerja, pada 2008 saya melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus pada 2010. Tiga tahun kemudian (2013) saya mengajar di Fakultas Agama Islam UM SBY. Dan, pada 2018 saya melanjutkan S3 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, yang ketika saya menulis ini, tengah dalam proses penyelesaian Disertasi.

Saya pertama kali mengenai film dan menonton bioskop ketika masih duduk di Madrasah/SD di Kedungpring, Lamongan. Pada awal 1990-an bioskop sangat marak di Jawa Timur. Demikian pula di Kabupaten Lamongan. Hampir di setiap Kecamatan ada bioskop, termasuk di Kecamatan Kedungpring yang letaknya di sebelah Pasar Kecamatan. Pada suatu malam saya diajak sepupu saya yang sedang patah hati, karena baru bertikai dengan istrinya dan katanya diusir dari rumah. Untuk pelipur lara, ia mengajak saya menonton film di bioskop. Itulah perkenalan pertama saya dengan film bioskop.

Di masyarakat desa kami, ada beberapa media pemutaran film. Selain melalui stasiun TV, dan bioskop, yang paling seru adalah menonton layar tancap. Layar tancap sebagai wahana pertujukan umum seringkali diadakan di kampung kami. Penontonnya tidak hanya warga kampung kami, tapi juga warga dari pelbagai kampung lain. Tidak hanya penonton, para pedagang keliling pun berdatangan dari pelbagai penjuru. Waktu itu, layar tancap adalah hiburan yang sangat istimewa bagi warga desa kami. Pelbagai judul film diputar. Antara lain, *Brama Kumbara, Si Buta dari Gua Hantu,* dan *Saur Sepuh.*

Selain film-film besar tersebut, saya sangat tertarik pada film anak-anak yang diputar pada Minggu pagi. Yang paling disukai zaman itu adalah film *Si Unyil* yang ditayangkan di TVRI Pusat. Namun, di desa kami saat itu belum banyak yang punya TV. Meskipun masih TV hitam putih, kami selalu menonton beramai-ramai di rumah tetangga yang punya TV.

Seiring waktu, pada 2007, sebagai aktivis kampus, saya resah ketika melihat tontonan film yang kian hari makin tidak produktif. Banyak sinetron yang kami

anggap nilai edukasinya rendah. Oleh karena itu, saya dan teman-teman mahasiswa se-Surabaya, membuat gerakan tolak sinetron dan tayangan tv yang tidak edukatif. Beberapa kali kami melakukan aksi demonstrasi, mengingatkan kepada pemerintah selaku pembuat dan pengatur regulasi, untuk menekan pihak stasiun televisi, agar mereka menayangkan tontonan yang lebih bagus, berkualitas, dan edukatif.

Ketika pada 20017 LSF Perwakilan Provinsi Jawa Timur dibuka di Surabaya, beberapa teman dekat saya mendaftar dan diterima sebagai Tenaga Sensor (TS). Saat itulah saya mulai mengenal eksistensi serta tugas fungsi dan wewenang LSF. Sehingga, saat pendaftaran calon Anggota LSF dan Tenaga Sensor periode baru diumumkan pada 2019, saya melihat, inilah peluang dan waktunya bagi saya untuk memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap persoalan perfilman di Indonesia.

Ketertarikan saya pada LSF dimulai ketika secara pribadi saya merasa tontonan yang dihadirkan di ruang publik, tidak terlalu berkualitas, dan lebih mengutamakan profit dan kepentingan perusahaan semata. Oleh karena itu, saya merasa harus berkontribusi terhadap persoalan perfilman di Indonesia. Mulai dari berkontribusi terhadap hadirnya tontonan yang layak, dan berusaha menyadarkan masyarakat akan pentingnya memilih tontonan yang tepat.

Bekerja di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya. Pertama, LSF memberikan pengalaman luar biasa kepada saya. Kita bisa bertemu dan bekejasama dengan banyak kalangan, yang memiliki dasar keilmuan dan latar belakang yang beragam, untuk menilai dan memutuskan kelayakan tayangnya sebuah film. Kedua, kita bisa berkontribusi dalam menjaga pengaruh atau dampak negatif film kepada masyarakat Indonesia, dengan menetapkan klasifikasi usia penonton film. Lalu, mengkampanyekan Budaya Sensor Mandiri (BSM) agar masyarakat menonton film sesuai klasifikasi usia. Di situ saya melihat kita telah berkontribusi terhadap moralitas anak bangsa.

Film sebagai karya seni budaya, memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Sebagai media komunikasi massa, film juga sangat berguna sebagai sarana mencerdaskan bangsa, mengembangkan potensi diri, membentuk akhlak mulia, dan sarana untuk promosi budaya.

Menurut saya, film sangat efektif untuk pemajuan kebudayaaan. Melalui film terjadi penetrasi budaya bangsa, sehingga memberi pengaruh pada masyarakat yang hidup di wilayah budaya lain, seperti gaya berpakaian, gaya berbicara atau istilah-istilah yang terkandung dalam suatu film yang diadopsi masyarakat. Bila individu dan masyarakat tidak siap, maka film juga memiliki dampak negatif, terutama jika film ditonton oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya.

Untuk memastikan bahwa film yang diedarkan untuk dikonsumsi masyarakat adalah film yang layak dan sesuai dengan budaya bangsa, serta tidak mengandung unsur-unsur yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu ada mekanisme sensor terhadap film yang akan diedarkan. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh film yang bermutu.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, tentu berpengaruh besar terhadap peredaran dan pertunjukan film. Sebab, saat ini film tidak hanya dapat disaksikan melalui layar bioskop dan televisi, namun juga dapat diakses melalui media baru berbasis internet, platform digital dan media sosial. Sehingga, akses



**Bersama Panglima TNI (Periode 2017-2021) Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P**

masyarakat terhadap film semakin mudah. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, masyarakat memiliki potensi untuk mengakses konten perfilman yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya.

Film tentu akan memberikan dampak negatif, bila ditonton tidak sesuai dengan klasifikasi usianya. Film yang diperuntukkan bagi orang dewasa, misalnya, tidak akan cocok bila ditonton anak-anak. Film yang mengandung pornografi, kekerasan, perjudian, pelecehan, perendahan terhadap harkat dan martabat, serta penodaan terhadap agama dan kemanusiaan, tentu akan berdampak pada kelompok rentan bila film tersebut ditayangkan tanpa melalui proses filtrasi yang baik.



**Bersama Gubernur Jawa Timur (Periode 2019-2024) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si**

Mekanisme penyensoran film merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Setiap film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan, wajib mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF). Namun LSF menyadari bahwa saat ini, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif film, tidak hanya cukup dengan kebijakan pemberian STLS. Masyarakat dan publik perlu mendapatkan pendidikan dan pengetahuan terhadap film, melalui penguatan fungsi literasi, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menonton film sesuai dengan klasifikasi usia dan peruntukannya.

Lembaga Sensor Film mepunyai peran, tugas dan tanggung jawab yang besar. Dan saya, pada periode 2020-2024 ini, berada di dalamnya. Tentu saya sangat bersyukur bisa berkontribusi konstruktif dengan mendedikasikan pengabdian di LSF bagi bangsa dan negara serta masyarkat Indonesia.

Ada beberapa pengalaman yang cukup menarik dalam proses kerjasama dengan Anggota dan Tenaga Sensor (TS). Hampir setiap hari kita duduk di studio, untuk menilai dan memutuskan klasifikasi film yang sudah kita lihat bersama-sama. Semua berpendapat sesuai kompetensinya masing-masing. Baik Anggota maupun TS, selalu menyampaikan pendapat terkait film tersebut. Dan Anggota yang hadir di studio tersebut akan memutuskan klasifikasi film yang telah kita nilai. Menurut saya, pengalaman yang menarik dari kerjasama ini adalah, dibutuhkan kerjasama yang baik antara Anggota dan TS, dalam menilai sebuah film, agar film yang kita



**Bersama Ketua KPU (Periode 2017-2022) Arif Budiman**

nilai tepat, dan aman dan nyaman dilihat serta dinikmati masyarakat.

Kadang, ada beberapa film yang disensorkan, sangat berat untuk dinilai. Karena film yang disensorkan tersebut, terkadang mengandung banyak adegan kekerasan yang sangat keras dan berlangsung dalam waktu cukup panjang. Sesekali juga ada adegan penuh kekerasn disertai dengan adegan seksual yang tampak jelas / atau adegan LGBT, dengan intensitas yang panjang. Melihat film-film dengan adegan kekerasan disertai seksualitas itulah, yang membuat kita harus sangat cermat dan berhati-hati, dalam menilai dan menentukan klasifikasi usia film, serta adegan mana saja yang kita rekomendasikan untuk direvisi kepada pemilik film. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelian dalam menetukan kalsifikasi usia film.

Seringkali Anggota dan TS berbeda pendapat terkait penilaian film. Karena setiap Anggota punya latar belakang dan pengetahuan berbeda. Sehingga, dibutuhkan diskusi cukup panjang untuk menentukan klasifikasi usia film yang tepat. Menurut saya, proses pengamatan dan diskusi menentukan klasifikasi film dalam studio, adalah sebuah pengalaman luar biasa, karena kita harus berdebat, dan berargumentasi untuk menentukan yang terbaik.

G*enre* film itu banyak sekali macamnya. Terlebih lagi, hampir semua orang sangat menyukai film, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. *Genre* film adalah kategori yang digunakan untuk mengelompokkan film berdasarkan tema, gaya, dan respons emosional terhadap film tersebut. Dalam dunia perfilman, *genre* film dapat digambarkan dengan elemen-elemen seperti konvensi, ikonografi, latar,

narasi, karakter, dan aktor, seperti yang ditemukan dalam teori kritik genre sastra. Kita dapat mengklasifikasikan film berdasarkan berbagai aspek seperti nada, topik/tema, suasana hati, format, sasaran audiens, atau anggaran. Karakteristik ini paling jelas terlihat pada film ber-*genre*, yang umumnya memiliki pengulangan kisah yang sudah dikenal, dengan karakter dan situasi tertentu dalam *genre* yang sama.

*Genre* film juga berpengaruh pada penggunaan teknik dan gaya dalam pembuatan film, seperti kilas balik dan pencahayaan rendah pada film *noir*, dan penggunaan bingkai pada film horor, atau jenis huruf yang terlihat seperti batang kayu yang dipahat kasar untuk judul-judul film Barat. Selain itu, *genre* film berpengaruh pada jenis musik dan *scoring* yang terkait, seperti orkestra dawai yang merdu pada film melodrama romantis atau musik elektronik pada film fiksi ilmiah. *Genre* film juga mempengaruhi




**Literasi dan Edukasi Hukum Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto**

bagaimana film ditayangkan di televisi, diiklankan, dan sebagainya.

*Genre* film tidak bersifat tetap. *Genre* dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Beberapa di antaranya mungkin menghilang, misalnya *genre* melodrama. Ekspektasi penonton terhadap sebuah film, juga memiliki peran penting dalam pengaruh dan bentuk *genre* film, serta wacana institusional yang menciptakan struktur umum. *Genre* film sudah mengalami banyak perkembangan dan pembaruan. Terutama berkat perkembangan industri film yang semakin pesat. Dengan bantuan Computer-Generated Imagery (CGI), film yang hanya dapat tercipta di dalam imajinasi, dapat divisualisasikan. Hal itu juga membantu

perluasan *genre*, di mana terdapat sebuah cerita atau karakter yang sepenuhnya berasal dari ciptaan CGI. Yang jelas g*enre* film adalah kategori yang digunakan untuk mengelompokkan film berdasarkan tema, gaya, dan respons emosional terhadap film tersebut.

Karena film sebagai karya seni budaya memiliki peran yang strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, maka saran dan harapan saya terhadap film sebagai karya seni budaya, industri, dan hiburan adalah sebagai berikut.

*Pertama*; film harus lebih banyak memberikan sentuhan edukasi sehingga film juga dapat dijadikan media untuk mendidik anak-anak kita. *Kedua*; film harus lebih banyak memberikan sentuhan ketahanan nasional dan semakat nasionalisme




**Kunjungan Ke Net.TV Bersama Jajaran Direksi Net TV dan Ketua LSF Rommy Febri Hardianto Beserta TIM LSF**

yang tinggi sehingga rasa nasionalisme yang mulai terkikis pada anak-anak generasi terakhir ini bisa membara kembali. *Ketiga*; harus digalakkan lagi pembuatan film-film untuk usia semua umur atau film untuk anak-anak, sehingga anak-anak kita mendapatkan tontonan yang layak.

*Keempat*; jangan terlalu banyak memproduksi film-film horor. Coba gali kembali potensi budaya kita yang melimpah selain horor. Karena menurut saya, produksi film horor di Indonesia sangat melimpah namun miskin film untuk anak-anak. *Kelima*; harus ada desain besar / peta jalan pemajuan industri perfilman nasional, agar industri perfilman kita bisa berkembang dan bersaing dengan industri film negara lain seperti Korea dengan drakor-nya, India dengan



**Bersama Metri Agama (Periode 2014-2019) Dr. K.H. Lukman Hakim Saifuddin**

Bollywood-nya, dan Amerika dengan Hollywood-nya. Mereka bisa berkembang karena dikonsep dengan baik. Demikian juga dengan industri perfilman nasional. Kalau mau berkembang harus ada peta jalan menuju indutri perfilman yang maju.

Program Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) yang dikampanyekan LSF, bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan sensor mandiri. Baik untuk kepentingan pribadi maupun, dan terutama, untuk keluarga. Masyarakat diajak untuk secara bijak, mampu memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi atau penggolongan usia. Baik untuk film, iklan film, maupun program televisi. Klasifikasi usia penonton itu ditetapkan LSF melalui penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS), untuk setiap tontonan yang ditayangkan baik di bioskop, televisi, maupun di jaringan informatika.

Sedangkan Program Desa Sensor Mandiri adalah program pembentukan dan penguatan perilaku masyarakat agar secara sadar dapat memilah dan memilih tontonan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan terkait secara berkesinambungan. Khususnya di wilayah Desa / Kelurahan terpilih, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mampu melakukan *self-censorship*. Desa terpilih diberikan program-program terkait penguatan BSM, yang ditentukan melalui mekanisme yang terdapat di dalam Petunjuk Teknis ( Juknis) yang telah ditetapkan oleh LSF.

Desa Sensor Mandiri diharapkan dapat memberikan penguatan literasi bagi segenap lapisan masyarakat, agar dapat membentengi diri dari dampak negatif film, serta menjaga adat istiadat dan budaya daerah agar tetap terjaga dan lestari. Selain itu, sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, LSF ditugaskan untuk membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu, serta memahami pengaruh film dan iklan film. Dengan demikian, selain masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai film-film yang bermutu, masyarakat juga memahami Budaya Sensor Mandiri. Sehingga masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif film dan iklan film. Masyarakat yang cerdas harus memiliki kemampuan untuk



**Menghadiri Piala Citra 2020 Bersama Reza Rahardian salah satu Aktor Peraih Piala Citra 2020**

memilah dan memilih tontonan yang pantas untuk dikonsumsi, pada semua jenis film yang beredar, karena adanya perkembangan dan perubahan teknologi.

Telah banyak program sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dan Desa Sensor Mandiri yang dilakukan LSF dalam tiga tahun terakhir ini. Dan, hampir di seluruh provinsi di Indonesia, sudah pernah dilakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa catatan untuk dijadikan evaluasi dalam program ini. *Pertama*; Budaya Sensor Mandiri adalah program yang bagus sehingga perlu diperluas dan diperbanyak lagi program-programnya. *Kedua*; penambahan anggaran agar program Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri ini semakin banyak dan semakin tersosialisasikan kepada masyarakat luas. *Ketiga*; perlu melibatkan organsiasi-organisasi lain untuk terlibat dalam Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri agar segmentasinya semakin meluas.

Banyak pengalaman menarik setiap kami melaksanakan tugas luar kota. *Pertama*; di setiap kegiatan selalu ada pengalaman dan ilmu baru yang kami dapatkan. *Kedua*; kita semakin banyak mendapatkan masukan dari masyarakat terkait kemajuan perfilman Indonesia dan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia. *Ketiga*; hampir di setiap kunjungan ke daerah, kita selalu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baru

tentang perfilman saat ini. Mulai dari banyaknya film yang tayang tanpa sensor, sampai adanya media-media baru yang dapat menayangkan film.

Ada salah satu pengalaman menarik ketika kita sedang melakukan Sosialisasi Desa Sensor Mandiri di Malang, tepatnya di desa Glanggang. Usai acara, saya diajak berdiskusi dengan beberapa mahasiswa Universita Muhammadiyah Malang yang kami undang. Mereka secara panjang lebar bercerita terkait keresahan mereka sebagai generasi muda, akan bahayanya film-film yang mengandung kekerasan, adegan seksual yang vulgar, serta adanya muatan LGBT di film yang ditayangkan di platfom digital berbayar. Mereka setengah memprotes, ihwal banyaknya tayangan yang tidak disensor, namun ditayangkan di platform digital berbayar tersebut. Mereka juga memprotes tentang klasifikasi usia yang ada. Menurut mereka, ada sebuah judul film yang adegan dan muatannya seharusnya diklasifikasikan untuk penonton usia 17 tahun ke atas, namun mengapa LSF mengklasifikasikannya untuk penonton usia 13 tahun ke atas.

Tentu dengan adanya kritik dan masukan yang diberikan, itu saya sangat berterima kasih. Dan, kami telah memperbaiki kinerja kelembagaan yang ada. Sebagai penyelenggara negara yang bertugas di bidang penyensoran, tentu apapun kritik dan saran, amat ditunggu untuk perbaikan kinerja LSF. Apalagi, peran LSF sangat signifikan dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif film yang muncul. Oleh karena itu, agar eksistensi LSF ke depan terus berjalan dengan baik, maka ada beberapa saran saya untuk LSF ke depan:

*Pertama*: Lembaga Sensor Film jangan sampai berpuas diri dengan semua capaian yang ada. LSF harus terus meningkatkan kinerja kelembagaannya, agar kinerja LSF semakin baik, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. *Kedua*; Lembaga Sensor Film harus meningkatkan layanannya, baik untuk penyensoran, pemantauan, pengaduan, literasi dan edukasi hukum, serta dalam hubungan antar lembaga. Dan tentu saja Budaya Sensor Mandiri. *Ketiga*; Lembaga Sensor Film harus meningkatkan jumlah orang yang terpapar Budaya Sensor Mandiri, dengan cara semakin memperbanyak jumlah dan strategi BSM. Sehingga, masyarakat yang terliterasi BSM jadi semakin banyak.

*Keempat*: Lembaga Sensor Film terus meningkatkan *channeling program* dengan pelbagai elemen masyarakat, sehingga program-program kerja LSF bisa termanfaatkan dan tersosialisasikan lebih luas. *Kelima*; waktu terus berjalan dan zaman semakin bergerak maju. Dengan adanya revolusi industri 4.0 tentu banyak perubahan yang terjadi pada industri perfilman kita. Oleh karena itu, agar undang-undang perfilman saat ini dapat bergerak atau berlaku secara maksimal, perlu segera dilakukan revisi terhadap Udang-Undang No. 33 Tahun 2009. Hal ini penting dilakukan, agar Lembaga Sensor Film sebagai lembaga negara yang independen, dapat lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



## JATI DIRI:

| | |
|---|---|
| **Nama** | : Mukayat Al Amin, |
| **Tempat & Tanggal Lahir** | : Lamongan, 16 November 1983 |
| **Nama Istri** | : Anisa Herawati |
| **Nama Anak** | : Aisyah, Hafidz dan Alicya |
| **Nama Orang Tua** | : H. Saduri & Hj. Siti |
| **Medsos** | : mukayatalamin821@gmail.com |

## RIWAYAT PENDIDIKAN

**1996** : Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kalen

**1999** : Madrasah Tsanawiyah Negeri, Babat

**2002** : Madrasah Aliyah Negeri, Babat

**2006** : IAIN Sunan Ampel, Surabaya

**2010** : Universitas Airlangga, Surabaya

**2018 :** Proses Study S3 Universitas Airlangga, Surabaya

# RINGKASAN

## Mukayat Al-Amin

Mukayat Al-Amin, M. Sosio, lahir pada Rabu, 16 November 1983, di Desa Kalen Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bapak, Emak, Kakek dan sanak kerabatnya berprofesi sebagai petani. Dibesarkan dari keluarga dan lingkungan petani, selepas Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada 1996, Cak Mukayat, begitu panggilan akrabnya, melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsyanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Babat (1999), sebelum kemudian kuliah di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, pada Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam (PMI).

Sejak awal kuliah itulah ia lalu memasuki dunia aktivis dengan latar belakang pemikiran dan orientasi berbeda-beda, mulai dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sampai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), maupun organisasi ekstra kampus. Meraih gelar S1 tepat waktu delapan semester, ia melanjutkan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, sembari bekerja sebagai konsultan Comunity Development (CD). Meraih gelar S2 dalam empat semester (2010), ia kemudian mengajar pada Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya (2013), sembari aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Pemuda Muhammadiyah. Dan, pada 2018, ia melanjutkan studi S3 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.

Ketertarikan Cak Mukayat pada dunia film, muncul ketika pada masa kuliah ia melihat dan menilai film berperan penting dalam pembangunan bangsa dan negara, antara lain, memupuk semangat nasionalisme, yang berfungsi sebagai salah satu benteng pemersatu bangsa dan negara. Atas dasar kecintaan serta pengabdiannya pada bangsa dan negara, itulah ia kemudian berikhtiyar untuk masuk dan kemudian terpilih menjadi anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (2020-2024). Sebagai Anggota LSF termuda, ia ditunjuk sebagai Sekretaris Komisi III LSF yang membidangi Sosialisasi dan Hubungan Antarlembaga.


Moco
MUSEUM
in art
we trust



# Menilai Film Jangan menggunakan Analisis Fiqih

**Nasrullah**
Ketua Komisi I Bidang Penyensoran, Dialog, Komunikasi, dan Data

Saya lahir di Jakarta, pada Jumat, 10 Maret 1978, dari pasangan H. Muhamad Ali dan Hj. Arsiyah. Sebagai Anggota LSF, saya mewakili kepakaran di bidang agama, sebagai utusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepakaran di bidang agama, memang memiliki porsi tersendiri sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. "Pasal tersebut menyebutkan, yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya." Bahkan ditambahkan, "yang menonjolkan pornografi, memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan atau antargolongan, menistakan, melecehkan, dan atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum, serta merendahkan harkat dan martabat manusia."

**K**eterwakilan bidang agama di LSF, itu punya porsi tersendiri, bahkan lebih diperhatikan. Karena agama merupakan salah satu segi untuk diperhatikan dalam menilai film. Sehingga, diperlukan anggota yang berlatar belakang agama. Selain UU No. 33/ 2009, pentingnya latar belakang kepakaran di bidang agama, itu tertuang pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF. Disebutkan, LSF beranggotakan 17 orang, terdiri atas 12 unsur masyarakat dan lima unsur pemerintah.



**Dengan komunitas Masjid dekat rumah**

Kelima unsur pemerintah yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah kepakaran di bidang pendidikan, perfilman, kebudayaan, hukum, teknologi informasi, pertahanan dan keamanan, bahasa, agama, serta kepakaran lain yang relevan. Jadi keberadaan saya di LSF mewakili unsur agama, sesuai ketentuan undang-undang dan memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang LSF.

Kepakaran bidang tersebut bertujuan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.

Sebelum di LSF, saat bertugas di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Direktorat Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama RI, saya malang melintang menangani konflik-konflik agama di tengah masyarakat. Saya pernah menangani beberapa aliran yang dianggap radikal. Di antaranya, menjumpai beberapa orang yang mengaku nabi, malaikat, bahkan tuhan. Dan tentu saja semuanya palsu. Saya juga pernah mengendalikan Kelompok Ahmadiyah di Jawa Barat dan Kelompok Syiah di Sampang, Madura, Semua itu menjadi bekal saya saat bertugas di LSF.

Keberadaan kepakaran agama, menurut saya sangat penting, terutama ketika harus menilai film. Namun, kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun, dari 40 ribu lebih judul film dan iklan film yang disensorkan – baik televisi, bioskop, jaringan informatika – belum ada yang saya anggap sebagai film ber-*genre* religi murni..

Hanya ada film-film yang dibuat secara temporal, seperti dalam rangka bulan Ramadan. Jadi nuansa itu terbawa oleh situasi. Apakah itu disebut film nuansa agama, ya saya katakan bisa disebut bernuansa agama. Film itu dinyatakan bernuansa agama, kalau dalam film tersebut ada instrumen yang dianggap oleh agama tertentu ada instrumennya.

Menurut saya, film Indonesia belum ada yang murni mengangkat masalah agama. Lebih banyak film asing yang sempat ada dinamika di tengah-tengah masyarakat, antara lain *His Only Son*. Film yang bercerita tentang kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq menurut versi Kristen itu, bagi saya, itu adalah film agama. Tapi, kalau ada film-film yang lebih dominan menyelipkan kata-kata bijak, kebaikan, itu sudah bernuansa agama.

Dalam menilai dan meneliti sebuah film, saya hanya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF. Dari segi agama, yang perlu dinilai, apakah ada yang menista agama, mendiskeditkan agama, memperolok-olok atau meremehkan kesucian agama, simbol yang mengganggu kerukunan – itu menjadi aspek penilaian saya dalam film agama. Penilaian film agama tidak dapat berbatas pada hitam-putihnya agama, atau halal dan haram. Hitam dan putih atau halal dan haram itu tidak bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai film.

Saya tidak bisa membayangkan kalau ada yang memiliki ilmu wawasan keagamaan yang luas, tapi tidak tepat menggunakan analisisnya dalam menilai




**Dengan Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto saat Rakor LSF di Jakarta**

film. Kalau hasil penilaiannya seperti itu, saya yakin akan ada resistensi dari pemilik film. Karena itu, kacamata penilaiannya menggunakan Undang-Undang Perfilman dan PP, bukan menggunakan analisis fiqih.

Saya menuntaskan pendidikan S-2 dan S-3 Ilmu Dakwah Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Selain menilai dan menganalisis film, salah satu wewenang anggota LSF adalah mendorong masyarakat perfilman, pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman agar membuat film berkualitas. Jadi, tugas LSF itu ada dua. Yaitu menilai film atau menyensor film sebelum dipertunjukkan. Lebih penting dari itu, LSF memberikan masukan kepada produser, pegiat film, atau pelaku usaha film bahwa filmnya dapat ditayangkan sesuai dengan klasifikasi usia yang ditetapkan LSF. Kalau film tersebut



**Dialog dengan pimpinan agama Buddha terkait film Thailand**

dipertunjukkan tanpa batasan usia, dikhawatirkan berdampak negatif bagi masyarakat penonton. Karena itulah, LSF memiliki peran memberi masukan, yang dalam regulasi disebut menyosialisasikan, kepada para pembuat film. Saya lebih senang membahasakannya sebagai bersilaturahmi dengan *stakeholders,* para pemangku kepentimgan. Ajang silaturahmi adalah sosialisasi dan itu penting dalam mendorong mereka berkarya dengan film-film yang berkualitas.

Keterwakilan bidang agama di LSF, itu punya porsi tersendiri, bahkan lebih diperhatikan. Karena agama merupakan salah satu segi untuk diperhatikan dalam menilai film. Sehingga, diperlukan anggota yang berlatar belakang agama. Selain UU No. 33/ 2009, pentingnya latar belakang kepakaran di bidang agama, itu tertuang pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF. Disebutkan, LSF beranggotakan 17 orang, terdiri atas 12 unsur masyarakat dan

lima unsur pemerintah.

Kelima unsur pemerintah yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah kepakaran di bidang pendidikan, perfilman, kebudayaan, hukum, teknologi informasi, pertahanan dan keamanan, bahasa, agama, serta kepakaran lain yang relevan. Jadi keberadaan saya di LSF mewakili unsur agama, sesuai ketentuan undang-undang dan memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang LSF.

Kepakaran bidang tersebut bertujuan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.




**Meeting dengan Tenaga Sensor (TS) di kantor LS Senayan**

Sebelum di LSF, saat bertugas di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Direktorat Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama RI, saya malang melintang menangani konflik-konflik agama di tengah masyarakat. Saya pernah menangani beberapa aliran yang dianggap radikal. Di antaranya, menjumpai beberapa orang yang mengaku nabi, malaikat, bahkan tuhan. Dan tentu saja semuanya palsu. Saya juga pernah mengendalikan Kelompok Ahmadiyah di Jawa Barat dan Kelompok Syiah di Sampang, Madura, Semua itu menjadi bekal saya saat bertugas di LSF.

Keberadaan kepakaran agama, menurut saya sangat penting, terutama ketika harus menilai film. Namun, kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun, dari 40 ribu lebih judul film dan iklan film yang disensorkan – baik televisi, bioskop, jaringan informatika – belum ada yang saya anggap sebagai film ber-*genre* religi murni..

Hanya ada film-film yang dibuat secara temporal, seperti dalam rangka bulan Ramadan. Jadi nuansa itu terbawa oleh situasi. Apakah itu disebut film nuansa agama, ya saya katakan bisa disebut bernuansa agama. Film itu dinyatakan bernuansa agama, kalau dalam film tersebut ada instrumen yang dianggap oleh agama tertentu ada instrumennya.

Menurut saya, film Indonesia belum ada yang murni mengangkat masalah agama. Lebih banyak film asing yang sempat ada dinamika di tengah-tengah masyarakat, antara lain *His Only Son*. Film yang bercerita tentang kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq menurut versi Kristen itu, bagi saya, itu adalah film agama. Tapi, kalau ada film-film yang lebih dominan menyelipkan kata-kata bijak, kebaikan, itu sudah bernuansa agama.

Dalam menilai dan meneliti sebuah film, saya hanya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF. Dari segi agama, yang perlu dinilai, apakah ada yang menista agama, mendiskeditkan agama, memperolok-olok atau meremehkan kesucian agama, simbol yang mengganggu kerukunan – itu menjadi aspek penilaian saya dalam film agama. Penilaian film agama tidak dapat berbatas pada hitam-putihnya agama, atau halal dan haram. Hitam dan putih atau halal dan haram itu tidak bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai film.

Saya tidak bisa membayangkan kalau ada yang memiliki ilmu wawasan keagamaan yang luas, tapi tidak tepat menggunakan analisisnya dalam menilai film. Kalau hasil penilaiannya seperti itu, saya yakin akan ada resistensi dari



**Menyerahkan hasil penjurian "Anugerah LSF 2023" dengan Tim Juri Agung Irfan (TS) dan Noorca M. Massardi serta Mukayat Al-Amin (Anggota)**




**Bersama pimpinan agama Buddha dan para Anggota LSF usai dialog ihwal film Thailand yang ditengarai dapat menyinggung umat Buddha di Indonesia.**

pemilik film. Karena itu, kacamata penilaiannya menggunakan Undang-Undang Perfilman dan PP, bukan menggunakan analisis fiqih.

Saya menuntaskan pendidikan S-2 dan S-3 Ilmu Dakwah Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Selain menilai dan menganalisis film, salah satu wewenang anggota LSF adalah mendorong masyarakat perfilman, pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman agar membuat film berkualitas. Jadi, tugas LSF itu ada dua. Yaitu menilai film atau menyensor film sebelum dipertunjukkan. Lebih penting dari itu, LSF memberikan masukan kepada produser, pegiat film, atau pelaku usaha film bahwa filmnya dapat ditayangkan sesuai dengan klasifikasi usia yang ditetapkan LSF. Kalau film tersebut dipertunjukkan tanpa batasan usia, dikhawatirkan berdampak negatif bagi masyarakat penonton. Karena itulah, LSF memiliki peran memberi masukan, yang dalam regulasi disebut menyosialisasikan, kepada para pembuat film. Saya lebih senang membahasakannya sebagai bersilaturahmi dengan *stakeholders,* para pemangku kepentimgan. Ajang silaturahmi adalah sosialisasi dan itu penting dalam mendorong mereka berkarya dengan film-film yang berkualitas.

Keterwakilan bidang agama di LSF, itu punya porsi tersendiri, bahkan lebih diperhatikan. Karena agama merupakan salah satu segi untuk diperhatikan dalam menilai film. Sehingga, diperlukan anggota yang berlatar belakang agama. Selain UU No. 33/ 2009, pentingnya latar belakang kepakaran di bidang agama, itu tertuang pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF. Disebutkan, LSF beranggotakan 17 orang, terdiri atas 12 unsur masyarakat dan lima unsur pemerintah.

Kelima unsur pemerintah yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah kepakaran di bidang pendidikan, perfilman, kebudayaan, hukum, teknologi informasi, pertahanan dan keamanan, bahasa, agama, serta kepakaran lain yang relevan. Jadi keberadaan saya di LSF mewakili unsur agama, sesuai ketentuan undang-undang dan memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang LSF.

Kepakaran bidang tersebut bertujuan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.



**Usai Jumaatan di Masjid Kemendikbud dengan Noorca M. Massardi (Anggota) dan Yugo Prasetya (Operator Studio)**

Sebelum di LSF, saat bertugas di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Direktorat Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama RI, saya malang melintang menangani konflik-konflik agama di tengah masyarakat. Saya pernah menangani beberapa aliran yang dianggap radikal. Di antaranya, menjumpai beberapa orang yang mengaku nabi, malaikat, bahkan tuhan. Dan tentu saja semuanya palsu. Saya juga pernah mengendalikan Kelompok Ahmadiyah di Jawa Barat dan Kelompok Syiah di Sampang, Madura, Semua itu menjadi bekal saya saat bertugas di LSF.

Keberadaan kepakaran agama, menurut saya sangat penting, terutama ketika harus

menilai film. Namun, kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun, dari 40 ribu lebih judul film dan iklan film yang disensorkan – baik televisi, bioskop, jaringan informatika – belum ada yang saya anggap sebagai film ber-*genre* religi murni.

Hanya ada film-film yang dibuat secara temporal, seperti dalam rangka bulan Ramadan. Jadi nuansa itu terbawa oleh situasi. Apakah itu disebut film nuansa agama, ya saya katakan bisa disebut bernuansa agama. Film itu dinyatakan bernuansa agama, kalau dalam film tersebut ada instrumen yang dianggap oleh agama tertentu ada instrumennya.

Menurut saya, film Indonesia belum ada yang murni mengangkat masalah agama. Lebih banyak film asing yang sempat ada dinamika di tengah-tengah masyarakat, antara lain *His Only Son*. Film yang bercerita tentang kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq menurut versi Kristen itu, bagi saya, itu adalah film agama. Tapi, kalau ada film-film yang lebih dominan menyelipkan kata-kata bijak, kebaikan, itu sudah bernuansa agama.

Dalam menilai dan meneliti sebuah film, saya hanya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF. Dari segi agama, yang perlu dinilai, apakah ada yang menista agama, mendiskeditkan agama, memperolok-olok atau meremehkan kesucian agama, simbol yang mengganggu kerukunan – itu menjadi aspek penilaian saya dalam film agama. Penilaian film agama tidak dapat berbatas pada hitam-putihnya agama, atau halal dan haram. Hitam dan putih atau halal dan haram itu tidak bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai film.

Saya tidak bisa membayangkan kalau ada yang memiliki ilmu wawasan keagamaan yang luas, tapi tidak tepat menggunakan analisisnya dalam menilai



**Ngopi bareng ditraktir Ketua LSF Rommy Fibri Hardiyanto, Wakil Ketua LSF Ervan Ismail, dan para Anggota LSF.**

film. Kalau hasil penilaiannya seperti itu, saya yakin akan ada resistensi dari pemilik film. Karena itu, kacamata penilaiannya menggunakan Undang-Undang Perfilman dan PP, bukan menggunakan analisis fiqih.

Saya menuntaskan pendidikan S-2 dan S-3 Ilmu Dakwah Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Selain menilai dan menganalisis film, salah satu wewenang anggota LSF adalah mendorong masyarakat perfilman, pelaku usaha dan pelaku kegiatan perfilman agar membuat film berkualitas. Jadi, tugas LSF itu ada dua. Yaitu menilai film atau menyensor film sebelum dipertunjukkan. Lebih penting dari itu, LSF memberikan masukan kepada produser, pegiat film, atau pelaku usaha film bahwa filmnya dapat ditayangkan sesuai dengan klasifikasi usia yang ditetapkan LSF. Kalau film tersebut dipertunjukkan tanpa batasan usia, dikhawatirkan berdampak negatif bagi masyarakat penonton. Karena itulah, LSF memiliki peran memberi masukan, yang dalam regulasi disebut menyosialisasikan, kepada para pembuat film. Saya lebih senang membahasakannya sebagai bersilaturahmi dengan *stakeholders,* para pemangku kepentimgan. Ajang silaturahmi adalah sosialisasi dan itu penting dalam mendorong mereka berkarya dengan film-film yang berkualitas.

**K**eterwakilan bidang agama di LSF, itu punya porsi tersendiri, bahkan lebih diperhatikan. Karena agama merupakan salah satu segi untuk diperhatikan dalam menilai film. Sehingga, diperlukan anggota yang berlatar belakang agama. Selain UU No. 33/ 2009, pentingnya latar belakang kepakaran di bidang agama, itu tertuang pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF. Disebutkan, LSF beranggotakan 17 orang, terdiri atas 12 unsur masyarakat dan lima unsur pemerintah.

Kelima unsur pemerintah yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut adalah kepakaran di bidang pendidikan, perfilman, kebudayaan, hukum, teknologi informasi, pertahanan dan keamanan, bahasa, agama, serta kepakaran lain yang relevan. Jadi keberadaan saya di LSF mewakili unsur agama, sesuai ketentuan undang-undang dan memenuhi unsur yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang LSF.

Kepakaran bidang tersebut bertujuan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.

Sebelum di LSF, saat bertugas di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Direktorat Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama RI, saya malang melintang menangani konflik-konflik agama di tengah masyarakat. Saya pernah menangani beberapa aliran yang dianggap radikal. Di antaranya, menjumpai beberapa orang yang mengaku nabi, malaikat, bahkan tuhan. Dan tentu saja



**Saat memimpin rapat rutin luring & daring dengan Anggota Komisi I LSF**

semuanya palsu. Saya juga pernah mengendalikan Kelompok Ahmadiyah di Jawa Barat dan Kelompok Syiah di Sampang, Madura, Semua itu menjadi bekal saya saat bertugas di LSF.

Keberadaan kepakaran agama, menurut saya sangat penting, terutama ketika harus menilai film. Namun, kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun, dari 40 ribu lebih judul film dan iklan film yang disensorkan – baik televisi, bioskop, jaringan informatika – belum ada yang saya anggap sebagai film ber-*genre* religi murni..

Hanya ada film-film yang dibuat secara temporal, seperti dalam rangka bulan Ramadan. Jadi nuansa itu terbawa oleh situasi. Apakah itu disebut film nuansa agama, ya saya katakan bisa disebut bernuansa agama. Film itu dinyatakan bernuansa agama, kalau dalam film tersebut ada instrumen yang dianggap oleh agama tertentu ada instrumennya.

Menurut saya, film Indonesia belum ada yang murni mengangkat masalah



**Berbusana etnis dalam acara "Anugerah LSF 2023" di Studio Indosiar dengan Noorca M. Massardi (Anggota) dan Ervan Ismail (Wakil Ketua LSF)**

agama. Lebih banyak film asing yang sempat ada dinamika di tengah-tengah masyarakat, antara lain *His Only Son*. Film yang bercerita tentang kehidupan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq menurut versi Kristen itu, bagi saya, itu adalah film agama. Tapi, kalau ada film-film yang lebih dominan menyelipkan kata-kata bijak, kebaikan, itu sudah bernuansa agama.

Dalam menilai dan meneliti sebuah film, saya hanya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang LSF. Dari segi agama, yang perlu dinilai, apakah ada yang menista agama, mendiskeditkan agama, memperolok-olok atau meremehkan kesucian agama, simbol yang mengganggu kerukunan – itu menjadi aspek penilaian saya dalam film agama. Penilaian film agama tidak dapat berbatas pada hitam-putihnya agama, atau halal dan haram. Hitam dan putih atau halal dan haram itu tidak bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai film.

# JATI DIRI:

**Nama Lengkap** : Nasrullah
**Tempat/Tanggal Lahir** : Jakarta, Jumat, 10 Maret 1978
**Nama Orang Tua** : H. Muhamad Ali (alm) & Ibu Hj. Arsi (almh)

# RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD: Madrasah Ibtidaiyah Shilaturahman Jakarta (1989)
2. SMP: Madrasah Tsanawiyah Al Awwabin Depok Jawa Barat (1993)
3. SMA: Madrasah Aliyah Annida Al Islamy Jakarta (1996)
4. S-1: Sarjana Komunikasi Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2001)
5. S-2 & S-3 : Ilmu Dakwah Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2005)

**Gelar: Dr.**

# RIWAYAT PENGALAMAN:

Pegawai Kementerian Agama RI, Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam (2009) - Tenagah Ahli Badan Amil Zakat Provinsi DKI Jakarta (2020) - Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Global Insan Cendekia Jakarta (2019) - Peneliti Balitbang Kementerian Agama RI (2011-2013) - Narasumber Agama Islam Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (2003-sekarang) - Narasumber Agama Islam Kejaksaaan Agung RI (2015-sekarang) - Narasumber Agama Islam Laboratoratorium Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut (2010-sekarang) - Narasumber Agama Islam RSPAD Gatot Subroto Jakarta (2020-sekarang) - Narasumber Agama Islam Kementerian Pertahanan RI Jakarta (2020-sekarang) - Narasumber Agama Islam Lemhanas RI Jakarta (2020-sekarang) - Narasumber Agama Islam Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta (2020-sekarang) - Narasumber Agama Islam Mabes Polri Jakarta (2021-sekarang) - Narasumber Narasumber Agama Islam Komisi Pemberantasan Korupsi RI Jakarta (2020-sekarang) - Narasumber Agama Islam LKPP Jakarta (2020)

# RINGKASAN
## Dr. Nasrullah

Nasrullah, lahir d Jakarta pada Jumat, 10 Maret 1978. Berpendidikan Sarjana Komunikasi Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2005), Dosen Tamu Psikologi Dakwah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten (2009), Peneliti Balitbang Kementerian Agama (2011-2013), dan Direktorat Penerangan Agama Islam Bimas Islam Kementerian Agama (2013-sekarang).

Diangkat sebagai perwakilan Pemerintah untuk menjadi Anggota Lembaga Sensor Film (Periode 2015-2019), dan diangkat kembali untuk Periode 2020-2024 — "Ustadz Nas" demikian biasa dipanggil — pernah meneliti tentang kerukunan umat beragama di 20 Provinsi, dan melakukan investigasi atas Aliran Sesat dan orang yang mengakui Nabi dan Malaikat.

Selain berprofesi sebagai Dosen dan aktif dalam pelbagai kegiatan Pembinaan Keagamaan Masyarakat, Ustadz Nas juga mengajar d Kampus Perguruan Tinggi Agama Islam (STAI) Global Cendekia Depok. Dan, di tengah aktivitas rutin menyensor film di LSF, juga mengisi sejumlah pengajian masyarakat pada berbagai Instansi Pemerintah di lingkungan Pemda DKI Jakarta, seperti, serta pengisi penceramah agama pada Kementerian Pertahanan RI, Lemhanas RI, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kejaksaan Agung RI, Pemda DKI Jakarta, Laboratorium Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut (LADOGI) Jakarta, Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta, dan Penceramah Tetap di Mabes Polri Trunojoyo.





# Hadir Wujudkan Tontonan Ramah Anak

**Naswardi**
Ketua Komisi III Lembag Sensor Film (LSF)

Lahir di Balimbing, Sumatera Barat, pada Sabtu, 16 Juli 1983, saat ini saya menjabat Ketua Komisi III Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia, membidangi sosialisasi, kerjasama antarlembaga, penelitian dan pengkajian. Terpilih menjadi anggota LSF dari unsur masyarakat dengan keahlian pada bidang perlindungan anak. Saya menyelesaikan pendidikan Doktor pada Program Studi Ilmu Manajemen di Universitas Negeri Jakarta saat usia 34 Tahun. Berpengalaman dan ahli dalam bidang perlindungan anak, selama sepuluh tahun bekerja sebagai analis dan tenaga ahli di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Di situ, saya terlibat aktif dalam perumusan kebijakan, pengawasan, advokasi, penanganan pengaduan dan mediasi sengketa pelanggaran hak anak, dan memiliki sertifikat kompetensi sebagai mediator ahli dalam bidang isu perlindungan anak.

Aktif menulis dan meneliti pelbagai isu perlindungan anak dan sumber daya manusia, hasil penelitian dan karya tulis yang saya publikasikan melalui jurnal dan opini antara lain, *Evaluation Of Community Services and Mediation Services Infringement of Childrens Rights in The Commission of Indonesian Child Protection* (Journal Internasional IJHCM: 2017), *Indonesia Darurat Perlindungan Anak* (Harian Singgalang: 2012), dan *Manajemen Keluarga Basis Perlindungan Anak dari Ancaman Kejahatan Media Televisi* (Warta: 2012).




**Kunjungan penjajakan kerjasama dengan Korea Media Rating Board (KMRB), 2021.**

Karya ilmiah yang diterbitkan dan dipublikasikan sebagai buku antara lain, *Kualitas Pengasuhan Anak di Indonesia, Hasil Survey Nasional dan Tela'ah Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia* (2015). *Harapan dan Realita 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (2016), *Pengawasan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia* (2017), *Telisik Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Masalah dan Faktual* (2017), *Dampak Pengasuhan dan Upaya Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum* (2018), dan *Kualitas Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Taman Panitipan Anak dan Taman Anak Sejahtera* (2020).

Sebelum di LSF, saya berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui organisasi sosial, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan. Antara lain sebagai Ketua Pusat Kajian dan Riset Perlindungan Anak (PAKAR PA), Ketua Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (Fornas LKSA-PSAA), Wakil Ketua Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak dan Ketua Asosiasi Mediator Anak Indonesia.

Untuk melengkapi aktivitas profesional dalam bidang akademik, saat ini saya aktif sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uhamka, Jakarta. Sebagai anggota sekaligus Ketua Komisi III LSF yang membidangi sosialisasi, saya hadir untuk mewujudkan tontonan yang ramah anak, yakni tontonan sehat sesuai usia dan perkembangan anak. Sehingga, anak dapat terbebas dari konten bermuatan pornografi, kekerasan, narkotika, perbuatan melawan hukum dan konten negatif lainnya, yang berpotensi ditiru dan berdampak buruk terhadap psikologi perkembangan anak.

Melalui tugas, fungsi dan kewenangan sebagai anggota LSF, saya telah dan akan terus aktif berkontribusi, untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak akan tontonan yang sehat dan ramah anak. Hal tersebut diwujudkan melalui proses penyensoran film dan iklan film secara baik. Yakni, melakukan penelitian, penilaian, dan penggolongan usia film dan iklan film secara tepat dan profesional, sebelum dapat dipertunjukan kepada publik. Baik film dan iklan film untuk media pertunjukan di bioskop, maupun di televisi dan jaringan teknologi informatika. Kehadiran saya dalam mewujudkan tontonan yang ramah anak, dapat dilihat melalui lima aksi utama gagasan dan kinerja yang dilakukan LSF.

***Pertama, Hadir Memperkuat Lembaga Sensor Film***

Transisi demokrasi dari era otoritarian ke era demokratis telah menjadikan demokrasi menjadi salah satu pilar ideologi ketatanegaraan. Konsep *trias politica* kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dipandang tidak cukup untuk men-

jalankan demokrasi, sehingga lahir organ-organ kekuasaan baru yang bersifat independen. Menurut Jimly Asshidiqie (2006:8) lembaga independen tersebut adalah organ negara *(state organs)* yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Meskipun demikian, organ negara itu mempunyai campur sari ketiganya, yakni menjalankan fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman secara bersamaan.




**Penghargaan LSF sebagai Lembaga Kepatuhan Pelayanan Publik (Ombudsman RI), dan Penghargaan LSF sebagai Lembaga Menuju Informatif (Komisi Informasi Pusat), 2022.**




**Talkshow dalam rangka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Inews TV, 2020.**

Merujuk pada data Kementerian Sekretariat Negara, saat ini terdapat 45 (empat puluh lima) lembaga negara nonstruktural yang bersifat independen. Baik dalam bentuk komisi, badan, komite maupun lembaga (Kementerian Sekretariat Negara: 2023). Salah satu lembaga independen tersebut adalah Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia, yang pembentukannya didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, memiliki peran strategis melalui kewenangan penerbitan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Dengan kewenangan tersebut, diharapkan ketahanan bangsa dapat dijaga, jati diri bangsa dapat dipertahankan, dan anak-anak bangsa dapat dilindungi dari kerentanan. Dan, mengingat Indonesia adalah negara majemuk dengan keberagaman suku, bahasa, adat istiadat, agama, budaya, warna kulit dan lain-lainya, maka bila tidak dirawat, berpotensi menimbulkan kerentanan dan perpecahan. Sehingga pikiran dan jiwa anak-anak perlu dilindungi dari tontonan yang tidak sehat, yang berdampak negatif terhadap nilai kebhinekaan Indonesia.

Memperhatikan pentingnya keberadaan LSF, maka mekanisme, tahapan dan kriteria dalam proses pelaksanaan penyensoran film dan iklan film, harus dilaksanakan secara baik, berkualitas, berintegritas, bertanggung jawab dan independen. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya ikut berkontribusi dan mendorong LSF dengan paradigma baru yakni, LSF yang profesional, ttransparan, cepat dan informatif dalam pelayanan. Paradigma baru tersebut, telah mengantarkan LSF pada lembaga yang profesional, terbuka dan informatif, terbukti dengan penghargaan yang diterima, yakni peringkat kedua Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik, dari Ombudsman Republik Indonesia dan Lembaga dengan Peringkat Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat pada 2020.

***Kedua, Hadir Mewujudkan Penyensoran Film yang Berkualitas***

Hak anak untuk mendapatkan informasi yang sesuai tahapan usia dan perkembangannya, merupakan kewajiban Negara yang direpresentasikan oleh Peme-




**Sosialisasi Badak Jawa sebagai Maskot Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, 2022.**

rintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewajiban Negara untuk memenuhi *(to fulfill)*, melindungi *(to protect)* dan menghormati *(to respect)* hak asasi anak tersebut, secara mandatori tercantum dalam hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 17 Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)*: "Negara para pihak mengakui fungsi penting yang dilaksanakan media massa, dan menjamin bahwa anak dapat memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, spiritual dan moralnya, serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya. Maka Negara-negara para pihak harus mendorong media massa menyebarluaskan informasi yang sehat bagi anak, secara khusus memperhatikan kebahasaan (linguistik) anak, dan mendorong pengembangan pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari informasi dan bahan-bahan yang membahayakan kesejahteraannya."

Pemerintah Republik Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, itu wajib melaksanakan ketentuan tersebut, karena pemenuhannya memiliki kekuatan memaksa *(entered into force)*. Komitmen ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang dilakukan pemerintah tersebut, salah satunya dilaksanakan melalui inisiasi dan pembaharuan norma hukum perlindungan anak. Pemerintah kemudian melakukan

pembaharuan dan revisi terhadap Undang-Undang 23 Tahun 2002, menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.




**Kerjasama dan deklarasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, 2021**

Semangat perlindungan anak dari paparan negatif film dan iklan film dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, senapas dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Film sebagai unsur pokok dari kegiatan perfilman dan usaha perfilman, wajib disertai pencantuman penggolongan usia penonton, meliputi untuk penonton semua umur, untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih, untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, dan untuk penonton usia 21 tahun (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Penggolongan usia penonton tersebut, merupakan bentuk keberpihakan Negara dalam upaya perlindungan anak, yang perlu diterjemahkan secara baik dalam kebijakan sensor film. Lembaga Sensor Film sebagai pelaksana dari mandat UU No. 33/2009 tentang Perfilman, itu perlu dan bertanggungjawab untuk mewu-




**Publikasi dan Sosialisasi hasil penelitian LSF tentang Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri, 2023.**

judkan tontonan yang ramah anak. Untuk mewujudkan tontonan yang ramah anak, itu dapat dilakukan melalui sistem penyensoran yang baik dan berkualitas, penelitian dan penilaian atas film secara akurat, penetapan penggolongan usia penonton secara tepat, dan percepatan sosialisasi gerakan nasional budaya sensor mandiri, untuk meningkatkan kualitas literasi tontonan anak. Sehingga anak memiliki kesadaran yang tinggi untuk menonton sesuai usianya.

Pada 2020, LSF telah melakukan penyensoran terhadap 39.863 judul film dan iklan film. Kemudian sebanyak 40,640 judul film dan iklan film (2021), dan 36,514 judul film dan iklan film (2022). Semua judul film dan iklan film tersebut, dinilai dan diteliti untuk diberikan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) sebelum dapat ditayangkan di bioskop, televisi dan jaringan teknologi informatika.

***Ketiga, Hadir Mewujudkan Tontonan yang Ramah Anak***

Berdasarkan profil anak Indonesia pada 2022, terdapat sebesar 29,1 persen atau 79,4 juta jiwa penduduk Indonesia yang berusia anak. Artinya, hampir satu dari tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Besarnya jumlah dan kuantitas anak menitipkan pesan harapan, mengingat kemajuan bangsa pada masa depan, terletak di pundak anak-anak saat ini. Oleh karena itu, Negara berkewajiban mengisi pikiran anak-anak dengan ilmu pengetahuan, mengisi hatinya dengan kebaikan, dan mengisi tubuhnya dengan gizi dan nutrisi, karena masa anak-anak adalah *golden periode* (periode emas).

Berdasarkan data profil anak Indonesia pada 2022, sebanyak 75 persen anak menyatakan telah mengakses internet dan menggunakan telepon seluler untuk mengakses informasi dan hiburan. Artinya, kebutuhan anak terhadap hiburan khususnya film, cukup tinggi. Namun, kebutuhan anak terhadap hiburan dan film yang tinggi, itu belum diikuti oleh pertumbuhan film anak nasional. Berdasarkan data LSF (2020), jumlah film dan iklan film yang disensor sebanyak 36.514 judul. Tapi hingga 2022, yang mendapat penggolongan usia penonton semua umur hanya 10,8 persen. Itu berarti, terdapat kesenjangan yang nyata antara kebutuhan film anak dengan ketersediaan film anak itu sendiri.

Kesenjangan itu tentu memiliki dampak negatif. Anak tidak mendapatkan hiburan dan pendidikan dari film yang sesuai tahapan usia dan perkembangannya. Bila anak menonton film yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangannya, maka anak berpotensi terpapar dampak negatif film dan iklan film. Baik dari konten yang bermuatan kekerasan, perjudian, narkotika, pornografi, pertentangan suku, ras, kelompok dan agama, maupun film dan iklan film dengan kandungan perbuatan melawan hukum serta perendahan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, anak memiliki potensi terpapar dan meniru isi kandungan negatif dari film tersebut.




**Peserta Kuis Indosia Juara dalam Acara Anugerah LSF 2022 di Indosiar**

***Keempat, Hadir Meningkatkan Kualitas Literasi Tontonan Publik***

Film saat ini menjadi salah satu alat yang efektif dalam mewujudkan pengaruh budaya antarnegara. Beberapa negara melakukan diplomasi budaya secara masif. Salah satu negara yang saat ini sangat kencang dan gencar mengembangkan produk kebudayaannya adalah Korea Selatan.

Melalui fenomena *Hallyu* atau *Korean Wave,* produk kreatif Korea Selatan baik *K-Pop, K-Fashion, K-Food, K-Beauty, K-Film,* maupun *K-Drama*, mengalir begitu deras dan dinikmati oleh anak-anak muda Indonesia. Untuk K-Drama itu, sebagai penikmat mereka kemudian membangun komunitas yang disebut dengan pecinta Drakor (Drama Korea).

Hal itu tentu akan berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari anak-anak Indonesia. Bila mereka tidak diberi sajian tontonan bermuatan lokal dan tayngan film nasional secara berimbang, maka kecintaan terhadap produk asing tersebut, berpotensi mengerus rasa nasionalisme, kecintaan pada produk dalam negeri,



**Berkunjung ke Kantor Pusat Bioskop CGV di Seoul, Korea Selatan, 2021**

kedangkalan terhadap pengetahuan tentang budaya bangsa sendiri, serta krisis kebanggaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk meningkatkan kualitas literasi tontonan masyarakat, maka sebagai Ketua Komisi III yang membidangi sosialisasi, saya hadir dan menyusun cetak biru *(blue print)* Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, yang kemudian kami sebut dengan Catur Aksi Budaya Sensor Mandiri. Yakni, masifikasi kampanye gerakan nasional Budaya Sensor Mandiri melalui Gerakan *LSF Goes to Campus*, *LSF Goes to School* dan *LSF Goes to Community,* dengan jumlah sasaran yang telah kami capai sebanyak 20.000 (dua puluh ribu orang), yang kemudian tergabung dalam komunitas #Sahabat Sensor Mandiri.

*Aksi Pertama* yang kami lakukan adalah memproduksi sebanyak 20 konten literasi tontonan Budaya Sensor Mandiri (BSM), dan mempublikasikannya melalui pelbagai media, baik televisi, bioskop, radio, media sosial maupun jaringan teknologi informatika. *Jingle* Budaya Sensor Mandiri dan maskot Badak Jawa, merupakan konten kampanye Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri, yang saat ini sudah semakin familiar di kalangan penonton film.



**Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Radio Ardan Bandung, 2021**

*Aksi Kedua*, Kami telah memperkuat kerjasama nasional dengan Pemerintah, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Organisasi Film, Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Saat ini kami telah melaksanakan Memorandum of Understanding (MOU) dengan 64 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, 7 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, dan 8 Organisasi Profesi dan Organisasi Masyarakat. Aksi kerjasama tersebut dilakukan untuk mempercepat proses sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Selain kerjasama nasional, kami juga telah melakukan penjajakan kerjasama secara internasional, di antaranya dengan Lembaga Penafis Film Malaysia (LPF), dan Korea Media Rating Board (KMRB).

*Aksi Ketiga*, Kami melakukan program inisiasi Desa Sensor Mandiri (DSM), agar nilai-nilai budaya sensor mandiri langsung ditujukan kepada kelompok sasaran paling bawah yakni, masyarakat desa. Sejak 2020 kami telah menginisiasi 7 (tujuh) Desa Sensor Mandiri di 6 (enam) Provinsi seluruh Indonesia. Antara lain di Desa Tigaherang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Desa Manguharjo di Kota




Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Kampus Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Bersama Walikota dan Rektor, 2021

Madiun, Jawa Timur. Desa Gelanggang di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa Karang di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Desa Candi Rejo di DI Jogjakarta. Dan Desa Klungkung di Kabupaten Klungkung, Bali.

*Aksi Keempat*, Kami melakukan penelitian tentang Budaya Sensor Mandiri, melalui survei nasional dan penelitian tematik tentang perfilman, kriteria penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri, sebagai upaya untuk mewujudkan program yang berkualitas, dan yang pelaksanaannya didasarkan pada hasil penelitian dan riset.

Upaya Lembaga Sensor Film untuk terus melakukan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri secara masif dan berkelanjutkan, melalui Catur Aksi Budaya Sensor Mandiri. Yakni, masifikasi kampanye, produksi konten literasi, inisiasi desa sensor mandiri, serta penelitian dan kerjasama, perlu terus dilakukan. Dengan harapan, literasi tontonan publik khususnya anak-anak, semakin meningkat dan berkualitas.

***Kelima, Hadir Membangun Kebijakan Berbasis Data Penelitian***

Penelitian yang dilakukan Lembaga Sensor Film (LSF: 2022) menemukan fakta bahwa, akses anak terhadap media tontonan semakin beragam, bervariasi dan meningkat, baik jenis maupun kuantitasnya. Hasil penelitian itu menjelaskan bahwa sebesar 76,1 persen anak, mengakses tontonan melalui media jaringan teknologi informatika berbasis internet; sebanyak 22,0 persen melalui televisi; dan 2 persen sisanya melalui bioskop. Sedangkan tempat anak mengakses tonton-

an adalah di kamar pribadi sebanyak 78,2 persen, sementara 35 persen anak menyatakan tidak mendapatkan pengawasan dan bimbingan dari orang tua dalam mengakses tontonan.

Perubahan teknologi informasi yang begitu cepat, terlihat berpengaruh signifikan terhadap perubahan pola edar film dan iklan film. Saat ini, film dan iklan film tidak hanya ditayangkan di bioskop, namun dapat secara bebas diakses melalui layanan *over the top* (OTT). Aplikasi menonton film tumbuh seperti jamur di musim hujan, dengan konten yang tidak terkontrol dan patut diduga bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, karena sarat dengan muatan kekerasan, pornografi, pornoaksi, diskriminasi, eksploitasi, kebencian, kriminalitas, horor, sadisme dan perilaku negatif lainnya.

Permasalahan itu berkorelasi positif dan signifikan dengan kasus-kasus pelanggaran hak anak. Berdasarkan data KPAI (2021), terdapat 5.953 (lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga) kasus pelanggaran hak anak, dengan kasus tertinggi terkait perlindungan khusus anak, yakni anak yang menjadi korban sebesar 2.982 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua) kasus. Termasuknya di dalamnya adalah anak yang menjadi korban pornografi dan *cyber crime* (KPAI: 2021).

Data dan fakta hasil penelitian di atas, menemukan korelasi bahwa tontonan yang mengandung muatan negatif, memiliki pengaruh signifikan terhap perilaku dan tumbuh kembang anak, mengingat sifat dasar anak adalah imitatif, menirukan apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang disaksikan. Hal itu berkorelasi dengan hasil penelitian Lembaga Sensor Film (LSF: 2022) yang menemukan fakta, sebesar 26 persen anak memiliki persepsi dan anggapan bahwa konten, cerit,a dan adegan di dalam film sebagai bagian dari kenyataan atau kisah nyata.



## JATI DIRI:

| | |
|---|---|
| **Nama Lengkap** | : Naswardi |
| **Tempat & Tanggal Lahir** | : Balimbing, Rambatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu, 16 Juli 1983 |
| **Nama Istri** | : Ners, Fitri Fujiana, S.Kep, M.Kep, Sp.Mat |
| **Nama Anak** | : Muhammad Fawwaz Nafi, Fathian Shaquille Nafi, Farzana Sameya Nafi |
| **Email** | : nas_jj@yahoo.co.id |

## RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 06 Balimbing, Sumatera Barat (1996)

SMP Negeri 03 Rambatan, Sumatera Barat (1999)

SMK Negeri 1 Batusangkar, Sumatera Barat (2002)

S.1 Ekonomi, STAIN Batusangkar, Sumatera Barat (2007)

S.2 Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jakarta (2009)

S.2 Ekonomi dan Keuangan, Universitas Trisakti Jakarta (2015)

S.3 Ilmu Manajemen, Universitas Negeri Jakarta (2018)

**Gelar: Dr. MM., ME**

## RIWAYAT PENGHARGAAN

Mediator Tersertifikasi (2017)

Penulis Skripsi Terbaik di STAIN Batusangkar (2007)

## RIWAYAT PENGALAMAN

Ketua Komisi III Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, (2020-2024) - Analis di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (2011-2019) - Wakil Ketua Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, (2016-2019) - Ketua Pusat Kajian dan Riset Perlindungan Anak (PAKAR PA), (2020-2024) - Ketua Forum Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-Panti Sosial Asuhan Anak, (2015-2020) - Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi DKI Jakarta, (2015-2024) - Ketua Lembaga Perlindungan Anak dan Keluarga Indonesia, Aplikasi Perlindungan Anak Online PandawaCare, (2015-2024) - Direktur Jurnal Ilmiah Puskapu Jakarta,

(2018-2024) - Wakil Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. (2004-2007) - Ketua Umum Dewan Kerja Cabang, Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. (2002-2004) - Penelitian Tentang Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri (2023) - Survei di Jabodetabek tentang Kriteria Penyensoran dalam Perspektif Perlindungan Anak (2022) - Survei Nasional tentang Kualitas Literasi Tontonan (2021) - Survei Nasional Akses dan Kualitas Tontonan Publik di Masa Pandemi Covid 19 (2021) - Survei Nasional Kualitas Tontonan Perspektif Konten Kreator (2020) - Survei Kualitas Lembaga Pengasuhan Anak di Indonesia (2019) - Survei Nasional Kualitas Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKS) di Indonesia (2018) - Survei Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Taman Penitipan Anak (2017) - Survei Nasional Kualitas Pengasuhan Anak, telaah kebijakan pemenuhan pengasuhan hak anak (2016) - Survei Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (2015)

## RIWAYAT KARYA

*Evaluation Of Community Services and Mediation Services Infringement of Childrens Rights in The Commission of Indonesian Child Protection.* International Journal of Human Capital Managemen, Vol.1. No. 2. 2017. - *Indonesia Darurat Perlindungan Anak,* Opini, Harian Umum Singgalang, Januari 2012. - *Manajemen Keluarga Basis Perlindungan Anak dari Ancaman Kejahatan Media Televisi,* Opini, Warta KPAI (2011). - *Dampak Pengasuhan dan Upaya Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum.* KPAI (2018). - *Pengawasan Pemenuhan*

*Hak Pengasuhan Anak di Indonesia.* KPAI (2017). - *Telisik Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Masalah dan Faktual.* KPAI (2017). - *Harapan dan Realita 2 Tahun Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* KPAI (2016). - *Kualitas Pengasuhan Anak di Indonesia, Hasil Survey Nasional dan Tela'ah Kebijakan Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak di Indonesia.* KPAI (2015).

# RINGKASAN
## Dr. Naswardi, MM.,ME

Lahir di Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Sabtu, 16 Juli 1983, Dr. Naswardi, MM, ME, Ketua Komisi III Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia, ini membidangi sosialisasi, kerjasama antarlembaga, penelitian dan pengkajian. Menjadi Anggota LSF (2020-2024) dari unsur masyarakat dengan bidang keahlian perlindungan anak, ia aktif menulis, meneliti dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis pada bidang perlindungan anak. Memiliki sertifikat sebagai mediator anak dan berpengalaman selama 10 (sepuluh) tahun sebagai analisis dan tenaga ahli di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ia berkomitmen untuk terus hadir "Mewujudkan Tontonan yang Ramah Anak."

Ia ingin mewujudkannya melalui inovasi pada peningkatan kualitas penilaian dan penelitian atas film sebelum dipertunjukan kepada publik, dan meningkatkan kualitas literasi tontonan anak. Sebagaimana mandat dari *United Nations Convention on the Rights of the Child,* anak berhak mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya, sehingga kesadaran menonton sesuai usia diharapkan menjadi budaya baik dalam menonton, khususnya bagi anak-anak.

Bentuk kehadiran, yang sudah saya gagas dan laksanakan dalam mewujudkan Tontonan Ramah Anak yakni *Pertama*, Hadir memperkuat lembaga sensor film, yang pelayanannya mudah, cepat, terbuka, transparan dan informatif. *Kedua,* Hadir mewujudkan penyensoran film yang berkualitas, dengan penggolongan usia tertentu. *Ketiga*, Hadir Mewujudkan Tontonan yang Ramah Anak. *Keempat*, Hadir Meningkatkan Kualitas Literasi Tontonan Publik, melalui sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang masif dan berkelanjutkan, dengan program inovasi *LSF Goes to Campus*, *LSF Goes to School* dan *LSF Goes to Community,* inisiasi Desa Sensor Mandiri dan inisiasi gerakan komunitas Sahabat Sensor Mandiri yang saat ini sudah berjumlah 20.000 Orang. *Kelima,* Hadir Membangun Kebijakan Berbasis Data Penelitian, melalui penelitian dan pengkajian yang berkelanjutkan terkait perfilman, penyensoran dan literasi tontonan, untuk menghasilkan program yang berkualitas, tepat sasaran, efektif dan efisien.





# Jatuh Cinta dari Film ke Film

**Noorca M. Massardi**
Ketua Subkomisi Dialog

Saya lahir di Subang, Jawa Barat, pada Minggu, 28 Februari 1954 sebagai anak kelima dari 12 bersaudara, dengan komposisi satu anak perempuan (nomer dua) dan sebelas lelaki. Bapak kami, Mas Sardi (alm), adalah pekerja keras asal Jatibarang, Jawa Barat. Konon, Bapak pernah bekerja sebagai mekanik di Bandung. Sedang Emak saya, Mukinah Massardi (almh), asal dari Maos, Cilacap, Jawa Tengah. Mereka bertemu di Bandung, lalu menikah dan kemudian tinggal di Pegaden Baru serta membuka bengkel sepeda di sana. Pegaden Baru adalah kota kecil di jalur pantai utara, yang memiliki Stasiun Kereta Api. Di jalur kereta arah Cirebon, itulah Bapak punya banyak kerabat dan saudara, yang sering saya kunjungi ketika bertualang sendirian naik gerbong kereta api barang secara gratis: Cipunegara - Haurgeulis - Jatibarang - Indramayu - Cirebon.

Dari Pegaden Baru orangtua kami pindah ke Subang, 15 kilometer arah ke Bandung, dan membuka usaha bengkel sepeda juga - yang pertama di kota Subang. Bapak tidak hanya memperbaiki, tetapi juga membuat sepeda sendiri. Memotong, menyambung, membengkokkan pipa besi dan mengelasnya menjadi rangka, lalu mengecat dan merakitnya menjadi sepeda siap pakai. Semua suku cadangnya dibeli di toko khusus sepeda yang sudah ada di Kota Subang. Sementara Emak, yang buta huruf sejak kecil hingga wafat, adalah ibu rumah tangga yang sabar, dan selalu membantu Bapak menambah penghasilan dengan membuka warung, di sudut bengkel. Mulai dări jualan buah-buahan sesuai musim, atau menjual rujak dań gado-gado yang diuleknya sendiri, sampai akhirnya membuka restoran sate dan gulai *a la* Cirebon dengan nama "Rumah Makan Goncang Lidah."

## Noorca M. Massardi

Sebagai anak kembar nomer lima dan enam - dengan Yudhistira Ardi Noegraha - sejak sekolah Taman Kanak-Kanak, kami selalu bersama dan berada di kelas yang sama. Namun, ketika duduk di kelas dua Sekolah Rakyat (SR) Negeri I, Subang, saat kenaikan ke kelas tiga, adik kembar saya itu dinyatakan tidak naik kelas. Bukan karena faktor nilai di rapor ternyata, melainkan karena guru-guru dan kepala sekolah sengaja memisahkan kami, agar mereka tidak selalu tertukar. Akibatnya, Yudhis marah dan mungkin dendam sampai sekarang he3 … Walau perbedaan umur kami hanya lima menit, ketertinggalan setahun itu ternyata berdampak cukup panjang dalam jalur hidup dan takdir kami. Saya selalu selangkah lebih dulu, hampir dalam segala hal. Misalnya, hijrah ke Jakarta lebih dulu. Atau karya tulis saya dimuat di media massa lebih dulu, walau dalam hal mengarang, sesungguhnya Yudhis sudah lebih dulu ketimbang saya. Saya juga lebih dulu memenangi lomba penulisan lakon, lebih dulu memimpin grup teater, lebih dulu ke luar negeri, lebih dulu menikah, lebih dulu punya anak, lebih dulu punya menantu dan cucu, dan lebih dulu memimpin media massa, dan seterusnya.

Sejak hijrah dari Jogja usai tamat sekolah di Taman Dewasa Jetis, saya nekad untuk merantau dan berkiprah di bidang penulisan puisi dan prosa di Jakarta pada 1969. Yudhis sendiri baru ikut hijrah ke Jakarta pada 1972. Dan, setelah malang melintang mencari penghidupan, karir, dan prestasi sebagai pengarang, baru pada awal 1976 saya dan Yudhis ditawari bekerja resmi di sebuah majalah yang dipimpin pengarang dan pewarta terkenal Teguh Esha (alm). Teguh Esha adalah pengarang produktif yang banyak menulis menulis novel. Karyanya yang paling terkenal adalah *Ali Topan Anak Jalanan* yang kelak difilmkan, dengan *soundtrack* karya Guruh Soekarnoputra. Namun setelah ikut menggarap tiga edisi awal, saya terpaksa meninggalkan majalah *Le Laki. S*aya harus berangkat ke Paris, Perancis, untuk menyusul pacar saya Rayni, yang selulus SMA, untuk melanjutkan studinya, "diungsikan" kedua ortunya ke Perancis. Mungkin, agar tidak terlalu lama berteman dengan saya: seniman yang barangkali dianggap tidak jelas masa depannya. Sebelum ke Paris, Rayni sendiri sempat kuliah setahun di Sekolah Tinggi Publisistik (STP), yang kampusnya di dekat sekolah Kanisius, di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Sebagai awal cerita, saya ingin mengisahkan bagaimana awal mula dan "hubungan cinta" saya dengan film dan dunianya. Saya pertama kali mengenai film dan menonton bioskop ketika masih duduk di Sekolah Rakyat (SR) di Subang. Karena rumah makan merangkap bengkel sepeda milik kedua orangtua kami berada di tengah kota Subang, lokasinya dekat sekali dengan gedung bioskop. Di Subang sendiri, saat itu ada dua bioskop "kembar" yakni bioskop "Chandra" di tengah kota dan bioskop "Kirana" agak di pinggiran kota. Keduanya konon milik keluarga pengusaha dan penguasa jaringan bioskop di kawasan Jawa Barat.

Karena keluarga kami kenal baik dengan penjaga bioskop, saya sering di-

bolehkan menonton bioskop gratis, terutama dari belakang layar. Layarnya mungkin terbuat dari bahan kain putih tebal. Sehingga, saya menonton dengan tayangan dan teks terjemahan terbalik. Tapi sering pula saya diselundupkan nonton di dalam gedung. Terutama di "Kelas Kambing" alias kelas tiga, dengan bangku-bangku panjang tanpa sandaran. Sedangkan kelas dua dan kelas satunya menggunakan deretan kursi kayu dengan sandaran yang diberi nomer. Sementara kelas VIP-nya berada di balkon, yang harga tiketnya tentu lebih mahal, dengan jumlah kursi lebih sedikit. Mungkin hanya ada tiga deret kursi.



**Emak dan Bapak**

Jadi, sejak kecil saya sudah sering menonton



**Sembilan Keluarga Massardi sebelum bertambah menjadi 12 orang. Atas ki-ka: Djamhuri HS (No.1) dan Andhar (No.9), Emak, Bapak; dan bawah ki-ka: Antho (No.8), Adhie (No.7), Yudhis (No.6), Noorca (No. 5), Ade (No.4), Nanang (No.3) dan Siti Aminah (No. 2)**

film barat, film India, film dari negara Asia Tenggara, serta tentu saja film Indonesia. Nama-nama pemain yang saya kenal dan hapal saat itu antara lain Shakila dan Mahipal dari India. P. Ramlee dari Malaya (kemudian menjadi Malaysia), atau Tony Curtis, Robert Mitchum, dan John Wayne dari Amerika Serikat, yang biasanya tampil dalam film-film drama dan terutama Western. Serta tentu saja Charlton Heston, aktor film kolosal *The Ten Commandments* (Cecile B. DeMille, 1956), *Ben-Hur* (William Wyler, 1960), *El Cid* (Anthony Mann, 1961), dan Kirk Douglas dengan filmnya *Spartacus* (Stanley Kubrick, 1960). Sedangkan para aktor dan aktris Indonesia yang terkenal saat itu adalah Bambang Hermanto, Bambang Irawan, Chitra Dewi, Rima Melati, Nani Wijaya, Mieke Wijaya, Aminah Tjendrakasih, Wolly Sutinah, dan lain-lain.

Kecintaan saya pada film semakin berumbuh ketika saya sudah hijrah ke Jakarta, dan aktif bersastra dan berteater di GRJS Bulungan, pada 1972-1976. Terutama karena letak GRJS Bulungan dekat dengan bioskop New Garden Hall, bioskop Kebayoran di Blok M, bioskop Majestic di Pasar Majestik, serta bioskop Benjamin di Jalan Iskandarsyah. Apalagi teman saya di Bulungan, penyair Adri Darmadji Woko, yang juga pecinta film, sering mengajak saya menonton, termasuk film-film India. Antara lain film berjudul *Bobby* yang tayang di bioskop Rivoli, di Jalan Kramat Raya, yang sangat mengesankan. *Bobby* ternyata menjadi *blockbuster* serta menempati peringkat ke-20 film India terlaris sepanjang masa.

Setiap kami menerima honor dari tulisan-tulisan yang dimuat di koran, dan majalah, selain untuk makan, sisanya sering kami pakai untuk menonton bioskop. Kadang nonton bareng kadang pula hanya berdua. Yang menarik, pada masa itu, ternyata banyak sekali film Perancis dan Italia yang tayang di Indonesia, baik versi bahasa Inggris maupun versi bahasa Perancis. Mulai dări *genre* komedi, western, drama, laga, perang, sampai *romance*.

Aktor Perancis yang terkenal di Indonesia ketika itu adalah Alain Delon dan Jean Paul Belmondo. Delon sendiri tampil dalam film "neo-noir" *le Samourai* (Jean-Pierre Melville, 1967), *le Clan des Siciliennes* (Henri Verneuil, 1969), *Borsalino* (Jacques Deray, 1970), *Indian Summer* (Valerio Zurlini, 1972), *Borsalino & Co.* (Jacques Deray, 1974), *Flic Story* (Jacques Deray, 1975), dan *Zorro* (Duccio Tessari, 1975). Aktrisnya adalah Catherine Deneuve, dan Michelle Mercier dengan *franchise* film *Angélique* (Bernard Borderie). Sedangkan "*bomb sex*" Perancis saat itu adalah Brigitte Bardot dan Mylène Demongeot. Sementara komedi *slapstick* diwakili film *franchise The Crazy Boys* (*Les Chariots* karya Claude Zidi) yang menampilkan empat sekawan bodoh, serta film-film yang dibintangi komedian Louis de Funès, yang lucunya khas Perancis. Film Perancis "serius" yang mengejutkan karena mendadak jadi *box office*, khususnya di Jakarta, adalah *l'Histoire d'Adèle H (The Story of Adèle H)* karya sutradara Francois Truffaut (1975). Dibintangi aktris muda Isabelle Adjani (Adele Hugo), dan

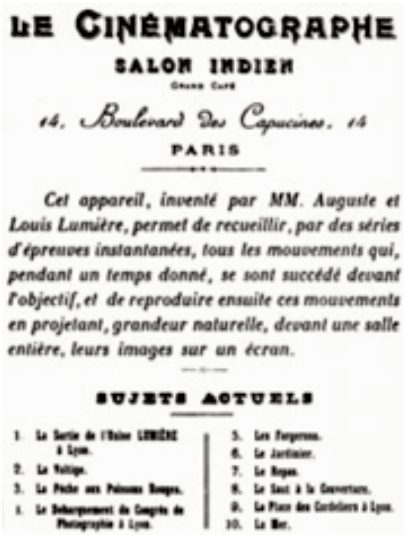

LE CINÉMATOGRAPHE

SALON INDIEN

Grand Café

14, Boulevard des Capucines, 14

PARIS

*Cet appareil, inventé par MM. Auguste et Louis Lumière, permet de recueillir, par des séries d'épreuves instantanées, tous les mouvements qui, pendant un temps donné, se sont succédé devant l'objectif, et de reproduire ensuite ces mouvements en projetant, grandeur naturelle, devant une salle entière, leurs images sur un écran.*

SUJETS ACTUELS

1. La Sortie de l'Usine LUMIÈRE à Lyon.
2. La Voltige.
3. La Pêche aux Poissons Rouges.
4. Le Débarquement du Congrès de Photographie à Lyon.
5. Les Forgerons.
6. Le Jardinier.
7. Le Repas.
8. Le Saut à la Couverture.
9. La Place des Cordeliers à Lyon.
10. La Mer.

Bruce Robinson (Letnan Albert Pinson), film itu berkisah tentang putri kedua sastrawan besar Victor Hugo, Adèle Hugo, yang jatuh cinta sepihak kepada serdadu Inggris Letnan Albert Pinson.

Ketika Rayni dikirim orangtuanya untuk melanjutkan studi di Paris, Perancis, ia kuliah di Fakultas Sinematografi Universitas Paris III, Sorbonne-Nouvelle. Saya yang kemudian menyusulnya ke Paris, setiap menjemput Rayni ke kampus di Censier-Daubenton, sering ikut duduk menghadiri kuliahnya. Dari situlah saya baru paham betapa film dan industri film Perancis memiliki keunikan dibanding film-film negara lain. Paris sendiri merupakan kota kelahiran film yang dibaptis sebagai Seni Ketujuh (*le Septieme Art*) — setelah sastra, teater, musik, tari, seni suara, dan seni rupa — dan ditandai dengan penayangan perdana film pendek menggunakan proyektor yang disebut *le cinematographe* karya Auguste dan Louis Lumiere bersaudara, di ruang bawah tanah Grand Cafe, Paris, pada 28 Desember 1895.

Paris memang merupakan surga bagi film. Selain bisa menonton semua *genre* film di ruang kuliah, sejak periode kelahiran film sampai karya film mutakhir, film-film monumental sepanjang sejarah film, juga bisa ditonton di bioskop-bioskop kecil di Paris. Seringnya penayangan film secara tematik atau retrospektif karya sutradara tertentu, itu sangat memungkinkan bagi kami untuk mengetahui dan mempelajari riwayat penciptaan setiap karya sutradara dunia, serta apa ciri khasnya, apa peran dan sumbangsihnya bagi industri dan sejarah perfilman, serta bagaimana film itu dibuat. Apalagi para dosen di kampus Rayni, hampir semuanya penulis teori dan kritik film, terutama dari majalah *Cahiers du Cinema*, serta pakar teori dan sejarah film Perancis, yang kemudian banyak menjadi sutradara terkenal. Sekadar informasi, majalah *Cahiers du Cinema* merupakan satu-satunya majalah serius tentang film, dan menjadi kiblat serta rujukan para sineas dan penulis kritik film dunia. Walau untuk memahami gaya bahasa dan gaya penulisannya sangat tidak mudah, kendati tidak bersifat akademik.

Tradisi kritik film yang membahas film dari segi estetik, *semiologique* (pengamatan terhadap setiap tanda dan penanda dalam sebuah karya film), serta ideologis, itu terutama dikembangkan teoresi Andre Bazin (penulis *Qu'est-ce que le cinéma?*) dan kelompoknya dari *Cahiers du Cinema.* Termasuk di dalamnya adalah para tokoh film

gelombang baru (*nouvelle vague)*: Francois Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, Claude Chabrol, Alain Resnais, dll. Berkat mereka itulah kemudian dikenal apa yang disebut *"politique des auteurs"* yakni sineas yang menyutradarai dan menulis skenarionya sendiri, serta memiliki kewenangan mutlak menentukan filmnya (*director cut*), sehingga memiliki keunikan masing-masing. Mereka itulah yang disebut sebagai *"auteur"* bukan semata-mata *realisateur (director)*. Istilah itu oleh teoresi anglo-saxon kemudian diterjemahkan sebagai *"author theory"* yang berpengaruh hingga sekarang. Selain mengenal dan memahami para *auteurs* dari "gelombang baru" Perancis, saya juga mulai mengenal dan mencintai karya-karya para *auteurs* dari pelbagai negara lain, yang sangat menarik sebagai bahan rujukan dan kajian. Dan, semua itu terkatualisasikan ketika hampir setiap tahun, antara 1978 saat menetap di Paris, sampai dengan 2000 sesudah tinggal di Jakarta, saya menghadiri dan meliput Festival Film de Cannes, dan kemudian juga Tokyo International Film Festival. Baik atas nama media maupun secara pribadi.

Pada 1978, novel pertama saya *Sekuntum Duri*, dimuat sebagai cerita bersambung di Harian *Kompas.* Sebuah prestasi tersendiri bagi saya, karena tidak sembarang penulis karyanya bisa dimuat koran nasional terkemuka itu. Saya merasa bangga karena bisa sejajar dengan Marga T, Kuntowijoyo, Ashadi Siregar, dan JB Mangunwijaya, yang setelah novelnya dimuat sebagai cerber di *Kompas*, kemudian difilmkan. Sesudah diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama, novel *Sekuntum Duri* kemudian dibeli untuk difilmkan oleh produser Lucy Sukardi, dan disutradarai Bobby Sandi, dengan pemain Lydia Kandou dan Herman Felani. Skenarionya saya tulis sendiri, dan transaksi pembayarannya dilakukan di apartemen kami di Paris, bahkan produsernya menginap di apartemen kami di 58, Rue de Belleville, Paris 20.

Sepulang dari studi di Perancis, awal 1982, Rayni sempat diminta mengajar dan menjadi asisten dosen Djadoeg Djajakusuma, tokoh perfilman seangkatan Usmar Ismail, yang mengajar sinematografi di Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ), sebelum kemudian menjadi Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (FFTV-IKJ). Beberapa waktu kemudian, ketka saya menjadi pewarta di Harian *Kompas*, saya juga diminta mengajar di kampus yang sama, menggantikan Parakitri T. Simbolon, untuk mengajar Sejarah Film Dunia, khususnya tentang *nouvelle vague* di Perancis dan Neo-Realisme Italia. Setelah satu semester, saya berhenti mengajar dan fokus sebagai pewarta di *Kompas*. Sementara Rayni, pada 1984 sampai 1986, diminta Sutradara Arifin C. Noer menjadi *Continuity* dan melakukan riset serta wawancara sejumlah tokoh, untuk film *S.O.B.* produksi Perusahaan Film Negara (PFN), yang kemudian diganti judulnya menjadi *Penumpasan Penkhianatan G30S/PKI.* Rayni dan Jajang C. Noer, adalah dua kru perempuan dari seluruh tim yang ada. Dua tahun kemudian, Rayni juga diminta




**Pembawa Acara "Cinema-Cinema" dengan Zoraya Perucha - 1990-1993**

**Dengan Bintang Tamu: Widyawati**

sebagai *continuity* dan pencatat skrip, untuk film *Matahari-Matahari*, karya sutradara Arifin C. Noer.

Berkat pengalaman terjun sebagai pekerja lapangan, Rayni kemudian diminta menjadi Bendahara Organisasi Karyawan Film dan Televisi (KFT) di bawah kepemimpinan Sophan Sophiaan, Slamet Rahardjo, dan Erros Djarot. Pada kepengurusan berikutnya, di bawah Slamet Rahardjo, saya diminta menjadi pengurus KFT, untuk bidang Kehumasan dan Luar Negeri. Saya bisa diterima sebagai anggota KFT karena pernah menulis skenario *Sekuntum Duri,* satu-satunya skenario film yang saya tulis sampai sekarang.

Pada 1990, ketika saya memimpin Majalah *Vista FMTV* di bawah bendera Surya Persindo milik Surya Paloh, saya diminta oleh mantan anak buah saya di Majalah Berita Bergambar *Jakarta-Jakarta,* Tino Saroengallo, untuk menjadi pemandu program lokal *Cinema-Cinema* di RCTI — stasiun televisi swasta pertama di Indonesia — berpasangan dengan Zoraya Perucha. Selama lebih dari tiga tahun memandu acara setiap sore akhir pekan, itu saya semakin banyak mengenal para insan dan tokoh perfilman. Termasuk dengan para petinggi di jaringan Cinema

XXI, yang menjadi sponsor acara program itu. Tak aneh bila sesudah saya dan Perucha digantikan Mayong Surtyolaksono dan Ira Wibowo, saya kemudian diminta menjadi *publicist,* untuk menyelenggarakan konferensi pers dan mengelola media pada setiap penayangan *press screening* film baru, khususnya dari *major studio* Hollywood dan film impor *indie*. Namun, karena kesibukan saya di tempat lain, urusan *press screening* itu kemudian ditangani oleh Rayni, sampai sekarang. Saya juga sempat menjadi juru bicara Cinema XXI (1992-2011), dan diangkat sebagai pengurus Organisasi Gabungan Perusahaan Film Seluruh Indonesia (GPBSI), di bawah kepemimpinan Djonny Sjafruddin (2005-2020). Di GPBSI saya adalah satu-satunya pengurus yang tidak punya bioskop.

Kiprah saya di dunia teater dimulai dari menulis naskah sebelum kemudian bergabung dengan Grup Teater Lisendra dari Remaja Yudha Club (RYC), yang berada di bawah naungan surat kabar Mingguan *Yudha Minggu*, dari harian *Berita Yudha* — kelak berganti nama menjadi *Buana Minggu* dan Harian *Berita Buana*. Dari Lisendra kemudian saya bergabung dengan Teater Ketjil pimpinan Arifin C. Noer. Lalu Tjok Hendro (alm), Dharnoto dan saya (sebagai "triumvirat" di Lisendra) membentuk dan melatih Teater Bulungan, grup *inhouse* dari Gelanggang Remaja Jakarta Selatan (GRJS) Bulungan. Dan akhirnya, saya membentuk Teater Tujuh, teater sekolah dari SMAN VII, Gambir, tempat saya mengajar ekstra kurikuler teater, yang terdiri dari 20-an murid pelbagai kelas, termasuk Rayni, yang kemudian menjadi istri saya.

Selain menjadi aktor dan sutradara, saya juga menulis lakon sendiri untuk kepentingan pementasan Lisendra. Kesempatan untuk itu terbuka ketika Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), untuk kepentingan Festival Teater Remaja (FTR) di Jakarta, mengumumkan lomba menulis lakon. Alhamdulillah, lakon sandiwara saya yang pertama, *Perjalanan Kehilangan* memenangi juara ketiga Sayembara Penulisan Lakon Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada 1974, saat usia saya 20 tahun. Saat itu, juara pertama dan juara keduanya adalah Putu Wijaya. Lalu, lakon kedua saya *Terbit Bulan Tenggelam Bulan,* memenangi juara kedua Sayembara Penulisan Lakon DKJ pada 1976, dengan pemenang pertama dan ketiga Putu Wijaya. Saya juga mengikuti Sayembara Penulisan Lakon Anak-anak Direktorat Kesenian Depdikbud, dan dua lakon saya *Tinton* (1976), dan *Mencari Taman* (1978) menang sebagai juara. Lalu, pada Sayembara Penulisan Lakon Pemerintah Daerah Jawa Barat lakon saya *Kuda-Kuda* terpilih sebagai juara (1975). Dan, lakon lain yang saya tulis dan pentaskan sebagai sutradara dan aktor adalah *Bhagawad Gita* (1972). *Kertanegara* (1973), dan *Growong* (1982).

Pada ajang Festival Teater Remaja (FTR) yang diselenggarakan DKJ, grup kami Lisendra terpilih sebagai salah satu pemenang selama tiga tahun berturut-turut, dua di antaranya saya menjadi sutradara dan ikut main, sehingga Lisendra berhak

mendapatkan subsidi produksi dan mendapat jatah untuk main di Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai grup "teater senior," sejajar dengan Bengkel Teater Rendra, Teater Populer, Teater Ketjil dan Teater Mandiri.

Sebagai penulis, bakat saya mungkin muncul karena semasa kecil, sejak kelas lima sekolah rakyat (SR), saya hobi membaca buku, mulai dari cerita silat Kho Ping Hoo, cerita detektif Indonesia dan terjemahan, cerita koboi, kisah petualangan Winnetou karya Karl May, komik silat, dan surat kabar. Sejumlah novel sastra Indonesia klasik terbitan Balai Pustaka, koleksi paman saya di Subang, juga selalu saya baca. Namun, yang paling mengesankan dan membuat saya penuh haru bahkan meneteskan sampai airmata adalah novel *Tenggelamnya Kapal Van Der*



**Menyutradarai Rayni dkk dari grup Teater Tujuh, dalam pentas lakon "Aduh" di Teater Arena TIM - 1975**

*Wijck* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA). Kisah kasih tak sampai pasangan Zainuddin dan Hayati, yang sangat melodramatis dan berujung kematian. Yang membuat saya kagum adalah, betapa karya sastra berbahasa Indonesia mampu membuat haru, bahkan bagi saya yang saat itu masih berumur 10 tahun. Kesan yang mendalam itulah mungkin yang sering membuat saya berkhayal dan bercita-cita penjadi pengarang terkenal. Dan, alhamdulillah, sesuatu yang tak pernah terbayangkan dulu kini terjadi. Pada 2023, putri sulung saya Cassandra Massardi, jebolan FFTV-IKJ Jurusan Penyutradaraan, diminta menulis skenario film biografi *Buya Hamka*, produksi bersama Starvision dan Falcon, berdampingan dengan penulis skenario Alim Sudio. Di dalamnya tentu saja ada

pembahasan tentang proses pembuatan novel *Tenggelamnya Kapal van Der Wijck* karya HAMKA itu.

Bakat khayal saya itu juga agaknya mulai "terungkit" ketika sekolah di SMP Negeri I, Subang, pada 1965, saya merasa "jatuh cinta" kepada teman siswi saya satu kelas, yang selalu menjadi juara kelas bersama saya, termasuk ikut kegiatan Pramuka bersama-sama. Namun, karena tak berani mengungkapkan perasaan itu, mulailah saya mencoba menuliskannya melalui puisi. Ketika cerita komik silat mulai marak, saya mencoba menulis cerita silat, dan meminta teman sekiolah saya membuat gambar menyerupai komik, sampai tamat. Tapi komik itu tidak pernah diterbitkan. Baru setelah saya pindah ke Jogjakarta, dan melanjutkan sekolah di Taman Dewasa, Jetis, saya mulai menulis cerita pendek, dengan tulisan tangan di atas kertas bergaris empat halaman folio ganda. Saya agak heran, karena adik kembar saya, Yudhistira, yang sudah lebih dulu pindah ke Jogja, ternyata juga bisa dan sudah mulai mengarang. Namun, hingga saat itu, dan mungkin karena tidak punya mesin ketik, kami tidak pernah mengirimkan karangan-karangan itu ke media massa.

Karena situasi ekonomi keluarga kami sangat memprihatinkan, saya memutuskan untuk kembali ke Subang, sekalian menemani Emak yang memilih tetap tinggal di Subang. Emak tidak mau mengikuti Bapak yang sudah pindah ke Jogja, dan kemudian menetap serta membuka bengkel sepeda di Wates, Kulonprogo. Saya dan adik-adik saya pindah ke Jogja, karena mengikuti jejak abang sulung kami, yang sekolah dan kuliah di Universitas Gadjah Mada. Sementara Emak hanya ditemani kakak perempuan kami nomer dua, dan abang saya nomer tiga, yang tetap sekolah di Subang, sampai kemudian mengambil S1 nya di Jogja.

Setelah tinggal di Subang, saya mendapat tawaran pekerjaan dari keluarga Tionghoa, kenalan kedua orangtua saya, untuk bekerja di rumahnya, sekaligus menjaga toko kain mereka di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Saya menerima ajakan itu, karena kebetulan, abang saya nomer tiga sudah bekerja di Jakarta, di keluarga Tionghoa asal Subang juga, yang punya toko kain besar di Jakarta Kota. Bila abang saya tinggal di rumah majikannya di sekitar Jalan Asem Lama (kini Jalan KH Wahid Hasyim) arah Tanah Abang, saya tinggal di rumah majikan di Kampung Bali Gang 25, tak jauh dari Pasar Tanah Abang.

Seusai kerja, pada sore dan malam hari, saya mulai mencoba membuat puisi dan cerita pendek, di atas kertas bergaris double folio, dengan tulisan tangan. Satu cerpen harus selalu tamat di halaman keempat. Sementara pada pagi hari menjelang kerja, saya selalu membaca *Kompas,* yang memuat opini para pakar dan intelektual Indonesia, serta liputan pelbagai acara kesenian dan kebudayaan, dan tentu saja cerita bersambung. Berkat pengetahuan dan rujukan bacaan itulah antara lain, yang kemudian mendorong dan memberanikan diri saya untuk menulis dan mengirimkannya ke media massa cetak. Karena di rumah majikan tidak ada mesin ketik, saya mem-

bawa semua karya tulisan tangan itu, ke rumah majikan tempat abang saya bekerja. Karena mereka punya mesin ketik bekas, abang saya pun selalu mengetikkan karya-karya saya itu. Dan, alhamdulillah, suatu ketika cerita pendek saya memenangi lomba menulis cerpen yang diselenggarakan koran *Warta Minggu,* edisi Minggu dari koran *Warta Harian* yang berafiliasi dengan Kosgoro. Yang membanggakan, ketua jurinya adalah sastrawan terkenal Iwan Simatupang, dan cerpen saya kemudian dimuat di *Warta Minggu.* Umur saya ketika itu masih 16 tahun.

Cerpen saya berikutnya dimuat di koran *Pos Kota Minggu* edisi Minggu dari harian *Pos Kota, yang* bagian awal dan ilustrasi cerpen di situ selalu dimuat di halaman satu, pojok kanan atas. Sejak itu, sejumlah puisi dan cerpen saya pun mulai dimuat di pelbagai koran edisi Minggu, yang memiliki lampiran kebudayaan serta rubrik cerpen dan puisi. Dan, ketika saya kabarkan ihwal pemuatan karya-karya tersebut kepada saudara kembar saya Yudhistira yang masih tinggal di Jogja, Yudhis semakin bersemangat untuk menulis dan lalu mengirimkan karya-karyanya kepada saya, untuk disampaikan kepada para redaktur di Jakarta. Dan, banyak yang dimuat. Yudhis saat itu sudah bergabung di Persada Studi Klub (PSK) pimpinan Umbu Landu Parangi (alm), yang menjadi redaktur di tabloid Mingguan *Pelopor Jogja,* bersama deretan penyair Jogja lain yang kelak hampir semuanya



Wakil dari The SAIF (RW Andrew) menyalami Noorca, ditengah mereka adalah pelukis Zaini anggota DKJ yang juga menghadiri acara tersebut, yang juga dihadiri oleh banyak pengagum Noorca yang terkenal sebagai seniman muda masa kini.
(teks SA/photo Dj Hutasoit)

**Berita Kompas setelah saya menerima Penghargaan The SAIF (The Society of American-Indonesian Friendship) sebagai Seniman Muda Kreatif - 1975**

terkenal: Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi AG, Suwarno Pragolapati, dll.

Setiap sore usai kerja, di rumah majikan — saya tidur di loteng ukuran satu dipan di atas dapur — saya selalu menonton siaran berita di televisi di sudut dapur. Suatu malam, saya menonton promosi teater yang akan dipentaskan di Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM), di Jl. Cikini Raya 73, yang baru diresmikan Gubernur KDKI Ali Sadikin. Ada beberapa orang mengenakan jas dan dasi yang tampil di layar kaca. Di antaranya adalah WS Rendra, pimpinan dan sutradara Bengkel Tetaer Jogja. Saat itu mereka mempromosikan pentas lakon *Menunggu Godot (En Attendant Godot)* karya Samuel Beckett, tokoh teater *absurd* asal Irlandia yang mukim di Paris dan menulis dalam bahasa Perancis. Pementasannya akan dilangsungkan di Teater Besar TIM pada 17-19 Maret 1970. Dan, entah *magnet* apa yang menyedot perhatian saya, sehingga saat itu saya bertekad dan memutuskan untuk menontonnya.

Saya meminta izin kepada majikan, meminjam sepeda untuk pergi ke TIM. Dan, itulah untuk pertama kalinya saya keluar malam. Dari Kampung Bali saya bersepeda menjemput abang saya di Jl. Asem Lama, lalu kami berdua boncengan menuju ke TIM. Setiba di depan loket Teater Besar TIM, ternyata semua tiket kelas satu dua dan tiga, sudah terjual habis. Yang tersisa hanya tiket VIP. Saya yang masih bercelana pendek, karena masih berusia 16 tahun ketika itu, merasa "tertantang." Selain karena sudah tanggung sampai di TIM, saya tak tahu lagi kapan akan bisa menonton Rendra. Terutama karena sepulang dari belajar teater di New York, Amerika Serikat, Rendra dan Bengkel Teaternya sudah menggegerkan media massa, saat mementaskan lakon pendek yang disebut sebagai "Teater Mini Kata" pada pembukaan TIM Juli 1969. Sesudah itu, Bengkel Teater juga mementaskan lakon klasik Yunani, *Oidipus Sang Raja* karya Sophocles terjemahan Rendra, pada November 1969. Pentas dalam gaya Batak, itu banyak dipuji para penulis kritik di semua media.

Akhirnya, dengan uang yang ada di dompet saya dan dompet abang saya, kami membeli dua lembar tiket yang harganya @ Rp 750, dan totalnya Rp 1.500. Jumlah itu sama dengan gaji saya sebulan. Begitu duduk di barisan depan, saya lihat banyak tokoh politik dan intelektual yang sering muncul di media massa. Pentas itu menampilkan Rendra sebagai Didi (Vladimir), Chaerul Umam sebagai Gogo (Estragon), Putu Wijaya sebagai Pozzo, Moortri Poernomo sebagai Lucky dan Azwar AN sebagai Bocah. Sebuah pentas teater modern yang menakjubkan, dengan jalan cerita yang aneh, lucu, dan *absurd*. Keempat peran itu menunggu seseorang bernama Godot, yang tak pernah datang hingga pentas berakhir. Itulah pentas teater modern pertama — sekaligus *absurd* — yang juga baru pertama kali saya tonton secara langsung, seumur hidup. Sebuah rujukan teks lakon dan pementasan yang sangat membekas, dan menjadi referensi utama bagi saya dalam penulisan dan pementasan teater




**Reuni dengan teman-teman teater Lisendra dan Teater Bulungan**

kemudian. Suatu pengalaman batin dan intelektual yang tidak pernah saya sesali, walau saya harus membayar tiket yang harganya selangit waktu itu. Dan, rasanya, saat itu juga, saya sudah merasa jatuh cinta pada teater.

Selain menonton berita di TVRI, saya juga sering memirsa acara tayangan live drama remaja di TVRI, yang saat itu masih hitam putih. Salah satu grup favorit saya adalah Teater Lisndra RYC pimpinan sutradara Tjok Hendro (alm). Berita tentang mereka selalu saya baca setiap hari Minggu di koran *Yudha Minggu.* Dan, terilhami oleh penampilan mereka, saya kemudian mencoba mengadaptasi sebuah cerita pendek terjemahan berjudul *Ivan The Terrible.* Ivan adalah Tsar pertama di kerajaan Rusia. Kisah singkat yang dimuat di majalah sastra itu saya adaptasi menjadi lakon remaja satu babak berjudul *Ivan yang Dahsyat.*

Pada suatu hari Minggu, saya mendatangi kantor redaksi koran *Berita Yudha/ Yudha Minggu*, di Jalan Tanah Abang II. Karena saya termasuk pembeli/ pembaca koran itu, saya tahu bahwa kelompok Remaja Yudha Club (RYC) selalu berkumpul dan latihan di sana setiap Minggu pagi. Banyak kegiatan yang mereka lakukan: menari, merangkai bunga, panjat tebing, naik gunung, menyanyi, dan teater. Di situ, saya ketemu dan berkenalan dengan orang-orang Lisendra. Mulai dari Tjok Hendro, Dharnoto, Annie van de Rob (kelak Annie Rai Samoen), Rani Rivai, Tizar Purbaya sampai Boy Saratoga. Saat itu saya memberikan naskah *Ivan yang Dahsyat* kepada Tjok Hendro, yang langsung membacanya sekilas. Tampaknya ia tertarik. Beberapa saat kemudian ia bilang akan menawarkan naskah itu

ke Ibu Puji dan Rd. Lingga Wisnu, penanggungjawab teater di TVRI Pusat. Sejak itu, setiap hari Minggu saya ikut kegiatan olah tubuh sebagai latihan dasar teater *a la* Bengkel Teater Jogja, karena kedekatan grup itu dengan Bengkel Teater. Dan, pada Minggu ketiga setelah perkenalan itu, Tjok memberitahu bahwa naskah saya *Ivan yang Dahsyat* diterima dan akan dipentaskan sebulan kemudian di TVRI.

Ketika *casting* dan *reading,* Tjok yang selalu menjadi sutradara, memilih saya memerankan tokoh utama Ivan. Saya yang belum pernah latihan *acting* apalagi main drama, tentu saja kaget dan senang. Dengan latihan kilat dan mengenakan kostum *a la* kerajaan, kami pun tampil *live* di studio TVRI. Mungkin saya masih sempat berkabar kepada Ibu di Subang, dan keluarga di Jogja, ihwal rencana pentas itu. Juga tentu saja ke keluarga majikan saya, dan tetangga di Kampung Bali. Itulah penampilan pertama saya seumur hidup, sebagai aktor drama di layar kaca. Di TVRI pula, satu-satunya kanal televisi di republik ini, yang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan, saat itu, saya memakai nama pentas: *Noorca van Subang*, mungkin ikut-ikut nama Annie van de Rob.

Sejak itu pula, hari-hari dan hidup saya tidak pernah lepas dari teater, hingga saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, dan mulai hidup sebagai "bohemian" alias menggelandang di Jl. Asem Lama, dengan mengandalkan pasokan makanan dari abang saya, dan dari honorarium tulisan di media cetak. Walau masih yunior di Lisendra, umur saya sudah 17 tahun, karena saya menjadi satu-satunya penulis lakon di Lisendra, saya kemudian didaulat juga menjadi sutradara dan sesekali ikut main. Terlebih, karena aktor Tizar Purbaya yang juga ikut bergabung dengan Teater Ketjil pimpinan Arifin C. Noer (alm), mengajak saya masuk Teater Ketjil, serta ikut latihan di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM). Ketika memperkenalkan diri kepada Mas Arifin C. Noer, saya juga membawa naskah drama baru tulisan tangan, dan meminta Mas Arifin untuk memberikan komentar. Sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan, sampai Mas Arifin wafat, dan pada suatu kesempatan, Jajang yang kemudian menjadi istri Mas Arifin, menyerahkan kembali naskah tulisan tangan itu. Yang pasti, setelah saya berhasil memenangi lomba penulisan lakon di DKJ, Mas Arifin mengakui bakat saya sebagai penulis lakon Indonesia masa depan, sebagaimana dikisahkan Remy Sylado (alm) kepada saya, ketika saya ikut menulis puisi-puisi *mbeling* yang diproklamasikan Remy di majalah *Aktuil*, Bandung.

Keanggotaan saya di Teater Ketjil, nyaris satu angkatan dengan Jajang C. Noer, dan Dery Sirna (istri Rudolf Puspa), yang kelak membikin grup Teater Keliling. Namun, karena kesibukan saya di Lisendra, di Tanah Abang, di GRJS Bulungan, dan kemudian di SMAN VII, Gambir, baik sebagai penulis, sutradara, aktor, dan pelatih drama, saya tidak bisa intens bergiat di Teater Ketjil. Mungkin saya hanya sempat terlibat dalam dua produksi Teater Ketjil. Yakni, *Perang Troya (Tidak)*

*Akan Meletus* (karya penulis dan diplomat Perancis Jean Giraudoux), dan *Mega-Mega* (karya Arifin C. Noer). Itu pun hanya sebagai figuran yang sekali melintas di atas panggung Teater Tertutup TIM. Dan, dunia teater terpaksa saya tinggalkan pada Maret 1976, karena saya harus berangkat ke Paris.




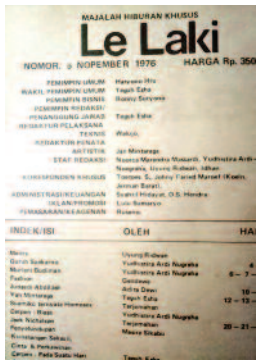




**Saya dan Yudhis diajak Teguh Esha menerbitkan Majalah Pria Le Laki - 1976**

Jurnalisme di Indonesia, mungkin profesi yang tak terpisahkan dengan dunia kepengarangan. Terutama karena dunia jurnalisme lebih memberikan "jaminan keamanan" bagi pemasukan rutin tetap setiap bulan, ketimbang dunia kepengarangan yang tak bisa selalu menghasilkan uang. Sebagai penulis lepas, yang tidak mengikatkan diri (bekerja) di media massa (terutama media cetak saat itu), saya cukup lama mengalami suka duka dan derita. Sebagai penulis puisi dan cerita pendek, "nasib" saya ditentukan oleh pilihan bahkan kebaikan hati para redaktur budaya di semua media. Apalagi untuk bisa terpilih, karya saya harus bersaing dengan puluhan bahkan ratusan penulis lain, yang naskahnya setiap hari diterima redaksi. Bila sedang nasib baik, satu puisi dan satu cerpen bisa dimuat pada satu bulan yang sama. Baik di media yang sama maupun di media berbeda. Artinya, setiap bulan akan mendapatkan honor, yang cukup untuk hidup sepekan sebagai lajang. Untuk setiap judul puisi, besaran honornya diukur dengan panjang pendeknya teks, seperti ukuran iklan, dihitung per milimeter/kolom. Semakin pendek puisi akan semakin kecil honornya. Sementara untuk cerita pendek, besaran honornya dihitung per judul, berapa pun panjang atau pendeknya. Yang pasti, cerpen tidak mungkin lebih panjang dari setengah halaman koran, atau empat halaman majalah.

Untuk "menyiasati" hidup dan mempertahankan eksistensi, selain menulis fiksi (puisi dan cerpen), saya kemudian menulis resensi buku, *review* seni pertunjukan dan film. Beruntung saya bisa berkenalan dengan Pak Kadjat Hartojo, salah seorang pimpinan harian *Suara Karya* (milik Golkar), yang juga menerbitkan *Suara*

*Karya Minggu (SKM)*, dan menjadi dosen di Universitas Indonesia. Suatu hari, saya membawa dua judul tulisan ke kantor *Suara Karya* di Jalan Tanah Abang III. Saya lalu diantar resepsionis untuk menyerahkan kedua naskah ketikan langsung itu ke Pak Kadjat. Saya dipersilakan duduk di hadapannya. Pak Kadjat yang berkaca mata tebal dan bersuara bariton, itu membacanya sekilas. Lalu Pak Kadjat memerhatikan saya sejenak, dan kemudian mengatakan bahwa kedua naskah itu akan segera dimuat pada dua pekan berurut-turut. Pak Kadjat pun memanggil Sekretaris dan meminta agar honor kedua naskah itu dibayar sekaligus saat itu juga. Saya tentu sangat terperangah dan takjub.

Ketika saya menandatangani bukti penerimaan, di atas *log book* tebal, dan melihat sederet nama penulis dan jumlah honornya, saya ternyata menerima honor yang sama dengan penyair tekenal Abdul Hadi WM, dan saat itu saya menerima dua kalinya. Jumlah itu, pada 1973 sudah sangat besar dan bisa untuk hidup selama satu bulan. Jumlah itu pun, merupakan jumlah honor terbesar yang pernah saya terima seumur hidup. Tak hanya itu, setelah menerima uang, Pak Kadjat juga langsung meminta saya untuk menjadi penulis tetap di *SKM*. Tawaran yang menakjubkan bagi penulis "gelandangan" seperti saya. Lalu saya diajak berkeliling ruang redaksi dan diperkenalkan ke seluruh jajaran redaktur yang ada. "Bung Noorca boleh datang setiap saat dan mengetik di sini," kata Pak Kadjat. Suatu keajaiban dan karunia Tuhan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan, karena kantor *SKM* di Jl. Tanah Abang III, posisinya paralel dengan kantor *Berita Yudha* (kemudian *Berita Buana*) di Jl. Tanah Abang II, maka saya bisa lebih mudah wara-wiri dari dan ke dua tempat itu. Baik untuk latihan teater maupun menulis atau mengirimkan tulisan. Dan, yang lebih penting lagi, saya bisa menumpang makan siang bersama secara gratis, yang selalu disediakan di *Suara Karya*.

Sebagai penulis di *SKM,* saya bisa menulis fiksi (cerpen dan puisi) juga resensi atau review seni pertunjukan (teater, tari, film) serta artikel atau esei bebas, yang terjamin pemuatannnya setiap pekan. Namun, karena tidak terikat sebagai karyawan, saya masih boleh menulis di media massa lain. Berkat penghasilan yang lumayan tetap itulah, selama bergiat sastra dan teater di GRJS Bulungan, hampir setiap pekan saya mampu mentraktir teman-teman di warung Tegal, di samping bioskop New Garden Hall. Selain berteater, saya juga menginisiasi penerbitan majalah *inhouse* GRJS Bulungan berjudul *Sirkuit,* yang memuat prosa, puisi, esei dan cerita bersambung. Majalah yang dicetak stensil elektronik itu, sempat memuat cerita bersambung saya berjudul: *Cassandra Arabella.* Nama Cassandra saya ambil dari salah seorang tokoh lakon *Perang Troya (Tidak) Akan Meletus,* tokoh cenayang yang setiap ramalannya tidak pernah didengar orang. Nama itu pula yang kemudian saya berikan sebagai nama putri pertama kami yang lahir di Paris: Cassandra Massardi.

Kepergian kekasih saya Rayni untuk melanjutkan studinya di Paris, pada Maret




**Mertua mengajak putri kami Cassandra, yang sudah tinggal di Jakarta, untuk berlibur akhir tahun ke Paris.**

1976, menimbulkan semangat dan tantangan tersendiri. Bagaimana pun, saya harus menyusulnya ke Paris. Alhamdulillah, tiba-tiba Teguh Esha mengajak saya dan Yudhis menjadi redaktur di majalah pria *Le Laki,* setelah saya menerima penghargaan *General Award in the Arts dari The Society for American – Indonesian Friendship, Inc* sebagai Seniman Muda Kreatif (1975). Dengan penghasilan yang ada, ditambah uang muka gaji saya tiga bulan dari *Le Laki,* saya bisa membeli tiket satu jalan ke Paris. Untuk urusan tiket, paspor dan visa Perancis, saya meminta tolong Mbak Amna Sardono, istri koreografer Sardono W. Kusumo, yang merupakan manajer berpengalaman dalam memberangkatkan rombongan seniman ke Paris.

Maka, perjalanan saya ke Paris, Perancis, pada Juni 1976, itu merupakan perjalanan pertama saya keluar dari Pulau Jawa, ke luar dari Indonesia, dan untuk pertama kalinya pula naik pesawat terbang. Perjalanan itu membawa sensasi tersendiri, karena bahasa Inggris saya pas-pasan, bahasa Perancis saya nol besar, dan saya tak punya bayangan sama sekali tentang Paris dan Perancis. Kecuali ihwal sejumlah nama pesohor, filsuf, penyair, pemain film, penulis lakon dan seniman yang sempat saya baca dan dengar di setiap diskusi di TIM. Saya juga tidak punya gambaran apa yang akan saya lakukan kelak untuk mencari nafkah, selain mungkin menjadi koresponden majalah *Le Laki,* serta koresponden majalah musik *Top* Jakarta*,* dan *Aktuil,* Bandung.

Untunglah kebijakan visa dan izin tinggal bagi warga asing di Perancis pada 1976, di bawah Presiden Valéry Giscard d'Estaing, tidak seketat sekarang. Visa turis saya bisa diubah menjadi zin tinggal sementara, sebagai visa *student (etudiant)*, selama saya terakredtasi di lembaga pendidikan yang ada. Saya pun kursus

bahasa Perancis berbayar di Alliance Française Pusat di Boulevard Raspail, Paris 6, dengan pengantar bahasa Perancis. Lalu, karena saya tidak mampu lagi membayar biaya kursus, saya belajar bahasa Perancis gratis di Fakultas Bahasa Asing Universitas Sorbonne Paris VII Jussieu, dengan pengantar bahasa Inggris. Rupanya, saya dan sejumlah peserta dari negara lain, belajar di ruang laboratorium bahasa. Tampaknya fakultas tengah mempelajari bagaimana pengucapan bahasa Perancis dilakukan oleh pelbagai bangsa asing. Dan, suara kami selalu direkam. Untuk memperlancar, saya pun rajin menonton acara televisi, terutama berita dan film, serta berlangganan koran terkemuka *le Monde* yang bahasa Perancisnya berat, mingguan berita *l'Express* yang lebih mudah, dan pelbagai koran, serta majalah ilmiah populer. Termasuk majalah berita bergambar *Paris-Match,* yang kelak mengilhami saya ketika diminta pimpinan Kelompok Kompas-Gramedia, Pak Jakob Oetama (alm), untuk memimpin Majalah Berita Bergambar *Jakarta-Jakarta,* yang saya ubah menjadi majalah berita bergambar pertama di Asia, dengan penampakan seperti majalah *Paris-Match*.

Setelah menikah dengan Rayni secara Islam di kediaman Dr. Boer Mauna, Atase Pers KBRI Paris, dan kemudian mencatatkan pernikahan kami di Kantor Walikota Mairie de Courbevoie, serta ketika kelak melahirkan putri pertama Cassandra di l'Hopitale Generale de Neuilly (sekarang Hospital Center Rives De Seine), tentu kami membutuhkan banyak biaya. Untunglah, semua proses itu diberikan Pemerintah Perancis secara gratis. Bahkan setiap bulan kami menerima *Allocations Familiales*, subsidi bagi anak pertama dan kedua untuk setiap keluarga, termasuk warga asing, yang jumlah tunjangannya cukup untuk membeli kebutuhan bayi sehari-hari setiap bulan. Sedang untuk kebutuhan kuliah Rayni dan saya, serta membayar sewa apartemen, listrik, air, dan gas, masih bisa dibiayai dari kiriman rutin ayah Rayni, yang setiap bulan dikirim dan diambil melalui rekening Rayni di Citibank, Paris.

Pada 1978, kami masih tinggal di Avenue Pierre Grenier, Boulogne-Billancourt, di seberang apartemen keluarga pasangan penyair Ramadhan KH, dan diplomat Pruistin Ramadhan, orang tua musisi Gilang Ramadhan. Sebelumnya, kami tinggal di apartemen di kawasan La Defense. Suatu hari, saya menerima surat berupa warkat pos (*aerogramme*) dari pimpinan MBM *Tempo* Goenawan Mohamad (GM), yang intinya meminta kesediaan saya untuk menjadi Koresponden *Tempo* di Perancis. Saya kaget dan bangga juga menerima surat yang bersifat personal dari budayawan dan jurnalis terkemuka Indonesia itu. Dan, itulah agaknya surat pertama dan terakhir yang saya terima dari Mas Goen. Tawaran Mas GM itu datang agak tepat waktu. Karena itu langsung saya iyakan. Apalagi saya dijanjikan akan menerima honor tetap US$ 100 setiap bulan, atau sekitar 500 francs Perancis, dengan kurs satu dollar AS di Indonesia sekitar Rp 625.

Pada pekan-pekan berikutnya, saya pun mulai rutin menerima kiriman MBM






**Dengan Nakita Massardi di depan ESJ Paris, di Place Saint-Germain-des-Pres, sebelum ESJ pindah ke Tolbiac (kanan)**

*Tempo*, dari Jakarta. Nama saya juga sudah dicantumkan di *masthead,* sebagai Koresponden *Tempo* di Paris, sederet dengan nama para koresponden *Tempo* lainnya di sejumlah negara. Padahal, saya belum menulis apa pun. Saya baru bisa menulis liputan pertunjukan musik untuk majalah *Top* dan majalah *Aktuil.* Terutama di panggung tertutup di Porte de Pantin dan di Bataclan. Antara lain pentas grup pop-rock Inggris Fleetwood Mac yang meluncurkan albumnya *Rumours* (terjual 40 juta kopi), Black Sabbath, John Mayall, Jack Bruce, Genesis, Rick Wakeman, dan grup punk-rock Ramones. Namun karena saya tidak tahu musik dan siapa gerangan personel grup-grup itu, sebelum dan sesudah menonton, baru saya cari tahu lagu apa saja yang mereka mainkan, dengan mendatangi toko musik terbesar di Perancis, *FNAC*. Yang menarik, setiap kali menonton, saya selalu bisa berdiri atau duduk di barisan terdepan, sambil memotret, hanya dengan menunjukkan kartu pers. Dan, setiap tulisan saya dimuat, majalah itu mengirimkan nomer buktinya dengan pos dan majalahnya digulung, tidak dimasukkan ke dalam amplop. Di dalam gulungan majalah itu, saya akan menemukan amplop yang dibungkus kertas karbon hitam yang di dalamnya terdepat lembaran dolar AS, yang nilainya selain sebagai pengganti uang tiket pertunjukan, juga cukup untuk menonton film, serta makan dan minum dalam satu hari.

Ketika *Tempo* meminta saya menjadi koresponden, mengingat *Tempo* adalah majalah berita, saya segera mencari tahu dan kemudian menjadi anggota Persatuan Pewarta Asing di Paris, yang kantornya di kawasan elite Avenue des Champs Elysees. Dari pengurus Asosiasi itulah saya mendapat info bahwa bila ingin diakui sebagai koresponden internasional, saya harus mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri Perancis. Sesuai arahan, saya kemudian diwawancarai para pejabat (intelijen) di kedua kementerian itu, sehingga saya mendapatkan kartu

pers dari Kemlu Perancis, yang bahkan bisa untuk meliput kegiatan di Istana Presiden, di Palais de l'Élysée. Sesuatu yang rasanya masih menggentarkan bagi saya, dan hingga saya pulang, saya tidak pernah datang Istana Presiden.

Mengapa saya katakan permintaan *Tempo* agar saya menjadi koresponen itu *agak* tepat waktu, tak lain karena untuk perpanjangan izin tinggal / kartu tanda penduduk (*carte de sejours*), saya tidak bisa selamanya memakai kartu *student* dari tempat kursus bahasa di Alliance Francaise, yang ada tingkat, kelas, dan waktunya. Saya mencoba konsultasi ke diplomat Perancis di Quai d'Orsay (Pejambon-nya Paris), apakah dengan status saya sebagai Koresponden Asing, saya bisa mendapatkan atau memperpanjang izin tinggal. Jawabannya negatif. Karena dengan status itu saya tidak boleh bekerja apa pun di Perancis. Saya harus punya rekening di bank yang menunjukkan bahwa saya mendapat gaji bulanan dari *Tempo*, sekurang-kurangnya sama nilainya dengan upah minimum pekerja di Perancis alias UMR atau SMIC (*salaire minimum interprofessionnel de croissance*), sebesar US$ 500 atau 2.500 Francs sebulan. Padahal, honorarium tetap bulanan saya dari *Tempo* hanya US$ 100 atau sekitar 500 francs. Apa akal?

Saya terpaksa membuka rekening di bank Perancis di Paris, dan meminta tolong kepada ayah mertua (ayahnya Rayni), Pak Anwar Abdoel Moein, agar mengirimkan US$ 500 per bulan, yang akan segera saya kembalikan beberapa waktu kemudian. Begitulah. Akhirnya, masalah izin tinggal dan karu pers serta rekening bulanan saya bisa teratasi. Namun, karena ongkos kirim balik uang pinjaman mertua itu cukup besar nilainya, akhirnya setiap bulan saya hanya bisa mengembalikan US$ 400. Sisanya yang US$ 100, selain dipakai untuk ongkos kirim balik, juga untuk menambah anggaran hidup kami. Soalnya, ayah Rayni selama ini sudah mengirim jatah hidup US$ 500 petr bulan, untuk uang kuliah, sewa rumah, bayar listrik dan air. Bila semula jatah bulanan itu direncanakan hanya untuk Rayni sendiri, maka setelah kami menikah dan punya anak, jatah itu harus cukup untuk hidup bertiga. Jadi, kami harus hidup super hemat, dan seringkali harus berpuasa, sampai menunggu kiriman rutin datang. Sementara, honor-honor dari tulisan saya dari Jakarta, hanya cukup untuk sekadar bisa jajan atau ngopi atau makan atau nonton bioskop satu kali. Sebab, yang kami utamakan adalah keperluan makan dan gizi serta popok untuk bayi kami Cassandra, yang bisa dibeli dan disiapkan untuk sebulan penuh, berkat tunjangan dari pemerntah Perancis. Dan, konon, tunjangan itu sesungguhnya akan terus diberikan hingga anak berusia 17 tahun.

Setelah merasa "resmi" sebagai pewarta, dan koresponden *Tempo,* akhirnya saya memutuskan bahwa untuk selanjutnya, kalau sudah pulang ke Jakarta, saya akan memilih jurnalisme sebagai profesi. Karena saya tidak melihat "masa depan" bila tetap hanya sebagai seniman, baik di teater maupun sebagai penulis prosa dan puisi. Contoh Goenawan Mohamad dan kawan-kawan penulis / sastrawan yang
















**Wawancara Ekslusif dengan Pemimpin Iran Ayatollah Khomeiny, di Perancis, menjadi Cover Story MBM *Tempo*.**

bisa hidup dari jurnalisme, semakin menguatkan niat saya. Namun, saya tidak punya latar pendidikan jurnalisme sama sekali.

Karena itulah, untuk memiliki diploma agar kelak bisa dipakai untuk melamar pekerjaan sebagai jurnalis, saya memutuskan mencari lembaga pendidikan jurnalisme yang *credible*. Akhirnya saya mendaftar ke Écoles Supérieures de Journalisme (ESJ), Paris, yang kampusnya saat itu berada di Place Saint-Germain-des-Prés no. 4. Plasa di depan Gereja Saint-Germain-des-Prés itu sendiri merupakan tempat berkumpulnya para pesohor di bidang politik, filsafat, sastra dan kebudayaan, sejak sebelum Perang Dunia II. Letak kampus ESJ ketika itu berada di sebelah cafe paling terkenal di Paris: Les Deux Magots, tempat pertemuan rutin filsuf Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir, serta Café de Flore, dan *brasserie* Lipp, tempat ngumpulnya para jurnalis, aktor dan politisi terkemuka Perancis. Di sekitar itu pulalah sejumlah penerbit terkemuka berkantor.

ESJ Paris yang berdiri sejak 1899, merupakan sekolah jurnalistik tertua di dunia, dan hingga hari ini sudah berumur 120 tahun. ESJ juga yang pertama kali meneri-

ma mahasiswa perempuan (1899), pertama kali menerima mahasiswa asing (1919), dan pertama kali memberikan gelar Master dalam jurnalisme (2004). Dan, sesuai perkembangan, sejak 1991 kampusnya pindah ke Rue Tolbiac, Paris 13. Setelah tiga tahun kuliah di ESJ, saya pun lulus dengan diploma, pada 1981, sehingga saya bisa kembali ke Jakarta dengan lega.

Selama tinggal di Paris, saya berhasil menulis novel pertama *Sekuntum Duri,* yang pada saat kami liburan ke Jakarta, pada 1978, saya kirimkan ke harian *Kompas*, dan tahun itu juga dimuat sebagai cerita bersambung. Bersamaan dengan liburan itu pula, kami menitipkan putri kami Cassandra ke *Atok* dan *Andung*-nya, alias mertua saya (ayah dan ibunya Rayni), di Jakarta. Itu pun atas permintaan mertua, agar kami bisa fokus untuk segera menyelesaikan studi di Paris.

Hidup dan tinggal di luar negeri mungkin masih dianggap hebat dan mewah. Apalagi di kota mode, anggur, parfum, keju, museum, dan kebudayaan seperti Paris. Namun bagi kami, kemewahan dan ke-*glamour*-an itu tidak bisa kami rasakan dan nikmati. Kami harus hidup hemat dan prihatin. Kami juga tidak bisa pergi liburan ke luar dari kota Paris. Kecuali karena nekad, kami pernah liburan musim panas naik kereta api dengan tiket student, dan menginap di hotel termurah di Venesia, Italia. Selain itu, karena kami tidak boleh dan tidak bisa bekerja, kami hanya bisa fokus kuliah, dan hidup sangat tergantung dari kiriman rutin mertua. Kenikmatan tinggal di Paris, pun baru bisa kami rasakan, bila kedua orangtua Rayni mampir ke Paris, sepulang dari undangan bos perusahaannya di Geneva, Swiss, setiap akhir tahun. Apalagi bila putri kami, Cassandra, diajak serta menengok kami. Kami baru bisa makan enak dan ditraktir di restoran yang sesungguhnya. Paris terasa sungguh indah he3…

Tugas sebagai koresponden majalah berita *Tempo*, sesungguhnya baru saya rasakan dan lakukan, ketika suatu hari pada akhir Desember 1978, saya mendapat telegram dari *Tempo*. Isinya: Harap mewawancarai Ayatullah Khomeny, tokoh oposisi Iran, yang baru mengungsi ke Perancis. Saya juga diberi beberapa pertanyaan pokok untuk dikembangkan.

Ketika menerima telegram itu, tentu saja saya merasa bingung karena pertama, saya belum mendengar ihwal berita itu, dan kedua, ke mana dan kepada siapa saya harus mencari info? Memang saya sudah punya kartu pers yang terakreditasi, dan menjadi anggota asosiasi pewarta asing, tapi karena sikon, saya tidak pernah bergaul atau meliput ke tempat dan sumber berita. Akhirnya, karena kebetulan saya sudah berkawan dengan Erwin Ramedhan, satu-satunya jurnalis Indonnesia yang (pernah) bekerja dan menulis untuk harian terkemuka Perancis, *le Monde,* saya pun menelepon Erwin. Erwin lalu menyebut nama Patrice de Beer, redaktur urusan Asia — kelak menjadi Pemimpin Redaksi *le Monde* — untuk mencari tahu di mana keberadaan Ayatullah Khomeiny. Dari Patrice de Beer saya mendapat

kontak juru bicara Khomeny, namanya Bani Sadr. Saya pun menelepon Bani Sadr dan menjelaskan siapa saya. Lalu saya dijanjikan untuk bisa wawancara dengan Khomeny di rumah pengasingannya di Neauphle-le-Chateau di pinggiran Paris.

Untunglah sahabat kami Hadi Basalamah, mahasiswa Indonesia yang sudah lama kuliah dan tinggal di Paris, bersedia mencari dan mengantarkan saya ke lokasi. Apalagi Hadi punya mobil. Maka pada hari yang dijanjikan, di tengah musim salju, kami tiba di lokasi yang dituju. Setelah menunggu beberapa jam di seberang kediaman Khomeiny, dengan ditemani Bani Sadr, saya pun disilakan masuk ke ruang tamu. Ayatullah Khomeniy sudah menanti dan duduk di atas per-




**Wawancara Ekslusif dengan mantan Raja Kamboja, Pangeran Norodom Sihanouk, di Paris, Perancis, menjadi Cover Story MBM *Tempo*.**

madani di lantai. Wawancara pun berlangsung dalam bahasa Perancis, lalu diterjemahkan ke bahasa Iran, dan jawaban Khomeiny dalam bahasa Iran kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Perancis. Dari kaset rekaman wawancara dua bahasa itulah sepulang ke rumah di 58, Rue de Belleville, Paris 20, saya menerjemahkan hasil wawancara tersebut. Dan, alhamdulillah, wawancara eksklusif itu terbit sebagai *cover story* majalah *Tempo* edisi 27 Januari 1979.

Kata redaksi *Tempo* kemudian, mereka sangat bangga pada *scoop (an exclusive news story that is reported before other news organizations know about it)* itu. Sebab, itulah untuk pertama kalinya majalah dari negara Asia berhasil mewawancarai Khomeiny, bahkan lebih dulu beberapa minggu dibanding majalah *Time*, yang mengirimkan pewawancara *freelance* terkenal asal Italia Oriana Falacci, yang ternyata hadir serta menunggu di luar, ketika saya menantikan panggilan wawancara waktu itu.

Posisi sebagai majalah berita dari negara muslim terbesar di dunia, itulah mungkin yang menjadi pertimbangan mengapa *Tempo* didahulukan. Dan, yang lebih menarik lagi, sepekan setelah wawancara *Tempo* terbit 27 Januari 1979, pada Sabtu, 3 Februari 1979, Ayatullah Khomeny kembali ke Iran. Pada 8 Februari

1979, penguasa Iran, Raja Shah Reza Pahlevi pun tumbang oleh Revolusi Iran pimpinan Khomeiny, yang sebelumnya terus menyebarkan propaganda melalui rekaman kaset. Suatu kemenangan besar bagi Khomeiny, yang tekah diasingkan selama 14 tahun dari negaranya. Dan, bagi saya, meminjam istilah pewarta senior BM Diah, setelah berhasil mewawancarai Mikhail Gorbachev, tokoh perestroika Uni Soviet, wawancara saya dengan Khomeiny itu bisa dikatakan merupakan "Mahkota Kewartawanan" bagi saya, yang saat itu baru berumur 24 tahun. Walau sesungguhnya, saya tidak terlalu merasakan kebanggaan itu secara berlebihan. Dan, sebulan kemudian saya mendapatkan honor tambahan dari *Tempo,* mungkin US$ 300, lebih dari biasanya yang US$ 100. Alhamdulillah.

*Scoop* berikutnya saya dapatkan ketika pada Desember 1979, tiba-tiba *Tempo* mengirim telegram agar saya mewawancarai Pangeran Norodom Sihanouk. Mantan Raja Kamboja, itu baru melarikan diri ke Amerika Serikat, dan kemudian mengungsi ke Paris, setelah Kamboja diserbu pasukan Vietnam yang mengusir kekuasaan rezim Khmer Merah. Sihanouk sendiri tengah menjalani tahanan rumah, ketika Raja Kamboja itu digulingkan pada 1976, dan Kamboja dikuasai rezim otoriter Khmer Merah pimpinan Pol Pot dan Khieu Shampan.

Untuk itu, saya kembali menghubungi Patrice de Beer dari *le Monde,* yang memberikan info bagaimana menghubungi Sihanouk. Pada 19 Desember 1979, saya pun berhasil mewawancarai Pangeran Norodom Sihanouk, di sebuah apartemen di Rue de Berri, dekat Avenue des Champs Elysees. Sihanouk menerima saya, yang ditemani Buyung Tanisan, lokal staf di KBRI Paris, yang sudah puluhan tahun tinggal di Paris, dan kini menetap di Payakumbuh, Sumatera Barat, sebagai Datuk. Tanpa didampingi siapa pun, Sihanouk ramah tamah berbincang dalam bahasa Perancis, diseling tawanya yang sering keras terbahak. Sampai ketika saya bertanya ihwal dari mana selama ini ia mendaptakan dana, sehingga bisa menghidupi diri dan keluarganya, terutama di pengasingan. Sihanouk tiba-tiba berubah sikap. Kedua matanya melotot. Sebagaimana biasa kalau ia bicara dengan penuh semangat.

Sekejap Sihanouk terdiam. Ia lalu berdiri dan berbicara kepada asistennya, yang ada di dalam, dengan suara keras. "Hai … ! Ini pewarta dari Indonesia ingin tahu dari mana saya dapat uang selama ini?! (*Lalu ia menghadap saya*). Anda pikir saya dapat uang dari negara asing? Saya ini seorang pejuang nasionalis. Rakyat sayalah yang memberikan saya sumbangan agar saya bisa meneruskan perjuangan untuk membebaskan negara saya dari pendudukan negara asing … !!!" katanya dengan suara keras.

Mendengar jawaban itu, saya tentu kaget, tapi tetap berusaha tenang dan membiarkannya menyelesaikan amarah dalam dirinya. Karena saya pikir, pertanyaan saya itu rasanya wajar dan tidak sensitif. Sampai akhirnya wawancara selesai dengan keramahan seperti sebelumnya. Dan, hasil wawancara eksklusif itu kemudian

dimuat di majalah *Tempo* pada edisi 8 Januari 1980, sebagai *cover story*.

Pada Januari 1980, setelah Ayatullah Khomeiny berkuasa, untuk pertama kalinya Republik Islam Iran, menyelenggarakan pemilihan presiden secara demokratis. Abolhassan Bani Sadr, tangan kanan Khomeny, yang selama itu mendampinginya hingga ke pengasingan di Paris, dan yang menjadi perantara saya sampai bisa mewawancarai Khomeny, pun terpilih sebagai Presiden Republik Islam Iran yang pertama. Namun, pergolakan internal, dan perebutan pengaruh di kalangan elite yang dekat dengan Khomeny, terutama akibat makin menguatnya


Wawancara "TEMPO" (Noorca M. Massardi) dengan mantan Presiden Iran Abolhassan Bani Sadr & Pemimpin Mujahiddin Khalq Massoud Radjavi

(France - 19 September 1981)

Fotos: Rayni N. Massardi

"Anak Spiritual" Yang Melawan

Kalau Mujahiddin Nanti Berkuasa

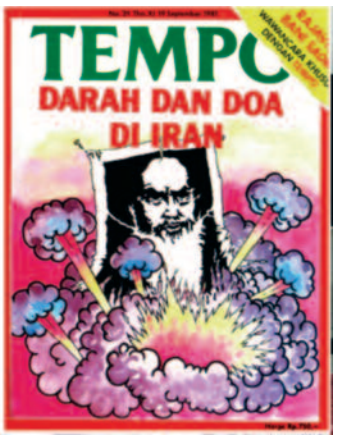


**Wawancara Ekslusif dengan Mantan Presiden Iran Abolhassan Banisadr dan Ketua Mujahiddin Khalq Massoud Radjavi, di Perancis, menjadi Cover Story MBM *Tempo*.**

kelompok garis keras yang menentang prinsip-prinsip demokrasi Barat yang hendak dijalankan Bani Sadr, berhasil menguasai panggung politik. Di tengah kekacauan itu, Bani Sadr pun digulingkan dari kekuasaannya setelah memerintah selama 17 bulan (Februari 1980 - Juni 1981). Ia digantikan oleh PM Mohammad Ali Rajai. Dalam *chaos* itu Bani Sadr berhasil melarikan diri, dan konon dengan menyamar sebagai perempuan, hingga akhirnya ia tiba kembali ke Perancis, dan kemudian menetap di desa Auvers-sur-Oise. Desa itu adalah tempat pelukis Belanda ternama Vicent Van Gogh meninggal, dan selama tinggal di situ, Van Gogh telah menghasilkan 80 buah lukisan terpenting selama hidupnya.

Setelah *Tempo* memastikan Bani Sadr berada di Perancis, saya pun mendapat telegram untuk mewawancarai Bani Sadr. Untuk ketiga kalinya, Patrice de Beer dari *le Monde* memberitahu saya tentang keberadaan Bani Sadr. Karena tidak ada orang lain, untuk pertama kalinya saya mengajak Rayni menemani saya, sekalian memotret. Pada awal September 1981, dengan kereta api kami sampai ke desa Auvers-sur-Oise, dan entah bagaimana, kemudian berhasil menemukan alamat

rumahnya. Di rumah itu, saya agak terkejut, karena Bani Sadr ternyata didampingi Massoud Radjavi, Pemimpin Gerilyawan Mujahiddin Khalq (Mujahiddin Rakyat Iran). Rupanya, Bani Sadr dan Massoud Radjavi yang mendukungnya, sama-sama lari dari Iran. Radjavi kemudian menikah dengan putrinya Bani Sadr.

Hasil wawancara saya dengan Bani Sadr dan Massoud Radjavi, itu kemudian dimuat di majalah *Tempo* sebagai *cover story* edisi 19 September 1981. Sekadar info, Imam Khomeiny wafat pada 3 Juni 1989 pada usia 86 tahun. Bani Sadr meninggal karena sakit di Paris, 9 Oktober 2021 pada usia 88 tahun. Dan, Massoud Radjavi, yang tinggal di Perancis dan di Irak, tidak diketahui nasibnya sampai saat ini, setelah Irak diserbu pasukan Amerika Serikat pada 19 Maret 2003.

Wawancara saya dengan Bani Sadr bersama Massoud Radjavi itu ternyata merupakan liputan terakhir saya sebagai Koresponden *Tempo* di Paris. Sebab, pada Oktober 1981, Rayni sudah selesai kuliah dengan diploma dari Universitas Paris III, Sorbonne Nouvelle, Departement d'Etude et de Recherches Cinematographiques, Paris, Perancis. Kami pun harus kembali ke tanah air. Dan, ketika pulang itu, saya membawa novel kedua saya berjudul *Mereka Berdua,* yang saya tulis selama di Paris.

Setiba di Jakarta, kantor yang pertama kali saya datangi adalah *Tempo*, di kawasan Proyek Senen. Oleh Mbak Etti Sunarti Asa, Sekretaris Redaksi *Tempo*, saya diminta menandatangani tanda terima "honor yang tertunda" selama menjadi Koresponden di Paris, yang jumlahnya sekian juta rupiah. Sebuah kejutan yang memungkinkan saya bisa bertahan hidup beberapa bulan di Jakarta dalam kondisi "menganggur." Karena adik kembar saya Yudhistira sudah bekerja beberapa tahun terakhir ini di MBM *Tempo*, saya merasa tidak nyaman bila harus berkerja di tempat yang sama. Lagi pula, pasti akan banyak orang yang akan keliru melihat wajah dan nama kami. Oleh sebab itu, saya kemudian datang ke kantor redaksi *Kompas*, di Jalan Palmerah Selatan. Bukan untuk melamar pekerjaan, tapi menemui redaktur budaya JB Kristanto, yang pada 1978 menerima novel saya *Sekuntum Duri* menjadi cerita bersambung di harian *Kompas*. Saat itu, saya menawarkan novel kedua saya *Mereka Berdua,* sekiranya bisa dimuat lagi sebagai cerber di *Kompas*. Mas Kris menyatakan akan segera membaca dan mengabari. Apalagi saat itu, cerber yang sedang dimuat akan segera tamat, dan belum ada naskah baru yang layak untuk diterbitkan.

Sambil berbincang-bincang dengan Mas Kris JB, saya melihat dan membaca di halaman dalam, ada iklan *Kompas* yang tengah membuka lowongan penerimaan reporter baru. Iseng saya tanyakan, apakah saya boleh ikut melamar? Mas Kris langsung mengiyakan sambil tertawa. Lalu saya pun mengirimkan sejumlah dokumen yang dipersyaratkan dalam lamaran itu. Bulan November 1981, surat lamaran saya sebagai calon reporter *Kompas* dinyatakan diterima sebagaimana diumumkan



**Meliput KTT APEC di Istana Bogor - 1994**

dalam iklan. Pada saat hampir bersamaan, novel saya *Mereka Berdua* juga dimuat sebagai cerber baru di *Kompas*. Sesuatu yang cukup mengherankan bagi teman-teman yang kemudian ikut test bersama saya, dan baru mengenal siapa saya.

Dari sekian ratus pendaftar, nama saya termasuk sebagai satu dari belasan calon reporter, yang akan diproses untuk mengikuti test tertulis. Lulus test tertulis, kami menjalani psikotes, untuk kemudian diwawancara oleh petinggi *Kompas*, yakni Pak Jakob Oetama, Pak P. Swantoro, dan Mas J. Widodo. Sesudah wawancara, baru kami melakukan test kesehatan. Dan hasilnya, saya dan lima calon finalis lainnya, diterima resmi untuk bekerja sebagai reporter dengan masa percobaan enam bulan per 1 Februari 1982. Angkatan saya ketika itu adalah Budiarto Shambazy, Don Sabdono (Bre Redana), Bambang Sukartiono, Eko Waryono, dan Albert Kuhon.

Sebagai calon reporter, selama masa percobaan kami dimutasi ke tiga *desk*, masing-masing dua bulan. Saya memilih desk politik, desk luar negeri, dan desk kebudayaan. Setelah diangkat sebagai pegawai tetap, saya memilih untuk menetap di Desk Luar Negeri. Karena bagi saya, di desk luar negeri saya bisa belajar segala macam hal dan bidang yang ada di dunia ini: ekonomi, politik, hukum, sains, pertahanan, agama, diplomasi, kebudayaan, dan urbanisme. Sementara di desk lain hanya akan fokus pada satu bidang. Selain itu, di desk luar negeri, saya juga bisa memperlancar pengetahuan bahasa Inggris saya. Selain membaca, saya juga harus menerjemahkan dan mengedit sesuai jatah halaman / kolom yang tersedia. Peng-

alaman saya selama belajar di ESJ Paris, terasa sangat bermanfaat. Antara lain, menulis suatu berita dalam dua halaman, lalu mengedit berita yang sama menjadi satu halaman, lalu menjadi setengah halaman, dan kemudian hanya menjadi satu paragraf / alinea, tanpa boleh kehilangan inti dan pokok masalah. Sejak di *Kompas* itulah saya juga dengan resmi memakai inisial tiga huruf mati **(ncm),** sampai sekarang.

Ihwal liputan kebudayaan, karena saya merasa itu sebagai sebagai "*domaine*" pribadi, saya lakukan dan tawarkan secara sukarela liputannya kepada Mas JB Kristanto. Jadi, saya banyak menulis resensi / review seni pertunjukan (teater / film / tari), dan sesekali menulis esei tentang kesenian dan politik luar negeri di halaman Opini, di halaman empat *Kompas,* yang sangat selektif dan prestisius sejak dulu.

Berbeda dengan di *Tempo,* yang memungkinkan setiap penulis bersaing bebas dan terbuka, baik dalam tulisan maupun perdebatan, kultur *Kompas* lebih terasa *"sangat Jawa."* Hampir tidak ada persaingan kualitatif secara terbuka, karena semua diajarkan untuk rendah hati, kolektif kolegial, dan tidak boleh "nyelonong sendiri" alias menonjolkan diri. Baik di dalam maupun di luar lembaga. Kami harus selalu *low profile,* karena nama *Kompas* sudah menjadi institusi tersendiri yang sangat disegani siapa pun, sebagai koran Nasional yang paling kredibel. Jadi, siapa pun yang bekerja di dalamnya tidak (dianggap) penting, karena *Kompas* tidak bergantung / tergantung pada satu dua orang "bintang." Semua sama. Bahkan bila "orang *Kompas*" berpakaian lusuh, atau bersandal jepit, pun pasti akan tetap diterima dan dihormati, oleh menteri sekali pun. Sebab ke mana pun pergi, citra *Kompas* lah yang terbawa/dibawanya.

Maka bila ada satu dua orang yang namanya "terkenal" di luar *Kompas,* akan dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan "kurang pantas" sebab tidak sesuai dengan budaya *andap asor, low profile*. Karena itu, ketika di luaran nama saya lebih dikenal sebagai seniman / pengarang / penulis, ketimbang sebagai "pewarta *Kompas*" hal itu dianggap sebagai "anomali." Sebab, yang bisa "gaul" dan *lobby* ke dunia luar hanya Pak Jakob dan Mas August Parengkuan (AG). Selebihnya wajib kerja dengan baik, serius, dan menunggu *assigment* atau perintah dari atasan. Karena itulah, bila saya mendapat undangan dari dalam negeri atau luar negeri, terutama bila diatasnamakan pribadi, saya selalu menyampaikannya kepada Mas AG lebih dulu, dengan catatan, saya tidak keberatan siapa pun yang kelak akan ditugaskan. Mungkin pula, karena sikap itulah, setiap undangan atas nama saya, selalu diserahkan kembali kepada saya sebagai pelaksana tugasnya.

Tugas internasional pertama saya dari *Kompas,* adalah meliput penyerbuan dan pendudukan Vietnam di Kamboja (1979-1992). Alasannya, karena hanya saya yang bisa lancar berbahasa Perancis, mengingat di kedua negara itu masyarakat dan para tokohnya banyak menggunakan bahasa Perancis. Sebagaimana diketahui,

negara-negara Indochina memang pernah menjadi jajahan Perancis. Tanpa pengetahuan sama sekali ihwal apa, siapa dan bagaimana yang harus saya liput, dan tanpa pembekalan apa pun dari redaksi, saya pun berangkat ke Thailand, negara yang belum pernah saya kunjungi, dan tidak ada yang saya kenal.



**Sambil menanti kabar baik, berjalan kaki keliling pusat kota Bangkok.**

Ketika masih dalam pesawat Thai Airways, saya diarahkan oleh seorang ibu yang duduk di kursi sebelah saya, orang Thai, agar menginap di sebuah hotel yang dekat dengan KBRI di Bangkok. Bahkan, saya diantarkan oleh penjemputnya ke depan hotel itu. Esoknya saya mendatangi kantor KBRI Bangkok, yang alamatnya saaya dapatkan dari buku telepon umum, untuk mencari informasi ihwal bagaimana saya bisa memasuki perbatasan Thailand-Kamboja. Secara kebetulan, alhamdulillah, hari itu saya bertemu mbak Yuli Ismartono, Koresponden *Tempo* di Bangkok, yang sedang ada urusan di KBRI. Sebagai mantan koresponden *Tempo*, kami tentu saling mengenal nama melalui tulisan. Dan, walau saat itu ada "persaingan" antara *Tempo* dengan *Kompas*, saya terus terang menyampaikan mendapatkan tugas peliputan itu. Mbak Yuli pun dengan senang hati membantu. Ia menyampaikan sebaiknya saya datang ke acara pertemuan Asosiasi Koresponden Asing di Bangkok. Siapa tahu saya bisa mendapat info lebih banyak.

Saya pun datang ke acara dimaksud yang dilakukan di hotel paling terkenal di Bangkok, kalau tak salah Hotel Oriental, di tepi Sungai Chao Praya. Di situ, Mbak Yuli memperkenalkan saya kepada Abdul Gaffar Peang Meth, seorang muslim Thailand, yang menjadi juru bicara Khmer People's National Liberation Front (KPNLF), gerakan pembebasan rakyat antikomunis yang dipimpin mantan PM Son Sann. Abdul Gaffar menjanjikan akan membawa saya ke kamp pengungsian

di perbatasan Thai-Kamboja untuk bertemu dan wawancara dengan Jenderal Dien Del, Panglima Militer KPNLF. Saya diminta menunggu sampai ada momen yang tepat, karena markas Jenderal Dien Del terus dihujani bom oleh pasukan Vietnam di Kamboja, sebagai kelanjutan dari perang yang sudah menewaskan sekitar 12 ribu sampai 15 ribu anggota gerilya KPNLF, anak buah Jenderal Dien Del, pada musim panas sepanjang 1984 - 1985. Dan, saya ditugaskan hanya beberapa hari setelah peristiwa itu terjadi.Menunggu tanpa kejelasan di Bangkok, saya pun memanfaatkan untuk berjalan kaki mengelilingi pusat kota Bangkok. Hingga saya teringat pada pengarang perempuan asal Thailand, Nantawan Yoon, yang saya kenal ketika saya dan beberapa pengarang Indonesia, dipilih oleh Mochtar Lubis, untuk menghadiri pertemuan pengarang Asia di Baguio City, Filipina, atas sponsor Asia Foundation. Suami Nantawan adalah Suthichai Yoon, Pemimpin Redaksi harian berbahasa Inggris *The Nation.* Saya datang ke kantornya, tapi tidak bisa ketemu dengan Nantawan, namun sempat ngobrol tentang kondisi sastra, pers, dan situasi politik di Kamboja dan Thailand, dengan Kevin, salah seorang redakturnya.

Karena merasa tak enak hati dengan *Kompas*, yang sudah berhari-hari mengongkosi saya tanpa hasil, suatu hari, saya berinisiatif berangkat ke Aranyaprathet, provinsi timur Thailand, yang berjarak 6 km dari perbatasan Kamboja. Sebuah kota kecil yang sepi. Dan saya hanya menginap semalam di hotel yang sangat sederhana itu, sebelum kembali lagi ke Bangkok. Akhirnya, saat yang dinantikan itu tiba. Abdul Gaffar menjemput saya di hotel, dan dengan mobil van yang penuh logistik sembako, kami menuju Banteay Ampil, Siem Reap. Abdul Gaffar meminta saya jangan bicara apa-apa setiap kali melewati pos militer Thailand di perbatasan. Dan saya diberi nama samaran, sebuah nama Kamboja, bila sampai saya ditanya.

Akhirnya saya tiba di kamp pengungsian yang sejumlah rumahnya tampak hancur dan hangus, juga pepohonan di sekitarnya, dan masih banyak asap mengepul di mana-mana. Jenderal Dien Del tinggal di sebuah *bunker* militer yang disamarkan dengan aneka ranting dan pohonon, serta dibentengi karung-karung pasir. Jenderal Dien yang ramah dan berkumis tipis, menjawab semua pertanyaan saya dalam bahasa Perancis yang lancar. Kami sempat makan bersama orang-orang dekatnya, dengan menu yang cukup beragam, sambil minum Singha Beer yang ringan. “Minum bir ini agar Anda terlindung dari bakteri makanan,” bisik Abdul Gaffar. Dan, itu sangat masuk akal. Sebab, sepanjang kami makan, semua piring makanan di atas meja besar, itu selalu dirubung lalat hingga nyaris menutupi piring. Tapi, saya pura-pura biasa saja melihat pemandangan “aneh” itu, dan ikut makan dengan lahap. Entah itu lalat apa dan entah datang dari mana.

Malam harinya, saya tidur di bawah tenda yang disediakan dengan pengawalan seorang prajurit bersenjata laras panjang. Saya sulit tidur karena sepanjang malam terus terdengar dentuman bom dan rentetan senjata api, tak terlalu jauh dari tempat kami berada. Saya hanya bisa berdoa sampai pagi, dan kembali dengan selamat



**Sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), saya memimpin para seniman nasional dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI, menyampaikan protes atas pelarangan pentas Rendra, N. Riantiarno, Guruh Sukarnoputra, dan Rhoma Irama di Taman Ismail Marzuki - 8 Desember 1990.**

hingga ke hotel di Bangkok, bersama rombongan Abdul Gaffar. Sebelum berpisah, Abdul Gaffar menyarankan agar selama beberapa hari saya tetap di Bangkok, menghindari kemungkinan ada pihak yang membuntuti saya. Saya pun dengan cemas segera mengabarkan hal itu ke kantor di Jakarta. Tentu saja redaksi di Jakarta merasa heran, namun mereka maklum. Dan saya mengatakan, demi keamanan, saya baru akan menulis laporan setelah tiba di Jakarta.

Alhamdulillah laporan saya itu kemudian dimuat tiga hari berturut-turut di halaman satu pojok kanan bawah, halaman *features* yang merupakan favorit pembaca *Kompas*. *Features* itu saya tulis dalam gaya prosa naratif, seperti cerita bersambung, dan saya menyebut diri saya sebagai pihak ketiga, dengan nama Kamboja pemberian Abdul Gaffar. Perjuangan KPNLF bersama Jenderal Dien Del, Abdul Gaffar Peang Meth dan kawan-kawannya, itu baru berhasil pada 1990, ketika akhirnya pasukan pendudukan Vietnam keluar dari Kamboja.

Pada bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, akhir Juni 1984, saya ditugaskan meliput transmigran dari Lampung, yang hendak pulang mudik ke Jawa menjelang Lebaran. Sebagaimana bisa diduga, itulah pertama kalinya saya akan ke Sumatera, dan ke Lampung. Dengan pesawat udara saya turun di pelabuhan udara Branti (sekarang Raden Intan II). Dari bandara saya langsung naik kendaraan umum menuju terminal bus luar kota. Di terminal saya mencari penumpang yang akan mudik ke Jawa. Ketemulah keluarga kecil, pasangan suami istri dan anak remaja yang

akan ke Jawa. Mereka bilang para transmigran lain sudah banyak yang mudik, dan mereka adalah sisanya. Karena hari itu adalah H-7 menjelang Lebaran. Dan, mereka tidak keberatan ketika saya bilang akan mengikuti mereka sampai ke kampung halaman di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Timur.

Melalui perjalanan darat dengan angkot, kami sampai di Pelabuhan Bakauheni, lalu naik bus menyeberang ke Pelabuhan Merak dengan kapal ferry dan tiba di terminal Merak selepas maghrib. Di pangkalan bus itu, kami menunggu angkutan bus antarkota yang setiap saat datang dan berangkat. Baru pada malam hari kami dapat bus menuju Jawa Timur melewati Solo. Tiba di Solo sudah menjelang maghrib pula, dan para penumpang beristirahat di pool bus. Saya yang belum mandi sejak berangkat dari Jakarta ke Branti, dan Merak, sudah tidak tahan lagi karena badan sangat letih, pegal, dan bau serta lengket oleh keringat. Terutama karena sepanjang perjalanan itu saya duduk berhimpitan, nyaris jongkok di jok, dengan para penumpang dan semua barang bawaannya, di dalam bus yang rasanya tidak ber-AC. Belum ada telepon genggam pula.

Setiba di Solo, saya memutuskan untuk menumpang mandi di sebuah hotel di Jalan Slamet Riyadi. Saya yakin, dengan kartu pers *Kompas*, mereka tidak akan menolak. Alangkah beruntungnya saya, ketika tiba di lobby hotel tersebut, saya bertemu trio Warkop DKI: Dono, Kasino, Indro, yang tengah menginap di hotel itu, dan baru akan berangkat ke tempat acara. Sebelumnya, saya sudah mengenal mereka, karena mereka sering datang ke kantor *Kompas*, di Jakarta. Saya pun menceritakan tugas perjalanan saya dan mau numpang mandi di hotel itu. Ternyata, mereka bertiga mengizinkan saya mandi di salah satu kamar mereka. Tanpa basa-basi saya mengiyakan, dan mereka langsung pergi setelah memberikan kunci kamarnya. Lalu saya masuk kamar yang tampak berantakan, dan mandi air hangat. Usai mandi dan keramas, saya ganti baju dan pakaian dalam, lalu kembali ke pool bus, untuk bergabung dengan rombongan melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur.

Ternyata kami harus menginap di Solo malam itu dan baru menjelang subuh kami melanjutkan perjalanan nonstop ke Surabaya. Dari terminal Surabaya kami beberapa kali ganti kendaraan kecil, hingga tiba di rumah keluarga itu pada sore hari, dan saya menginap di salah satu kamarnya. Walau sederhana, rumah itu cukup bersih dan saya tidur di atas ranjang tamu. Esok paginya saya pamitan, lalu memberikan uang secukupnya, sebelum saya berangkat ke Surabaya.

Di kantor *Kompas* Surabaya, saya kebetulan juga bertemu Mas JB Kristanto. Saya lalu menelepon kantor Jakarta, agar diperbolehkan pulang naik pesawat terbang, karena hari sudah H-2 Lebaran. Setelah disetujui, saya pun balik ke Jakarta. Dan, ketika orang lain sibuk merayakan Idul Fitri, di rumah saya harus mengetik laporan perjalanan itu, sebagai *features* bersambung, dan sudah harus diterima redaksi pada hari pertama Lebaran. Tentu saja pada waktu itu semua laporan ditulis dengan mesin ketik, dan di atas kertas buram berlogo *Kompas*. *Features* per-

jalanan itu pun dimuat tiga hari berturu-turut, di halaman satu pojok kanan bawah *Kompas*. Kali itu, laporan sengaja saya tulis dalam gaya penulisan catatan perjalanan, sebagaimana dilakukan VS Naipaul, sastrawan Inggris keturunan India kelahiran Trinidad, yang kelak pada 2001 memenangi Hadiah Nobel Sastera.

Liputan Kamboja dan Liputan Lebaran, itu ternyata mendapat apresiasi tinggi dari Pak Jakob. "Lain ya kalau sastrawan, pengarang, menulis laporan … !" kata Pak Jakob dengan suara berat diiringi tawanya yang berderai. Lalu, pada akhir 1984, itu Pak Jakob Oetama meminta atau menawari saya posisi untuk memimpin majalah *Jakarta-Jakarta,* yang sudah berhenti terbit dan ingin diterbitkan kembali dengan perubahan isi. Tanpa berbasa-basi, saya pun langsung menerima tantangan itu. Karena bagi saya, itulah kesempatan besar bagi saya untuk bisa membuktikan diri sebagai jurnalis, sekaligus mempraktekkan ilmu jurnalistik yang saya dapatkan di ESJ Paris.

Semula Pak Jakob menginginkan majalahnya seperti *Focus* Jepang yang baru terbit dan sangat laris di Negeri Sakura itu. Isinya foto-foto sensasional dua halaman diserta teks narasi yang ringkas. Setelah saya melihat contohnya, saya merasa gaya *Focus* kurang cocok dengan budaya orang Indonesia. Maka saya tawarkan agara *Jakarta-Jakarta* nanti dibuat seperti majalah berita bergambar *Paris-Match*, mingguan paling populer di Perancis dan Eropa, dengan jumlah oplag yang sangat besar, dan pembacanya terdiri dari seluruh lapisan masyarakat: awam, cendekiawan, selebriti, politisi, kaya miskin, dari semua tingkatan usia. Isinya: foto selebriti, foto berita eksklusif, sedikit gosip, wawancara khusus, dan banyak menampilkan peristiwa internasional, termasuk perang dan skandal. Pak Jakob pun setuju.

Yang unik, beberapa kali percakapan dan tawaran itu sesungguhnya hanya













berlangsung sam-

**MBB Jakarta-Jakarta dan Edisi Akhir Tahun 1986**

bil lalu, dan dibicarakan sekilas di depan meja kerja saya, di dekat anak tangga menuju ke lantai dua, sebelum atau sesudah Pak Jakob menemui Pak P. Swantoro, Wapemred *Kompas,* dan bertegur sapa dengan jajaran redaksi di lantai dua. Jadi, *deal* itu tidak terjadi di ruang Pak Jakob, atau di pertemuan resmi, bahkan tanpa konsep, *dummy,* atau proposal tertulis. Pak Jakob percaya sepenuhnya begitu saja pada kemampuan saya. Kami pun bersepakat, *Jakarta-Jakarta* akan diterbitkan awal 1985, hanya tiga tahun setelah saya bergabung di Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Anggarannya? "Tidak dibatasi … !" kata Pak Jakob.

Akhirnya, pada 17 Mei 1985, Majalah Berita Bergambar yang saya rancang, terbit dengan nama MBB *Jakarta-Jakarta (MBB JJ)*. Majalah berita bergambar dwimingguan, yang setiap terbitnya diiklankan *full-color* seperempat halaman *Kompas.* Saat itu, *MBB JJ* adalah satu-satunya majalah berita yang mampu memasang iklan berwarna di *Kompas*. Dan ketika terbit, saya menjadi Pemimpin Redaksi majalah berita termuda di Indonesia, dalam usia 31 tahun, sementara Goenawan Mohamad pada 1971, menjadi Pemred MBM *Tempo* pada usia 30 tahun.

Kehadiran *MBB JJ* tentu cukup menggemparkan dunia jurnalisme di Indonesia. Selain karena diterbitkan oleh KKG, *MBB JJ* juga merupakan majalah berita pertama di Asia, yang menampilkan foto-foto berita dan profil selebriti dalam ukuran dua halaman, dengan sedikit teks. *Tagline MBB JJ* juga segera menjadi perhatian masyarakat: *Panas Gambarnya, Hangat Beritanya.* Setahun kemudian, *MBB JJ* diizinkan terbit sebagai majalah mingguan, sebagaimana galibnya majalah berita. Seluruh materi foto / slide bewarna internasional, itu saya peroleh dari berlangganan kepada agen foto jurnalistik terbesar di dunia saat itu, yang kebetulan ketigatiganya berpusat di Paris, Perancis: *Sygma, Gamma* dan *Sipa Press.* Tak aneh bila semua foto yang dimuat *MBB JJ,* tidak pernah kalah dibanding majalah internasional mana pun. Baik subjeknya, kualitasnya, maupun aktualitasnya.

Namun, karena situasi dan kondisi internal di KKG yang kurang sehat ketika itu, pada 1 April 1989, saya menyatakan mengundurkan dari sebagai Pemred majalah yang fenomenal itu, sekaligus mengundurkan diri dari KKG, walau saya sempat dibujuk agar kembali ke *Kompas*. Dan pengunduran diri saya saat itu cukup fenomenal, karena saya mendapat pesangon Rp 100 juta, atau setara US$ 55.555 ketika itu, yang bila dikonversikan sekarang, sama dengan Rp 833 juta. Jumlah pesangon terbesar sepanjang sejarah pers Indonesia waktu itu.

Sejak itu, saya tetap aktif di media massa, khususnya majalah, sebagai Redaktur Eksekutif Majalah *Vista FMTV* (1990-1992), Redaktur Eksekutif dan kemudian Pemred Majalah Berita *Forum Keadilan* (1992-2003), Pemred Majalah *telset* (2002-2003), Pemred Majalah *Hongshui Living Harmony* (2004-2006), Pemred Majalah Bulanan *AND* (2010-2011), Wakil Pemimpin Umum Tabloid Mingguan *Prioritas* (2011-2012), Redaktur Eksekutif Majalah *Kebudayaan* (Ditjenbud Kemendikbud 2012 - 2014), dan Pemimpin Redaksi Majalah *I Life & Style* (2014-2015).

Di tengah kesibukan saya sebagai penulis dan editor *freelance*, seorang teman memberitahu ihwal adanya lowongan bagi calon anggota Lembaga Sensor Film (LSF) untuk periode 2020-2024. Karena pemberitahuannya hanya sepekan sebelum pendaftaran ditutup, saya pun menyiapkan segala sesuatu secepatnya, karena dikejar waktu, dan tanpa banyak berharap. Saya kemudian diberitahu oleh Panitia Seleksi, untuk mengikuti semua proses seleksi, wawancara dan terakhir *fit*




**Foto Resmi 17 Anggota LSF Periode 2020-2024**

*and proper test* di Komisi I DPR RI. Ternyata, *alhamdulillah*, saya diterima dan dilantik oleh Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim, secara daring, pada Jumat 8 Mei 2020, bersama 16 anggota lainnya, sebagai Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia. Karena secara usia saya ternyata paling senior, maka saya ditetapkan sebagai Ketua Sidang Pleno sementara, bersama anggota paling yunior, Mukayat Al-Amin, untuk memimpin proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LSF periode 2020-2024.

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan secara terutup dan terpisah, bukan dalam satu paket, dengan masing-masing anggota menuliskan nama calon ketua di atas kertas suara kosong. Terpilihlah Rommy Fibri Hardiyanto, mantan Anggota LSF (2015-2019) sebagai Ketua LSF Periode 2020-2024, melalui pemilihan dua putaran. Proses serupa dilakukan untuk jabatan wakil ketua. Dan, pada putaran kedua, Ervan Ismail terpilih sebagai Wakil Ketua LSF Periode 2020-2024.

Dari seluruh anggota yang ada, saya hanya kenal pribadi dengan dua orang. Pertama dengan Pak Ahmad Yani Basuki, mantan Ketua LSF (2015-2019). Saya pertama kali mengenalnya di Lhokseumawe, Aceh, ketika sebagai Pemred *Forum*

*Keadilan* diundang meliput jalannya Operasi Pemulihan Keamanan di Daerah Operasi Militer Aceh. Ketika itu Kolonel (TNI) Ahmad Yani Basuki menjabat Dansatgaspen / Jubir Koops TNI (2003-2004). Sementara dengan Rommy Fibri, saya pernah satu kantor selama setahun, ketika Rommy menjadi Pemred Tabloid *Prioritas*, dan saya sebagai Wakil Pemimpin Umum. Sedangkan dengan Arturo Guna Priatna (Anggota LSF 2015-2019), saya sudah mengenal namanya sebagai editor senior pada sejumlah film karya Garin Nugroho, dan baru bertemu secara langsung saat proses seleksi calon Anggota LSF 2020-2024.

Pada proses penyusunan kepengurusan yang dilakukan Ketua dan Wakil Ketua baru, saya terpilih sebagai Ketua Subkomisi Dialog merangkap Anggota. Sebagai Ketua Subkomisi Dialog LSF, tugas utama saya adalah mengelola dan memandu jalannya dialog antara pemilik film atau iklan film, yang mengajukan banding atas penetapan klasifikasi film oleh LSF, yang mereka nilai tidak sesuai dengan klasifikasi usia yang mereka harapkan. Serta mengundang dialog pemilik film atau iklan film, yang khusus diundang oleh LSF, terkait materi film atau iklan film yang tengah disensor, yang memerlukan klarifikasi, sebelum LSF menetapkan penggolongan usianya.

Mekanisme dialog itu wajib dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) dengan pemilik film / iklan film, karena Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman melalui Pasal 60 ayat (2) menekankan agar "LSF melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor." Hal itu juga dipertegas oleh Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2014 tentang LSF pada Pasal 25: "Penyensoran film dan iklan film dilakukan berdasarkan prinsip dialogis dengan pemilik film dan iklan film yang disensor."

Sejak anggota LSF periode 2020-2024 dilantik pada Jumat 8 Mei 2020, dialog dan prinsip dialogis dengan pemilik film yang disensor sebagaimana diterangkan di atas, telah berlangsung beberapa kali. Sebagaimana diketahui, dialog dapat terjadi apabila 1). Ada pihak yang memohon untuk berdialog atau 2). Ada pihak yang diundang atau diajak untuk berdialog. Dalam hal pemilik film yang disensor memohon untuk berdialog dengan LSF, biasanya itu terjadi karena beberapa hal.

*Pertama*, pemilik film yang disensor memohon informasi atau meminta keterangan mengapa film miliknya ditetapkan untuk golongan usia tertentu, dan bukan untuk golongan usia yang lebih rendah atau lebih tinggi, sebagaimana mereka harapkan sebelumnya. *Kedua*, pemilik film yang disensor berkeberatan atas penilaian LSF yang menyarankan filmnya untuk direvisi, karena LSF menilai film itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No 33 /2009 tentang Perfilman, namun pemilik film menginginkan agar revisinya dilakukan sebagian, sesuai maksud dan tujuan pemilik film, agar penggolongan usia penonton untuk filmnya diubah dari Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) yang telah dikeluarkan. *Ketiga*, pemilik film yang disensor ingin mengajukan perubahan penggolongan usia penonton, dari yang lebih tinggi agar menjadi lebih rendah, atau sebaliknya dari




**Dialog LSF dengan Direksi PFN**

penggolongan usia yang rendah menjadi lebih tinggi, dengan mengajukan pelbagai alasan serta maksud dan tujuannya.

Sebagaimana diketahui, Pasal 6 UU 33/2009 tentang Perfilman itu menyatakan: Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang: a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. menonjolkan pornografi; c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antarras, dan/atau antargolongan; d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilainilai agama; e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau f. merendahkan harkat dan martabat manusia.

Sementara itu, apabila undangan untuk berdialog itu diajukan oleh LSF kepada pemilik film / iklan film, biasanya itu terjadi karena beberapa alasan. *Pertama*, LSF menilai film yang sedang disensor terlalu banyak mengandung adegan, gambar, atau suara yang dinilai melanggar Pasal 6. Agar tidak merugikan pihak pemilik film, sebelum memberikan penilaian akhir, LSF mengundang pemilik film untuk menjelaskan dan memberikan informasi mengapa semua hal yang dipertanyakan LSF itu bisa terjadi, serta apa maksud dan tujuannya. Apabila kedua pihak telah saling memahami informasi dan argumentasi masing-masing, maka LSF akan menetapkan penggolongan usia tertentu, baik dengan atau tanpa revisi.

*Kedua*, apabila pelanggaran terhadap Pasal 6 itu ternyata tetap terjadi atau masih dilakukan pemilik film yang sama, maka LSF perlu mengingatkan lagi tentang pelbagai undang-undang dan peraturan yang ada menyangkut perfilman dan sensor, agar yang bersangkutan makin lebih memahami, khususnya dalam melakukan upaya sensor mandiri. *Ketiga*, apabila dalam pemantauan, LSF menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan penggolongan usia, yakni film tersebut ternyata ditonton oleh golongan usia di bawahnya, atau film yang diedarkan tidak

sesuai dengan revisi yang ditetapkan LSF. *Keempat*, apabila sebuah film yang sudah mendapatkan STLS ternyata mendapat reaksi keras dari masyarakat penonton, atau dari kelompok tertentu yang merasa tersinggung terhadap tema, adegan, gambar, suara tertentu dari film tersebut. Dan, proses Dialog itu dilakukan biasanya untuk menentukan atau menyamakan sikap, bagaimana sebaiknya menyikapi atau menanggapi reaksi dari masyarakat tersebut.

Sebagai contoh, sepanjang Januari sampai dengan Desember 2021, dialog yang setara dan seimbang antara LSF dan pemilik film/iklan film yang disensor, telah berlangsung sebanyak 16 kali, terkait dengan 16 materi (film, sinetron, dokumenter, dan film iklan), yang melibatkan 13 perusahaan film. Dan, pada Desember 2021 sampai dengan Desember 2022, dialog antara LSF dan pemilik materi film/iklan film yang disensor, berlangsung sebanyak 9 (sembilan) kali, terkait dengan 5 (lima) judul film, 3 (tiga) program televisi, dan 2 (dua) festival film, yang melibatkan 5 (lima) perusahaan film, 1 (satu) rumah produksi sinetron, 2 (dua) lembaga penyiaran televisi, dan 2 (dua) penyelenggara festival film.

Selain mengelola dan memandu jalannya Dialog, saya juga menginisisi pembuatan Panduan Film, yang dimulai pada April 2021. LSF menampilkan rubrik Panduan Film (PF) di semua platform media sosial LSF.RI: web, instagram (IG), facebook (FB), twitter, dan tiktok. Termasuk dicetak dalam bentuk buku saku dań diedarkan di sejumlah bioskop, melalui kerjasama dengan Gabungan Perusahaan Film Seluruh Indonesia (GPBSI).

Sebagaimana judulnya, PF dimaksudkan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menonton film yang sudah, akan, dan atau sedang dipertunjukkan sesuai peruntukannya. Baik di bioskop, televisi, festival, palwa, maupun di jaringan informatika. Terutama, untuk film-film yang telah atau baru mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF.

Setiap judul yang dibahas secara singkat di dalam PF, baik film nasional maupun film impor, selalu menampilkan informasi dasar mengenai klasifikasi usia, kandungan film, tema, *genre*, jalan cerita, para pemain, sineas, produser, tanggal rilis, durasi, tahun produksi, negara pembuatnya, serta terutama unsur-unsur yang terkandung di dalam film tersebut. Mulai dari kekerasan, perjudian, sadisme, narkoba, seksualitas, pendidikan, budaya, informasi, sampai hiburan.

Kandungan film tersebut dinyatakan dalam bentuk keterangan atau ikon dan simbol tertentu. Namun, yang lebih penting, panduan tersebut selalu mencantumkan penggolongan / klasifikasi usia penonton untuk setiap film yang dibahas. Mulai dari semua umur (SU), 13 tahun ke atas (13+), 17 tahun ke atas (17+), sampai 21 tahun ke atas (21+).

Publikasi PF tersebut, dilakukan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi LSF sesuai Undang-Undang tentang Perfilman No 33/2009, Pasal 57, Ayat 3, yakni *"memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan*










*film"*. Juga sebagai pelaksanaan Pasal 61 Ayat (1), *"LSF memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film*; dan Ayat (2) *"LSF membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film."*

Sejak 2021 sampai dengan akhir 2023, PF mengutamakan informasi tentang film-film layar lebar (*feature film*) atau film cerita yang sudah mendapatkan STLS dan tayang di bioskop, televisi, festival, serta jaringan informatika. Juga film-film yang dinilai cukup berpengaruh yang akan /sedang tayang di pelbagai media pertunjukan. Proses penulisan PF pada tahap awal dilakukan oleh 34 Tenaga Sensor, untuk kemudian disunting oleh saya, yang ditugaskan untuk menyeleksi, menjaga, dan mengelola Panduan Film tersebut.

Pada Januari 2022 sampai dengan Desember 2022, Panduan Film telah menampilkan sebanyak 121 (seratusduapuluh satu) judul film. Tercatat, ada 51 (limapuluh satu) judul film nasional dan 69 (enampuluh sembilan) judul film impor. Jumlah tersebut secara keseluruhan memang masih belum banyak dibandingkan dengan produksi sebelum masa pandemi Covid-19 yang diawali Desember 2019, namun sudah mulai bertambah secara signifikan setelah pandemi semakin melandai dan seluruh jaringan bioskop dibuka kembali untuk umum. Sebagaimana kita ketahui, sejak pandemi merebak sampai dengan Desember 2022, jumlah produksi film di seluruh dunia menurun drastis, hanya sekitar 30 persen dibanding masa sebelum pandemi. Termasuk di Indonesia. Secara total, sejak April 2021 hingga Desember 2023, LSF telah membuat dan memuat sebanyak lebih dari 500 judul Panduan Film Nasional dan film impor, khusus peruntukan bioskop, baik yang diunggah di situs web maupun di semua platform media sosial milik LSF.

## Noorca M. Massardi

# JATI DIRI:

**Nama Lengkap** : Noorca Marendra Massardi

**Tempat & Tanggal Lahir**: Subang, Jawa Barat, 28 Februari 1954

**Anak ke** : 5 dari 12 bersaudara

**Nama Ayah** : Mas Sardi

**Nama Ibu** : Mukinah

**Nama Anak** : Cassandra Massardi dan Nakita Massardi

**Nama Cucu** : Muhamad Hafiizh Effendi, Dylan Maka Manoch, dan Arken Jati Sasongko

**Email** : noorca282@gmail.com

**Medsos** : IG, fb, twitter (X), TikTok

# RIWAYAT PENDIDIKAN

SR Negeri I, Subang

SMP Negeri I, Subang

Taman Dewasa, Jetis, Jogjakarta

Ecole Superieure de Journalisme, Paris, France

# RIWAYAT PENGHARGAAN

General Award in the Arts dari The Society for American Indonesian Friendship, Inc (1975)

Pemenang Sayembara Penulisan Lakon Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) untuk lakon *Perjalanan Kehilangan* (1974), dan *Terbit Bulan Tenggelam Bulan* (1976)

Pemenang Sayembara Penulisan Lakon Anak-anak Direktorat Kesenian Depdikbud untuk lakon *Tinton* (1976), dan *Mencari Taman*(1978);

Pemenang Sayembara Penulisan Lakon Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk lakon Kuda-Kuda (1975).

# RIWAYAT KARYA

**NOVEL**

*Sekuntum Duri* (1978),
*Mereka Berdua* (1981),
*September* (2006),
*d.I.a. cinta dan presiden* (2008),
*Setelah 17 Tahun* (2016),
*Straw* (2015), *180* (2016),
*Simvlacrvm* (2023).

SEKUNTUM DURI (1979)




MEREKA BERDUA (1982)




SEPTEMBER (2006)




d.I.a. CINTA DAN PRESIDEN (2008)




STRAW (2014)




SEPTEMBER (REPRINTED 2017)




180 (2015)




SETELAH 17 TAHUN (2016)






**KUMPULAN PUISI**

*Mata Pelajaran dan Syair Kebangkitan* (1994),
*Hai Aku Sent To You* (2017),
*Hai Aku* (2017),
*Ketika 66* (2020),
*Pantai Pesisir* (2021),
*69 Cinta untuk Rayni* (2023),
dan *Dari Paris untuk Cinta* (2024)




**EDITOR**

Mega Simarmata: *Anak Bangsa, Kebebasan Bersuara di Radio* dan *Udin Darah Wartawan*.

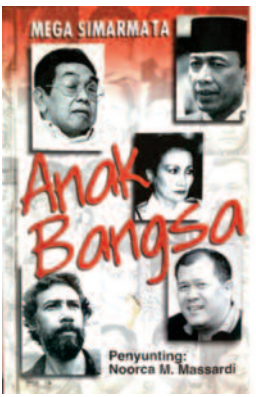





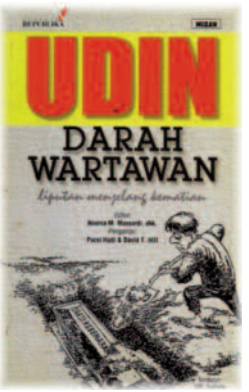

## PANDUAN FILM LSF










## TERJEMAHAN

Komik *Le Mystere de la Grande Pyramide* (*Misteri Piramid Besar: Petualangan Blake dań Mortimer).*

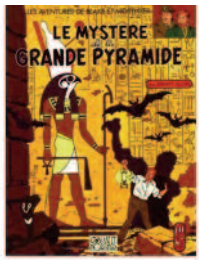


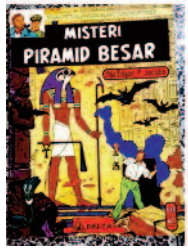


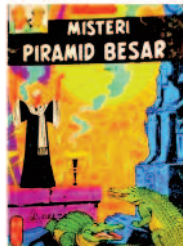


## BIOGRAFI

*Luhut* biografi Jenderal (Hor) Luhut Binsar Pandjaitan (2022), *Perjalanan Dorce : 7 sampai 40 Tahun* (2013).

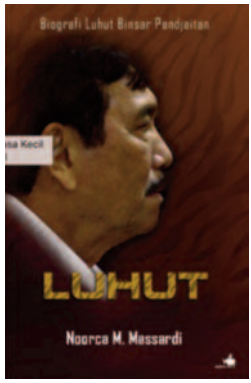




## BEGAWANSHIP BANK INDONESIA




**Penerbit**
Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia

**Penyelia:**
Fretdy Purba, Fenny Karlavita Siregar,
Shiddieq Adhityarahman

**Tim Penyusun:**
Noorca M. Massardi
A. Margana
Irwan Andri Atmanto
J.A. Putranto
Maman Gantra
Riki Dhamparan Putra
Indri Arieñandi
Bona Soetirto
























## KARYA & KINERJA ANGGOTA LSF 2020-2024




## RIWAYAT JURNALISME



# RINGKASAN
## Noorca M. Massardi

Lahir di Subang, Jawa Barat, pada 28 Februari 1954, anak kelima dari 12 bersaudara ini adalah pewarta, pengarang, dan pernah menjadi pembawa acara di televisi (RCTI, TVRI, JAKTV). Karya-karyanya mulai dimuat di media massa sejak berusia 16 tahun. Antara lain:

**Lakon Sandiwara:** *Bhagawad Gita* (1972), *Kertanegara* (1973), *Perjalanan Kehilangan* (1974), *Kuda- Kuda* (1975), *Terbit Bulan Tenggelam Bulan* (1976), *Tinton* (1976), *Mencari Taman* (1978), dan *Growong* (1982). **Biografi:** 17 mantan Direktur Bank Indonesia (*Begawanship)* (2008), dan *LUHUT Biografi Luhut Binsar Pandjaitan* (2022). **Novel:** *Sekuntum Duri* (1978), *Mereka Berdua* (1981), *September* (2006), *d.I.a. Cinta dan Presiden* (2008), *Straw* (2015), *180* (dengan Muhammad Cevy Abdullah), *Setelah 17 Tahun* (2016), dan *SIMVLACRVM* (dengan Cassandra Massardi). **Kumpulan Puisi:** *Mata Pelajaran - Syair Kebangkitan* (dengan Yudhistira ANM Massardi - 1994), *Hai Aku Sent To You* (2017), *Hai Aku* (2017), *Ketika 66* (2020), *Pantai Pesisir* (2021), *69 Cinta untuk Rayni* (2023), dan *Dari Paris untuk Cinta* (2024).

**Di dunia jurnalistik**, lulusan Ecole Superieure de Journalisme (ESJ), Paris, Perancis (1981) ini pernah menjadi koresponden *Tempo* di Paris, Perancis (1978-1981), pewarta Harian *Kompas* (1982-1985), dan Pemimpin Redaksi di Majalah Berita Bergambar *Jakarta-Jakarta* (1985-1989), *Vista FMTV* (1990-1992), *Forum Keadilan* (1992-2003), *telset* (2002-2003), *Hongshui Living Harmony* (2004-2006), *AND* (2010-2011), dan Wakil Pemimpin Umum Tabloid *Prioritas* (2011-2012). Di Paris, ia pernah mewawancarai Pemimpin Iran Ayatullah Khomeiny, Abolhassan Banisadr, Massoud Radjavi, Pangeran Norodom Sihanouk, Madame Simone Veil, Michel Rocard, Maurice Duverger, dan Regis Debray.

**Di bidang film**, Ketua Komite Teater dan Ketua Dewan Kesenian Jakarta (1990-1993), ini pernah menjadi pembawa acara *Cinema-Cinema* di RCTI (1990-1993), pengurus organisasi Karyawan Film dan Televisi (1993), dan Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (2010-2020). Sejak Jumat, 8 Mei 2020, ia dilantik menjadi Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia (2020-2024) dan Ketua Subkomisi Dialog LSF.





# *"JOURNALISM IS MY PASSION"*

## Rita Sri Hastuti
Ketua Subkomisi Publikasi & Data

Judul *Journalism is My Passion* di atas itu diberikan oleh sahabat saya, pewarta senior Heryus Saputro, ketika menulis tentang saya untuk Portal *Bisniswisata.co.id*. Judul itu membuat saya merenungi perjalanan saya, yang ternyata tak lepas dari kewartawanan. Sebuah dunia yang tak sengaja saya arungi sejak 1980.

Saya lahir di Jakarta pada Minggu, 13 November 1955, sebagai anak kedua dari enam bersaudara. Ayah saya R.Wisnoenoto, asal Purworejo, Ibu saya R. Ay. Soemi Koentini dari Semarang. Meskipun lahir di Jakarta, saya mengalami masa kanak-kanak hingga sekolah Taman Kanak-Kanak di Semarang, karena ketika itu Ayah saya bekerja di Semarang.

Sebutan "wartawan" saya dengar pertama kali dari Ayah, ketika kami sudah kembali ke Jakarta. Ketika itu Ayah ditunjuk sebagai salah satu direksi di sebuah perusahaan negara perindustrian rakyat. Saya sudah di SD ketika Ayah mengajak nonton Asian Games di televisi, berdua, pada 24 Agustus 1962. Itulah siaran penanda lahirnya TVRI, jaringan televisi pertama di Indonesia. Waktu itu usia saya tujuh tahun. Kakak saya yang lebih tua tujuh tahun dari saya, tinggal di Semarang bersama Eyang Kakung-Putri. Adik saya masih berusia empat tahun, jadi belum diajak nonton.




**Sebagai host Podcast LSF "Action Nihil...!" dengan narasumber Ni Luh Putu Elly (Anggota LSF (2015-2019)**

"Itu apa, 'Pi? tanya saya waktu Ayah menunjukkan kotak berkaca yang ditaruh di atas bufet. "Itu namanya televisi," kata Ayah. Saya tidak tahu apa yang ditayangkan di televisi itu – setelah dewasa, saya baru tahu itulah Asian Games. Yang saya tahu, ketika ada kerumunan di sekitar atlet, Ayah bilang, "Kalau kamu besar nanti, jangan seperti mereka, enggak ada uangnya."

"Memangnya mereka itu apa?"

"Itu wartawan"

Ketika itu tentu, profesi wartawan masih belum masuk di kepala saya. Saya sekolah sesuai arahan Ayah. Mulai SD Tarakanita I di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (lulus 1968). Lalu SMPN XII, juga di sekitar Kebayoran Baru (1971). Saat SMA, saya ikuti permintaan Ayah agar kembali ke Tarakanita yang kebetulan dekat rumah.

Sampai kemudian, ketika lulus SMA (1974), Ayah berkeras agar saya melanjutkan kuliah kesekretarisan di LPK (Lembaga Pendidikan Kejuruan) Tarakanita. "Supaya bisa langsung dapat pekerjaan," kata Ayah. Kebetulan waktu itu, Ayah sudah pensiun. Namun, saya tidak tertarik untuk menjadi sekretaris.

Karena masih LPK, belum menjadi akademi, saya bisa ambil kuliah hanya satu tahun (1975). Diam-diam pada tahun yang sama, saya ikut tes masuk di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI, sekarang FIB UI), yang waktu itu masih di Rawamangun, Jakarta Timur. Dan lulus. Saya pilih Sastra Indonesia karena sejak SMP saya suka bahasa dan sastra Indonesia. Ayah saya menyerah.

Pada saat kuliah di FSUI itu, saya ikut banyak kegiatan. Nah, suatu ketika, saya melihat promo menarik di dinding kampus. Bahwa akan ada pendidikan pers untuk menjadi wartawan koran kampus. Saya jadi teringat kata-kata Ayah tentang wartawan, dan penasaran untuk tahu apa itu wartawan.

Setelah mengikuti pendidikan beberapa hari, hasilnya, saya tidak masuk 10

besar. Tetapi, saya satu-satunya peserta yang diundang menjadi wartawan di Surat Kabar Kampus UI (SKK UI) *Salemba*. "Kamu berbakat jadi wartawan," ujar senior saya, Pamusuk Eneste. Bahkan esoknya, Pamusuk khusus mengajak saya ke kantor redaksi yang berlokasi di kampus UI Salemba Raya, Jakarta Pusat.

SKK UI *Salemba*, adalah media pers mahasiswa yang terbit secara nasional pada 1975–1980 masa Orde Baru. Ketika itu, dunia kemahasiswaan di Indonesia sedang dalam pengawasan dan pembinaan sebagai dampak Peristiwa Malari (Limabelas Januari) 1974. Di situ saya digembleng menjadi wartawan. Mulai dari meliput, wawancara, sampai menulis.

Setiap hari selesai kuliah di kampus Rawamangun, saya naik bemo ke kampus




**Menyampaikan sambutan sebagai Ketua Pelaksana "Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022" di Medan.**

Salemba. Pulang sore. Posisi saya dari wartawan sampai menjadi redaktur budaya menggantikan Bang Pamusuk Eneste yang pada 1978-1981 mengajar di Universitas Hamburg, Jerman Barat. Honor saya Rp10 ribu sebulan.

Sejak itulah, perjalanan hidup saya seakan terseret menjadi wartawan. Pada 1980, SKK UI *Salemba* kembali menyelenggarakan pendidikan pers. Saya mendapat tugas mengantar undangan kepada redaktur foto Majalah *Tempo* Ed Zoelverdi (alm) untuk menjadi salah satu pembicara. Ketika itu kantor *Tempo*

masih di Proyek Senen. Rupanya itu tanda saya lebih jauh berkarier jadi wartawan. Saat menunggu di ruang tamu, muncul seorang teman mantan wartawan SKK UI *Salemba*, Najib Salim – mahasiswa Fisip UI.

"Rit...masih di *Salemba*?" tanya Najib. "Ayo gabung di *Tempo*. Ada Majalah *Zaman* baru terbit," katanya. Saya langsung diperkenalkan kepada Mas Putu Wijaya, Redaktur Pelaksana Majalah *Zaman*. Pengelola majalah itu para tokoh budaya – selain Goenawan Mohamad (Pemimpin Redaksi) dan Putu Wijaya (Redaktur Pelaksana), deretan redakturnya antara lain Danarto (alm), Sori Siregar (alm), N. Riantiarno (alm), Jim Supangkat, Seno Gumira Ajidarma, dan Ananda Moersid.




**Di "Warung Prihatin" dengan Fidha, Titta dan Wiwid**

Saya langsung diterima dan aktif bekerja sejak November 1980. Saya beruntung, ketika itu grup Majalah *Tempo* belum menerapkan rekrutmen khusus. Baru tahun berikutnya penerimaan wartawan harus berlatar belakang sarjana. Itulah pengalaman pertama saya bekerja di media umum. Saya mendapat tugas sebagai Staf Redaksi Bidang Film dan Budaya.

Saya juga dipercaya meliput kegiatan tokoh yang saya lakukan sejak subuh hingga malam hari. Ayah saya tak komentar, ketika secara resmi saya lapor bahwa saya bekerja sebagai wartawan.

Ketika Majalah *Zaman* ditutup pada 1985, diganti dengan Majalah *Matra* (terbit

1986), saya memilih bergabung sebagai redaktur di Majalah *Swasembada* (sekarang Majalah *Swa*). Di situ saya belajar meliput dunia bisnis. Majalah bisnis yang terbit sejak 1985 itu, merupakan kerja sama PT Grafiti Pers (penerbit *Tempo*) dengan Yayasan Swasembada Swakarya yang menggencarkan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Saya beruntung, pemimpin redaksi saya ketika itu, Bondan Winarno (alm) – yang belakangan dikenal sebagai pengamat kuliner – banyak memberi ilmu liputan bisnis. Ia juga mengajari wartawannya menikmati makanan dengan benar. Tujuannya, tentu agar tidak *malu-maluin* bila makan bersama narasumber. Ketika itu kami berkantor di Kuningan, Jakarta. Hampir setiap sore Mas Bondan



**Dalam acara "Anugerah LSF 2023" di Studio Indosiar. (Ki-Ka): Ketua GPBSI Djonny Sjafruddin, Direktur PMM Ahmad Mahendra, Rita, dan Ahmad Yani Basuk (Ketua Komisi II LSF)i.**

mengajak wartawannya ke kafe yang baru dibuka di wilayah itu. Saya tak lupa, yang diingatkan Mas Bondan, "Nikmatilah makanan sesuai rasa aslinya.

"Pada masa itulah atas usul Muklis Gumilang, salah satu redaktur, nama majalah *Swasembada* diubah menjadi *Swa* dan masih terbit hingga sekarang. Ketika Mas Bondan mengundurkan diri dari Majalah *Swa* pada 1987, kebetulan saya bersama 43 wartawan dari grup *Tempo* hengkang untuk menerbitkan Majalah Berita *Editor.*

Sayang akhirnya *Editor* dibreidel oleh Departemen Penerangan RI pada 1994, bersamaan dengan *Tempo* dan *Detik*. Sebagai gantinya, pada 1995, dengan tim yang

sama, kami menerbitkan Majalah *Tiras* pada 1995. [Di *Tiras*, antara lain saya ditempatkan sebagai Kepala Biro Jawa Timur (1990 -1992) untuk liputan Jawa Timur.

Jadi, betul menjadi wartawan merupakan gairah hidup saya. Saya juga mengukir karier di radio dan televisi. Pernah magang sebagai reporter lepas di Siaran Kata Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Acara Seni dan Sastra. Kemudian penyiar Siaran Film di Radio Prambors (1986), serta penyiar, reporter, dan produser di Radio Delta Fm (1994 – 2004).

Setelah sepuluh tahun di radio, saya kembali ke media cetak, ikut menerbitkan Majalah *d'Maestro* (Mei 2004 – April 2008) bersama wartawan senior Chrys Kelana dan Ekky Imanjaya. Saya tercatat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi/Redaktur Pelaksana (Mei – November 2008) dan Pemimpin Redaksi hingga 2009.

Di media televisi, saya adalah Redaktur Pelaksana Acara "Wanita dan Berita" di ANTV (Avi Production, 2001), Redaktur dan Narator Acara "Kabar-Kabari Minggu" di RCTI (Shandika, 2002), Redaktur dan Narator Acara "Kabar Baik" di TVRI (Sinemaindonesia, 2009 – 2010).

Akibatnya, saya sempat mengabaikan perkuliahan. Pada 1983 saya hanya mendapatkan sarjana muda. Apalagi waktu itu kebanyakan wartawan tak mengutamakan gelar. Berulang kali Ayah mengingatkan agar saya menyelesaikan kuliah, saya abaikan. Ketika kemudian semakin banyak teman wartawan kuliah kembali, saya jadi ikut bergairah. Jadi, jangan heran kalau saya baru menyelesaikan S-1 pada



**Dalam acara "Anugerah Jurnalistik Adinegoro" di Medan, dengan Ibu Rosita Niken (Kemenkominfo) dan Tjandra Wibowo (PFN).**




**Bincang terakhir dengan Kemala Atmodjo (alm) dalam Podcast "Action Nihil...!" LSF di Senayan.**

2010 di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional.

Hobi saya nonton film antara lain saya salurkan dengan menjadi kontributor Majalah *Moviegoers* (2010 – 2012) milik Kemala Atmojo (alm). Pada waktu yang sama, saya juga aktif di Majalah *Warisan Indonesia*, dan menjadi Pemimpin Redaksi majalah tersebut pada 2013. Sejak 2015 saya tercatat sebagai Wakil Pemimpin Umum Portal *Bisniswisata.co.id*, dan Wakil Pemimpin Umum *e-magazine Explore* sejak April 2020.

Sebagai wartawan, saya menjadi Anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) cabang Jakarta sejak 1987. Sejak di PWI cabang Jakarta Sie.Budaya dan Film (1987–1992), lalu ke PWI Pusat sebagai Ketua Bidang Radio (1998–2003); Ketua Departemen Wartawan Pariwisata, Budaya, dan Film (2003–2008), dan Wakil Sekjen (2008–2013). Saya juga Juri Anugerah Jurnalistik Adinegoro Bidang Infotainmen Budaya (2012, 2013, 2015), Ketua Panitia Tetap (Pantap) Anugerah Jurnalistik Adinegoro PWI Pusat (2018–2023), dan penguji kompetensi wartawan sejak 2018 hingga sekarang.

Nah, berkat menjadi wartawan dan pengurus PWI Pusat, ditambah menangani budaya dan film, saya dipercaya menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF). Waktu itu, anggota LSF adalah wakil dari lembaga dan organisasi di Indonesia, termasuk PWI. Kebetulan pengurus PWI yang menjadi anggota LSF ketika itu, H.B. Soeharto Wijaya, mengundurkan diri dan merekomendasikan saya sebagai penggantinya.

Saya kemudian lapor kepada Ibu Titie Said, Ketua LSF (2002–2008), yang



**Kegiatan outdoor LSF di Bandung. Ki-Ka: Titta, Noorca, Nasrullah, Joseph, Rita, Fidha, Mukayat, Kuat Prihatin.**

menyambut dengan hangat. "Bagus, Rita, jadi menambah jumlah perempuan di LSF," ujarnya. Saya kemudian dilantik menjadi anggota LSF (2009–2012), bersama tokoh-tokoh senior di LSF. Selain bersama Titie Said Sadikun (almh.) yang juga dikenal sebagai wartawan dan novelis, juga H.M. Johan Tjasmadi (alm.) tokoh bioskop, Rae Sita Supit (almh.) aktris film, Anwar Fuadi-aktor, Firman Bintang-produser, dan Mayjen TNI (Purn) Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si.-tokoh militer. Ketua LSF periode tersebut, Dr.Mukhlis PaEni, adalah budayawan dan sejarawan.

Rupanya periode 2009 – 2012 merupakan periode terakhir LSF dengan jumlah anggota 45 orang. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebut jumlah anggota LSF 17 orang terdiri 12 unsur masyarakat dan 5 unsur pemerintah. Sebagai Ketua LSF (2015-2019) adalah Mayjen TNI (Purn) Dr.Ahmad Yani Basuki.

Undang-Undang juga menyebutkan bahwa tugas penyensoran dibantu Tenaga Sensor. Saya melamar sebagai Tenaga Sensor (TS) pada periode tersebut. Meskipun TS, saya dipercaya untuk menulis dan menyunting buku *Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film di Indonesia Memasuki Abad Kedua* (2016).

Barulah pada periode 2020 – 2024 saya memberanikan diri melamar sebagai Anggota LSF. Di periode ini saya mendapat jabatan Ketua Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi – yang antara lain wajib menerbitkan Majalah *Sensor Film* — pekerjaan yang tak jauh dari profesi wartawan. Di LSF ini, selain saya semakin memahami tugas penyensoran, saya dapat menyelesaikan S-2 Komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta (IISIP).



## JATI DIRI:

**Nama Lengkap** : Rita Sri Hastuti, SS., M.Ikom
**Tempat/Tanggal Lahir** : Jakarta, 13 November 1955
**Surel**:: ritasoedjono@yahoo.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1.SD Tarakanita, Jakarta (1968)
2.SMPN XII, Jakarta (1971)
3.SMA Tarakanita, Jakarta (1974)
4.LPK Sekretaris Tarakanita (1975)
5.Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Indonesia, Universitas Indonesia (1983)
6.Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nasional (2010)
7.Fakultas Ilmu Komunikasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) (2022)

## RIWAYAT PEKERJAAN:

-Anggota Lembaga Sensor Film (LSF)/Ketua Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi/Pemimpin Redaksi Majalah Sensor Film (2020 – 2024)
-Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI
Pusat, 2023 – 2028)
-Wakil Pemimpin Umum e-magazine Explore (2020 – sekarang)
-Wakil Pemimpin Umum bisniswisata.co.id (2015 – sekarang)
-Pengajar Penyuntingan Berita dan Bahasa Jurnalistik di Politeknik Negeri Jakarta (2009 – sekarang)
-Tim Penguji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat (2013 – sekarang)
-Penulis dan Penyunting buku (1992 – sekarang)

## Rita Sri Hastuti

# RIWAYAT PENGALAMAN:

**MEDIA CETAK**

Reporter Surat Kabar Kampus UI Salemba (1976–1980) - Bergabung di Majalah Tempo - Reporter/Staf Redaksi Bidang Film dan Budaya Majalah Mingguan Zaman (1980–1985) - Redaktur Majalah Ekonomi Bulanan Swa (1985–1987) - Ikut menerbitkan Majalah Mingguan Berita Editor (1987–1994) - Redaktur Film dan Budaya kemudian Redaktur Bisnis (1987–1990) - Kepala Biro Jawa Timur (1990–1992) - Asisten Redaktur Pelaksana (1992) - Manajer Iklan dan Promosi (1992 – 1994) - Redaktur Tabloid Internal McDonald (1994–1995) - Ikut menerbitkan Majalah Mingguan Berita Tiras (1995–1998) - Manajer Promosi (1995–1996) - Redaktur Pelaksana (1996–1998) - Redaktur Pelaksana Majalah Internal AMA (Asosiasi Manajer) Indonesia Cabang Jakarta (199 –1998) - Penulis lepas di The Jakarta Post untuk bidang kebudayaan (1998–1999) - Redaktur Pelaksana Tabloid Power (Mei – September 1999) - Wakil Pemimpin Redaksi Tabloid Gosip (September – Desember 1999) - Redaktur Eksekutif Majalah Popular (2000) - Redaktur Pelaksana Koran Perempuan (2001) - Redaktur Bahasa Majalah ShowBiz (2002) - Editor Majalah Warta, majalah internal Pusat Dokumentasi Sastra H.B.Jassin (2004–2008) - Redaktur Pelaksana Majalah d'Maestro (Mei 2004 – April 2008) - Wakil Pemimpin Redaksi/Redaktur Pelaksana Majalah MaestroNews (Mei – November 2008) - Pemimpin Redaksi Majalah MaestroNews (November 2008–2009) - Kontributor Majalah Moviegoers (2010 – 2012) - Dewan Redaksi Majalah Warisan Indonesia (2010–2011) - Pemimpin Redaksi Majalah Warisan Indonesia (2011–2013) - Pembina Surat Kabar Suara Keadilan (2021 – sekarang)

**MEDIA RADIO**

Reporter lepas Siaran Kata untuk Acara Seni dan Sastra di RRI (1984–1987) - Penyiar Siaran Film di Radio PRAMBORS (1986) - Penyiar, Reporter, dan Produser di Radio DELTA FM (1994–2004).

**MEDIA TELEVISI**

Redaktur Pelaksana Acara WANITA DAN BERITA di ANTV (Avi Production, 2001) - Redaktur dan Narator Acara KABAR-KABARI MINGGU di RCTI (Shandika, 2002) - Redaktur dan Narator Acara KABAR BAIK di TVRI (Sinemaindonesia, 2009–2010)

**MEDIA INTERNET**

Redaktur Website LSF www.lsf.go.id (2010 – 2016)

KEHUMASAN

Primabhumi PR (1986) sebagai penulis advertorial untuk televisi - Gayatri PR (1988 – 1989) sebagai Koordinator Wartawan - Ikut mendirikan PT Adhidaya Visi Selaras (1993 – sekarang) sebagai penyelenggara seminar dan penerbitan media internal - Membantu Avigra Comm. untuk penerbitan media internal (1996) -

Humas Festival Internasional Art Summit '98 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998) - Tim Asistensi Media untuk Dirjen Kebudayaan Prof.Dr.Edi Sedyawati (1999) - Humas Festival Budaya Nusantara (Jakarta, 1999) - Koordinator Humas Seminar dan Festival Tradisi Lisan ATL (2003 – 2011) - Humas Festival Revitalisasi Budaya Melayu (Tanjungpinang, 2004) - Koordinator Humas Festival Film Indonesia (2005 dan 2006) - Koordinator Humas Indonesian Science Festival (2007–2013) - Humas Teater Mandiri (2014 – sekarang)

**LITERASI**

Pengajar Jurnalistik Media Cetak di Mabes TNI (2010–2017) - Pembicara tentang Bahasa Jurnalistik dalam workshop Announcing Skill, News Announcing, Script Writter, dan Public Speaking Poros FM, Politenik Negeri Jakarta (2014) - Pembicara tentang Bahasa Jurnalistik mewakili Forum Bahasa Media Massa (FBMM) bersama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, dalam kunjungan ke beberapa media massa, antara lain Pos Kota, RRI Bogor, IndoSiar, dan DAAI TV (2016 – 2017) - Pembicara tentang Teknik Wawancara dan Penulisan Berita dalam Pelatihan Uji Kompetensi Wartawan secara hibrid, Dewan Pers (September, Oktober 2021) - Pembicara tentang Lembaga Sensor Film (LSF) Di Lingkaran Perfilman Indonesia dalam Seminar Industri Film, Departemen Film Universitas Bina Nusantara (7 Oktober 2021) - Pembicara tentang Meraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro dalam Webinar Media"Hulu Migas Update" dan Sosialisasi LKTJ Migas se-Provinsi Riau serta Pelatihan Wartawan "Meraih Anugerah Jurnalistik Adinegoro", Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau (22 Oktober 2021)

**BUKU**

Layar Perak, Sejarah Bioskop Indonesia (GPBSI, Jakarta, Tim Editor, 1992) - Biografi Prof.Dr.Mahar Mardjono, Mahar-Pejuang, Pendidik, dan Pendidik Pejuang (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tim Peliput, 1997) - Biografi H.Masagung, Ketut Masagung: Bapak Saya Pejuang Buku (Gunung Agung, Jakarta, Penulis, 2003) - Hasil Workshop Wartawan Film, Sosialisasi Draft RUU Perfilman (FFI 2006, Jakarta, Tim Editor, 2007) - Kumpulan Profil, Maestro Seni Tradisi (Asosiasi Tradisi Lisan-Depbudpar, Jakarta, Tim Penulis, 2008) - Kumpulan Profil, 30 Perempuan Pilihan (Wanita Penulis Indonesia, Jakarta, Tim Penulis, 2010) - Sejarah Batik, The 20th Century Batik Masterpieces-Tumbu Ramelan Collections (Museum Tekstil, Jakarta, Tim Editor, 2010) - Antologi Puisi 50 Penyair Indonesia, Kitab Radja dan Ratoe Alit (Kosa Kata Kita, Jakarta, Tim Penulis, 2011) - Antologi Puisi, 22 Perempuan Indonesia (Kosa Kata Kita, Jakarta, Tim Penulis, 2011) - Sejarah Sensor, Sejarah Sensor Film Di Indonesia 1916-1940 (LSF, Jakarta, Tim Penulis, 2011) - Memoar, Megawati: Anak Putra Sang Fajar (Yayasan Kusuma Pertiwi, Jakarta, Penulis bersama Yvonne de Fretes, 2012) - Memoar, M.Husseyn Umar Antara Kampus, Birokrasi, Hukum, dan Sastra (Buku,Pesta, dan Cinta) (PT Fikahati dan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, Penulis bersama Yvonne de Fretes, 2012) - Kumpulan Profil, Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi 2013 (Kemdikbud, Jakarta, Editor, 2013) - Kumpulan Esai HUT 70 Tahun Putu Wijaya, Bertolak dari Yang Ada (Teater Mandiri, Jakarta, Editor bersama Gandung Bondowoso, 2014) - Antologi Puisi, Perempuan Langit (Tiara Wacana, Yogyakarta, Tim Penulis, 2014) - Kumpulan Profil, Anugerah Kebudayaan dan Penghargaan Maestro Seni Tradisi 2014 (Kemdikbud, Jakarta, Editor, 2014) - Memoar, H.M.Johan Tjasmadi 60 Tahun Mengawal Bioskop dan Film Indonesia (PWI Pusat dan Panitia Hari Pers Nasional, Jakarta, Penulis bersama Yan Widjaya, 2015) - Kumpulan Tulisan, Cerita Pencari Berita (PWI Pusat dan Panitia Hari Pers Nasional, Jakarta, Editor bersama Fanny G.Poyk, 2015) - Kumpulan Tulisan, Kemerdekaan Pers di Indonesia: Seperti Arungi Jeram karya Tri Agung Kristanto (PWI Pusat dan Panitia Hari Pers Nasional, Jakarta, Editor, 2015) - Kumpulan Esai Myra Sidharta, Seribu Senyum dan Setetes Air Mata (Penerbit Kompas, Jakarta, Editor, 2015) - Kumpulan 10 lakon karya Putu Wijaya, Teror Mental (Teater Mandiri, Jakarta, Editor, 2015) - Kumpulan monolog karya Putu Wijaya, 100 Monolog (Teater Mandiri, Jakarta, Editor bersama Gandung Bondowoso, 2016) - Kiat Penulisan Artikel: Agar Tulisan Kita Digemari Pembaca karya Syatrya Utama(PWI Pusat dan Panitia Hari Pers Nasional, Jakarta, Editor, 2016) - Pesona Lombok Sumbawa karya Sigit Setyo Lelono (PWI Pusat dan Panitia Hari Pers Nasional, Jakarta, Editor, 2016) - Bunga Rampai 100 Tahun Sensor Film di Indonesia Memasuki Abad Kedua (LSF, Jakarta, Editor, 2016) - Kumpulan Lakon karya Putu Wijaya, Tradisi Baru (Teater Mandiri, Jakarta, Tim Penyelaras Naskah, 2017) - Bunga Rampai Seni Pertunjukan Kebetawian karya Julianti Parani (IKJ Press, Jakarta, Editor bersama Gandung Bondowoso, dan Penyelaras Bahasa, 2017) - Seribu Cermin karya Putu Wijaya (Teater Mandiri, Jakarta, Editor, 2019) - Kumpulan 99 Puisi Peradaban Baru Corona (Wartawan Penyair Indonesia, Jakarta, Penulis, 2020) - Biografi Harjoko Trisnadi, salah satu pendiri Grup Tempo, Harjoko Trisnadi - Dari Jurnalis Mengelola Bisnis (Tim Buku Alumni Tempo, Jakarta, Penyelaras Bahasa, 2021) - Anugerah Jurnalistik Adinegoro (Kumpulan Pemenang dan Juri 2019-2022) (PWI Pusat, Jakarta, Penulis, 2023)

**RIWAYAT ORGANISASI**

PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), anggota cabang Jakarta (1987 – sekarang) - PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) cabang Jakarta, Sie.Budaya dan Film (1987–1992) - Yayasan Dinamika Indonesia, Pendiri dan Pengurus (1988–1992) - AMA (Asosiasi Manajer) Indonesia Cabang Jakarta, Humas (1995–1998, 1998–2001) - PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Ketua Bidang Radio (1998–2003) - PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Ketua Departemen Wartawan Pariwisata, Budaya dan Film (2003–2008) - PSAUI (Paduan Suara Alumni UI), Pengurus (2003–2012) - ATL (Asosiasi Tradisi Lisan) Pusat, Ketua Tim Humas (2003–2007), (2008–2011) - ATL (Asosiasi Tradisi Lisan) Pusat, Wakil Sekretaris (2012–2016), (2017–2021) - WPI (Wanita Penulis Indonesia), Humas (2007–2016),

(2021–2025) - PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Wakil Sekjen (2008–2013) - FBMM (Forum Bahasa Media Massa), Ketua II (2008 – sekarang) - PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Sekretaris Komisi Pendidikan (2013-2018) - IKWI (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia) Pusat, Ketua Bidang Pendidikan (2014–2018) - Panitia Tetap (Pantap) Anugerah Jurnalistik Adinegoro PWI Pusat, Ketua (2018–2020, 2020–2023) - Komisi Kompetensi Wartawan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Anggota (2018–2023) - ATL (Asosiasi Tradisi Lisan) Pusat, Wakil Bendahara (2022–2026) - PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan (2023–2028)

**AKTIVITAS LAIN**

Pemandu Acara dan moderator untuk diskusi sosial-budaya (1987 – sekarang) - Narator untuk iklan dan audio visual (1994-2000) - Juri untuk Lomba Puisi, Cerpen, Pidato, Penulisan, Film, Radio - Juri Anugerah Jurnalistik Adinegoro Bidang Infotainmen Budaya (2012, 2013, 2015) - Juri Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kemdikbud untuk Lomba Pidato (2013, 2014, 2015, 2016) - Juri Lomba Penulisan Cerpen HUT Xpressi Jurnal, Politeknik Negeri Jakarta (2014) - Juri Anugerah KPID Banten Kategori Radio (2016) - Juri Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Kemdikbud Kategori Lomba Baca Puisi (2017) - Juri Festival Film Usmar Ismail Award (2017) - Juri Lomba Penulisan Kritik Film dan Non Kritik Film, Pusbangfilm Kemdikbud (2017) - Juri Lomba Penulisan Sensor Mandiri, Anugerah LSF (2017, 2018) - Juri Anugerah Jurnalistik Adinegoro Bidang Radio (2018) - Juri Lomba Karya Tulis HUT IKWI Ke-59 (2020) - Juri Anugerah KPI 2022 Kategori Radio (2022)

# RINGKASAN

## Rita Sri Hastuti

Perempuan kelahiran Jakarta, Minggu, 13 November 1955, ini lebih banyak menjalani hidupnya sebagai pewarta.

Rita Sri Hastuti yang dikenal dengan insial "RSH," memulai kariernya sebagai pewarta di Surat Kabar Kampus UI *Salemba*, sebelum kemudian bergabung di Majalah Berita Mingguan *Tempo*. Saat *Tempo* menerbitkan Majalah Budaya *Zaman*, ia ikut mengelolanya antara lain bersama Putu Wijaya (1980-1985). Ia juga mengelola Majalah *Swa* bersama Bondan Winarno (alm) pada 1985-1987.

Ia ikut mendirikan Majalah Mingguan Berita *Editor* (1987-1994) dan Majalah Mingguan Berita *Tiras* (1995-1998) bersama beberapa pewarta ex-*Tempo*. Lalu bersama pewarta senior Chrys Kelana menerbitkan Majalah Profil *d'Maestro* (2004-2008), dan bersama budayawan Putu Wijaya menerbitkan Majalah Budaya *Warisan Indonesia* (2010-2013).

Menjadi Anggota LSF (periode 2009-2015), juga berkat kewartawanannya. Ketika itu, LSF masih beranggotakan perwakilan pelbagai lembaga di Indonesia, Rita yang mewakili PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, langsung pula dipercaya menjadi redaktur *website* LSF ketika itu. Dan, saat dilantik sebagai Anggota LSF periode 2020-2024, ia ditunjuk menjadi Ketua Subkomisi Data, Pelaporan, dan Publikasi. Salah satu tugasnya adalah mengelola Majalah *Sensor Film*.





# Wartawan Perang yang Dipercaya Menjadi Ketua LSF

**Rommy Fibri Hardiyanto**
Ketua LSF

Rabu, 19 Maret 2003, serangan rudal mengguncang Baghdad, Ibukota Irak. Presiden Amerika Serikat, George W. Bush berpidato bahwa gempuran itu adalah tahap awal operasi militer Pembebasan Irak atau *Operation Iraqi Freedom*. Tak lama seusai Bush berpidato, Negeri 1001 Malam, itu hancur dikoyak hujan peluru, ledakan bom dan serbuan pesawat tempur dari selatan hingga utara, dari barat hingga pusat kota Baghdad.

Meletusnya Perang Irak itu membuat Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Baghdad. Termasuk, empat orang wartawan Indonesia. Mereka dipindahkan ke Amman, Yordania. Usai proses pengungsian, WNI yang masih bertahan di Baghdad hanya Dachlan Abdul Hamid, Duta Besar Indonesia untuk Irak saat itu.

Dalam kondisi perang yang tengah berkecamuk, jurnalis Indonesia yang terjun langsung ke peperangan sendirian adalah saya, ketika itu sebagai wartawan Majalah Berita Mingguan *Tempo*. Saya, menjadi satu-satunya jurnalis asal Indonesia yang berada di jantung Perang Irak. Saya menuju Baghdad melalui ssuatu jalur dari kota Abu Kamal, sebuah kawasan di perbatasan Suriah dan Irak, yang harus ditempuh selama 12 jam dari kota Damaskus.



**Meliput perang Irak, Maret-April 2003**

Terjun ke medan perang seorang diri, rasa takut tentu tak dapat ditampik. Perlintasan sepanjang rute Abu Kamal-Baghdad, itu termasuk zona rawan perang. Beberapa hari sebelumnya, ada sebuah bus yang dihantam rudal pesawat Amerika Serikat ketika melewati rute dengan panjang sekitar 500 kilometer itu. Perasaan cemas pun semakin menjadi-jadi ketika saya menyaksikan sendiri bekas kendaraan yang hancur itu. Namun, saat tiba di lokasi perang, rasa takut itu justru hilang.

Selama Maret hingga April 2003 atau hampir satu setengah bulan, saya berada di Baghdad. Saya bukan hanya jurnalis, tapi juga saksi mata atas kejatuhan rezim Saddam Hussein. Pada 9 April 2003, pasukan Amerika Serikat (AS) merangsek ke Baghdad dari segala penjuru. Sore harinya, pasukan AS sudah menguasai kota, tepatnya di Firdaws Square, pusat kota Baghdad. Puluhan milisi yang menjadi pertahanan terakhir Irak, menanggalkan senjata tanda menyerah. Patung Saddam Hussein di perempatan Firdaws akhirnya dirobohkan. Peristiwa bersejarah sekaligus ironis itu tak luput saya abadikan. Dalam foto yang saya ambil, tergambar bagaimana situasi warga kesusahan, saat hendak menumbangkan patung Saddam. Sehingga, untuk proses penghancuran patung itu tentara Amerika pun turun tangan. Sebuah tali diikatkan di bagian leher patung, lalu tali itu ditarik kendaraan lapis baja Armored Personal Carrier (APC). Patung itu pun roboh.

Peristiwa di Firdaws itu saya tulis menjadi laporan pembuka dalam buku *Detik-detik terakhir Saddam: laporan wartawan TEMPO dari Baghdad, Irak*. Selepas dari *Tempo*, saya melanjutkan karir jurnalistik sebagai Produser Eksekutif Liputan 6 SCTV, Pemimpin Redaksi Tabloid Mingguan *Prioritas*, Direktur News dan Pro-

duksi *TV Muhammadiyah*, Direktur Harian *Jurnal Nasional* dan Komisaris *Dream.co.id*. Saya pernah aktif dan menjadi pengurus di Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan setelah beberapa tahun mengundurkan diri. Dan, pada Desember 2023, saya menjadi Ketua Ikatan Jurnalis Indonesia (IKAJI), yang saya dirikan bersama rekan-rekan jurnalis yang aktif di Muhammadiyah.

Dalam buku yang saya tulis bersama Ahmad Taufik, itu saya menyebutkan bahwa kebahagiaan penduduk Baghdad hanya sementara. Kelak, mereka akan menyadari apa artinya berada di bawah kendali Amerika Serikat, meski saat itu mereka merasa terbebaskan dari Saddam. Waktu itu, penduduk Baghdad memperlakukan Tentara Amerika seperti pahlawan. Mereka mengelu-elukannya serasa menghirup kebebasan.

Bukan hanya sekali, saya mengunjungi Baghdad. Kali kedua saya lakukan pada Desember 2003 hingga Januari 2004. Kala itu, saya meliput tertangkapnya Saddam Hussein. Pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditangkap pasukan koalisi. Saddam diringkus di sebuah lubang yang disamarkan dengan tumpukan batu bata, dan ditutupi selembar *styrofoam*, serta karpet. Itu sekaligus mengakhiri pelariannya setelah pada 20 Maret 2003, pasukan AS mulai menggempur Irak.



**Pasukan Marinir bersiaga di sekitar perempatan Firdaws Baghdad, April 2003**

Saddam diburu karena dianggap menyimpan senjata pemusnah massal. Dia juga dikenal sebagai penjahat perang karena menggunakan gas kimia untuk menyerang warganya sendiri. Saddam akhirnya menjalani eksekusi hukuman gantung pada 30 Desember 2006. Kedua anaknya yakni Uday dan Qusay pun terbunuh dalam penggerebekan di persembunyian mereka di kota Mosul, Irak bagian utara. Perang selalu meninggalkan torehan sejarah bagi pemenangnya. Dan di bawah itu semua, hanya tersisa rakyat kecil yang menderita.

Dua hari setelah Saddam ditangkap, saya kembali masuk Irak. Selain Baghdad, saya juga mendatangi kota Najaf, Kufah, Karbala, Falujah, Ramadi, Tikrit, Baquba, Samarra, Kirkuk dan Sulaymaniyah. Masyarakat yang tinggal di kawasan itu lahir dari beragam kultur, dari Arab hingga Kurdistan. Dan, untuk ketiga kalinya, saya



**Bom pasukan koalisi meluluhlantakan pemukiman penduduk Baghdad, Maret 2003**

menyambangi bekas wilayah Mesopotamia, itu pada Mei-April 2004, ketika berlangsung penyerahan kekuasaan dari pasukan koalisi AS ke pemerintahan Irak.

Tak banyak wartawan yang punya kesempatan meliput secara langsung kejadian di daerah konflik atau medan perang. Selain perang Irak 2003, saya pernah meliput peristiwa Darurat Sipil di Aceh, terorisme di Poso Sulawesi Tengah, konflik di Papua, serta peristiwa Bom Bali (2002). Bahkan dalam seri liputan terkait Bom Bali, saya menelusuri lokasi-lokasi pelaku selama di Malaysia, termasuk menyingkap relasinya dengan Abu Bakar Ba'asyir.

Ada cerita lucu yang membuat saya tak bisa menahan tawa. Ada pembaca yang mengisahkan kehebatan seorang wartawan yang meliput perang di Irak. Saat makan bersama istri di sebuah resto, saya mendengar pengunjung di meja sebelah, itu sedang asyik berkisah tentang wartawan yang meliput perang. Orang itu bercerita tentang betapa heroiknya kerja jurnalistik seorang wartawan, yang melakukan reportase langsung di Irak, saat negara itu tengah dilanda perang. Saya hanya tertawa geli mendengarnya bercerita pada koleganya. Ketika itu, istri saya *nyolek* saya sambil berbisik, "Orang itu sedang menceritakan soal kamu saat liputan di Irak," kata istri saya.

Dari peristiwa kecil itu, secara tak sadar muncul keinginan dalam hati kecil saya, kalau saya juga perlu tampil di depan. Agar orang lebih tahu tentang diri dan pikiran-pikiran saya. Peluang untuk tampil di depan itu ada di dunia televisi, yang memungkinkan saya bisa menjadi *host* atau pembawa acara dalam sebuah reportase.

Ternyata keinginan itu terwujud saat saya menerima tantangan Rosiana Silalahi untuk bergabung di Liputan6 SCTV. Saat itu, Rosi langsung menghubungi saya ketika baru saja diangkat menjadi Pemimpin Redaksi Liputan 6. Bersama Tim, saya bertugas membuat liputan mendalam tentang sebuah peristiwa.

Selama berkarya di dunia televisi, itu saya mulai bersentuhan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menjadi Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) sejatinya bukanlah impian awal saya. Saya malah lebih tertarik menjadi komisioner di Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI). Namun jalur hidup saya ternyata lebih condong ke LSF.

Pada suatu ketika, saya mendapat informasi tentang pendaftaran Anggota LSF. Saya diberitahu cuma sehari sebelum batas akhir pendaftaran. Dalam waktu singkat, saya menyiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Dan setelah melewati semua proses, termasuk uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR, alhamdulillah saya dipercaya menjadi anggota LSF Periode 2015-2020.

Pada periode pertama, itu saya menjadi Anggota sekaligus dipercaya sebagai Juru Bicara (Jubir) LSF. Posisi saya sebagai juru bicara cukup rawan, karena sayalah yang pertama dicari wartawan apabila ada kasus/masalah terkait film yang beredar di Indonesia. Entah film itu beredar di bioskop, di televisi maupun di jaringan informatika.

Selain itu, menjadi Anggota LSF tidaklah kebal dari kritik. Apabila ada adegan tertentu dalam sebuah film diluluskan, maka akan ada pihak yang menyampaikan protes kepada LSF. "Kok adegan seperti itu diluluskan," kata mereka. Sebaliknya, bila ada adegan yang diminta untuk direvisi, pihak satunya lagi berkata. "Adegan begini saja harus direvisi, apa sih maunya LSF?" Nah, juru bicara mesti pandai dan bijaksana memainkan peran dalam situasi dan kondisi tersebut. Selain menjadi Jubir LSF, Ketua LSF saat itu, Ahmad Yani Basuki, memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili LSF menjadi Tim Panel Ahli Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2018-2020. Panel ahli ini bertugas meluluskan atau tidak meluluskan iklan yang diajukan oleh produsen obat tradisional maupun suplemen kesehatan kepada BPOM. Panel ahli inilah yang selama ini mengawal iklan-iklan mereka sebelum ditayangkan di televisi maupun ruang iklan lainnya.



**Pasukan Marinir AS yang masuk sampai perempatan Firdaws dan menguasai kota Baghdad, April 2003**

Bertahun-tahun pengalaman menjadi jurnalis, memahat saya menjadi pribadi yang harus supel dan hangat dalam bergaul. Tak heran jika saya memiliki relasi dengan spektrum yang cukup luas, dan berkawan dengan siapa saja, tanpa mempedulikan pangkat dan jabatan. Di internal LSF, saya tak hanya akrab dengan sesama Anggota LSF, melainkan juga acapkali reriungan bersama Tenaga Sensor dan staf Sekretariat

LSF. Tak jarang, saya main futsal atau pun bola voli bersama mereka.

Saya juga menjalin hubungan yang akrab dengan para komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik di tingkat pusat maupun daerah. Tak heran jika beberapa kali saya diminta menjadi tim juri *Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia* (KPI) Pusat yang diselenggarakan setahun sekali, termasuk menjadi tim juri Festival Film Pendek Digital Movie Competition 2020 yang dilaksanakan KPI dan BAKTI Kemenkominfo.

Pada periode LSF 2015-2020, saya menorehkan sebuah terobosan yang menjadi tonggak kegiatan *Anugerah Lembaga Sensor Film* hingga kini. Pada kegiatan *Anugerah LSF* yang kedua, pada 2018, saya dipercaya menjadi Ketua Panitia Pelaksana. Pada pelaksanaan sebelumnya, acara hanya dilangsungkan secara luring di sebuah gedung pertemuan. Nah, karena enggan terjebak dengan pola sebelumnya, saya mengundang sejumlah pengelola televisi untuk berdiskusi tentang hal ini. Intinya, saya mengundang pengelola TV untuk mengajukan konsep acara *Anugerah LSF* 2018 secara *live*. Dari sekian TV yang diundang, akhirnya *Kompas TV* yang terpilih sebagai penyelenggara. Konsep acara *Anugerah LSF* yang dilangsungkan secara *live* di TV, itu pun menjadi standar acara LSF di kemudian hari.

Saya menyadari bahwa dengan ide-ide kreatif yang *out of the box* (di luar kebiasaan) dan melalui kerjasama tim, LSF dapat dibangun menjadi sebuah lembaga modern dan berkemajuan. Dan semangat itulah yang mendasari saya untuk mengikuti seleksi Anggota LSF periode 2020-2024. Akhirnya, saya dipercaya kembali untuk melanjutkan tugas sebagai Anggota LSF 2020-2024. Bahkan pada periode ini, saya men-



dapat kepercayaan yang lebih besar dengan terpilih sebagai Ketua LSF.

Setelah terpilih menjadi Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) RI Periode 2020-2024 pada Mei 2020, saya langsung mengumandangkan visi baru LSF. Saya ingin membangun LSF menjadi lembaga yang independen, akuntabel, kredibel dan profesional.

Kecerdasan tentu menjadi perangkat penting akal dalam mengambil sebuah kebijakan. Namun sebagaimana kata Thomas Stephen Szasz, pakar psikoanalisis AS kelahiran Hungaria, "Berpikir jernih lebih memerlukan keberanian daripada kecerdasan." Keberanian menjadi prasyarat utama yang tak kalah urgensinya bilamana seseorang harus berpikir jernih memandang suatu permasalahan.

Sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab



**Proses penumbangan patung Saddam di perempatan Firdaws, April 2003**






**Kartu Pers yang dirilis Kementerian Informasi Irak untuk wartawan internasional selama meliput perang Irak, Maret-April 2003**

menjaga masyarakat dari pengaruh negatif film, saya meyakini bahwa Lembaga Sensor Film (LSF) harus selalu mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Kejernihan berpikir benar-benar diperlukan seluruh Anggota LSF dan Tenaga Sensor, dalam melakukan penyensoran. Sebab LSF tak hanya merepresentasikan satu kelompok atau golongan, melainkan mewakili imaji dan gagasan seluruh elemen bangsa.

Sebagai sebuah lembaga, LSF tak boleh berada di awang-awang, yang jauh dari hiruk-pikuk *trend* dan perkembangan masyarakat. Dengan kata lain,




**Menyambangi Pentagon, 2004**

setiap keputusan yang dibuat LSF terhadap satu film, harus berada di antara semuanya, meski belum tentu menyenangkan semua pihak.

Visi saya untuk membangun LSF yang Independen, Akuntabel, Kredibel, dan Profesional, itu ringkasnya adalah sebagai berikut. Independen merujuk pada pengambilan kebijakan yang tidak dipengaruhi, sekaligus tidak terikat pada, kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Rujukan paling utama adalah kepentingan bangsa dan negara. Kebijakan tersebut tentu harus dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat dimaknai sebagai Akuntabel. Sementara Kredibel itu merepresentasikan LSF sebagai lembaga, harus dapat dipercaya seluruh pemangku kepentingan perfilman. Lembaga ini mesti mampu menyelaraskan antara menjaga masyarakat dan mendorong majunya dunia perfilman. Adapun Profesional sangat berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, demi merilis keputusan-keputusan yang jernih.

Untuk mewujudkan predikat sebagaimana visi itu, LSF harus melakukan beberapa hal. *Pertama,* penguatan aspek penyensoran. Dalam hal ini, LSF seyogyanya selalu menyerap dinamika yang berkembang di masyarakat, sehingga tak terpengaruh oleh tempik sorak kehebohan di masyarakat, senyampang menggunakan pandangan helikopter untuk melihat perkembangan zaman. *Kedua*, meningkatkan *branding* atau pembentukan persepsi publik terhadap LSF. Saat ini proses penyensoran yang dilakukan LSF lebih demokratis dan dialogis. LSF selalu



**International Visitor Program ke Gedung Parlemen Republik Federal Jerman, 2005**




**Menjadi pembicara dalam International China TV Drama and TV Program Fair di kota Shenzhen, Desember 2023**

mengedepankan dialog dalam setiap proses penyensoran film. Apabila ada konten yang dinilai tidak sesuai aturan, LSF memberikan catatan untuk revisi. Lantas pemilik filmlah yang kemudian merevisi dan mengembalikan lagi ke LSF. Pemilik film pun dapat mengajukan dialog dengan LSF, terkait catatan yang diberikan.

*Ketiga*, LSF harus melakukan optimalisasi kelembagaan, yakni dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang baik, dengan seluruh pemangku kepentingan perfilman. *Keempat*, lebih proaktif melakukan diseminasi informasi melalui media komunikasi, terkait info-info LSF dan perfilman, khususnya melalui dunia maya. Selayaknya, LSF menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang ingin menonton film. Publik patut memiliki kecukupan informasi sebelum menonton film, agar tidak salah langkah dalam mengajak putra-putrinya masuk ke bioskop. *Kelima*, menstimulasi kesadaran masyarakat untuk membudayakan sensor mandiri. Pada prinsipnya, sensor mandiri merupakan upaya masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Di tengah derasnya arus tontonan digital yang merangsek dunia hiburan kita, maka konsep sensor mandiri ini merupakan salah satu langkah utama dalam menangkisnya.

Saya menilai, masih berkembang pemahaman di masyarakat bahwa LSF menggunting dan memotong film yang disensorkan. Padahal, sekarang sudah berbeda. Produser mengirimkan film dalam bentuk DCP (*Digital Cinema Package*), lalu LSF meneliti dan menganalisis, kemudian memberikan catatan terkait adegan-adegan yang ditengarai melanggar aturan, misalnya unsur ketelanjangan. Catatan




**LSF mendapat penghargaan peringkat 2 kategori Lembaga Negara dalam Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI, Desember 2023**

itu lalu dikirimkan ke produser film yang bersangkutan.

Perubahan medium film dari seluloid ke digital pun menggeser perilaku analog ke era digital. Bila pada zaman seluloid dulu film langsung dipotong, kini pendekatan LSF lebih dialogis. Sebagai Ketua LSF, saya melakukan pendekatan dialogis. Terhadap adegan-adegan yang diberi catatan, LSF membuka diskusi dengan para pembuat film, sehingga pembuat film memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi tidak lagi asal menggunting.

Saya memahami bahwa membuat film merupakan proses kreatif yang tidak mudah. Maka LSF dalam menyensor film selalu memperhatikan konteks cerita. Bayangkan jika kita sekadar menyensor berdasarkan *scene by scene* (adegan per-adegan), kemudian adegan yang diminta revisi ternyata mempengaruhi alur cerita, tentu itu merugikan para pembuat film. Dengan berdialog, maka LSF juga memberikan ruang kepada para pembuat film untuk melakukan koreksi atau merevisi adegan, tanpa perlu menghilangkannya sama sekali. Dengan demikian, proses kreatif para pembuat film tidak terganggu. Sebab, saya meyakini bahwa LSF bukanlah pemegang hak tunggal atas kebenaran.

Prinsip dialogis, itu bukannya tanpa dasar hukum. Tetapi sesuai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF) yang menyebutkan bahwa penyensoran film dan iklan film dilakukan berdasarkan prinsip dialogis dengan pemilik film dan iklan film yang disensor. Pendekatan dialogis itu merupakan kerangka kerja yang penting selama saya

memimpin LSF. Maka dalam menjalankan program-programnya, LSF banyak melakukan pendekatan ke pelbagai lapisan. Mulai dari masyarakat umum, pelaku industri film, produser, sutradara, aktor/aktris, pimpinan lembaga penyiaran, pengelola jaringan informatika hingga pelaku industri bioskop.

Sehari setelah dilantik menjadi Ketua LSF, saya langsung meminta kepada salah satu rekan Anggota, untuk mengatur waktu dipertemukan dengan sejumlah sutradara film yang selama ini kritis terhadap keberadaan LSF. Apalagi pada tahun-tahun sebelumnya, LSF disebut sebagai salah satu "setan" di dunia perfilman, karena dianggap menghambat kreativitas insan perfilman.

"Yakin mau ketemu mereka? Nanti dihajar habis, lo," kata rekan saya. Tapi saya bersikukuh, dan mengaku justru ingin mendengar langsung ujaran bahkan cacian mereka terhadap LSF. Bagi saya, kritikan dan cacian terhadap LSF adalah bagian dari belanja masalah. Apalagi ketika itu saya baru saja memimpin LSF.

Pada waktu yang ditentukan, saya pun bertemu dengan sejumlah produser dan sutradara. Di antaranya ada Mira Lesmana, Riri Riza, Joko Anwar dan Lola Amaria. Alhamdullilah setelah diskusi, mereka memahami soal kerja-kerja LSF yang sesuai amanat UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, memang ditugaskan melindungi masyarakat dari tontonan negatif, namun pada saat bersamaan juga tidak ingin mematikan kreativitas para pembuat film dengan pola dialogis.

Pada hari-hari berikutnya, LSF semakin banyak bertemu dan berdiskusi dengan para sineas, produser dan pemangku kepentingan perfilman lainnya. Bahkan secara rutin, saya hadir dalam gala premiere film baru yang diadakan para produser. Menurut saya, undangan itu merupakan kesempatan emas untuk bersua dan menjalin komunikasi positif dengan mereka, yakni para produser, sutradara, aktor, aktris, termasuk juga penulis skenario.

Hal lain yang menjadi konsentrasi saya adalah, terkait "tsunami" tontonan yang sedemikian dahsyat. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, berpengaruh besar terhadap peredaran dan pertunjukan film, di mana film saat ini tidak hanya dapat disaksikan di layar bioskop dan televisi, namun juga dapat diakses melalui internet, platform digital dan media sosial.

Akses masyarakat terhadap film pun semakin mudah, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga, masyarakat memiliki potensi mengakses konten perfilman yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya. Untuk itu, pendekatan ke masyarakat yang dilakukan LSF adalah mengadakan peningkatan literasi melalui program Budaya Sensor Mandiri (BSM). Intinya, LSF mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam memilah dan memilih tontonan, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menonton film sesuai dengan klasifikasi usia.

Dengan kampanye dan peningkatan literasi yang terus menerus, itu saya berharap masyarakat memiliki saringan tersendiri untuk menyesuaikan tontonan.




**Memberikan Piala untuk Indro Warkop sebagai peraih penghargaan Pengabdian Seumur Hidup dalam Anugerah LSF Oktober 2023**

Sebab, dengan perkembangan teknologi tontonan yang makin mudah diakses dari pelbagai platform, membuat LSF tidak mungkin menjangkau semuanya.

Ada seseorang yang pernah bertanya pada saya. "LSF itu anggotanya 17 orang, tapi terlihat kompak secara kelembagaan. Kenapa bisa begitu?" Saya pun menggelengkan kepala tanda tak tahu jawabannya. Yang jelas, saya menerapkan prinsip keterbukaan dan kolektif kolegial kepada seluruh kolega di LSF. Saya memahami, setiap orang memiliki pikiran dan pendapat sesuai keahliannya masing-masing. Nah, semuanya tidak harus disatukan dalam pandangan yang sama. Masing-masing boleh menyampaikan persepsi dan pendapatnya, namun lebih penting untuk berorientasi pada solusi. Masalah akan selalu ada, termasuk perbedaan pendapat, namun yang lebih penting adalah merumuskan jalan keluarnya.

Berkaitan hal tersebut, saya meyakini teori yang disampaikan George Wilhem Friederich Hegel, filsuf Jerman yang hidup di sekitaran abad ke-19, tentang dialektika. Dialektika Hegel diawali dengan adanya sebuah Tesis sebagai fase pertama. Yang pada prosesnya kemudian akan melahirkan Antitesis sebagai lawannya di fase kedua. Dan fase ketiga yaitu sintesis-lah yang akan memperdamaikan Tesis dan Antitesis tadi. Dan proses dialektik itu akan terus dan terus berulang.

Kondisi semacam itu mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Entah di lembaga, organisasi, kelompok, komunitas ataupun entitas mana pun, kejadiannya bisa didekati dengan logika tersebut. Dan yang paling penting, menurut




**Konferensi pers penyelenggaraan Anugerah LSF 2023 bersama Dirut Indosiar Imam Sudjarwo**

saya, sintesis dapat diartikan sebagai rumusan jalan keluar, komitmen bersama, perdamaian, kesepakatan, kompromi dan sebagainya, yang apabila kita konsisten menjalankan sikap tersebut, akan terciptalah harmoni.

Hal yang penting juga, sebagai Ketua LSF, saya fokus membenahi aspek internal dan eksternal. Aspek internal, berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, sistem administrasi penyensoran, penanaman semangat korporasi (*esprit de corps*), dan menabalkan budaya korporasi (*corporate culture*). Kesemua hal itu berkaitan erat dengan perspektif pola pelayanan LSF terhadap seluruh pemangku kepentingan perfilman.

Ketekunan dan kerja keras seluruh tim LSF, itu akhirnya membuahkan hasil. Pada Desember 2023, LSF mendapat penghargaan dari Ombudsman RI dengan meraih peringkat Kedua Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik untuk kategori Lembaga Negara. Naik satu tingkat dibanding tahun sebelumnya, yang meraih peringkat Ketiga. Selain itu, dari Komisi Informasi (KI) Pusat, LSF yang pada 2022 dinilai "tidak informatif," pada Desember 2023 mendapat Peringkat Pertama "Menuju Informatif" untuk kategori Lembaga Negara. Dari "Tidak" menjadi "Menuju Informatif" —lompat dua tingkat— merupakan langkah besar LSF sebagai lembaga.

Ini merupakan ukuran bahwa LSF sudah sangat terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Apalagi proses pelayanan administrasi penyensoran sudah 100 persen *online* alias dapat diakses sepenuhnya secara digital. Pengelolaan lembaga pun sudah sangat terbuka dan mengikuti aturan-aturan terkait keterbukaan informasi publik. Dan itu semua adalah kerja tim, bukan kerja orang perorang semata.

Dari aspek eksternal, LSF sudah membuka diri untuk siap berdialog dan berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan perfilman. Secara kelembagaan,

LSF sekarang memiliki relasi positif dengan rumah produksi, sutradara, pengelola lembaga penyiaran, pengelola bioskop (eksibitor), pengelola festival film di Indonesia, termasuk juga pengelola dan pimpinan video *streaming* yang berhimpun dalam Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI). Dalam bahasa yang sangat sederhana, semua sudah sangat bersahabat dengan LSF.

Pelbagai hal tersebut tentu membuat LSF bangga, dan sekaligus merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Itu menjadi penanda bahwa LSF akan selalu melayani pemangku kepentingan perfilman dengan sepenuh hati. Meski tak sedikit capaian yang diperoleh LSF periode 2020-2024, tak membuat saya jumawa. Memang sudah tugas LSF untuk berperan aktif mendukung tumbuhnya industri perfilman, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap tontonan yang mereka nikmati. Itulah tugas mulia LSF yang sesungguhnya.

Proses berdiskusi, berdebat, berargumentasi dan berorganisasi seperti itu, memang sudah saya jalani sejak dari bangku kuliah. Setamat SMA, saya diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Saat di




**LSF dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) kampanye bersama untuk Budaya Sensor Mandiri, September 2022**

Yogyakarta, walau anak eksakta, saya senang membaca buku-buku tentang filsafat, agama, politik, psikologi dan sosiologi. Itu membuat kepala saya "penuh." Tidak hanya tentang ilmu kedokteran gigi, melainkan juga tentang teori-teori, logika berpikir, politik, psikologi dan lainnya. Namun, jalan hidup tak membuat saya mulus menjadi dokter gigi untuk lantas praktik di sebuah klinik atau rumah sakit. Saya malah berprofesi menjadi wartawan, sebagai hasil kristalisasi nilai-nilai selama saya menjadi aktivis pers kampus. Memang sejak semester satu, saya sudah terjun di arena pers kampus.

Ketekunan membuat saya terpilih menjadi Pemimpin Redaksi Majalah *Dentisia*,

majalah tingkat fakultas di FKG UGM, saat masih di semester 2 (dua). Itu hanyalah batu pijakan sebelum akhirnya mengantarkan saya menjadi pengurus di tingkat universitas (UGM). Berikutnya, kegigihan dan kekuatan jaringan membawa saya menjadi Presidium Perhimpunan Pers Mahasiswa Yogyakarta (PPMY), sebelum akhirnya terpilih sebagai Sekjen Presidium Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) yang pertama. Organisasi kemahasiswaan PPMI, itu masih eksis hingga saat ini.

Sebelum lulus kuliah, saya sudah bergabung menjadi wartawan Harian *Yogya Pos* dan kontributor media nasional yang terbit di Jakarta. Ketika itulah, saya seolah menemukan karir dan takdir saya, hingga saya memutuskan untuk menjadi



**Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI, Maret 2021**

wartawan. Bagi saya, wartawan adalah panggilan jiwa yang tak kalah mulia dari profesi dokter. Profesi itu juga menuntut pengabdian sekaligus bisa menjembatani orang yang terpinggirkan (teralienasi), dan mereka yang tidak bisa menyuarakan pendapatnya (*the voiceless*).

Dan terbukti, saya tak salah memilih profesi. Secara pribadi, saya pernah menerima penghargaan "Jurnalis Jakarta Award" dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada Agustus 2003 untuk kategori Liputan Internasional, dan meraih nominasi penghargaan "Lorenzo Natali Prize: Excellence in Reporting Human Rights, Democracy and Development" dari International Federation of Journalists (IFJ) dan Komisi Eropa (European Commission) di Brusel-Belgia pada November 2002.

Pada kali lain, saya dan tim pernah mendulang penghargaan *Anugerah Adiwarta* buat Tabloid Mingguan *Prioritas* untuk kategori Foto Jurnalistik Feature Terbaik (Desember 2012), dan meraih Juara I Lomba Penulisan IPTEK yang diselenggarakan Dupont Industries Co. (Indonesia) dan Kementerian Riset dan Teknologi RI pada

Agustus 2001.

Sebagai wartawan, saya tak hanya menggamit pengalaman tingkat nasional. Saya pernah menjadi pembicara dalam konferensi tentang *"Terrorism and Radical Islamic Movement in Indonesia"* yang diselenggarakan US Public Affairs Section se-Asia Pasifik di US-Pacific Command, Hawaii-USA pada 2004. Selain pernah masuk Markas Militer AS di Pearl Harbour, dalam kesempatan lain, saya juga sempat menyambangi Pentagon dan Gedung Putih (*White House*) di Washington DC.




**Boleh menjadi yang utama, tetapi tetap rendah hati**

Semua sifat dan karakter saya yang suka kerja keras, tekun dan persisten, selama perjalanan hidup dan karir, itu saya peroleh dari didikan kedua orang tua saya yang berprofesi sebagai guru. Saya merasa dekat sekali dengan Ibu, yang menjadi guru Kimia di sekolah menengah atas. Saya banyak meraup pelajaran berharga dari beliau. Suatu ketika Ibu pernah berkata, "Jangan sedikit-sedikit nanya terus, tapi coba dulu, cari tahu dulu, usaha dulu, kalau sudah mentok (terbentur tembok) baru nanya." Kata-kata itulah yang terngiang-ngiang di kepala saya hingga kini. Bahkan ternyata berdampak besar pada karakter dan sikap hidup saya di kemudian hari.

Perjalanan hidup telah membawa saya menjadi Ketua Lembaga Sensor Film 2020-2024. Namun semua itu tak mengubah diri saya yang selalu hangat dan penuh setia kawan terhadap rekan, sejawat, dan kolega. Karena selama ini saya meyakini pepatah Aceh yang mengatakan, "*Kebahagiaan hudep yang sebetoi jih nyankeh hudep ngon kerendahan hate* (Kebahagiaan hidup yang sesungguhnya adalah hidup dengan rendah hati)." Ini selaras dengan kata-kata yang selalu dipesankan oleh orang tua saya, "*Ambeg utomo, andhap asor* (Boleh menjadi yang utama, tetapi tetap rendah hati)."

## Rommy Fibri Hardiyanto

# JATI DIRI:

**Nama Lengkap** : Rommy Fibri Hardiyanto
**Tempat & Tanggal Lahir** : Semarang, Senin, 14 Februari 1972
**Anak** : Sulung dari 3 (tiga) bersaudara
**Email** : rommy.fibri@gmail.com
**Medsos** : FB, IG

# RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. Pasca Sarjana (S2), Magister Ilmu Komunikasi di The London School of Public Relations (LSPR) Jakarta, 2016
2. Sarjana (S1), Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, 1999
3. SMAN 1 Semarang-Jawa Tengah, 19904. SMPN 3 Semarang-Jawa Tengah, 19875. SDN Miroto I, Semarang-Jawa Tengah, 1984.Gelar: drg. - MIKom

# RIWAYAT PEKERJAAN

1. Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) RI 2020-2024
2. Anggota merangkap Juru Bicara Lembaga Sensor Film (LSF) RI 2015-2020
3. Direktur Utama Harian *Jurnal Nasional*, 2014-2015
4. Direktur News dan Produksi *TVMu* (TV Muhammadiyah), 2013-2014
5. Pemimpin Redaksi Mingguan *Prioritas* (Media Group), 2011-2013
6. Dosen Mass Communications dan Investigative Reporting di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta, sejak 2010-sekarang
7. Produser Eksekutif Liputan 6, SCTV, Jakarta, 2006–2011
8. Wartawan Majalah Berita Mingguan *Tempo*, Jakarta 2000-2006

# RIWAYAT ORGANISASI:

1. Dewan Pakar Lembaga Seni Budaya (LSB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022-2027
2. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Indonesia (IKAJI), 2023
3. Pengurus KAGAMA DKI Jakarta, 2022-2027
4. Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat, 2021-2024
5. Pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia DKI Jakarta, 2019-2022

6. Pengurus Majelis Pustaka Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, 2015-2020
7. Anggota Tim Publikasi KAGAMA DKI Jakarta, 2011-2015
8. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, 2009-2015
9. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, 2009-2012
10. Ketua Divisi Dana Usaha dan Divisi Internasiona Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2004-2006
11. Ketua Dewan Karyawan TEMPO (DEKAT), 2004-2006
12. Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Jakarta, 2003
13. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, 2002-2004

## RIWAYAT PENGHARGAAN

1. Penghargaan Dedicated Expertise Lecturer 2022, LSPR Institute of Communication and Business, Juli 2022
2. Penghargaan Best Expertise Lecturer 2012, LSPR Institute of Communication and Business, Januari 2013
3. Anugerah Adiwarta untuk Tabloid Mingguan Prioritas, kategori Foto Jurnalistik Feature Terbaik, Desember 2012
4. Penghargaan "Jurnalis Jakarta Award" oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta untuk kategori "Liputan Internasional", Agustus 2003
5. Nominasi Penghargaan "Lorenzo Natali Prize: Excellence in Reporting Human Rights, Democracy and Development" oleh International Federation of Journalists (IFJ) dan Komisi Eropa, Brussels-Belgia, November 2002
6. Juara I Lomba Penulisan IPTEK yang diselenggarakan oleh Dupont Industries co (Indonesia) dan Kementerian Riset dan Teknologi RI, Agustus 2001

## RIWAYAT KARYA:

1. *Detik-detik Terakhir Saddam: Kesaksian Wartawan TEMPO dari Bagdad, Irak*", karya Rommy Fibri dan Ahmad Taufik, Penerbit Pusat Data dan Analisa TEMPO (PDAT), Juni 2008
2. *Panduan bagi Jurnalis dalam Meliput Peristiwa Traumatik*, Tim Penulis: Rommy Fibri, Ray Wijaya, dan Fetty Fajriati, Penerbit Yayasan Pulih, 2005

# RINGKASAN

## Rommy Fibri Hardiyanto

**ROMMY FIBRI HARDIYANTO**, Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (2020-2024) adalah lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan pascasarjana Ilmu Komunikasi di Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR. Putra pertama dari tiga bersaudara ini, pernah bekerja sebagai pewarta Majalah Berita *Tempo* (2000-2006), Produser Eksekutif Liputan 6 SCTV (2006-2011), Pemimpin Redaksi Tabloid Mingguan *Prioritas* (2011-2013), Direktur News dan Produksi TVMu/TV Muhammadiyah (2013-2014), Direktur Utama Harian *Jurnal Nasional* (2014-2015), dan dosen *Intro to Mass Media Communications* dan *Investigative Reporting* di LSPR Institute of Communication and Business sejak 2010 hingga sekarang.

Selain dikenal sebagai aktivis pers, "Mas Ketua" - sapaan akrabnya – kini menjadi Ketua Umum Ikatan Jurnalis Indonesia/IKAJI (2023), Dewan Pakar Lembaga Seni Budaya (LSB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2022-2027), Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat (2021-2024) dan Pengurus KAGAMA DKI Jakarta (2022-2027). Ia juga pernah menjadi Pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) DKI Jakarta (2019-2022), Pengurus Majelis Pustaka Informasi PP Muhammadiyah (2015-2020) dan Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Jakarta (2003).

Kerjasama tim LSF di bawah kepemimpinannya, membuahkan pelbagai terobosan. Beberapa diantaranya, yakni membenahi sistem pelayanan publik, sistem administrasi penyensoran yang sudah seratus persen daring, sejumlah program-program kreatif untuk kampanye nasional Budaya Sensor Mandiri, membuat WABA (WhatsApp Business Account/Akun WhatsApp Bisnis) dan layanan SMS Boradcast untuk akun LSF, menciptakan relasi dan sinergi positif dengan pemangku kepentingan perfilman termasuk juga membuka katup informasi LSF sebagai lembaga yang terbuka dan transparan.


DEPARTMENT
OF
DEFENSE

# Menjadi "Orang Film" di Lembaga Sensor Film

**Roseri Rosdy Putri**
Sekretaris Komisi II

Saya lahir di Jakarta pada 14 Februari, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara. Biasa dipanggil Erri, saya anak satu-satunya di keluarga yang bekerja di Pemerintahan, sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN), di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek). Ayah saya, Rosdy Agus, dulu berprofesi sebagai pewarta di *Harian Indonesia*, sebuah koran cetak di Ibukota yang menggunakan bahasa Mandarin, dan berkantor di Jalan Toko Tiga Seberang, Jakarta Kota. Banyak orang menduga beliau mahir berbahasa Mandarin, namun kemampuan berbahasa Mandarin itu justru kelak hanya dimiliki Esty, adik bungsu saya. Kini keduanya sudah lebih dulu menghadap Yang Maha Esa, disusul Ibu saya, yang meninggalkan kami pada 2006.

Ayah dan Ibu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Keduanya lahir di desa yang sama, sebuah desa kecil di atas Danau Singkarak bernama Sulit Air. Sebelum menikah dengan Ayah, Ibu adalah Guru Sekolah Rakyat di Kota Solok. Pertemuan Ibu dan Ayah dicomblangi oleh rekan Ibu saya sesama guru, yang tak lain adalah kakak dari Ayah saya. Mereka menikah di Sulit Air dan sempat menjalani hubungan jarak jauh (LDR istilah kekiniannya) selama beberapa lama sebelum semua bisa berkumpul di Jakarta.





Kedua orang tua, Bapak dan Ibu Rosdy Agus

Setelah kelahiran putri pertama, Ibu pindah ke Jakarta mengikuti Ayah yang sudah sejak remaja tinggal memang di Ibukota. Masa kecil saya dihabiskan bersama kakak dan adik serta kedua orang tua saya di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Selama membesarkan anak-anaknya, Ayah dan Ibu berbagi tugas. Tugas Ayah tentu saja mencari nafkah untuk menghidupi kami sekeluarga, dan tugas Ibu mendidik anak-anak dalam berperilaku, serta membimbing kami dalam menghadapi aneka pelajaran sekolah.

Bila kami berbuat salah, maka Ibu yang akan menghadiahi paha kami dengan sebuah cubitan kecil yang perih. Kami cuma meringis, tidak berani membantah karena memang salah. Mungkin kalau itu terjadi pada masa kini, maka si anak akan memviralkan, mengadu pada dunia tentang kejamnya orang tua mereka yang tega menyiksa anaknya. Itu tidak mungkin terjadi pada kami. Karena Ibu adalah pendidik hebat. Beliau tidak akan membiarkan anaknya meninggalkan ruang belajar dengan perasaan masih sakit. Sesi itu selalu diakhiri dengan obrolan Ibu dan anak yang membuat kami mengerti kenapa kami harus dihukum. Karena itu kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semua kenakalan anak-anak berhenti di Ibu, tidak pernah diadukan ke Ayah. Kalau sampai ke Ayah, artinya itu anak sudah terlalu nakal. Seingat saya, Ayah dan Ibu selalu berdua untuk urusan sekolah saya hingga SMA.

Bersama kakak kedua, sejak kecil saya sudah jatuh cinta pada kucing. Sayangnya kakak kedua meninggal pada usia dini, sehingga semua kucingnya kemudian menjadi milik saya. Suatu malam, saya mendengar obrolan Ayah ke Ibu, yang akan membuang semua kucing yang ada. Malam itu juga saya kenyangkan perut semua kucing, dengan memberinya ayam goreng masakan Ibu, sambil berpesan agar

mereka lari bila bertemu Ayah. Keesokan paginya, entah mengapa, saya mengalami demam tinggi. Menurut Ibu, mungkin itu karena aku mendengar obrolan Ayah ihwal kucing itu. Mendengar hal itu, Ayahpun membatalkan niat dan keinginannya untuk membuang kucing. Dan, seketika itu juga demam saya pun mereda. Ajib. Maka sejak saat itu, tidak ada yang bisa dan berani memisahkan saya dari kucing. Akhir yang membahagiakan adalah, semua anggota keluarga saya pun mencintai kucing sampai sekarang.

Namun, kebiasaan saya mengambil kucing di jalanan untuk dirawat di rumah, sudah lama saya stop. Karena saya pikir, mengambil kucing di jalanan itu malah akan mendidik orang untuk semakin mudah membuang makhluk imut itu. Kini, saya giat menularkan kepada semua orang agar bisa berempati pada kehidupan binatang, khususnya kucing dan anjing. Sebab, pada dasarnya binatang itu tidak

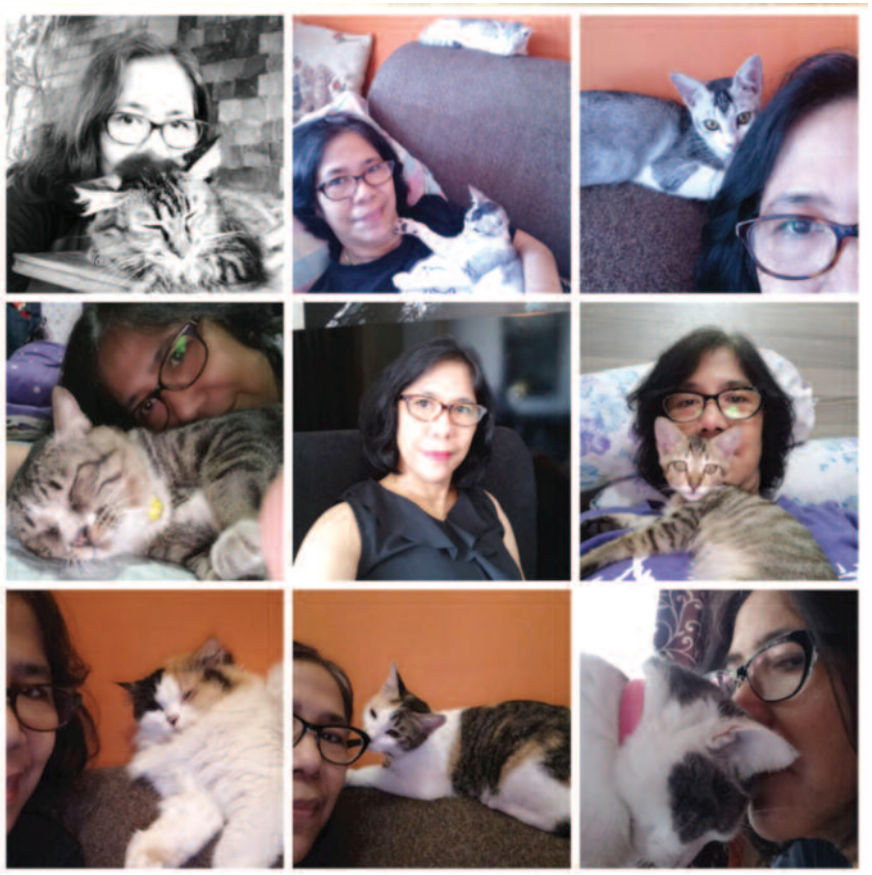

**Kucing-kucingku**

punya pikiran jahat. Hidup mereka hanya dihabiskan untuk mencari makan, demi menghindari kelaparan, dan untuk menyambung hidup.

Saya tidak habis pikir pada orang-orang yang mudah menyiksa binatang, dengan alasan apa pun, termasuk untuk alasan percandaan. Sebab, seandainya ada makanan yang diambil oleh anjing dan kucing, itu saya yakin jumlahnya tidak akan banyak. Hanya secukup isi perutnya. Jahat sekali manusia bila ada yang bisa menyiksa binatang karena hal remeh seperti itu. Di sisi lain, binatang pun berkembang biak sangat cepat, yang mengakibatkan mereka saling berebut makanan. Populasi anjing dan kucing, khususnya kucing, sekarang ini dianggap



**Pertemanan Asisi sejak awal SD hingga kini dan sampai nanti**

sudah melebihi dari yang seharusnya. Itulah kenapa saya sekarang giat mengajak orang untuk menyayangi binatang, khususnya kucing dan anjing. Karena kedua binatang itu sangat dekat dengan manusia. Saya mengajak teman-teman di sekitar saya serta di luar lingkungan saya, untuk melakukan steril terhadap semua kucing yang ditemui di sekitar mereka, atau pun yang singgah ke rumah. Semua itu semata untuk menekan jumlah populasinya agar tidak berlebih. Dengan demikian, diharapkan anjing dan kucing dapat hidup sehat sejahtera, berdampingan dengan manusia dan dengan jatah makanan yang cukup.

Saya mengawali pendidikan dasar di sekolah Katolik, yakni di SD Strada Asisi, Menteng Dalam, semata karena lokasinya dekat dengan rumah tinggal kami. Jaraknya tidak sampai lima menit berjalan kaki, dari rumah ke sekolah. Kalau ada buku pelajaran yang lupa terbawa, saya bisa lari pulang ke rumah. Lulus sekolah

dasar, saya nyambung ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Asisi Menteng Dalam, di lokasi yang sama. Sehingga, teman SD dan SMP saya praktis masih orang-orang yang sama. Sembilan setengah tahun selalu bersama, menyebabkan kedekatan yang lumayan akrab.

Untuk memberikan keseimbangan dengan pendidikan yang saya terima di sekolah Katolik, Ayah kemudian menyediakan guru mengaji di rumah. Itu sekaligus menjadi jawaban bagi keingintahuan Pastor sekolah saya, mengapa Ayah yang muslim mempercayakan pendidikan kami, anak-anaknya, ke Sekolah Katolik. Ayah tidak pernah khawatir dengan perbedaan itu, karena menurut Ayah, masing-masing orang punya tanggung jawab yang diemban di pundaknya. Laksanakan tanggung jawab itu dengan sebaiknya. Itulah yang sedang dilaksanakan oleh Pastor dan Ayah untuk pendidikan kami, anak-anak Ayah. Sikap itulah yang ditularkan Ayah kepada kami: hidup damai berdampingan dalam perbedaan dengan siapa pun.

Selepas SMP, saya lanjut ke SMA Negeri 8, Bukit Duri, Jakarta, dan kemudian kuliah di Universitas Indonesia jurusan Arkeologi. Jurusan yang saya cita-citakan sejak kecil. Pendidikan S1 saya selesaikan selayaknya teman-teman lain, sebelum kelak harus mencari pekerjaan. Dan, pekerjaan saya ternyata menuntut saya untuk melanjutkan kuliah S2 Arkeologi, dengan pengkhususan *Cultural Resource Management* (*CRM = Manajemen Sumberdaya Budaya*), dan kemudian menyandang gelar Magister Humaniora, sebagai Kasubdit Pemugaran pada Direktorat Peninggalan Purbakala, Kemendikbudristek.



**Mendampingi Dirjen Kebudayaan, Ibu Edy Sedyawati di Proyek Pemugaran Situs Royal Palace, Angkor, Kamboja.**

Tanpa menyiakan waktu,



**Maiden Tower, warisan dunia Azerbaijan**

selesai kuliah, saya langsung melamar dan kemudian diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang dikenal sebagai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Awal karir saya adalah sebagai CPNS di Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah), kantor Pemerintah di bidang pelestarian kepurbakalaan dengan wilayah kerja di seluruh provinsi Indonesia, tempat sebagian besar lulusan Arkeologi Indonesia bekerja. Tak aneh bila terkadang suasana kantor terasa seperti masa kuliah saja, selain tentu bertambah teman non Arkeologi. Bagi saya, menjadi Arkeolog dan Pegawai Negeri, merupakan cita-cita sejak kecil, setelah dulu menonton berita di televisi tentang penemuan fosil di Mesir, dan Indonesia berhasil memperbaiki Candi Borobudur pada 1979.

Sebagai pegawai Pusat, pekerjaan awal saya lebih banyak melakukan perancangan pemugaran bangunan purbakala, sekarang dikenal sebagai Cagar Budaya, di seluruh wilayah Indonesia. Karena itulah saya lebih sering bepergian keliling Indonesia, menyambangi objek purbakala untuk diidentifikasi sebagai cagar budaya. Juga melakukan analisis terhadap kondisi cagar budaya dan merekomendasikan tindakan pemugaran yang seperti apa, bila cagar budaya tersebut mengalami kerusakan. Pelbagai bentuk cagar budaya menjadi objek garapan pekerjaan, mulai dari peninggalan masa Prasejarah, masa Klasik (yang mendapat pengaruh agama Hindu dan Buddha), berlanjut ke peninggalan pengaruh Islam, serta masa Kolonial. Itu sebabnya saya harus selalu belajar lagi, mengingat semasa kuliah, pengkhususan yang saya pelajari adalah Kepurbakalaan

masa Prasejarah.

Untuk menambah khasanah keilmuan dan keahlian saya dalam menangani cagar budaya, pada awal 1995, saya ditugaskan belajar Spesialisasi Pemugaran Bangunan Kayu di Kyoto University, Jepang. Penugasan itu sepenuhnya dibiayai Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA Program. Pengalaman itu membuka pintu Jepang untuk saya, karena sesudah akhir tahun menyelesaikan *short course* tersebut, saya harus kembali ke Jepang beberapa kali lagi, untuk belajar hal-hal baru terkait pelestarian bangunan kepurbakalaan Jepang, yang *relate* dengan kondisi kepurbakalaan Indonesia. Saya belajar tentang Penanganan Kepurbakalaan Pasca Tsunami di Sendai, dan tentang Penanganan Kepurbakalaan Pasca Gempa di Tokyo. Ilmu-ilmu itu sangat bermanfaat sekali mengingat Indonesia mengalami banyak gempa yang berakibat pada rusaknya sejumlah cagar budaya.

Tugas terbesar terkait keahlian pemugaran kepurbakalaan adalah melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Proyek Pemugaran *Royal Palace Temple* di dalam Kawasan Angkor Thom, Kamboja. Saya ditemani seorang Tenaga Teknis dari Kantor Candi Borobudur, almarhum Pak Mulyanto. Kami adalah tim ketiga yang ditugaskan pada 1996. Penugasan itu merupakan bakti Indonesia kepada Dunia yang telah



**Kursus keahlian pemugaran bangunan kayu di Jepang**



**Anggota Lembaga Sensor Film RI pada masanya.**

membantu pemugaran Candi Borobudur, yang beritanya saya tonton pada 1979. Waktu itu, Indonesia melakukan kampanye ke banyak negara, di bawah bendera UNESCO. Dan sebagai balasan atas kesuksesan pemugaran tersebut, Indonesia bersedia membuka program pelatihan pemugaran cagar budaya untuk lima Arkeolog muda asal Kamboja.

Tiga tahap pelaksanaan pelatihan yang harus diikuti kelima arkeolog muda itu adalah, pelatihan pemugaran tingkat dasar selama enam bulan di Candi Borobudur; pelatihan pemugaran tingkat lanjutan tiga bulan di Candi Borobudur,

dan praktek pemugaran di salah satu cagar budaya Kamboja. Situs Royal Palace Temple yang dipilih sebagai lokasi pelatihan, dilaksanakan selama lima tahun. Dengan demikian, diharap Kamboja dapat melakukan pemugaran cagar budayanya, tanpa perlu meminta negara lain melakukannya untuk mereka. Program itu dikenal sebagai *transfering know-how on heritage restoration program*.

Saya bertugas di Kamboja pada 1996, beberapa bulan sekembali dari belajar di Jepang. Almarhumah Ibu Edy Sedyawati, Direktur Jenderal Kebudayaan pada saat itu, pernah menyampaikan dalam pidatonya bahwa Indonesia sudah dipandang sebagai negara dengan kemampuan lebih di Bidang Pemugaran Cagar Budaya, "Dan Roseri (beliau menyebut nama saya) menjadi satu-satunya perempuan yang memimpin pemugaran di antara para expat di Kawasan Angkor, Kamboja,". Terima kasih Bu Edy atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Bu Edy sudah pergi menghadap Ilahi, dan saya masih meneruskan perjuangan menjadi perempuan tangguh di tengah dominasi kaum pria. Kisah ini terus saya bawa, sebagai kebanggaan bagi diri saya pribadi, termasuk bagi kedua orang tua. *Thank you God for the blessing.*



**Di gudang penyimpanan koleksi fosil Museum Situs Sangiran**

Suatu keberuntungan yang mungkin tidak semua orang alami sepulang saya dari Kamboja adalah, berkesempatan menghadiri banyak Sidang UNESCO (Badan PBB bidang Pendidikan dan Kebudayaan) terkait Pengelolaan Warisan Dunia, termasuk Sidang Nominasi dan Penetapan Warisan Dunia. Sidang itu dilaksanakan dua kali setiap tahun, dan diselenggarakan di markas besar UNESCO di Paris, Perancis, serta di negara



**Lima Srikandi LSF RI 2020-2024**

lain yang memiliki Warisan Dunia. Dengan melihat kasus yang dihadapi setiap warisan dunia, tentu perlu juga dicari sistem manajemen yang sesuai kondisi dan situasi masing-masing warisan dunia. Indonesia saat itu tidak memiliki mekanisme penominasian Warisan Dunia. Saya pikir, saya berhasil membangun Sistem Penominasian Warisan Dunia, yang sampai sekarang masih diterapkan di Kemendikbudristek. Mencontoh Cina yang memiliki lebih dari 50 Warisan Dunia, atau Amerika Serikat, Perancis, atau negara maju lainnya, maka Indonesia masih kurang dengan pencapaian 10 warisan dunianya. Masyarakat umum menganggap itu sebagai sebuah pekerjaan mudah dan sederhana. Kenyataannya tidak demikian.

Untuk menjadi warisan dunia, perlu minimal empat tahun menyiapkan dokumen pengusulannya. Sepanjang empat tahun itu, diperlukan kesiapan pihak-pihak terkait dengan warisan budaya yang akan diusulkan. Termasuk koordinasi lintas negara, karena perlunya dukungan dari banyak negara sahabat dalam sidang penetapan nantinya. Sungguh sangat menantang dan menyenangkan melaksanakan Diplomasi Budaya, demi mencapai tujuan bangsa membawa Indonesia dalam peran perdamaian dunia melalui warisan dunianya. Pekerjaan Diplomasi Budaya itu pun akhirnya selesai saat saya menerima penugasan sebagai Anggota di Lembaga Sensor Film RI untuk periode 2020 - 2024.

Menonton film adalah salah satu hobi saya, selain berenang dan mengemudi mobil. Berenang bermanfaat untuk melatih dan menjaga otot kaki, sedang menyetir adalah mengikuti nasihat dokter keluarga, yang juga seorang *cat lover*,

yang mengatakan menyetir merupakan salah satu upaya untuk mencegah manusia mengalami kepikunan. Semoga saya tidak termasuk golongan orang-orang yang pelupa. Itulah kenapa sampai sekarang saya masih menyetir sendiri.

Kembali ke hobi menonton film. Kesenangan itu timbul karena sejak kecil rumah kami sudah dilengkapi sarana televisi. Masih hitam putih, televisi kami menjadi satu-satunya kemewahan yang dapat kami *share* dengan tetangga. Rumah kami menjadi ramai oleh tetangga sekitar, yang numpang nonton film, atau sebagian orang yang bersama Ayah mengikuti berita di televisi. Keakraban bertetangga sangat terasa cair bila yang ditonton adalah film koboi. Pada saat itu seorang tetangga nonton, senang sekali bertindak seolah-olah sebagai penerjemah yang membuat kami semua tertawa, karena kami tahu terjemahannya tidak sesuai



**Anggota Komisi II LSF RI**

dengan yang tampil di televisi. Namun itu membuat kami makin akrab dengan tetangga sekitar rumah.

Film layar lebar pertama yang saya tonton adalah film musikal berjudul *Mama* yang dibintangi sekaligus dinyanyikan Heintje, alias Hendrik Nikolaas Theodoor Simons, seorang aktor remaja Belanda kelahiran 12 Agustus 1955. Menontonnya bukan di bioskop, tapi di aula sekolah. Sekolah Asisi beberapa kali membuat kegiatan putar film dan nonton bareng di Aula Sekolah. Setiap kelas mendapat gilirannya. Kami menonton film dengan riang suka cita didampingi wali kelas masing-masing. Aula Sekolah selanjutnya lebih banyak dipakai untuk kegiatan belajar mengajar teater, menari dan musik. Saya memilih berlatih menari Jawa dan Bali, yang sekarang hanya tinggal kenangan.

## Roseri Rosdy Putri

Sebenarnya ada gedung bioskop yang lokasinya tidak jauh dari rumah. Bioskop Wira namanya, tempat Ayah dan Ibu menyelipkan waktu untuk pacaran lagi. Mereka selalu pergi berduaan, seminggu sekali, hanya untuk makan malam dan nonton bioskop. Larangan anak-anak masuk bioskop sudah ada pada masa itu. Dan, itu sangat dipatuhi oleh penjaga bioskop. Walau ada kemampuan untuk membeli tiket, kami tahu menonton sendiri pada usia sekecil itu tidak mungkin terjadi. Kalau ketahuan petugas bioskop, kami akan dikeluarkan. Saya pun tidak pernah berani ikut nonton. Bila ketahuan Ibu, maka hukumannya akan lebih berat daripada hanya dikeluarkan dari bioskop. Sebaliknya, saya hanya diminta bersabar oleh orang tua, karena nanti ada masanya saya bisa nonton film di bioskop dengan merdeka. Dan benar, meningkat remaja, film-film Indonesia tema remaja sudah mulai banyak dIbuat dan dipertunjukan di bioskop. Seiring dengan itu, jumlah bioskop pun bertambah.



**Orang Film dan Bukan Orang Film**
**Bagian dari Sistem Perfilman**

Saya lebih sering menonton film di Bioskop Viva yang terletak di sebelah Bioskop Wira, dan Ayah Ibu yang membelikan tiketnya. Mereja hanya membeli dan tidak ikut nonton film bersama kami. Belakangan kami tahu bahwa film yang kami tonton itu ternyata sudah mereka tonton lebih dulu. Pantas saja mereka berani melepaskan anak-anaknya menonton sendiri. Sudah ada Budaya Sensor Mandiri rupanya waktu itu. Budaya Sensor Mandiri ala Bapak dan Ibu Rosdy Agus.

Salah satu anggota keluarga dekat Ayah adalah penikmat film India. Dia selalu menontonnya di Bioskop Rivoli, di Jalan Kramat Raya. Bila saya sedang lIbur sekolah dan menginap di rumah mereka, sudah dipastikan saya akan diajak

nonton film India. Filmnya tiga jam, dan di tengah-tengah film ada waktu istirahat bagi penonton, untuk mencari makan dan minum, serta ke toilet. Saya pernah ikut menonton sekali saja dan sesudahnya tidak lagi. Bukan kapok, tapi karena ternyata film India bukan jenis film tontonan untuk usia saya pada waktu itu. Filmnya pun terlalu lama. Ayah tidak berkomentar untuk hal ini karena dinilainya saya sudah bisa memutuskan untuk menonton atau tinggal di rumah saja.



**Poster film musik 'Mama' oleh Heintje**

Kebiasaan menonton film pun diteruskan sendiri seiring dengan meningkatnya usia dan kemampuan untuk menabung, menyisihkan sebagian uang untuk kesenangan pribadi, termasuk menonton film di bioskop. Terus terang film nasional sangat sedikit saya tonton. Pilih-pilih judul dan sutradara, serta pemainnya. Film luar negeri lebih diminati. Mungkin karena jalan ceritanya yang sukar ditebak yang membuat penasaran *ending*-nya. Film nasional sangat mudah ditebak, kadang tidak masuk logika pula. Itu masa dulu ya, sewaktu masih muda. Setelah bergabung di Lembaga Sensor Film RI, di mana kita menjadi penonton pertama dan penentu klasifikasi usia penonton, penilaian terhadap film nasional jauh berbeda. Lebih bagus cerita dan garapannya. Akhir-akhir ini sudah mulai terdapat film nasional yang *ending*-nya ternyata tidak terduga. Bravo film nasional.

Lembaga Sensor Film bukan nama Lembaga yang asing untuk saya yang penikmat film. Saya ingat nama-nama Muchlis PaEni atau Ahmad Yani Basuki tampil di layar lebar, yang akhirnya saya tahu itu sebagai STLS (Surat Tanda Lulus Sensor). Artinya, film yang sedang beredar itu sudah lulus sensor dengan klasifikasi usia tertentu. Sedang untuk film-film keluaran tahun sebelumnya, tidak terlalu saya perhatikan bentuk pemberitahuan mengenai lulus sensornya. Klasifikasi usia penonton selalu saya ketahui karena tertulis pada lembaran poster setiap film yang akan ditonton.

Waktu itu, pimpinan kantor saya terpilih menjadi Anggota LSF. Beliau adalah Ibu Diah Harianti, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, yang membagi hari

kerjanya dengan melaksanakan tugas di Gedung Film di Jalan MT Haryono. Beberapa kali sempat juga Ibu Diah bercerita tentang dinamika sensor film, di mana terkadang ada perdebatan sengit untuk memutuskan sebagian *scene* film harus dipotong atau dipertahankan demi alur cerita. Hal yang sama juga saya alami. Menjelang akhir masa jabatan Ibu Diah, Mbak Ita (Dyah Chitraria Liestyati), mendapat tawaran dari Kementerian untuk meneruskan tugas Ibu Diah di LSF RI. Mbak Ita adalah senior saya di kampus dan di kantor. Tawaran itu diterimanya dan Mbak Ita pun berkiprah di LSF hingga 2020.



**Bertemu Gandalf dari film Lord of the Ring di Bandara New Zealand**

Pada September 2019, saya mendapat tawaran untuk mengisi jabatan yang sama di LSF masa bakti 2020 - 2024. Atas saran Ibu Diah Hariati dan Mas Ahmad Mahendra (Direktur PMM), tawaran itu saya terima. Beliau berdua mungkin berpikir saya orang yang cocok untuk mengisi jabatan di LSF RI tersebut. Selain karena pribadi yang tegas dan taat hukum, saya juga dapat menambah wawasan baru karena sudah terlalu lama berkutat hanya dengan urusan cagar budaya. Keberadaan saya dianggap dapat memberi warna lain. Dengan memegang keyakinan bahwa itu sebuah tawaran dan pilihan yang baik, maka pada Februari 2020 saya mengikuti *fit and proper test* di Komisi I DPR RI. Selanjutnya, pada 8 Mei 2020, saya pun dilantik sebagai Anggota LSF RI dari unsur perwakilan Pemerintah bidang Kebudayaan bersama dengan 16 orang lainnya. Ada pertimbangan gender dalam struktur Anggota LSF RI. Saya menjadi satu dari Lima Srikandi pengawal sensor film di Indonesia, yang bertugas berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI untuk masa bakti 2020 - 2024.

Karena saya memahami tugas itu sebagai Tugas Negara, maka pasti saya akan melaksanakan tugas itu sesuai amanat yang diberikan. Penugasan itu menuntut

totalitas dan loyalitas diri kepada Lembaga Sensor Film. Itu tentu terkait status saya sebagai ASN yang pada saat menjabat sebagai Anggota LSF, saya diberhentikan sementara, sampai masa penugasan berakhir, yaitu pada 2024. Selanjutnya, bila dianggap perlu, saya dapat ditugaskan kembali sebagai Anggota LSF untuk periode kedua.

Menjadi Anggota LSF menurut saya sungguh sebuah pekerjaan yang menyenangkan. Oleh Ketua LSF RI saya ditunjuk sebagai Sekretaris Komisi II bersama Ketua Komisi II, Pak Ahmad Yani Basuki. Komisi II adalah unsur LSF yang mempunyai kewenangan di bidang Pemantauan dan Advokasi Hukum. Setiap film yang akan dipertunjukkan ke masyarakat wajib memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Sebagai produk hukum, STLS melindungi film yang beredar. Sempat merasa aneh karena nama Ahmad Yani Basuki, yang selama ini saya baca di layar bioskop, ternyata menjadi rekan kerja untuk masa periode sekarang ini. Bersama beliau dan pribadi-pribadi baru lainnya, merupakan keberuntungan sekaligus menjadi satu hal yang menyenangkan bagi saya. Teman baru saya bertambah, dan tentunya saya ketularan ilmu baru pula dari masing-masing pribadi, yang membuat saya makin matang dalam menilai sebuah film yang layak dipertontonkan untuk masyarakat Indonesia.

Perlu waktu kurang lebih sebulan untuk memahami dinamika pekerjaan ini. Film yang akan disensor harus melalui tahapan penilaian, penelitian, dan tahapan akhir berupa rekomendasi klasifikasi usia penonton. Semua dilakukan di dalam studio oleh Kelompok Penyensor, yang terdiri dari Anggota dan Tenaga Sensor. Yang menarik bagi saya, semua film yang akan dinilai harus sudah terdaftar lebih dulu di Direktorat Perfilman, sebagai satu-satunya film yang dIbuat, dan tidak ada film dengan judul yang sama. Menurut saya mekanisme penilaian film tersebut sudah baik dan benar, dengan alur yang dapat memastikan tidak akan ada produksi film dengan judul yang sama. Film dengan judul serupa sih banyak. Ini tentunya tergantung kreativitas pembuat film atau penulis cerita yang difilmkan.

Hal menarik sering terjadi di studio. Selesai film diteliti dan dinilai, dengan pemahaman yang berbeda, penentuan klasifikasi usia penonton pun bisa jadi berbeda-beda pula. Misalnya, Anggota A menetapkan klasifikasi Semua Umur, sementara Anggota B, mengklasifikasikannya untuk penonton usia 13 tahun ke atas (13+). Biasanya, itu terjadi pada film yang memang sejak awal si pembuatnya menyerahkan klasifikasi usia penonton filmnya pada kebijakan LSF. Sangat dipahami bahwa film merupakan produk budaya hasil pemikiran sekelompok orang, untuk dapat dinikmati kelompok lainnya. Melalui film, ide dan gagasan pembuat film tersampaikan. Tidak pernah tersirat adanya upaya pengekangan kreativitas para seniman pembuat film dengan melarang atau memotong adegan film. Malah sebaliknya, saya memaknai penyensoran film adalah untuk membuat

pemilik dan pembuat film lebih bertanggung-jawab atas produk yang dihasilkannya. Setiap tahun LSF menerima lebih dari 38 rIbu judul materi film, iklan film, dan program televisi yang disensorkan. Semua dinilai kelayakannya untuk ditonton oleh penonton usia tertentu. Semakin saya terlibat dalam penentuan usia penonton, semakin saya meyakini bahwa sensor diperlukan. Sayangnya masih banyak pihak yang belum memahami, dan tidak mendaftarkan filmnya ke LSF, serta mendistrIbusikan filmnya melalui kanal bebas.



**Rumah Bilbao di Hobbiton Village, LOTR**

Banyak sekali pengalaman menarik dalam kerjasama dengan Anggota dan Tenaga Sensor. Keberadaan saya dikelompokkan ke golongan "Bukan Orang Film." Sementara saya berpikir, begitu saya menjabat sebagai Anggota LSF, maka secara otomatis saya menjadi "Orang Film." Itu saya pahami karena untuk duduk sebagai Anggota saya harus mempelajari dan memahami *do and don't* dalam urusan Film, wabil khusus urusan sensor film. Saya paham, kita tidak bisa sembarang menilai film karena menganggap adegan yang ditampilkan itu rentan ditiru. Bahkan menganggap adegan film tertentu dapat merusak akhlak manusia Indonesia seutuhnya. Sementara pihak pemilik film malah akan senang bila ada adegan dalam film yang bisa diambil sebagai gimik pergaulan di masyarakat. Mungkin itu sebabnya ada dua golongan itu. O iya, sudah sejak lama LSF tidak melakukan *pemotongan film*. Bila ditemui adegan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan, pihak pembuat film akan memperoleh catatan untuk dipertimbangkan, agar mereka melakukan perbaikan terhadap *scene* atau adegan dimaksud. Cara itu diharap tidak diartikan sebagai mengekang kreativitas, melainkan ajakan untuk lebih bertanggung jawab. Persoalan "Orang Film" dan "Bukan Orang Film" akhirnya tidak terlalu saya ambil pusing. Yang pasti saya adalah bagian dari Sistem Perfilman Indonesia sekarang.

Sebagai penikmat film, bekerja di Lembaga Sensor Film sangat menyenangkan karena pasti akan nonton film terus. Film terbaru dan belum pernah dilihat orang lain, saya menjadi pihak pertama yang menonton film tersebut. Demikianlah pemikiran saya, yang hampir sama dengan pikiran banyak orang. Selama setahun LSF menilai lebih dari 38 ribu judul materi film, iklan film dan program televisi yang disensorkan. Bila dihitung-hitung, maka setiap hari akan terdapat sekian judul film yang masuk untuk dinilai. Singkat kata, setiap hari pasti akan ada film baru. Namun demikian, tidak setiap hari studio saya kedatangan film baru. Sudah sangat sering studio saya kosong, tanpa ada film baru. Studio saya hanya menyensor film *rerun* dan program regular televisi. Bila sudah terdengar gelegar suara film di luar studio, Kelompok Sensor pun saling bertanya: "Di studio mana itu?" Oh ada film baru di studio sebelah. Maklum, studio kerja kami belum 100 persen kedap suara. Tetangga studio bisa mendengar dengan jelas bila ada penyensoran film untuk bioskop. Saya tidak mengerti kenapa bisa satu studio sering mendapat film baru, katakan berkali-kali, sedang studio lain (baca: saya) tidak.

Mendapat film baru sekali seminggu saja sudah bagus. Artinya, kedatangan saya ke kantor dapat total melaksanakan tugas dengan film baru yang harus diteliti, dinilai, dan direkomendasikan klasifikasi usia penontonnya. Ditelusur lebih jauh, selalu dikatakan bahwa distribusi film ke studio sudah otomatis, mengikuti alur sistem yang ada. Penerimaan film sudah melalui alur kerja sistematis, mulai dari

pendaftaran hingga ke studio penyensoran, yang seluruhnya dijalankan mesin atau melalui program otomatis. Banyaknya film horror yang masuk untuk disensor, rupanya berimbas pada sistem e-Sias (sistem administrasi elektronik) milik LSF. Hantukah yang mengganggu sistem itu? Entahlah. Saya tidak mau memusingkan hal tersebut. Lebih bermanfaat bila saya melongok ke studio yang sedang memutar film baru. Tidak untuk melakukan penyensoran, melainkan hanya numpang nonton. Numpang nonton ini hanya mengisi sedikit pencerahan akan hobi nonton saya. Seringnya sih saya akan ke bioskop untuk menonton film yang sudah disensor itu lagi. Studio LSF belum bisa menampilkan gelegar dramatisasi film seperti yang saya dapatkan di bioskop. *And everybody happy* …

Selama hampir empat tahun menjabat sebagai Anggota, banyak pengalaman dan ilmu yang saya peroleh. Ilmu Pertemanan, Ilmu Pergaulan, dan yang terbaru adalah Ilmu Perfilman, ilmu yang selama ini sangat kosong dalam diri saya. Tidak kosong-kosong amat, adalah sedikit yang saya punyai. Tetapi sekarang saya menjadi sangat kaya karena Lembaga Sensor Film. Sebelum ini, saya selalu berprinsip bahwa urusan film, entah untuk tujuan apa pun, yang paling benar adalah menyerahkan pada Orang Film. Namun, saya kini adalah bagian dari Sistem Perfilman Indonesia dan saya harus terlibat ikut merancang dan berharap baik untuk kemajuan Perfilman Indonesia.

Sejarah mencatat, film pertama yang dibuat di Indonesia pada 1927 adalah *Loetoeng Kasaroeng*. Film ini pembuatannya masih dilakukan oleh orang Belanda, mengambil lokasi di Indonesia, dan diperankan oleh para pribumi. Selanjutnya film mengalami kemajuan, sehingga akhirnya orang Indonesia pun bisa membuat filmnya sendiri. Pada 1950, film *Darah dan Doa,* karya Usmar Usmail, menjadi film pertama produksi anak bangsa. Proses itu terus berkembang hingga sekarang. Sudah banyak bermunculan sutradara, aktor dan aktris, rumah produksi, produser, penulis naskah, dan banyak lagi profesi yang tumbuh. Film pun berkembang dari yang sederhana ceritanya hingga yang kompleks yang tidak bisa tidak, harus ditonton berkali-kali untuk memahaminya. Atau untuk mendapatkan kehebohannya.

Film yang baik adalah film yang menginspirasi atau memberi efek kepada masyarakat, entah baik atau buruk. Untuk masa kini, efek itu juga dikaitkan dengan ekonomi bangsa. Seberapa besar sebuah film dapat menghidupi masyarakat? Pertanyaan itu selalu menjadi pertanyaan dalam diri pribadi dan belum ada jawaban memuaskan untuk saya. Saya iri dengan banyak film asing yang masuk ke Indonesia dan berdampak luas di negara asalnya.

Saat pertama menginjakkan kaki di Bandara Wellington, New Zealand (Selandia Baru), pada 2017, misalnya, saya merasa takjub melihat hiasan burung besar yang menggantung di langit-langit bandara. Ada tokoh Gandalf, tengah



**Gollum dari *Lord of the Ring* di Weta Cave, NZ**

duduk di atasnya. Nuansa film *Lord of the Ring* (*LOTR*) pun terasa di seluruh sudut bandara. Siapa yang tidak tahu film *LOTR* garapan sutradara Peter Jackson? Sebagian besar proses pengambilan gambar filmnya dilakukan di Selandia Baru. Seni instalasi tersebut dikerjakan oleh Weta Cave milik Richard Tailor. Weta Cave tidak bergerak dalam urusan pembuatan film, melainkan mengerjakan segala pernak-pernik, atribut dan kostum film untuk seluruh pemeran.

Berkunjung ke Weta Cave, kita tidak akan percaya bahwa dari situlah dihasilkan perlengkapan untuk banyak film dunia lainnya. Weta Cave juga dilengkapi museum untuk memamerkan koleksi atribut dan kostum film-film dunia produksi Weta Cave beserta toko *merchandise*nya. Untuk itu semua, Weta Cave membuka rIbuan lowongan pekerjaan, termasuk untuk luar negeri. Saya bertemu dengan beberapa orang Indonesia yang sebelumnya terdaftar sebagai mahasiswa Indonesia di New Zealand. Mereka menyelesaikan kuliahnya, dan kembali untuk

bekerja di Weta Cave. Untuk membuat segala pernak-pernik film, para pekerja tidak pula pernah bertemu dengan para pemeran filmnya. Untuk melihat filmnya mereka pun datang ke bioskop.

Terletak di utara New Zealand, tepatya di Matamata, dibangun Desa Hobbiton, sebuah lokasi shooting untuk film *LOTR*. Dalam ceritanya, Desa Hobbiton merupakan desa tempat tinggal para hobbit. Perlu waktu dua tahun untuk membangun Desa Hobbiton ini. Sebuah investasi yang sangat besar untuk adegan film yang durasinya tidak lebih dari 20 menit, sebagaimana yang tampak di awal film *Lord of the Ring*. Selesai film dibuat, lokasi setting filmpun dimanfaatkan sebagai objek destinasi wisata yang ramai dikunjungi turis mancanegara. Mengambil waktu kurang lebih tiga jam untuk sampai lokasi yang jauh dari kota besar, dan dilengkapi *tour guide* yang mumpuni, kunjungan ke Desa Hobbiton menjadi sangat berkesan.

Pemandu wisata Desa Hobbiton sangat memahami, kisah seperti apa yang harus disampaikan kepada pengunjungnya. Mereka menemani seluruh turis menelusuri jalan-jalan desa, duduk di taman desa, dan masuk ke dalam rumah para hobbit. Kami bahkan juga ikut merasakan suasana para hobbit bercengkerama di bar, menikmati minuman yang hanya ada di Desa Hobbiton. Semua telah dirancang dengan baik dan matang oleh tenaga professional. Hobbiton Village Movie Set telah membuka banyak lapangan pekerjaan formal dan informal, mulai dari ahli tata kota, arsitek, pemandu wisata, supir bis, tukang taman, tenaga pemasaran wisata, dan banyak lagi yang terbuka bagi masyarakat New Zealand, juga bagi warga mancanegara. Itulah yang mempertahankan keberlangsungan bekas lokasi film *LOTR* menjadi objek destinasi wisata hingga saat ini.

Dua kunjungan di atas membuat saya menerawang membayangkan seandainya itu bisa dilakukan di Indonesia. Sebuah film yang dapat menghidupi banyak sektor kehidupan di masyarakat. Indonesia perlu mulai merencanakannya, membuat Perfilman Indonesia yang berkontribusi banyak bagi kesejahteraan masyarakat.



## JATI DIRI:

**Nama Lengkap** :
Roseri Rosdy Putri, M.Hum

**Tempat & Tanggal Lahir** :
Jakarta 14 Februari

**Nama Orangtua** :
Rosdy Agus

**Medsos**: IG: @errirosdy
roseri.rosdy@yahoo.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

**2014** : S2 Universitas Indonesia - Arkeologi - CRM

**1995** : Short course, Kyoto University, Restoration of Wooden Architecture - nondegree

**1990** : S1 Universitas Indonesia - Arkeologi

**1984** : SMAN 8 Jakarta - IPA

**1981** : SMP Asisi Menteng Dalam

**1975** : SD Strada Asisi, Menteng Dalam

# RINGKASAN
## Roseri Rosdy Putri, M. Hum.

Lebih sering disapa dengan panggilan Erri Rosdy. Arkeolog bersertifikat Keahlian Bidang Pemugaran Cagar Budaya, ini seorang *catlover* dengan 10 kucing di rumahnya. Sejak lulus kuliah dari Universitas Indonesia, bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Gempa di Kobe pada 1995 menjadi penanda awalnya melaksanakan tugas belajar di Jepang, sekaligus menuntunnya memiliki keahlian pemugaran. Dilanjutkan dengan tugas memimpin Proyek Pemugaran Indonesia di Situs Royal Palace, Kawasan Angkor Thom, di Kamboja, pada 1996.

Kembali ke Indonesia, Erri melaksanakan tugas sebagai penilai kelayakan pemugaran dan perancang teknis pemugaran objek cagar budaya di seluruh Indonesia. Kerja-kerja tersebut memungkinkannya meraih gelar Magister Humaniora di bidang *Cultural Resource Management* dari Pascasarjana Universitas Indonesia (2004). Setelah mengurusi pemugaran cagar budaya di Indonesia, diberi kepercayaan untuk mengelola seluruh Warisan Dunia Budaya milik Indonesia, termasuk mengusulkan warisan budaya Indonesia yang berpotensi naik peringkat menuju kelas Warisan Dunia.

Ikut terlibat dalam penyusunan Kertas Posisi, dan hadir sebagai Delegasi Indonesia untuk Bidang Kebudayaan pada Sidang Tahunan UNESCO untuk Komite Warisan Dunia, di Kamboja (2013), Doha, Qatar (2014), Bonn, Jerman (2015), Istanbul (2016), dan Baku, Azerbaijan (2019), serta untuk Komite Intangible Cultural Heritage di Paris (2012 dan 2014), di Baku, Azerbaijan (2013), dan di Windhoek, Namibia (2015).

Penggagas sekaligus Ketua Penyelenggara Pendidikan Warisan Dunia untuk Remaja bertajuk *World Heritage Camp Indonesia* atau WHCI di Ditjen Kebudayaan (2016-2019), ini menjadi Pimpinan Redaksi Majalah *Indonesiana*, milik Ditjen Kebudayaan, yang terbit setiap empat bulan (2016-2018). Bersama Tim Warisan Dunia Indonesia, berhasil menaikkan status Kawasan Tambang Batubara Ombilin menjadi Warisan Dunia yang kesembilan milik Indonesia (2019). Sejak Mei 2020 menjadi "Orang Film" saat ditugaskan menjadi Anggota merangkap Sekretaris Komisi II Lembaga Sensor Film RI.





# Merancang Peraturan dan menjadi Anggota LSF

**Saptari Novia Stri**
Anggota/Ketua
Subkomisi Hukum Dan Advokasi LSF

Sabtu Pahing, 07 November 1968, saya lahir dari pasangan suami istri H. Soeroso Idris dan Hj. Hartuti. Saya anak perempuan ketiga dari enam bersaudara, dengan komposisi lima perempuan dan satu laki-laki. Saya diberi nama Saptari Novia Stri, dengan nama panggilan Titta.

Bapak dan Ibu saya sama-sama berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Walau dari desa berbeda, jarak rumah keduanya tidak terlampau jauh, lebih kurang 500 meter, dan hanya dipisahkan oleh jembatan. Bapak dari Desa Kecila, sedangkan ibu dari Desa Karangjati, Kecamatan Kemranjen, Banyumas, Jawa Tengah.

Bapak mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Universitas Indonesia (UI), kemudian pindah ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sampai pensiun pada 1997. Sebelum menikah dengan Bapak, Ibu sudah yatim karena ayahnya (*Mbahkung*) meninggal pada usia 35 tahun. Jadi, Ibu tinggal di rumah pamannya yang berprofesi sebagai guru. Dan, Ibu bekerja di salah satu bank di dekat Kota Tua, Jakarta. Namun, karena ingin fokus mengurus anak-anak, akhirnya Ibu berhenti sebagai pegawai bank.

Kami sempat tinggal di salah satu ruang kelas di Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) ketika UI masih di Rawamangun, Jakarta. Jika malam hari, lingkungan di luar rumah terasa sunyi. Hanya bunyi jangkrik atau kodok serta suara gonggongan anjing peliharaan yang terdengar. Kemudian pada 1972 kami pindah rumah ke Jl. Daksinapati Timur Laut, Rawamangun, Jakarta Timur, atau Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, sampai sekarang. Rumah orangtua saya berdekatan dengan Bank Duta, Sekolah PPSP IKIP Jakarta (sekarang Labschool Rawamangun), kampus IKIP Jakarta, dan kampus UI Rawamangun, sebelum UI pindah ke Depok.

Cukup banyak juga yang tinggal di rumah kami. Selain kami sekeluarga, tinggal pula paman dan bibi (adik-adiknya Ibu), keponakan Bapak, dan dua asisten rumah tangga. *Mbahkung* meninggal ketika Ibu dan adik-adiknya masih belia. Malah adik Ibu yang bungsu masih dalam kandungan. Akhirnya, tiga adik Ibu diboyong ke Jakarta dan tinggal di rumah kami untuk bisa melanjutkan sekolah.

Walau Bapak seorang PNS, alhamdulillah bisa menyekolahkan anak-anak dan adik iparnya. Ketika saya kecil, jika mau mandi atau melakukan aktivitas yang menggunakan air, kami harus memompa air dulu dengan tangan, karena belum ada pompa listrik (*jetpump*). Untuk membantu perekonomian keluarga, Ibu yang punya keahlian memasak, menerima pesanan *catering* untuk makan siang karyawan, dari hari Senin sampai Jum'at. Ibu juga melayani *catering* untuk pesta pernikahan, atau untuk berbuka puasa ramadhan, yang jumlahnya lumayan banyak. Kami pun ikut menikmati menu yang dimasak Ibu. Berkat usaha *catering*, itu Ibu bisa membeli mobil, yang dapat digunakan untuk jalan-jalan atau membawa pesanan makanan.

Sedari kecil, saya, kakak, dan adik dipanggilkan guru ke rumah untuk belajar mengaji. Bapak saya memang tidak pernah marah, kecuali jika anak-anaknya meninggalkan sholat lima waktu dan tidak pergi mengaji. Televisi pun hanya dinyalakan dari sore sampai dengan adzan maghrib. Selepas itu kami harus belajar, kecuali jika hari libur. Acara televisi yang ditonton umumnya film anak-anak dan siaran berita. Layaknya anak-anak, setiap bulan puasa ramadhan, setelah sholat subuh dan mengaji, saya bersama beberapa teman sebaya, jalan pagi atau olahraga ringan sampai matahari terbit. Selain mengaji di rumah, setiap Rabu dan Jum'at sore selepas sholat ashar, saya mengaji di musholla dekat rumah. Guru ngajinya adalah imam di musholla tersebut, yang lumayan tegas, terutama dalam hal bagaimana cara membaca huruf hijjahiyah dan penekanan tajwidnya. Berkat bimbingannya, alhamdulillah pada musabaqah tilawatil Qur'an tingkat RT, saya menjadi juara, sedangkan di tingkat Kelurahan, hanya sampai semifinal.

Bapak dan Ibu yang telah membesarkan anak-anaknya (saya, dua kakak perempuan, dua adik perempuan, dan satu adik laki-laki), mengajarkan kami untuk selalu



mensyukuri apa yang telah didapat, dan tetap menjaga tali silaturahmi. Setiap Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, Bapak selalu mengajak anak-anaknya pulang ke Banyumas, Jawa Tengah, untuk berlebaran dan bersilaturahmi dengan keluarga di kampung. Bapak sengaja membangun rumah di atas tanah miliknya di Desa Kecila, Banyumas, Jawa Tengah, yang digunakan sebagai rumah singgah, apabila kami atau saudara pulang kampung. Di depan rumah juga dibangun masjid, tempat ibadah bagi penduduk sekitar maupun bagi pendatang.

Hal yang sangat menyedihkan terjadi ketika saya dan kakak kembali ke Jakarta, setelah berlebaran di Banyumas. Saya mendapat telepon jika Bapak tiba-tiba lemas dan sempat pingsan, sebelum kemudian dibawa ke RSUD Margono Soekarjo, Purwokerto, Jawa Tengah. Ternyata Bapak terkena serangan *stroke*. Saya dan saudara kandung berusaha mencari kesembuhan untuk Bapak. Tidak hanya medis, tapi juga pengobatan alternatif dan terapi. Sangat disayangkan, Bapak tidak bertahan lama.

Ketika terjadi pandemi Covid 19 pada 2020, yang menyerang hampir seluruh dunia, dan menyebabkan lumpuhnya perekonomian, kedua orangtua saya dan dua kakak saya terpapar virus Covid 19. Mereka dirawat di RS Radjak (eks RS MH. Thamrin) Salemba, Jakarta Pusat, tempat adik laki-laki saya, Tommy berpraktek. Setelah lima hari dirawat, akhirnya Bapak mengembuskan napas terakhir. Bapak pergi meninggalkan Ibu, anak, mantu, dan cucu. Yang lebih menyedihkan, saya yang selama ini membantu Ibu untuk merawat Bapak, tidak dapat ikut memandikan dan mensholatkan. Saya hanya mengantarkan almarhum Bapak ke pemakaman di TPU Pondok Rangon. Itu pun dari jarak jauh, sesuai protokol kesehatan selama pandemi Covid 19.

Saya sekolah di Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Jakarta,



**Ibu bersama anak, mantu, dan cucu pada Hari Raya Idul Adha 1444 H.**

atau yang sekarang dikenal dengan nama Labschool Rawamangun, Jakarta. Kakak dan adik saya juga sekolah di tempat yang sama. Selain dekat rumah, Bapak menyekolahkan anak-anaknya di Labschool, karena sekolah tersebut merupakan sekolah swasta terbaik di Rawamangun. Di antara murid-murid Labschool Rawamangun, itu tercatat antara lain Hilmar Farid, yang kni menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek, Thareq Habibie putra mantan Presiden BJ Habibie, dan Danti Rukmana, cucu mantan Presiden RI Soeharto.

Awal pendidikan saya dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) IKIP Jakarta yaitu TK nol kecil (TK A) dan TK nol besar (TK B). Sekolah Dasar (SD) di PPSP IKIP Jakarta selama lima tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) PPSP IKIP Jakarta tiga tahun, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tiga tahun. Sekolah saya itu mulanya adalah sekolah teladan, yang didirikan pada 12 Februari 1968. Sekolah itu dimaksudkan sebagai sekolah laboratorium IKIP Jakarta, yang digunakan untuk praktik mengajar, penelitian pendidikan, dan inovasi pendidikan. Pada 1972, sekolah teladan itu berganti nama menjadi Sekolah Proyek TPK (Tempat Pembinaan Keterampilan), untuk menguji-cobakan ide-ide baru dalam bidang pendidikan. Pada 1974, sekolah itu telah memiliki nama dan fungsi yang baru sebagai sekolah pelaksana proyek PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan), tempat menguji coba ide-ide dalam pendidikan, guna memberi masukan bagi pembaruan sistem pendidikan nasional. Sistem belajarnya pun menggunakan modul.

Sekolah di PPSP ini berlangsung selama sebelas tahun dan berakhir pada 1986. Dengan berakhirnya proyek PPSP, berganti pula nama SD, SMP, dan SMA eks PPSP IKIP Jakarta, menjadi SD Negeri Komplek IKIP Jakarta, SMP Negeri 236 di Komplek PIK Cakung, dan SMA Negeri 81 Komplek Kodam Cipinang Melayu. Sedangkan TK-nya masih tetap berstatus swasta dengan nama TK IKIP Jakarta. Atas permintaan masyarakat dan seiring bergantinya nama IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), maka mulai 1999 sekolah TK, SLTP, SMU IKIP Jakarta berganti nama lagi menjadi TK, SMP, dan SMU Labschool Rawamangun.

Enaknya bersekolah di Labschool Rawamangun adalah karena sejak TK, SD, SMP, dan SMA, kami selalu satu kelas. Sehingga keakraban terasa sekali. Hubungan sesama orangtua juga dekat, terutama saat pembagian rapor. Rumah orangtua saya yang dekat sekolah, menjadi tempat nongkrong dan kongkow teman-teman saat jam istirahat atau pulang sekolah. Mereka pasti main ke rumah hanya untuk ngobrol santai atau makan siang alakadarnya yang disediakan Ibu. Ada satu kamar yang disiapkan untuk teman-teman yang mau digunting rambutnya oleh teman yang bisa menggunting karena ibunya punya salon. Hilmar Farid termasuk salah seorang yang pernah dipotong rambut di ruang itu. Begitu pula sebaliknya. Bila saya main ke rumah teman, tante (ibunya teman) selalu menyediakan makanan. Jadi hubungan saya dengan orangtua teman-teman juga sangat dekat.

Layaknya anak SD, setelah selesai pelajaran dan sebelum pulang ke rumah, saya dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Walau beberapa teman SD saya ada yang tidak melanjutkan ke SMP Labschool, namun komunikasi dan persahabatan kami tetap terjalin. Di tengah kesibukan masing-masing, saya masih bisa janjian untuk bertemu dengan mereka.



**Bertemu teman SD PPSP IKIP Jakarta (Labschool Rawamangun) di Senayan City**

Karena Labschool merupakan sekolah percontohan, belajarnya menggunakan modul. Hanya pelajaran ekstra kurikuler yang tidak menggunakan modul. Ekstra kurikuler yang saya ikuti antara lain menjahit, memasak, prakarya, dan bahasa Perancis. Pelajaran menjahit saya tidak suka, karena saya harus membuat pola baju, tapi berkali-kali mencoba dan membuat pola baju mengikuti petunjuk, tetap saja salah. Akhirnya saya pindah ekstra kurikuler yaitu memasak. Dimulai dari membuat masakan sampai membuat kue. Mungkin karena ada keturunan bakat dari Ibu yang pintar masak, saya pun dapat memasak. Khususnya membuat kue. Setiap menjelang lebaran, saya selalu membuat dan menerima pesanan kue lebaran. Alhamdulillah bisa menghasilkan *cuan*.

Mata pelajaran Bahasa Perancis pun saya pelajari hanya satu semester. Saya juga kursus Bahasa Perancis di Centre Culturel Francais (CCF) di Jalan Salemba Raya, Jakarta. Ada pengalaman yang menjengkelkan ketika pulang kursus dan sedang menunggu bus kota bersama teman kursus. Tiba-tiba bokong saya dipukul orang gila, sehingga saya kaget dan berteriak. Saya menduga orang gila tersebut berasal dari rumah yang bersebelahan dengan Gedung CCF, karena menurut informasi, hampir semua penghuni rumah tersebut mengalami gangguan jiwa.

Seiring berkembangnya permintaan dan sebagai upaya perluasan layanan pendidikan kepada masyarakat, kemudian dibukalah Labschool Kebayoran (2001), Labschool Cinere (2011), dan Labschool Cireundeu (2019).

Selepas masa pandemi Covid 19, alumni Labschool angkatan 1986 mengadakan acara Tebar (Ketemu Bareng) pada 18 Juni 2023, di Sehela Kopi, Pondok Labu,




**Reuni akbar 50 tahun Labschool Rawamangun**



**Reuni dengan teman-teman sekolah dulu**

Jakarta Selatan. Judulnya halal bi halal, tapi itu hanya alasan, sebab intinya adalah kumpul bareng. Senang dan bahagia bisa ketemu bareng, saling canda dan tertawa, hingga lupa pada usia.

Lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), saya memilih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Djakarta, jurusan Hukum Keperdataan. Sejak kecil saya memang bercita-cita ingin dapat menolong siapa pun yang tersandung masalah. Perkuliahan dilaksanakan pagi dan sore, kadang sampai malam. Saya pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan sewaktu pulang kuliah selepas maghrib. Berawal dari kejadian tersebut, akhirnya Bapak meminta saya untuk mengikuti pelatihan beladiri silat Merpati Putih, guna berjaga-jaga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayangnya, saya hanya sampai sabuk merah, karena lengan kanan saya bengkak mengalami abses, sehingga saya memutuskan untuk berhenti latihan silat.

Lulus kuliah, saya mencoba melamar di kantor pengacara di daerah Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat. Beberapa hari setelah diwawancara dan menunggu surat pemanggilan apakah saya diterima atau tidak di kantor pengacara tersebut, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membuka pendaftaran Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS). Saya berkonsultasi dan minta saran ke Bapak. Atas saran Bapak, saya pun melamar sebagai CPNS Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu saya melengkapi berkas persyaratan, dan mengikuti tes tertulis serta wawancara.

Alhamdulillah, pada 1994, setelah menerima Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, saya ditempatkan di Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Tatalaksana, Sekretariat Ditjen Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan gaji 80 persen dari gaji pokok. Seorang Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, wajib mengikuti prajabatan selama tiga bulan di Gedung C Lantai 3, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah lulus prajabatan dan menerima Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, saya kemudian mengucapkan sumpah jabatan.

Pada 1996, saya ditugaskan mengikuti pelatihan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja selama tiga bulan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Depdikbud. Pesertanya adalah para pejabat Eselon III dan Eselon IV di politeknik 27 provinsi. Hasil dari pelatihan itu, pada 1997, saya bergabung dalam tim analisis jabatan Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tugasnya adalah melakukan kegiatan analisis dan penelaahan tugas harian dari suatu jabatan, untuk menyusun rekomendasi kebijakan di bidang kebudayaan.

Pada 1998. saya ditugaskan lagi untuk mengikuti Penyuntingan Bahasa Indonesia yang diselenggarakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusbinbangsa), sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan kursus komputer di Lembaga Pendidikan Komputer Lembaga Indonesia Amerika (LIA).

Pada 2000 saya mendapat surat panggilan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum (Diklat ADUM) yang sekarang dinamakan Diklat Pimpinan IV. Kemudian, pada 2001, era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wachid (Gus Dur), Direktorat Jenderal Kebudayaan bergabung dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Saya dilantik sebagai Kasubbag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kebudayaan (Eselon IV) pada Biro Hukum dan Humas Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pada 2004, terjadi perubahan organisasi. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dihilangkan. Saya pun dilantik sebagai Kepala Subbidang Teknologi Tradisional pada Asdep Urusan Tradisi, Deputi Pengembangan Kebudayaan Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, di bawah pimpinan Ibu Meutia Hatta. Suatu hari saya dipanggil oleh Ibu Fadjria Novari Manan

atau yang akrab dipanggil Bu Riri, untuk mendaftar dan mengikuti tes *short course* "*Human Rights Training in Australia."* Saya lulus test, dan pada 2004 itulah awal saya melawat ke luar negeri. Ke Australia untuk menambah ilmu dan pengalaman, yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bekerjasama dengan Pemerintah Australia, selama tiga bulan.

Sebelum berangkat ke Australia, saya dan teman-teman perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Universitas Negeri Jakarta, Yayasan Joesoef Kalla, dan Habibie Centre, yang semuanya berjumlah 19 orang, mengikuti pelatihan terlebih dulu selama tiga bulan di Jakarta dan tiga bulan di Australia, yaitu di Melbourne, Sydney, dan Canberra. Saya dan teman-teman merasakan nikmatnya puasa ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di negara orang. Selain puasa



**Bersama pengajar *short course "Human Rights Training in Australia."* dari Melbourne University**

dan lebaran di Australia, saya juga merasakan pertama kali naik ambulans.

Baru tiga hari di Melbourne, saya dan teman-teman diundang *wellcome dinner* oleh pemerintah Australia hingga larut malam. Sepulang dari *wellcome dinner,* dan ketika kami sedang tertawa riang, tiba-tiba mobil yang kami naiki ditabrak trem, sehingga kami yang ada di dalam mobil kaget dan mobil sempat terjungkal. Ternyata saya yang paling parah menderita. Akibat benturan besi di depan saya, satu gigi depan saya masuk ke dalam gusi. Kacamata, jam tangan dan pernak pernik di badan saya pun terlepas. Seketika itu juga datang ambulans untuk menolong saya dan teman-teman yang terluka. Leher saya dipakaikan alat agar tidak bergerak-gerak. Lalu saya dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Sesampai di unit gawat darurat, saya langsung diperiksa dan dirontgent untuk

mengetahui tingkat keparahannya, karena pipi saya sampai bengkak. Setelah pemeriksaan selesai dan diberi pengobatan, akhirnya sekitar pukul 03.00 dinihari waktu Australia, saya diperbolehkan pulang ke apartemen, tempat kami tinggal selama di Australia.

Selanjutnya saya berobat jalan ke dokter spesialis gigi untuk memperbaiki gigi saya yang rusak. Pagi saya ke kampus untuk belajar, siangnya izin ke dokter gigi. Begitu seterusnya kurang lebih selama hampir satu bulan perawatan. Dan, saya tidak memberitahu orang rumah di Jakarta, bahwa saya mengalami kecelakaan. Takut mereka khawatir. Alhamdulillah sampai sekarang gigi saya masih utuh, walau agak sulit jika harus menggigit di bagian depan.




**Bersama Keluarga besar Direktorat Sejarah pada acara Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Sejarah.**

Saya dan teman-teman juga bersyukur karena masih diberi keselamatan, dan dapat melaksanakan ibadah puasa ramadhan, walau tidak pernah mendengar adzan maghrib. Buka puasanya pun pukul 21.00 malam waktu setempat, dan kami makan sahur pada pukul 03.00 dinihari. Sejak kejadian tersebut, jika kami akan jalan-jalan pada hari Sabtu dan Minggu, disediakan bis besar agar tidak mengalaami kecelakaan. Pada hari raya Idul Fitri, saya dan teman-teman sholat bersama-sama warga Indonesia yang tinggal di Melbourne, makan ketupat dan kue lebaran yang disediakan.

Selesai acara, saya dan teman-teman berangkat ke Sydney selama dua pekan.

Lalu lanjut ke Canberra selama satu pekan untuk belajar tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan penerapannya. Kami juga berkunjung ke rumah tahanan (penjara) di Sydney dan Canberra. Selesai dari Sydney dan Canberra, saya dan rombongan kembali lagi ke Melbourne melanjutkan sisa *short course* sampai tanggal 20 Desember 2004.

Pada 2006, terjadi lagi perubahan organisasi kementerian. Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, di mana kebudayaan dibagi menjadi dua Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, dan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Saya dilantik menjadi Kepala Subbagian Hukum dan Tatalaksana pada Bagian Hukum dan Perencanaan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala. Bersama-sama Komisi X DPR RI, arkeolog, sejarawan, dan kementerian terkait, saya ikut menyiapkan bahan pembahasan revisi Undang-Undang tentang Benda Cagar Budaya menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Cagar Budaya. Akhirnya pada 2010 Rancangan Undang-Undang tentang Cagar Budaya disahkan oleh Presiden RI yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pada 2012, Kebudayaan kembali lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya dipercaya dan dilantik menjadi Kepala Subbagian Hukum dan Tatalaksana pada Bagian Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Masih sekitar peraturan perundang-undangan, saya mewakili Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian diminta hadir untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film, dan beberapa rancangan peraturan menteri terkait film. Sehingga, anggota Lembaga Sensor Film dapat berpraktik langsung dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Tidak lama menjadi Kepala Subbagian Hukum dan Tatalaksana, saya dilantik menjadi Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sebagai Kepala Bagian Hukum dan Tatalaksana, saya tidak hanya menangani masalah hukum dan tatalaksana, tetapi juga masalah kepegawaian, seperti masalah penerimaan calon pegawai negeri sipil, kenaikan pangkat pegawai, mutasi pegawai, pembinaan pegawai, sampai penanganan pegawai yang bermasalah dengan suami/isteri. Selain melaksanakan tugas pokok, saya pernah mengikuti seminar internasional bidang kebudayaan di Manila pada 2014.

Pada 2015, saya dimutasi dan dilantik menjadi Kepala Subdit Pembinaan Tenaga Ksejarahan pada Direktorat Sejarah, dan Kasubdit Penulisan Sejarah. Beberapa program kegiatan yang pernah dilakukan antara lain menyusun Rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Penulisan Sejarah, Workshop Guru Sejarah se Indonesia, Bimbingan Teknis Penulisan Sejarah, bekerjasama dengan Kwartir Nasional

Pramuka dalam gerakan Saka Widya Budaya Bakti (SWBB) dan Kemah Budaya Nasional, Lomba Kreasi Audiovisual Siswa dan Film Dokumenter untuk Pembelajaran Sejarah, dan bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk pembentukan asesor penulis sejarah. Pada 2018, bersama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, saya mengikuti 6th ASEAN Scout Jambore di Davao, Filipina, mengadakan pameran dan memperkenalkan Saka Widya Budaya Bakti.

Pada 2020 terjadi perubahan struktur organisasi. Saya dimutasi dan dilantik sebagai Kepala Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi, Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Baru beberapa bulan di subdirektorat itu, saya dilantik sebagai Pamong Budaya Ahli Madya pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Kendati pada 2020 baru dilantik sebagai Pamong Budaya Ahli Madya pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud, tiba-tiba saya ditelepon oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk mendaftar sebagai anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI), mewakili unsur Pemerintah.

Saya meminta izin kepada kedua orangtua untuk mendaftar sebagai anggota LSF RI. Bapak saya sempat keberatan tapi akhirnya beliau mengizinkan dan memberikan restu. Karena sudah mendapat izin dan restu orangtua, saya pun melengkapi persyaratan yang diperlukan dan mengikuti *fit and proper test* di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tepatnya di Komisi 1 DPR RI. Dari tujuh orang perwakilan Kemendikbudristek yang diminta mendaftar dan mengikuti *fit and proper test* di DPR, ada tiga orang yang diterima sebagai Anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, dari 17 anggota Lembaga Sensor Film (LSF), terdapat 5 (lima) orang unsur pemerintah. Dari kelima unsur pemerintah itu, tiga di antaranya adalah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan, saya adalah salah satu dari tiga orang wakil Kemendikbudristek.

Pada Jumat 8 Mei 2020, saya menerima Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 tertanggal 13 April 2020 tentang, Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film. Bersama 17 (tujuh belas) anggota LSF lainnya yang terdiri dari 12 (dua belas) orang unsur masyarakat dan 5 (lima) orang unsur pemerintah, di Gedung Film Jl. MT. Haryono, Jakarta Selatan, kami dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim atas nama Presiden Republik Indonesia secara daring. Karena pada saat itu pandemi Covid 19, jadi harus menjaga jarak.

Selesai pelantikan, saya bersama 17 (tujuh belas) anggota mengadakan

pertemuan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia periode 2020-2024. Dari hasil sidang itu terpilihlah Rommy Fibri Hardiyanto sebagai Ketua dan Ervan Ismail sebagai Wakil Ketua. Saya mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan tugas secara daring di ruang kerja. Nara sumber pembekalan adalah Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kepala Biro Hukum dan Tatalaksana Kemendikbud, Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud, Komisi Penyiaran Indonesia, dan dari Badan Perfilman Indonesia (BPI).



**Bersama tenaga sensor LSF di ruang studio sensor.**

Setelah mendapatkan pembekalan, walau masih suasana pandemi, dibantu Tenaga Sensor (TS) kamu mulai bekerja melaksanakan tugas penyensoran dan penilaian film dan iklan film yang akan diedarkan/dipertunjukkan kepada khalayak umum, serta menetapkan penggolongan usia. Apabila sudah tidak ada revisi (Nihil), selanjutnya diterbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) oleh Ketua LSF RI. Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum memang wajib mendapatkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Apabila ada konten film/iklan film yang dinilai tidak sesuai peraturan perundang-undangan, akan diberikan catatan untuk direvisi. Pemilik filmlah yang kemudian merevisi dan mengembalikan lagi ke LSF untuk disensor ulang. Jadi bukan LSF yang merevisi atau memblur film seperti anggapan orang selama ini. LSF sekarang tugasnya tidak memotong/menggunting film, tapi memberikan catatan jika ada adegan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada 20 Mei 2020, Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Rommy Fibri Hardiyanto mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 001/K/LSF/V/2020 tentang Pengangkatan Ketua

Komisi, Sekretaris, Ketua Subkomisi, dan Anggota Komisi LSF. Keputusan itu dimaksudkan agar program dan kegiatan di LSF berjalan dengan baik dan lancar. Dalam surat keputusan tersebut, kepengurusan LSF dibagi dalam 3 (tiga) Komisi, yaitu Komisi I Bidang Penyensoran, Dialog, Komunikasi, dan Data, Komisi II Bidang Pemantauan, Hukum dan Advokasi, Komisi III Bidang Sosialisasi, Kemitraan, Penelitiam, dan Pengkajian.

Sesuai Surat Keputusan Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 001/K/LSF/V/2020 saya ditempatkan sebagai Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi pada Komisi II Bidang Pemantauan, Hukum dan Advokasi. Ketua



**Komisi II: Dr. Ahmad Yani Basuki (Ketua), Saptari Novia Stri (Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi), Sekretaris Roseri Rosdy Putri, dan Dr. Fetrimen (Ketua Subkomisi Pemantauan).**

Komisi II yaitu Dr. Ahmad Yani Basuki, Sekretaris Roseri Rosdy Putri, dan Ketua Subkomisi Pemantauan Dr. Fetrimen.

Tugas saya sebagai Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi adalah melaksanakan penelaahan dan penyusunan regulasi berdasarkan kebutuhan, dan merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat, menyelenggarakan Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman di beberapa daerah. Antara lain, di Nusa Tenggara Barat, Bali, Aceh, Sumetera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Tujuan literasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelajar SMK atau mahasiswa perguruan tinggi jurusan perfilman atau ilmu komunikasi atau *broad-*

*casting*, tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, larangan, dan batasan dalam berkreasi dan berkarya sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Juga, mengedukasi pelajar atau mahasiswa sebagai *film maker* bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib disensor untuk memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). Walau para pelajar dan mahasiswa sedang libur semester, mereka hadir dan sangat antusias serta berterima kasih kepada Lembaga Sensor Film yang telah menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi tersebut.

Saya juga menjadi tim penyusun revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran,



**Mengawali kegiatan Literasi dan Edukasi hukum pada masa pandemi Covid 19 di Nusa Tenggara Barat tanggal 8 Juni 2021 di SMK Negeri 2 Kuripan, Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama Anggota LSF Arturo Gunapriatna dan Fetrimen serta dua orang dari Sekretariat LSF.**

Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran, Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tarif Sensor Film, dan peraturan lain terkait perfilman.

Kegiatan Komisi II berikutnya adalah Visitasi *Stakeholder* yang dilaksanakan Ketua Subkomisi Pemantauan. Bersama dengan Kelompok Kerja Pemantauan Hasil Pemantauan Sekretariat LSF, saya melawat ke Jambi, Makassar, dan Yogyakarta, untuk visitasi *stakeholder* yaitu melakukan pemantauan ke beberapa tempat. Visitasi *Stakeholder* ini dalam rangka menegakkan peraturan bidang penyensoran, melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pemantauan hasil penyensoran, dan beraudiensi secara langsung dengan *stakeholder* (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, TV lokal, dan pengelola Bioskop XXI), mengenai produk hukum




**Literasi dan Edukasi Hukum di Kendari, Sulawesi Tenggara**

di bidang perfilman.

Kesempatan visitasi ini dimanfaatkan untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam pelaksanaan fungsi pemantauan dan pengawasan. Visitasi pemantauan ke bioskop dilakukan untuk memberikan penegasan kembali tentang pentingnya penayangan sesuai STLS dan diskusi tentang permasalahan terkait ketaatan penonton sesuai klasifikasi usia dan solusi pemecahannya. Visitasi ke lembaga penyiaran (TV) lokal dimaksudkan untuk membuka dialog sekaligus sosialisasi tentang kesadaran pentingnya menyensorkan film dan iklan film yang akan ditayangkan.

Banyak pengalaman menarik selama bekerja di Lembaga Sensor Film. Saya yang telah bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun, hanya berkutat pada masalah peraturan perundang-undangan dan kebudayaan. Setelah masuk sebagai anggota Lembaga Sensor Film tugas saya setiap hari menonton film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukan kepada khalayak umum, dan melaksanakan tugas lain yang telah diprogramkan.. Tidak hanya sekedar menonton, tapi bersama anggota LSF lain, dan dibantu tenaga sensor melakukan penelitian dan penilaian terhadap judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selesai menonton tayangan tersebut, kami berdiskusi untuk menentukan penggolongan usia.

Film dan iklan film yang telah selesai disensor menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film digolongkan ke dalam 4 (empat) penggolongan usia penonton, yaitu Semua Umur (SU), 13 (tiga belas) tahun atau lebih, 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, dan 21 (dua puluh satu) tahun

atau lebih. Selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah, saya dalam bekerja juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran. Setelah disepakati penggolongan usia dan tidak ada catatan (nihil), Tenaga Sensor memasukkan (meng-*input*) ke dalam aplikasi *e*-SiAS (Sistem Administrasi Sensor Berbasis Elektronik), selanjutnya Ketua LSF menerbitkan Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) untuk diberikan kepada pemangku kepentingan (pemilik film).



**Pertemuan dengan pengurus Jambi TV**


**Visitasi Pemantuan ke Bioskop XXI di Jambi**

Apabila pemangku kepentingan (pemilik film) keberatan atau tidak puas dengan penggolongan usia yang telah diputuskan oleh LSF, pemilik film dapat mengajukan surat permohonan dialog untuk penurunan penggolongan usia. Namun pihak LSF tidak serta merta mengabulkan permohonan tersebut. Komisi I melalui Ketua Subkomisi Penyensoran Tri Widyastuti Setyaningsih akan menindaklanjuti surat permohonan dimaksud dengan mengadakan peninjauan ulang (re-sensor) terhadap film/iklan film bersama tim penyensor dan perwakilan dari masing-masing komisi.

Setelah film/iklan film selesai ditonton, kami berdiskusi apakah film/iklan film tersebut dapat diturunkan penggolongan usianya. Jika tidak dapat diturunkan dan pihak pemilik film/iklan film masih keberatan, maka dilakukan dialog oleh Ketua Subkomisi Dialog Noorca M. Massardi. Dialog adalah sarana komunikasi dari LSF kepada pihak pemangku kepentingan (pemilik film) untuk saling berdiskusi. Hal ini juga merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. LSF akan mengundang dialog biasanya karena ada film dengan adegan, gambar, dialog atau monolog, suara, teks terjemahan yang tidak sesuai dengan penggolongan usia yang diharapkan. Pokoknya dialog diperlukan agar

sikap demokratis tetap dipegang.

Saya dan anggota LSF juga melakukan kunjungan ke stasiun televisi (seperti MNC, NET TV, Indosiar, SCTV, iNews, Trans TV), dan rumah produksi. Kegiatan lain yang pernah saya ikuti adalah sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) baik melalui daring (webinar), maupun luring ke beberapa daerah. Ketika pada 2020 wabah pandemi Covid-19 menyerang seluruh dunia, di mana orang tidak boleh bertemu dan bersentuhan, program kegiatan LSF tetap berjalan baik. LSF melalui Komisi III Bidang Sosialisasi, Kemitraan, Penelitian, dan Pengkajian



**Bersama Noorca M. Massardi, Roseri Rosdy Putri, Rita Sri Hastuti, dan Andi Muslim.**

memaksimalkan waktu dengan serangkaian program yang berkaitan dengan sosialisasi atau literasi melalui daring (webinar).

Salah satu yang telah dicanangkan LSF adalah Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, kepedulian, dan kesadaran masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan film secara mandiri sesuai dengan klasifikasi usianya, sehingga masyarakat terlindungi dari dampak negatif film. Masyarakat diajak untuk secara bijak memilah dan memilih tontonan sesuai penggolongan usia, baik untuk film, iklan film, atau program televisi. Terutama yang tidak disensor, seperti yang dipertunjukkan di jaringan teknologi informatika. Dalam melaksanakan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), LSF berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. Sosialisasi Budaya

Sensor Mandiri (BSM) yang pernah saya sambangi adalah di Bandung, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Solo.

Selain Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), LSF juga menginisiasi program Desa Sensor Mandiri. Program pembentukan dan penguatan perilaku masyarakat sagar ecara sadar memilah dan memilih tontonan dengan melakukan kegiatan terkait secara berkesinambungan di wilayah desa/kelurahan terpilih, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mampu melakukan *self-cencorship* (sensor mandiri). Salah satu tujuan program Desa Sensor Mandiri adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sensor mandiri untuk melindungi keluarga dari tontonan dan tayangan yang tidak sehat/negatif.

Pilot *project* desa sensor mandiri antara lain di Desa Tigaherang, Ciamis, Jawa Barat, Desa Mangunharjo, Madiun, Desa Candirejo, Klaten. Diinisiasi juga di Desa Gelanggang, Malang, Jawa Timur, dan Desa Klungkung, Gianyar, Bali.

Saya ditugaskan ke Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah bersama Bapak Ahmad Yani Basuki dan Joseph Samuel Krishna, untuk melaksanakan *Training of Trainer (ToT)* Sahabat Sensor Mandiri. Nara sumber dari Solo yaitu Farah Dedi Setiawan, Kepala Desa Candirejo, dan Andika Renda Pribadi, *Trainer*. *Training of Trainer (ToT)* Sahabat Sensor Mandiri ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan sahabat sensor tentang pentingnya sensor mandiri. Peserta *Training of Trainer (ToT)* Sahabat Sensor Mandiri di Desa Candirejo ini adalah masyarakat desa setempat (pemuda/pemudi), pendidik, tokoh agama, seniman, dan organisasi perempuan/PKK.

Aktivitas lain yang saya lakukan di Lembaga Sensor Film adalah menjadi mo-



**Sambutan Bapak Ahmad Yani Basuki pada *Training of Trainer (ToT)* Sahabat Sensor Mandiri**



**Peserta *Training of Trainer (ToT)* Sahabat Sensor Mandiri.**

derator pada webinar nasional Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri Sesi ke-5 Tahun 2022 dengan tema *"Literasi Tontonan di Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka"*, mengisi podcast *Action Nihil* dengan tema *"Tugas Di Lembaga Sensor Film Asyik"*, dan mejadi tim juri *Anugerah Lembaga Sensor Film* untuk kategori film bioskop semua umur, 13+, 17+, dan 21+. Pelaksanaan pemberian *Anugerah LSF* itu ditayangkan secara langsung (*live*) oleh Televisi Indosiar.

Dalam rangka Implementasi Teknologi Penyensoran Berbasis *Artificial Intelligence* (*AI*) Penyensoran Film dan Iklan Film, saya bersama Bapak Ahmad Yani Basuki, Ibu Rita Sri Hastuti, Bapak Arturo Gunapriatna, Bapak Mukayat Al-Amin, Bapak M. Sanggupri, dan Hadi Prabowo pada 14 s.d 18 Desember 2023, ditugaskan ke Belanda untuk mengadakan kunjungan studi banding dan memenuhi undangan Netherlands Film Fond.

Proses administrasi yang saya dan tim lakukan cukup sulit dan hampir saja tidak bisa berangkat karena proses surat menyurat untuk pengurusan paspor dinas dan waktunya yang sangat mepet, hampir mendekati libur Natal. Alhamdulillah, atas bantuan dari kolega, pada tanggal 14 Desember 2023 pukul 00.25 WIB, kami akhirnya terbang ke Amsterdam menggunakan pesawat Emirats transit di Dubai, sampai di Amsterdam pukul 14.00 waktu setempat. Karena kami sudah ditunggu oleh Netherlands Film Fond, dari Bandara Schipol kami langsung menuju ke kantor tersebut. Walaupun lelah dan letih akibat perjalanan yang cukup panjang, namun kami senang dan bahagia bisa memenuhi undangan dari lembaga tersebut. Banyak informasi yang kami dapatkan dari hasil diskusi, bagaimana pengawasan lembaga ini terhadap film yang akan beredar, kebijakan dan mekanisme klasifikasi usia, dan sebagainya.



**Rapat Tim Juri Anugerah Lembaga Sensor Film Tahun 2023 Kategori Film Bioskop.**

Hari berikutnya, pada 15 Desember 2023, kami audiensi dengan Bapak Mayerfas, Duta Besar RI untuk Belanda didampingi Korfung Pensosbud, FX Widiarso dan staf. Bapak Mayerfas sangat senang atas kedatangan tim LSF, karena berdasarkan catatan yang ada di KBRI Den Haag, belum pernah ada kunjungan dari Lembaga Sensor Film. Beliau siap jika ada kegiatan yang bisa dikerjasamakan.

Selepas sholat Jum'at sekitar pukul 14.00, bertempat di KBRI Den Haag, kami mengadakan pertemuan dengan mahasiswa/mahasiswi Indonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Pelajar Indonesia di Belanda (PPIB), untuk meliterasi dan mengedukasi peraturan perundang-undangan tentang perfilman, proses penyensoran, serta Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri.

Hal yang paling membahagiakan bagi saya adalah rasa kekeluargaan di antara Anggota LSF. Walau dua tahun pandemi Covid-19 menyebabkan kami jarang ketemu, setelah pandemi berakhir, barulah kami bisa kumpul untuk bercerita dan bercanda. Malahan selesai tugas sensor pagi, biasanya kami berkumpul di ruang





**Pertemuan dengan Netherlands Film Fond**







**Foto bersama dengan Duta Besar RI untuk Belanda**

Pak Kuat Prihatin, yang akhirnya kami namakan "Cafe Prihatin." Sesekali kami juga keluar kantor untuk makan siang bersama termasuk jika ada yang berulang tahun.

Hadiah terindah dan ikut berbangga di pengujung tahun 2022 adalah, Lembaga Sensor Film mendapatkan Anugerah Ombudsman Kepatuhan Standar Pelayanan Publik peringkat ketiga untuk Kategori A. Begitu pula di pengujung tahun 2023, lagi-lagi LSF mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi



**Perkumpulan Pelajar Indonesia di Belanda**

Informasi Pusat sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Menuju Informatif Dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Lembaga Non Struktural. Semoga tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Harapan ke depan, Lembaga Sensor Film semakin sukses dan semakin dikenal oleh masyarakat.



**Pak Noorca sangat rajin memotret aktivitas kami.**

**Di ruang kerja Pak Kuat ini saya dan teman-teman biasa berkumpul.**





**Suasana makan siang bersama di luar kantor**

# RINGKASAN

## Saptari Novia Stri

Saptari Novia Stri, S.H., kelahiran Jakarta pada Kamis, 7 November 1968, ini adalah anak ketiga dari enam bersaudara. Putri pasangan Bapak dan Ibu asal Banyumas, Jawa Tengah, ini biasa Titta. Jarang orang memanggilnya Saptari, apalagi Stri, yang berarti perempuan. Ketiga saudara perempuannya juga memakai "Stri" di belakang nama mereka.

Setelah menyelesaikan pendidikan di TK, SD, SMP, SMA di Labschool Rawamangun, Jakarta Timur, gelar S1 Fakultas Hukum diraihnya di Universitas Islam Jakarta. Karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimulai dari staf Subbagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Tatalaksana Sekretariat Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Empat kali menduduki jabatan struktural eselon IV, empat kali pula menduduki jabatan eselon III. Dan, sebelum ditugaskan menjadi anggota LSF, Titta adalah fungsional pamong budaya ahli madya.

Perjalanan tugas Titta di bidang hukum adalah menelaah, menyiapkan, dan menyusun bahan rancangan undang-undang, peraturan menteri, MoU, NSPK, SKKNI Bidang Penulisan Sejarah, dan peraturan lainnya. Bahkan, pernah terlibat dalam pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Sekretariat Lembaga Sensor Film, serta pembentukan assesor penulis sejarah. Sebagai Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, ia pernah melaksanakan pembinaan dan pengaduan pegawai yang mangkir atau tidak pernah hadir ke kantor. Ia juga pernah mengikuti *short course "Human Rights Trainning in Australia,"* serta Seminar Internasional Bidang Kebudayaan di Manila, *6th ASEAN Scout Jambore* di Davao, Filipina, dan mengadakan pameran dan memperkenalkan Saka Widya Budaya Bakti.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020, mewakili unsur Pemerintah dari Kemendikbudristek, pada Jumat, 8 Mei 2020, ia dilantik sebagai Anggota LSF (2020 - 2024), sekaligus menjadi Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi pada Komisi II LSF bidang Pemantauan, Hukum, dan Advokasi.



# Tri Widyastuti Setyaningsih M.Sn



# Filmorfosa



## Tri Widyastuti Setyaningsih (Wiwid Setya)

Ketua Subkomisi Penyensoran

Lahir di Wirobrajan-Yogyakarta, dari pasangan orang tua yang berprofesi sebagai pendidik. Ibu saya, Suharmini adalah seorang guru SD dan Ayah saya, Drs. Muhtadi, adalah guru di SPG Muhammadiyah, sekaligus Kepala STM Muhammadiyah, merangkap sebagai dosen di IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Saya anak ketiga dari empat bersaudara, waktu kecil sering dipanggil Uwit, atau Wit, yang dalam bahasa Jawa berarti pohon. Tak jarang saudara dekat memanggil dengan sebutan Uwit Kambil, yang artinya pohon kelapa. Saya tak pernah protes dengan panggilan itu, anggap saja doa, agar kelak saya bisa tumbuh tinggi, banyak manfaat, dan kokoh seperti *glugu* (batang pohon kelapa).

## Wiwid Setya

Selayaknya kebanyakan orang Yogya, saya tumbuh di lingkungan yang kental dengan seni dan mengaji. Selain membaca puisi, berlatih seni peran, dan menari, saya senang menyanyi, baik sebagai solois maupun tergabung dalam grup koor. Lagu berbahasa asing pertama yang saya pelajari waktu masih SD adalah lagu kebangsaan Inggris, yang diajarkan langsung oleh Ibu. Waktu kecil, saya banyak mengikuti dan memenangi pelbagai kompetisi serta mengisi aneka *performance,* yang membuat saya akrab dengan panggung dan mikrofon. Kerap tampil di atas panggung, serta sering mengikuti kompetisi bidang akademik/seni/olahraga tersebut, agaknya berperan besar dalam menumbuhkan pribadi yang berani serta percaya diri.



**Disela syuting film Kartini, Wiwid (tengah) terlibat menjadi pemain (2017)**

Saya cukup beruntung karena sejak kecil sudah bisa mengakses dunia audio visual melalui TV di rumah sendiri. TV tabung hitam-putih dalam kotak kayu itu menjadi magnet bagi para tetangga, yang datang untuk ikut menonton TV di rumah kami. Tak jarang ruang keluarga kami *full house*, sampai saya harus menonton di baris belakang atau berdiri di kursi. Program favorit saya antara lain *series*: *The Six Million Dollar Man, The Bionic Woman, The Incredible Hulk, ACI, Rumah Masa Depan,* serta Aneka Ria Safari, Ria Jenaka, Ayo Menggambar - Pak Tino Sidin. Semua acara tersebut tentu saja hanya bisa diakses dari *single channel,* Televisi Republik Indonesia (TVRI). Sedang untuk film bioskop, terkadang Ayah membawa saya menonton film di bioskop Ratih, Permata atau Widya. Pada umur 10 tahun, saya mulai belajar fo-






**Sejak kecil, familiar dengan seni, kompetisi, panggung dan mikrofon**

tografi dengan menggunakan kamera Ricoh yang dibelikan Ayah.

Karena saya tidak pernah punya masalah akademik, kedua orang tua saya selalu mengizinkan saya beraktivitas *outdoor*. Kegiatan di luar acara sekolah dan kesenian, sering saya lakukan dengan sepupu dan teman-teman sekampung antara lain: berenang di sungai mBedok, main di sawah dan kebon tebu, main tenis meja, dan menyelinap malam-malam nonton film 'misbar' di lapangan dekat kelurahan. Sedangkan kegiatan *indoor* yang paling saya gemari adalah mengisi teka-teki silang (TTS) di harian *Kompas* dan majalah *Kuntum*. Mencari jawaban untuk mengisi TTS itulah, yang memaksa saya untuk selalu membuka dan membaca tujuh jilid *Ensiklopedi Indonesia* dari rak buku Ayah. Meski pada praktiknya, Ayah dan kakaklah yang paling banyak berperan dalam menjawab TTS itu.

Majalah kesukaan saya waktu kecil, selain *Bobo* tentunya, adalah majalah *Djaka Lodang* yang memuat kisah-kisah misteri/horor, serta *Intisari.* Dan yang selalu saya tunggu-tunggu adalah *Femina* langganan Ibu. Khususnya halaman sampul belakang, yang memuat komik *Hi and Lois,* tentang kehidupan keluarga di *subur-*

*ban* Amerika Serikat karya Mort Walker dengan ilustrasi Dik Browne. Komik itu adalah bacaan berbahasa asing pertama bagi saya.

Novel dewasa pertama yang saya baca ketika SD adalah roman berjudul *Astiti Rahayu*, karya Iskasiah Sumarto, terbitan Pustaka Jaya. Novel tersebut saya dapat dari Ibu, yang saat itu sedang menyelesaikan kuliahnya di jurusan Sastra Inggris IKIP - Yogyakarta. Salah satu pekerjaan rumah Ibu adalah membuat *review* atas novel *Astiti Rahayu*, yang kemudian saya pinjam dan habis saya baca. *Astiti Rahayu* punya pengaruh penting untuk hidup saya.

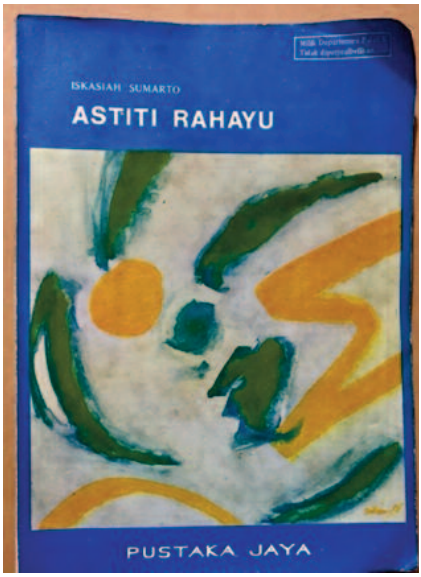


**Novel Astiti Rahayu punya andil besar dalam menentukan cita-cita**

Novel itu mengisahkan kehidupan mahasiswi Sastra Inggris di UGM, dengan *setting* tahun 1970-an. Astiti bekerja paruh waktu sebagai Pemandu Wisata (*Tour Guide*) di sela-sela ia menyelesaikan skripsinya. Astiti yang fasih berbahasa asing, memandu rombongan wisatawan domestik maupun mancanegara, ke tempat-tempat wisata seperti Prambanan-Borobudur-Kotagede-Dieng-Bromo dan banyak tempat lainnya di Indonesia. Hal itu memberi impresi besar pada saya. "Wow banget!". Dari membaca novel itulah saya mendapat pemahaman baru, bahwa cita-cita tidaklah harus menjadi insinyur atau dokter (profesi yang lazim ditulis kawan-kawan seumuran saya pada 1980-an). Lebih penting lagi, saya juga mendapat pemahaman bahwa seorang perempuan, bisa berprofesi sebagai pemandu wisata, atau penulis novel seperti Iskasiah Sumarto, yang memenangi lomba mengarang roman dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Terinspirasi dari novel *Astiti Rahayu*, meski masih duduk di bangku SD, di depan Ayah dan Ibu saya sudah sangat mantap menetapkan cita-cita kelak bila sudah dewasa yaitu saya ingin menjadi seorang Pemandu Wisata (*Tour Guide)*.

Kehilangan ayah pada usia 13 tahun, sangat memengaruhi jalan hidup saya. Terutama karena saya kehilangan tempat bertanya dan meminta petunjuk. Juga tentunya berdampak pada ekonomi keluarga. Menjadi pemberani saja ternyata tidak cukup. Saya dituntut untuk mandiri, sangat berhati-hati dan bertanggung jawab penuh pada perilaku diri sendiri. Saya harus mengerti dan memahami perjuangan seorang Ibu yang harus membesarkan dan mendidik keempat anaknya

yang semuanya masih masa usia sekolah. Kegiatan saya pun berfokus hanya pada bidang akademik: sekolah - belajar agama - les. Tak ada lagi kegiatan berkesenian.

Ibu pun berpesan bahwa saya boleh sekolah swasta sampai lulus SMA, tapi kalau mau kuliah harus di Perguruan Tinggi Negeri. Mimpi menjadi "Astiti Rahayu," dan mengambil sekolah kejuruan pun harus disimpan rapat-rapat. Meski pernah mencoba menulis cerpen dan saya kirim ke majalah dan koran di Jakarta, tapi hanya surat penolakan yang saya terima. Karena itulah, cita-cita untuk menjadi penulis seperti Iskasiah Sumarto, sangat jauh dari jangkauan. Mengisi TTS juga sudah tidak lagi. Tapi sesekali saya masih ikut kuis di majalah lokal atau di radio. Pernah, suatu ketika, kakak saya memenangi sebuah kuis berhadiah tiket menonton film di bioskop. Tiket itu diberikan kepada saya. Mungkin kakak tahu bahwa saya memang gemar menonton film. Ketika libur sekolah, pada suatu hari Jumat 1989, saya berangkat ke bioskop Mataram sendirian. Saya menonton film berjudul *Malioboro* yang disutradarai Marselli Sumarno (yang kelak akan menjadi dosen saya).



PROFESI

TRI WIDYASTUTI SETYANINGSIH
'BOSS' DI BALIK LAYAR LEBAR

APA TUGAS UTAMA PRODUSER PELAKSANA?
Seorang produser pelaksana bertugas mengelola jalannya pembuatan sebuah film, mulai dari tahap persiapan, produksi, hingga ke pascaproduksi. Singkatnya, dia merupakan motivator dan fasilitator yang mengakomodasi semua kebutuhan para pembuat film, mulai dari sutradara, artistik, kameramen, DOP (director of photography), dan lain-lain.

PENDIDIKAN KHUSUS APA YANG HARUS DIMILIKI?
Harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat serta pemahaman teknis kerja pembuatan film. Saya mempelajari semua keterampilan ini saat kuliah di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.

PUNYA PENGALAMAN TAK TERLUPAKAN?
Pada tahun 2001, ketika harus syuting di daerah konflik Ambon, saya kebetulan tinggal di hotel yang letaknya di salah satu daerah konflik. Setiap hari saya harus membiasakan diri melihat atau mendengar kerusuhan antara warga dan hujan tembakan pistol.

FILM APA SAJA YANG PERNAH DIGARAP?
Beberapa film yang disutradarai **Garin Nugroho**, seperti *Requiem From Java* (*Sinta Obong*, 2006), *Setambi* (2005), dan *Aku Ingin Mencium Mu Sekali Saja* (2002). Saat masih kuliah, saya juga pernah menangani film cerita pendek independen yang disutradarai **Hanung Bramantyo**, seperti *Tutur* (1999) dan *Maharani* (1998).

PROSPEK KARIER KE DEPAN?
Sangat menjanjikan. Jumlah produser pelaksana terbilang sedikit, padahal produksi film di Indonesia sekarang ini cukup tinggi. Orang-orang seperti saya pun menjadi incaran banyak rumah produksi. Semoga kondisi ini bukan sekadar euphoria belaka.

30 FEMINA

**Profil Wiwid Setya sebagai perempuan dengan profesi yang tidak lazim pada jamannya, majalah Femina edisi No. 10/XXXIV Maret 2006**

Beranjak dewasa, saya dipertemukan lagi pada dunia seni. Kali ini adalah seni teater. Saya kembali naik panggung dengan grup Teater Titian dalam pementasan *Ohmm atawa Basmalah* (1993), yang disutradarai Yudi Ahmad Tajudin (Yudi), dan dipentaskan untuk mengikuti lomba Festival Teater



**Syuting Dokudrama Pustaka Anak Nusantara di Saubebah, Kabupaten Sorong, Papua (2000)**

Remaja di ISI Jogjakarta. Pentas tersebut meraih banyak penghargaan saat itu, antara lain: Sutradara Terbaik, Aktor dan Aktris Terpuji. Pementasan pun dilanjutkan di Taman Budaya Solo (TBS). Selain teater, saya juga kemudian bergabung dengan Sanggar Bambu 'SABU' pimpinan Untung Basuki, sebuah grup musikalisasi puisi yang mempertemukan kembali saya dengan panggung dan mikrofon, hingga terbawa pentas ke pelbagai kota sampai ke Ancol-Jakarta pada 1994.

Seni pun kembali bersemi dalam hidup saya. Ketika Yudi mendirikan Teater Garasi di Fisipol UGM, saya ikut bergabung dalam pementasan naskah adaptasi bebas dari *Caligula* karya Albert Camus berjudul *... Atau Siapa Saja*, yang dipentaskan di Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Taman Budaya Solo (TBS), Taman Budaya Cak Durasim-Jawa Timur, Fisip UNAIR dan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Saya bertugas sebagai *Stage Manager*, peran yang baru pertama kali saya pelajari. Pentas berikutnya, masih dengan Teater Garasi, saya menjadi penyanyi latar dalam pementasan *Kapai-Kapai* karya Arifin C. Noer. Itulah awal saya berkenalan dan menikmati pekerjaan di balik panggung, meski terkadang saya masih tampil sebagai pemain dalam sebuah iklan layanan masyarakat (ILM) dan naik panggung musikalisasi puisi.

Teater Garasi telah mempertemukan saya dengan komunitas anak muda sebaya yang *movie freak*. Menonton film pendek maupun film panjang karya 'orang

Jakarta' yang didapat dari program 'Sinema Ngamen' di UGM dan entah dari mana lagi. Mengakses rekaman film bukanlah hal gampang saat itu. Jadi bila ada pemutaran film di Teater Garasi, saya merasa harus datang. Setelah pemutaran film (biasanya dalam format VHS), lalu diadakan diskusi. Film-film yang sangat berkesan bagi saya antara lain: *Cinta Dalam Sepotong Roti, Surat Untuk Bidadari, Dongeng Kancil untuk Kemerdekaan,* dan *Bulan Tertusuk Ilalang.* Sudah tentu semuanya karya Garin Nugroho (yang kelak akan menjadi Guru perfilman saya).

Suatu sore pada bulan April 1996, bersama teman-teman Teater Garasi, saya menonton film *First Knight* (karya sutradara Jerry Zucker), di bioskop Empire 21.8 Theatres di Jl. Urip Sumoharjo, Yogyakarta. Di pintu studio, saya membaca pengumuman lowongan pekerjaan. Seperti mendapat jalan untuk bisa menonton film gratis tiap hari, saya pun melamar pekerjaan itu. Keputusan *random*, enggak banyak pikir dan mungkin ngawur. Pekan berikutnya, saya sudah menjadi "porter" (tukang sobek tiket di pintu masuk) studio 4. Ada empat show dalam sehari, dan



**Syuting film 'Opera Jawa' Sutradara Garin Nugroho di Keraton Solo (2006)**

ada enam studio di bioskop tersebut. Sebagai porter, tugas saya selesai sesudah semua penonton memasuki studio. Ketika film mulai diputar, saya memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut menonton film yang ditayangkan. Saya bebas memilih film mana yang mau ditonton, mulai dari film di studio 1 sampai dengan studio 6. Bila ada adegan yang menarik dalam satu bagian (*scene/sequence*) film, biasanya saya akan menontonnya berulang-ulang. Saya amati adegan dan urutannya (kelak



**Syuting film 'Aku Ingin Menciummu Sekali Saja' di Kecamatan Waris, Papua (2000)**

saya mengenalnya sebagai struktur cerita, plot, pembabakan dan *mise en scene*). Terutama antara lain untuk film: *Indecent Proposal* (Adrian Lyne, 1993), *Dangerous Minds* (John N. Smith, 1995), *Fair Game* (Andre Sipes, 1995), *While You Were Sleeping* (John Turteltaub, 1995), dan *Broken Arrow* (John Woo, 1996).

Pada suatu siang di kursi beludru merah di tengah studio 2 yang sedang sepi penonton, saya duduk tepekur dan merenung setelah menyaksikan film *Up Close & Personal* (Jon Avnet, 1996). Diiringi lantunan suara Celine Dion dalam lagu *Because You Loved Me,* saya menyadari, bahwa tak ada yang lebih saya inginkan di kemudian hari, selain menjadi orang di balik layar dan melakukan banyak *travel work*, seperti yang diperankan oleh karakter tokoh film *Up Close & Personal* tersebut, Tally Atwater (Michelle Pfeiffer) seorang pembaca berita, dan manajer pemberitaan Waren Justice (Robert Redford). Detik itu juga saya menyadari, bahwa panah cinta saya sudah saya tembakkan kepada: Film!

Pada 1996 setelah wisuda dari sebuah akademi negeri di Jogja, saya pun pamit kepada Ibu, "Tugas Ibu menyekolahkan saya sudah selesai. Ini ijazah dan uang beasiswa terakhir. Setelah ini, biarkan saya mencari jalan hidup sendiri. Ibu tak perlu membiayai saya lagi!"

Saya pun berangkat ke Jakarta, membawa kisah *Astiti Rahayu* sebagai pembawa semangat. Namun, juga selalu terngiang kalimat Ibu: "Memangnya kalau seni-seni gitu nanti bisa buat hidup?" Saat itu tentu saja saya tak punya jawaban atas pertanyaan Ibu. Saya hanya diam, kendati dalam hati saya meyakini bahwa pembuktian nanti yang akan menjadi jawaban. '*Man jadda wa jadda, man sobara dhofara*'. Dalam hati saya berkata: "Kalau aku bersungguh-sungguh dan sabar, masak iya sih nanti enggak sampai ke tujuan?" *Wis-lah*, *mandep mantep* berangkat ke barat.

"Ibu kota, *please be kind to me.*"

Pertengahan 1996 saat masuk ke Jakarta, tujuan saya adalah sekolah di Fakultas Film dan Televisi, Intitut Kesenian Jakarta (FFTV-IKJ). Padahal, modal saya *almost zero*. Hidup menumpang di rumah rekanan di kawasan Depok Asri. Saya mulai bekerja di industri sulih suara (*dubbing*) film. Logat *medhok* Jawa saya tak memungkinkan untuk langsung bisa menjadi artis sulih suara (*dubber*). Selagi belajar menipiskan pengucapan konsonan: g j b d dan k, agar terdengar lebih "nasional," saya bekerja sebagai *translator* dan editor naskah.

Skenario film-film berbahasa asli China, Hongkong dan Jepang, yang saya terima dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian saya edit dan padu padankan setiap kata dan kalimatnya, disesuaikan dengan kata dan kalimat percakapan dalam Bahasa Indonesia. Jumlah suku katanya juga disesuaikan agar ketika diucapkan oleh *dubber*, akan mendekati *lip sync*. Di sela pekerjaan itu, saya menyiapkan porto folio untuk mendaftar ke IKJ pada tahun berikutnya. Kurang dari setahun, terkumpul cukup uang untuk membayar biaya pendaftaran dan membayar uang masuk IKJ. Dengan catatan, hanya cukup bila saya diterima dalam peringkat 10 besar. Sebab, akan ada tambahan biaya belasan juta rupiah bila saya diterima di atas peringkat 10. Dan sudah bisa dipastikan, bila itu yang terjadi, saya tidak akan mampu membayarnya. Pertengahan 1997, akhirnya saya mampu menginjakkan kaki pertama kali ke kompleks Taman Ismail



**Dalam perhelatan syuting pada acara kirab di keraton Solo**

Marzuki (TIM), dengan status sebagai mahasiswi Fakultas Film dan Televisi – Institut Kesenian Jakarta (IKJ). "And so, the journey began."

Di FFTV, atau akrab dengan sebutan fakultas Sinema, hari-hari seperti dalam mimpi: menonton film, belajar bikin film, ketemu orang film, dan menghadiri festival film.*"I started living my dream!"* Pada kuliah semester kedua, saya dipercaya menjadi Sutradara dalam pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), dengan tema pelestarian budaya. Pada semester ketiga, saya mendapat beasiswa sebagai mahasiswa dengan nilai terbaik di kelas. Demikianlah saya membiayai kuliah hingga selesai. Sekaligus juga mendapatkan beasiswa untuk belajar bahasa Prancis di *Centre Culturel Français* (CCF), Jakarta. Pada semester keempat, film pendek *Sepatu Merah Cinta* masuk dalam 10 nominasi Lomba Film/ Video Alternatif Indonesia 1998/1999. Dan dalam kompetisi yang sama, film pendek yang saya produksi berjudul *Tlutur* disutradarai oleh Hanung Bramantyo, menjadi Juara I pada lomba yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) tersebut. Tahun berikutnya, proyek film pendek *Maharani,* yang juga disutradarai Hanung Bramantyo, mendapat *funding support* dari The Japan Foundation (JF)-Indonesia. Demikianlah awal mula saya menjadi produser.



Poster film Puisi Tak Terkuburkan (2000)

Keterlibatan dalam pembuatan film layar lebar, untuk pertama kalinya saya mulai pada semester kelima tahun 1999, pada mata kuliah magang kerja (*stase*) dalam produksi film *Puisi Tak Terkuburkan* (*The Poet/Unburied Poetry*) karya sutradara Garin Nugroho.

Era tersebut merupakan awal kebangkitan kembali industri film nasional dari keadaan 'mati suri.' Sebab, setiap tahun hanya ada satu-dua judul film layar lebar yang diproduksi di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan betapa beruntungnya saya, terpilih dari sekian banyak mahasiswa dan mendapat kesempatan magang dalam film layar lebar, dengan sutradara Garin Nugroho pula. Saya memanfaatkan kesempatan magang itu dengan sebaik-baiknya dan bekerja serajin-rajinnya. Tugas terberat saya adalah,

membuat transkrip, baik dari dialog maupun syair lagu Didong, yang dilantunkan Datuk Ibrahin Kadir, pemeran utama film yang berasal Takengon, Aceh.

Saya, yang berlatar budaya Jawa tentulah buta ihwal Bahasa Aceh. Tapi, saya tak boleh menyerah, itu saja prinsipnya. Setiap usai pengambilan gambar, saya mendekati Datuk Ibrahim, dan membantunya mengingat kembali syair-syair (yang kebanyakan improvisasi) yang diucapkannya, lalu meminta Datuk menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia untuk saya catat. Setiap tengah malam sepulang *syuting,* saya menyalin catatan itu dengan mesin ketik (analog). Dua hari setelah rangkaian syuting selesai, saya menyerahkan satu bundel transkrip terjemahan dialog dan syair Didong langsung ke Mas Garin. "Non, kerjamu bagus," kata Mas Garin setelah sekilas membaca transkrip itu. Sebuah kalimat penebusan dan penghargaan dari kerja keras yang tidak bisa saya lupakan hingga hari ini.

*Puisi Tak Terkuburkan* bukan sekadar film layar lebar pertama untuk saya, tapi juga merupakan film layar lebar pertama di Indonesia yang menggunakan proses perekaman multi teknologi. Film direkam menggunakan kamera D-35 dengan pita kaset Betacam Digital, kemudian hasil rekamannya dipindahkan ke dalam format data digital melalui proses *Kine Transfer.* Proses editing dilakukan dalam format digital. Suara direkam dengan Nagra pada pita ¼. Kemudian dilakukan penggabungan gambar (hasil proses editing) dan suara atau disebut *married print* yang menghasilkan master film dalam format digital. Disebabkan sistem proyeksi bioskop masih menggunakan teknologi analog, maka master film dalam format digital tersebut harus ditransfer kembali dengan teknologi Kine Transfer ke pita seluloid 35 mm untuk menghasilkan *Master Film (Copy A*). Dari Copy A itulah kemudian dicetak perbanyak sesuai jumlah penayangan layar bioskop yang diinginkan. Film *Puisi Tak Terkuburkan* merupakan film *black and white* pertama yang melakukan pentrasferan pita video ke pita seluloid. Keterbatasan fasilitas di Indonesia di jaman itu mengakibatkan proses *mastering* dan *copying* film seluloid hanya bisa dilakukan di Amerika Serikat, atau di negara lain seperti Thailand, Hongkong dan Australia. Sungguh kerja rumit, memerlukan waktu yang panjang dan membutuhkan biaya sangat mahal.

Debut saya membuat film layar lebar adalah pada tahun 2000 sebagai *Line Producer* dalam film *Aku Ingin Menciummu Sekali Saja/AIMS* (*Bird Man Tale*) karya sutradara Garin Nugroho, produksi Yayasan SET Film. Film ini diperani oleh Lulu Tobing, Oktavianus R Muabay dan Adi Kurdi, dengan lokasi syuting di Jayapura & Waris, Papua.

Sebagai pekerja pemula dan harus melakukan syuting di Jayapura dan Waris, sebuah kecamatan di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, tentu saja merupakan pengalaman yang menantang sekaligus sarat pembelajaran bagi saya. Untunglah sebelum membuat film layar lebar, saya sudah berpengalaman membuat beberapa serial dokudrama Pustaka Anak Nusantara produksi Visi Anak

Bangsa (VAB) yang lokasi syutingnya di wilayah pedalaman Papua seperti di Saubebah – Kabupaten Sorong; Kokonao-Kabupaten Timika, juga di wilayah Indonesia Timur lainnya seperti Lamalera – Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Sehingga, pengalaman tersebut bisa menjadi modal saya dalam mengelola film layar lebar pertama saya, *AIMS*.

Film layar lebar kedua juga tak kalah menantang: *Denias, Senandung di Atas Awan* produksi Alenia Pictures (2006) dengan lokasi syuting di Danau Habema, di ketinggian 3.500 dpl, di kabupaten Wamena dan kawasan PT Freeport di Kabupaten Timika, Papua. Film ini dikirim mewakili Indonesia untuk mengikuti kompetisi pada kategori *foreign film* pada Oscar 2008.



**Bersama Anumpae Yali, Kepala suku Yali di Wamena, Papua saat syuting film Denias, Senandung di Atas Awan (2006)**

Tahun-tahun berikutnya saya aktif memproduksi film secara berkelanjutan dalam pola kerja sebagai *freelancer.* Antara lain, *Opera Jawa* (*Requiem from Java*) karya sutradara Garin Nugroho dengan produser Simon Field dan Keith Griffiths. Juga bekerja sama dengan sutradara lainnya seperti Hanung Bramantyo, Rizal Mantovani, Kamila Andini, Joko Anwar, Faozan Rizal, Monty Tiwa dll. Film-film yang saya kelola dibintangi para artis papan atas tanah air seperti: Reza Rahadian, Bunga Citra Lestari, Dian Sastrowardoyo, Fedi Nuril, Acha Septriasa, Adinia Wirasti, Christine Hakim, Pevita Pierce, Chico Jericho, Julie Estelle, Marthino Lio, Asmara Abigail, dll. Selain film nasional, saya juga bekerjasama dengan *film maker* internasional seperti dari Jepang, Belanda dan Amerika.



**Bersama Bacharuddin Jusuf Habibie (Presiden Ketiga RI) dan Reza Rahadian (Aktor pemeran Habibie dalam Film Habibie&Ainun).**

Selain *feature film*, saya juga menjadi produser Iklan Komersial maupun Iklan Layanan Masyarakat (ILM), serta beberapa produksi program TV/Web/Mini-series, antara lain: produksi iklan dengan sutradara dari Australia, Mark Toia dalam film *Uber: Happy Ramadhan*; Mini Series bersama penyanyi Rossa: *Masih (Cinta) Terbaik*; dan Web series *Jalanin Aja* karya sutradara Joko Anwar.

Sedangkan untuk stasiun TV (FTA) swasta, antara lain produksi dengan sutradara Jepang Terriyosi Ishi'i dalam serial *Bima Satria Garuda* produksi MNC Pictures, yang rilis di RCTI pada 2013, Sinetron *Si Cecep* disutradarai Ahmad Yusuf Produksi Tripar Multivision Plus tayang di SCTV 2004 dan produksi serial dokudrama yang ditayangkan di SCTV 2001: *Pustaka Anak Nusantara* produksi Visi Anak Bangsa (VAB). Antara lain episode *Saubebah-Kabupaten Sorong,Papua; Kokonao-Kabupaten Timika, Papua; Lamalera–Kabupaten Lembata, NTT; Tual-Maluku Tenggara* dll.

Dari seluruh film layar lebar yang pernah saya produksi, *Habibie & Ainun (H&A)* merupakan film yang sangat berkesan. Film biopik drama romansa yang menceritakan kisah cinta Ainun Besari dengan Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Ketiga Republik Indonesia. *H&A*, dibuat berdasarkan kisah nyata Eyang Habibie (demikian panggilan akrab untuk beliau), setelah mengalami guncangan pasca ditinggal istri tercintanya, Ibu Ainun. Eyang Habibie menuliskan kisah per-

jalanan hidupnya dalam buku berjudul *Habibie & Ainun*.

Dalam produksi tersebut, saya dituntut memimpin kru film dalam mengalihwahanakan novel *Habibie & Ainun* menjadi sebuah film layar lebar di bawah pengawasan langsung dari sang penulis. Proses pembuatan film menjadi sangat berkesan, bukan saja karena di kemudian hari film *H&A* sukses meraih *box office hit* dengan jumlah penonton 4,7 juta pada 2012, tetapi proses pembuatannya terasa sangat spesial karena keterlibatan langsung sang tokoh yang hampir tiap hari hadir pada saat syuting, baik di Jakarta, Lembang, Klaten, hingga Aachen dan Munich, Jerman. Saya juga sangat senang membaca tulisan tangan Eyang Habibie pada sampul halaman bukunya khusus untuk saya.

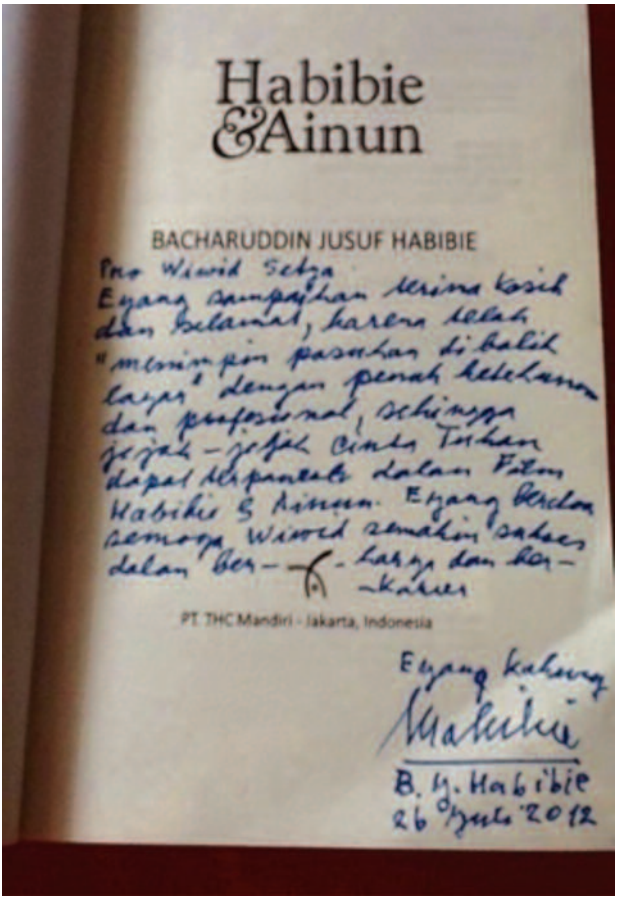


**Tulisan tangan BJ.Habibie pada halaman sampul buku Habibie & Ainun**

*The Mirror Never Lies*, sebuah debut film layar lebar dari sutradara perempuan Kamila Andini, merupakan film yang juga sangat mengesankan dalam proses pembuatannya. Syuting film dengan *setting* lokasi di kampung suku Bajo dengan fasilitas jalan dan fondasi bangunan dari kayu yang berdiri di atas laut, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Cuaca dan kondisi lokasi merupakan tantangan terberat dalam proses produksinya. Bekerja di bawah terik matahari, di atas pasang surut air laut, di dalam laut *(under water)*, *dealing* dengan arus, ombak, cuaca ekstrim, bulu babi, biawak dan ular laut, serta keterbatasan infrastruktur sekaligus transportasi, merupakan ujian dan tantangan bagi saya dalam mengelola produksi sebuah film layar lebar. Menampilkan budaya Indonesia yang eksotis dan menawan sungguh bukan pekerjaan yang gampang. *The Mirror Never Lies*, bukan saja mengajarkan saya apa-apa yang hidup di atas permukaan tapi juga apa-apa saja yang hidup di dasar laut.

Teringat ketika masih SD, di depan Ayah dan Ibu, saya mendeklarasikan bahwa kelak bila dewasa akan menjadi Pemandu Wisata (*Tour Guide*). Rasanya cita-cita saya sudah tercapai ketika memandu kru film asing ke lokasi-lokasi di kepulauan Indonesia; memandu kru film dari Indonesia ke Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Thailand, Hongkong dll. Memimpin kru untuk mencari lokasi, dilanjutkan syuting film baik di pedalaman, perbatasan, maupun di kota besar; di luar negeri maupun dalam negeri; dari Aceh hingga Papua. "*I felt like fulfilling my childhood dream of becoming a Tour Guide.*"




**Film telah membawa saya *traveling* dari satu tempat ke tempat lain, dari pulau satu ke pulau lain, dari negara satu ke negara lain, di darat, ke angkasa, sampai ke dalam laut.**

Film sebagai karya seni, di dalamnya terkandung elemen ilmu pengetahuan, estetika dan teknologi. Oleh karenanya, perkembangan film sangat dan akan selalu terpengaruh oleh perkembangan ketiganya. Dengan demikian, pendidikan dalam bidang perfilman menjadi sebuah keharusan. Sebagai sarjana seni bidang Manajemen Produksi Film dan TV, Fakultas Film dan Televisi (FFTV) - Institut Kesenian Jakarta (IKJ), saya pernah mendapatkan beasiswa Magang Internasional dari *The Ford Foundation*, Jakarta, yang dikelola *Asialink* (Australia), dan Yayasan Kelola (Indonesia), pada 2008. Beasiswa ini, antara lain, memberi saya kesempatan belajar pada Screen



**Bersama rekan-rekan dosen di *Screen Content Division, Australian Film, Television and Radio School* (AFTRS), Sydney, Australia.**

Content Division, Australian Film, Television and Radio School (AFTRS) untuk melihat langsung bagaimana pendidikan formal perfilman di sana.

Di Indonesia era 1990-an, LPKJ-IKJ adalah satu-satunya institusi pendidikan yang memiliki jurusan Film, TV dan Fotografi, dengan peminatan di bidang: Penyutradaraan, Produksi, Penulisan Skenario, *Editing*, Sinematografi, Penata Suara dan Penata Artistik. Namun, komposisi antara mahasiswa yang mengambil peminatan bidang kreatif dan manajerial, tidak tumbuh dengan seimbang. Sehingga, jumlah kreator lebih besar dan berkembang pesat dibandingkan bidang manajerial. Saat ini, tercatat sudah ada 22 institusi pendidikan yang memiliki peminatan pada Film/TV/Audio Visual yang tergabung dalam Asosiasi Program Studi Film dan TV (Asprosfisi). Dari ke-22 lembaga pendidikan tersebut, sebagian besar penekanannya adalah mencetak para kreator.

Fenomena di atas cukup memprihatinkan bagi saya yang bekerja dalam sektor manajerial dan bisnis film. Mestinya sektor kreatif tumbuh sebanding dengan perkembangan profesional film yang fokus pada pengelolaan produksi film. Sehingga, selain merupakan produk seni budaya, film juga menjadi jenama yang memiliki nilai *business* yang dapat di-*monetize* secara berkelanjutan. Dengan begitu, pendidikan di bidang Produksi Film pun harus diseriusi dan diberi perhatian khusus.

Dengan alasan tersebut, sejak 2015, saya mendedikasikan diri menjadi dosen pada




**Bersama tim film 'Critical Eleven' di Times Square-Manhattan, New York City (2016)**

kekhususan mata kuliah Produksi Film (Layar Lebar dan Film Pendek) di Fakultas Film dan Televisi (FFTV) – Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Dengan begitu, saya turut berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan generasi baru pembuat film, supaya mereka memiliki bekal edukasi dan kompetensi pada bidang produksi film.

Saya juga memperluas jangkauan dan membagikan pengalaman serta ilmu produksi film, dengan menjadi dosen tamu pada universitas lain, seperti Jogja Film Academy (JFA), SAE Institute Jakarta (SAE), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN), serta menjadi narasumber pada workshop perfilman lainnya.

Selain terlibat dalam produksi film, saya juga memiliki pengalaman mengelola festival film di Indonesia. Antara lain, *Jakarta International Film Festival* (JiFFest) tahun 2000 dan 2001. Kemudian British Film Festival (BFF) tahun 2002–2004 yang diselenggarakan oleh *The British Council* Indonesia.

Awal keterlibatan saya pada JiFFest 2000 adalah sebagai penanggung jawab atau *Festival Coordinator* di bioskop TIM 21. Tugasnya antara lain memastikan pemutaran film berjalan aman dan lancar di dua studio. Saat itu, JiFFest sedang mengubah sistem *ticketing* dari manual menjadi *computerized*. Problemnya, terjadi *crash system* yang mengakibatkan *overloading capacity* dan *seat crowded.* Pengalaman saya sebagai porter di bioskop semasa di Yogya, ternyata sangat membantu dalam menangani krisis penonton saat itu. Apresiasi dari Direktur Festival JiFFest, membawa saya pada posisi *Operational Manager* pada tahun berikutnya. Kemudian saya direkomendasikan kepada Jim Holington, *Head of Arts The British Council*, yang saat itu akan menyelenggarakan BFF 2002, dimana untuk pertama kalinya

saya dipercaya sebagai *Festival Project Manager,* yang berlanjut hingga penyelenggaraan BFF 2003 dan 2004.

Berkat pengalaman dalam penyelenggaraan JiFFest dan BFF itu, saya mendapat kesempatan untuk magang kerja internasional di bidang manajemen seni di Sydney Film Festival (SFF) ke-55 di Australia, sebagai bagian dari beasiswa dari *Ford Foundation.* Saya bekerja pada *Programing Department* dengan tugas, seperti para programmer SFF, melakukan seleksi film yang sudah terdaftar. Saya harus menonton ratusan film dan menyeleksi 100 judul pilihan. Kemudian disaring lagi menjadi 80 judul, lalu diseleksi lagi mejadi 50 judul. Kemudian menjadi 10 judul. Setiap tahap dilaporkan kepada Programer SFF. Dari 10 judul terpilih, saya menyaring tiga judul terpilih beserta peringkatnya dan menentukan pemenang kategori *Best Film*. Simulasi pemilihan ini dilakukan secara individual dan sungguh menjadi



**Sebagai delegasi film "Aach.. Aku Jatuh Cinta" untuk International Film Festival Rotterdam (IFFR), Belanda (2016)**

pengalaman yang luar biasa berharga. Biasanya, saya berada di sisi pembuat film yang mendaftarkan karyanya untuk diseleksi oleh kurator festival. Kali ini, saya justru bertindak sebagai kurator/juri festival film. *Exercise* yang sangat berharga untuk perjalanan karir saya di industri film selanjutnya.

Pengalaman di JiFFest dan dan BFF, juga memungkinkan saya untuk berurusan dengan Badan Sensor Film (BSF), yang kemudian berganti nama menjadi Lembaga Sensor Film (LSF). Dalam festival film yang berlatar non-komersial, materi

film yang ditayangkan hanya dipinjam untuk periode waktu tertentu, sehingga tidak mungkin untuk digunting/dipotong/dihilangkan sebagian adegan yang mendapat catatan dari LSF. Jalan keluarnya adalah, penyelenggara festival diwajibkan untuk melakukan penyamaran (*bluring*) saat melakukan *screening*. Sebagai manajer festival, saya harus mendampingi operator (*projectionist*) untuk memastikan film di-*blur* sesuai rekomendasi LSF. Materi film berupa pita seluloid 35 mm di-*bluring* dengan teknik manual menggunakan plastik mika atau kertas kalkir yang ditutupkan pada sinar pemancar *projector*. Dampaknya, sering terjadi kegaduhan di studio ketika penonton menyadari ada penyamaran gambar/*bluring* di layar tersebut. Tak jarang, penonton yang sebagian adalah *expatriate* mendatangi penyelenggara festival untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka atas penyensoran tersebut.

Lain lagi pengalaman dengan LSF ketika saya menjadi *film maker*, sebagai *Line Producer.* Tak terelakkan, saya harus menghitung dan menyisihkan dana untuk proses sensor yang tidak bisa dibilang sedikit dan *fixed price*. Biaya membuat *leader*/menempel telop dikalikan jumlah *copy* film (yang saat itu masih berupa seluloid 35 mm), sungguh memerlukan waktu lama dan berbelit dalam prosesnya, serta memakan biaya sampai puluhan juta rupiah. Rasanya, saat itu LSF menjadi institusi yang 'eksklusif' dan menakutkan. Iklan Layanan Masyarakat yang saya buat pun, ada juga yang mendapat koreksi dari LSF. Kondisi itulah antara lain, yang kemudian membuat saya tertarik untuk lebih mengenal LSF.

Saya pikir, pemerintah membuat badan/lembaga negara, mestinya untuk kebermanfaatan yang baik. Mengapa kesannya malah jadi penghambat untuk kreativitas anak bangsa? Dari amatan saya terhadap LSF dan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang memungkinkan unsur masyarakat dari kepakaran perfilman menjadi anggota LSF, maka saya pun berpendapat, "kalau mau melakukan perubahan, harus masuk dan brkontribusi dari dalam LSF." Sudah waktunya bagi saya untuk mengaktualisasi pengetahuan, kemampuan dan pengalaman sebagai pelaku kegiatan/usaha perfilman, pada bagian lain sektor perfilman. Dan LSF, sebagai bagian dari ekosistem perfilman dari sisi pemerintah, menjadi pilihan bagi eksistensi saya untuk pengembangan karir.

Saya meyakini bahwa latar belakang pendidikan saya di bidang film, ditambah lebih dari 20 tahun pengalaman sebagai pekerja film dan pengelola film festival, memberikan bekal yang cukup untuk mengemban amanah sebagai anggota LSF 2020-2024.

Tak berapa lama setelah mengikuti *fit and proper test* di Komisi I DPR-RI sebagai tahap akhir seleksi menjadi anggota LSF, pada awal Maret 2020 wabah Covid-19 dinyatakan masuk Jakarta. Dan tak lama kemudian, Indonesia ditetapkan berstatus pandemi. Semua kegiatan *locked down,* diberlakukan *social and physical distancing*. Tidak ada *public transport* yang beroperasi dan bagi masyarakat yang akan mema-

suki Jakarta diberlakukan Surat Ijin Keluar/Masuk (SIKM), semacam visa masuk, yang proses mengurusnya memakan waktu. Saya yang berdomisili di Yogyakarta, terkena imbas regulasi tersebut. Jumat, 8 Mei 2020, merupakan hari bersejarah karena saya dilantik sebagai pejabat negara eselon dua untuk mengemban amanah menjadi Anggota LSF-RI oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui sistem daring (dalam jejaring), alias secara *online*.

Awal bekerja di LSF, saya merasa perlu mempelajari dan mendalami perundangan yang menjadi rujukan dalam penyensoran secara lebih mendasar, terutama UU 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; PP 18 Tahun 2014 tentang LSF, dan Permendikbud No 14. Tahun 2019 tentang Pedoman Penyensoran. Baru kemudian, bersama Tim LSF, saya membuat dan memperbarui SOP Penyensoran. Pada tahun berikut-




**Momen bersejarah, Pelantikan Anggota LSF Periode 2020-2024 oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim secara online (2020)**

nya, *review* saya atas Permendikbud No. 14 Tahun 2019, dijadikan dasar rujukan awal tim revisi Permendikbud. Pada proses ini, saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga tentang pembuatan kebijakan.

Sebagai perwakilan masyarakat dari bidang film di LSF, modal relasi dengan insan perfilman dan ilmu pembuatan film dan iklan film, harus dapat saya manfaatkan. Pada tahun pertama, saya ditunjuk menjadi koordinator pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Budaya Sensor Mandiri, yang diperankan oleh pasangan Hanung Bramantyo dan Zaskia Adya Mecca beserta keluarganya. The Bramantyo's disutradari langsung oleh Hanung. Sukses dengan ILM, berlanjut

dengan pembuatan Telop dan V-klip dari Jingle LSF, hasil kolaborasi dengan sutradara/produser Lola Amaria. Telop hadir dengan gaya yang disesuaikan dengan generasi milenial dan gen Z, bekerja sama denga studio animasi Tahilalats. Telop tersebut hingga saat profil ini ditulis, masih bisa disaksikan di bioskop, sebagai informasi klasifikasi usia yang ditayangkan sebelum film dimulai.

Sebagai Ketua Subkomisi Penyensoran-LSF, selain melaksanakan tugas reguler melakukan penyensoran (baca: penelitian, penilaian dan penentuan klasifikasi usia) film dan iklan film, saya juga bertanggungjawab pada pelaksanaan *Re-censor* dan Diskusi Pakar. *Re-censor*, merupakan aktualisasi dari amanat perundangan yang menyatakan bahwa penyensoran harus mengedepankan dialog dengan pemilik film. Andaikata pemilik film belum memenuhi pedoman dan kriteria penyensoran, maka LSF dapat mengembailkan film dan iklan film kepada pemilik untuk diperbaiki, dan LSF harus menyensor kembali (*re-censor)* materi yang sudah diperbaiki tersebut.



**Bulan pertama berkantor di Lembaga Sensor Film (LSF) di Gedung Film, Jl. MT. Haryono pada kondisi diberlakukan protokol kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 (2020)**

Akan halnya dunia produksi film yang terus mengalami perubahan, seiring dinamika perubahan sosial, teknologi dan ilmu pengetahuan, maka Anggota dan Tenaga Sensor LSF dituntut untuk terus berpikir kritis dan terbuka atas fenomena yang terjadi di masyarakat dan juga di kalangan pembuat filmnya. Untuk itu, diadakan kegiatan Diskusi Pakar yang tujuannya untuk memberi tambahan wawasan dan informasi *updated* dari kepakaran tertentu, sesuai tema-tema yang diperlukan untuk meningkatkan wawasan kelompok penyensor film (Anggota dan Tenaga Sensor).

Adapun narasumber yang sudah pernah dihadirkan dalam acara Diskusi Pakar yang saya ampu, antara lain: Garin Nugroho (Sutradara), dengan tema *Film untuk Festival Film*; Marselli Sumarno (Dosen Film IKJ), dengan tema: *Genre dalam film*; Gina S. Noor (Sutradara) dengan tema: *Perempuan dalam pemajuan emansipasi dalam perfilman Indonesia*; Hadrah Daeng Ratu (Sutradara) dan Susanti (Produser) dengan tema: *Perempuan dalam film Horor*; Niniek L Karim (Psikolog) dengan tema *Klasifikasi Usia dari perspektif Psikolog*; Amanda Margia Wiranata (Psikolog) dengan tema: *Visual Film dari perspektif anak*; Myra Soeraryo (Senior Vice President VIU) dengan tema *Perkembangan industri Over The Top (OTT),* dan lain-lain.

Pelayanan penyensoran film, tidak hanya berbatas pada pelaku usaha film, namun juga pada para pelaku kegiatan perfilman. Antara lain, kegiatan apresiasi film berupa penyelenggaraan festival film, baik berskala internasional, regional maupun nasional.

Pada November 2022, saya menginisiasi diadakannya Forum Koordinasi Antar Lembaga yang mengundang semua pelaku kegiatan festival film. Atas kerjasama dengan bidang Festival di Badan Perfilman Indonesia (BPI), acara tersebut dapat dihadiri Ahmad Mahendra, Direktur Perfilman, Musik dan Media (PMM)-Kemendikbudristek dan lebih dari 20 Direktur/Manager Festival. Antara lain, perwakilan dari Jogja Netpac Asia Film Festival (JAFF); Jakarta Film Week Festival (JFW); Jakarta World Cinema Festival (JWCW); Korea Film Festival, dll.

Pada forum tersebut, Komisi I Bidang Penyensoran LSF melakukan sosialisasi tentang kewajiban mendapatkan STLS pada setiap film yang akan ditayangkan dan tata cara pendaftaran penyensoran. Dari kegiatan tersebut, para pengelola festival film terhubung lebih dekat dengan LSF, sehingga komunikasi antara penyelenggara festival dengan LSF makin erat.

Masuk ke arena penyensoran media baru digital, saya menyadari masih banyak persepsi keliru tentang LSF, seperti konsepsi lembaga tukang jagal, pemotong film yang brutal, melakukan blur film kartun, yang masih bergulir di masyarakat. Padahal peran sensor saat ini adalah untuk mengingatkan kembali klasifikasi usia dari tontonan film dan iklan film, agar dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan umur penontonnya.






**Memenangkan Lomba Karaoke dan Lomba Pembuatan Video Pendek (2022-2023)**




**Literasi hukum bagi film maker, produsen video konten dan iklan merupakan usaha LSF untuk meningkatkan kesadaran sensor mandiri di sektor hulu perfilman.**

Terlebih lagi, industri film Indonesia sejak tahun 2020, dibanjiri film-film melalui layanan *streaming digital* yang dikenal sebagai *Over The Top* atau OTT seperti *Netflix, Disney-Hotstar*, *VIU,* dan *Prime Video*, serta layanan lokal, seperti *Max Stream, Video, Mola TV, Vision+, We TV* dan *Klik Film*. Pelantar (*platform*) baru ini (juga *video on demand*), yang telah bertumbuh dalam percepatan deret ukur, sangat memengaruhi industri film Indonesia dan dunia, serta menumbuhkan ekosistem baru yang menuntut respon secara cepat. Untuk itulah, ke depan, LSF dituntut untuk dapat membuka wawasan dan pandangan yang memperkuat dasar pemikiran dan kebijakan terkait penyensoran film pada lokus Jaringan Teknologi Informatika (JTI).

Menonton, meneliti dan menilai film dan iklan film setiap hari tentu saja ada jenuhnya. Karena itu, bila ada waktu luang, saya tak lupa mengambil kesempatan untuk bersuka ria dan berolah raga dengan kolega. Pada kesempatan Rakor LSF, misalnya, saya memenangi lomba karaoke. Pada Rakor tahun berikutnya, saya menjuarai lomba pembuatan video. Prinsipnya, serius boleh, bersenang-senang jangan dilupakan.

Demikianlah filmorfosa ini mencatatkan perjalanan semenjak panah cinta saya lesatkan pada dunia film di tahun 1996. Perjalanan sebagai pelaku dan saksi atas proses perubahan, peralihan, dan perkembangan industri film, makin mengukuhkan keinginan saya untuk konsisten dalam mendedikasikan pengetahuan, waktu dan tenaga saya demi pemajuan perfilman Indonesia.

# FILMOGRAPHY

## *Produser Mini Movie/Web Series*




**1. Masih (Cinta) Terbaik (Webseries)**
MAV Pictures (Februari 2020)
Sutradara: Edo Wahyu Fahreza
Lokasi: Magelang & Salatiga, Jawa Tengah-Indonesia
(Rilis: Maret 2020 di YouTube Channel)




**2. Jalanin Aja (Mini Movie)**
Seven Sunday (2018)
Sutradara: Joko Anwar
Lokasi: Semarang, Indonesia
Rilis: Agustus 2018




**3. Ramadhan Halleluiah (Mini Movie)**
Seven Sunday (2018)
Sutradara: Mark Toia (Australia)
Lokasi: Bogor, Indonesia
Rilis: Agustus 2018

## *Associate Produser*




**4. Move On Aja**
North Cliff Pictures (Sept 2018 – Februari 2019)
Sutradara: Hestu Saputra
Lokasi: Bali, Indonesia
Rilis: Agustus 2019




**5. Kartini (Princess Van Java)**
Legacy Pictures (2016)
Sutradara Hanung Bramantyo
Lokasi: Alkmaar, Arnhem – The Netherlands & Jakarta, Jogja - Indonesia
Rilis: 19 April 2017

## *Line Producer*

***6.*** **The East (D'Ost)**
**(Tahap Preliminary Pre-Production)**
New Amsterdam (Haberkrats) (Agustus 2015 – Agustus 2018)
Sutradara : Jim Taihuttu (Belanda)
Lokasi: Amsterdam – The Nederland & Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat-Indonesia

**7. Critical Eleven**
Starvision Plus dan Legacy Pictures (2016)
Sutradara: Monty Tiwa & Robert Ronny
Lokasi: New York – USA & Lamongan, Jakarta - Indonesia
Rilis: 10 Mei 2017



**8. Firegate**
Legacy Pictures (2015)
Sutradara: Rizal Mantovani
Lokasi: Jakarta, Indonesia
Rilis: Oktober 2017




**9. Aach.. Aku Jatuh Cinta (Chaotic Love Poem)**
Multivision Plus (2015)
Sutradara: Garin Nugroho
Lokasi: Yogyakarya Indonesia
World premier di International Film Festival Rotterdam – IFFR Februari 2016

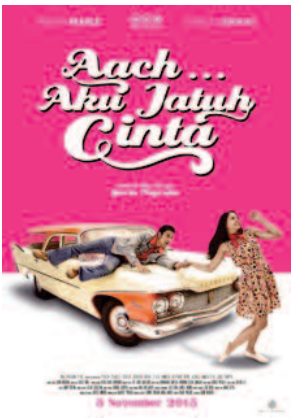


**10. Kapan Kawin?**
Legacy Pictures (2014)
Sutradara Ody C. Harahap
Lokasi: Jakarta, Yogyakarta - Indonesia



11. **Bima Satria Garuda (TV Series)**
MNC Pictures & RCTI (2013)
Sutradara: Teriyoshi I'shii
Lokasi : Jakarta, Indonesia
Tayang: RCTI




12. **Habibie & Ainun** ,
MD Pictures dan Dapur Film Production (2012)
Sutradara: Faozan Rizal & Hanung Bramantyo
Lokasi: Aachen, Munich – German dan Jakarta, Bandung, Klaten-Indonesia




13. **The Mirror Never Lies**
PT. Karya SET Film (2011)
Sutradara: Kamila Andini
Lokasi: Wakatobi Sulawesi Tenggara – Indonesia



14. **Menebus Impian**
Dapur Film Production (2010)
Sutradara: Hanung Bramantyo
Lokasi: Jakarta, Indonesia




15. **The Tarix Jabrix 2**
Starvision+ (2009)
Sutradara: Iqbal Rais
Lokasi: Jakarta, Bandung - Indonesia




16. **Crazy in Thailand**
Big Daddy Production (2008)
Sutradara: Dwi Ilalang
Lokasi: Bangkok – Thailand & Jakarta -Indonesia

17. **Raden Saleh**
Jakarta Art Institute (IKJ) (2007 - 2010)
Sutradara: Sardono W. Kusumo
Lokasi : Paris–Prancis & Solo,
Yogyakarta-Indonesia



18. **Sang Dewi**,
Big Daddy Production (2007)
Sutradara: Dwi Ilalang
Lokasi: Jakarta, Indonesia




19. **Denias, Senandung di Atas Awan**,
Alenia Pictures (2006)
Sutradara: John de Rantau
Lokasi: Wamena, Papua-Indonesia




20. **Opera Jawa** (**Requiem From Java)**
PT. Karya SET Film (2005)
Sutradara: Garin Nugroho
Lokasi: Solo, Jogja, Merbabu – Indonesia
(World Premier di 100th Birthday of Wolfgang Mozart, Wina - Austria)



21. **Aku Ingin Menciummu Sekali Saja (Birdman Tale)**
PT. Karya SET Film (2002)
Sutradara: Garin Nugroho;
Lokasi: Jayapura & Waris, Papua – Indonesia




## *Production Manager*

22. **Serambi**
Cristine Hakim Film (2005)
Sutradara: Garin Nugroho & Team (Viva Westi, Tonny Trimarsanto, Lianto Luseno)
Lokasi: Banda Aceh, Sumatra - Indonesia
(*World Premier* di Cannes Film Festival - Prancis)




23. **Rembulan di Ujung Dahan (Moon at The Branch Tip)**
PT. Karya SET Film (2002)
Sutradara: Garin Nugroho
Lokasi: Bogor , Jakarta – Indonesia
(tidak ada poster)

24. **Series of Docu Drama "Pustaka Anak Nusantara"**
PT. Karya SET Film and Visi Anak Bangsa (VAB)
(2000 - 2002)
Director : Garin Nugroho & Tim
Lokasi : 7 provinsi di Indonesia (Lamalera, Saubeba; Kokonao, Maudulung, Lombok, Soe, Tual)
Tayang: SCTV







## *Magang Tim Script Continuity*

25. **Puisi Tak Terkuburkan (The Poet)**
PT Karya SET Film (1999)
Lokasi: Jakarta, Indonesia
Sutradara : Garin Nugroho

## Wiwid Setya



## JATI DIRI:

| | |
|---|---|
| **Nama Lengkap** | : Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn |
| **Nama Alias** | : Wiwid Setya |
| **Tempat & Tanggal Lahir** | : Yogyakarta, 22 Januari 1974 |
| **Link-in** | : https://www.linkedin.com/in/wiwid-setya/ |
| **Medsos** | : IG: wiwid_setya;<br>fb: wiwid.setya;<br>Tiktok : @wwd5374a<br>Twitter: @WwdSetya |

## RIWAYAT PENDIDIKAN

**Sarjana :**
Manajemen Produksi Film dan Televisi , Fakultas Film dan Television – Institut Kesenian Jakarta (1997 – 2006) dengan IPK 3.18

**Pasca Sarjana:**
Seni Urban dan Industri Budaya – Institut Kesenian Jakarta (2016–2018) – Lulus Cum Laude dengan IPK 3.86

**KURSUS :**
*Production Management for Film* – Australia Government/AFTRS
*Financing For Telvision* – Australia Government/AFTRS

**HOBBI :**
*Traveling*
*Diving*
Menyanyi

**LAIN-LAIN**
Penerima beasiswa magang internasional dari The Ford Foundation bidang *programing* di Sydney Film Festival (SFF), Australia;
Magang di Atlab Film Post, Sydney Australia;
Short Course dan magang kerja pada departemen Screen Content Division di Australian Film Television and Radio School (AFTRS), Sydney-Australia

**LAYAR LEBAR:**
*Move On Aja; Critical Eleven; Kartini (Princess Van Java); Firegate; Aach.. Aku Jatuh Cinta (Chaotic Love Poem), Kapan Kawin? Habibie & Ainun; Laut Bercermin (The Mirror Never Lies); Menebus Impian; The Tarix Jabrix 2; Crazy in Thailand; Raden Saleh; Sang Dewi; Denias, Senandung di Atas Awan; Opera Jawa (Requiem From Java); Serambi; Aku Ingin Menciummu Sekali Saja (Birdman Tale); Rembulan di Ujung Dahan (Moon at The Branch Tip).*

# RINGKASAN

## Tri Widyastuti Setyaningsih, M.Sn (Wiwid Setya)

Tri Widyastuti Setyaningsih M.Sn, lebih popular sebagai Wiwid Setya (Wiwid), memiliki *background* pendidikan di bidang film dengan gelar sarjana seni di bidang Manajemen Produksi Film dan TV, Fakultas Film dan Televisi (FFTV) - Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Pada 2008, mendapatkan penghargaan beasiswa Magang Internasional dari The Ford Foundation, Jakarta yang dikelola oleh Asialink di Australia dan Yayasan Kelola di Indonesia, untuk melakukan magang kerja pada bidang *programing* di Sidney Film Festival (SFF) – Australia sekaligus untuk memperdalam ilmu filmnya di Australian Film Televisi and Radio School (AFTRS). Pada 2018, mendapatkan gelar Magister Seni dalam peminatan utama Seni Urban dan Industri Budaya, di Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta.

Berpengalaman lebih dari 20 tahun di industri perfilman sebagai *Line Producer*, *Associate Producer dan Producer*. Hingga saat ini sudah menangani puluhan film layar lebar antara lain, film *Kartini, Habibie & Ainun, Critical Eleven, The Mirror Never Lies, Opera Jawa, Kapan Kawin?, The Tarix Jabrik 2, Denias Senandung di atas Awan,* dll

Selain membuat film, juga memiliki jejak pengalaman dalam mengelola Festival Film di Indonesia antara lain: Jakarta International Film Festival ( JiFFest) ke-2 dan ke-3, serta British Film Festival (BFF) ke-2 s/d ke-4, yang diselenggarakan The British Council Indonesia.

Sejak 2015, mendedikasikan diri sebagai dosen pada kekhususan Mata Kuliah Produksi Film di Fakultas Film dan Televisi (FFTV) – Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan menjadi dosen tamu di beberapa sekolah film lainnya. Dan, saat ini menjadi Anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI) periode 2020 -2024 dari unsur masyarakat dengan kepakaran di bidang perfilman, sekaligus menjabat Ketua Subkomisi Penyensoran.






www.lsf.go.id @lsf_ri @lsf_ri

@lembagasensor.RI @lsf_ri

Buku ***Karya & Kinerja 17 Anggota LSF 2020-2024*** yang ditulis sendiri oleh Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia, ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi tentang karya, kinerja, riwayat hidup, riwayat pendidikan, maupun pengalaman anggota masing-masing.

Dengan demikian, para pemangku kepentingan, kementerian, lembaga, dan masyarakat yang terkait dengan pelayanan dan kinerja LSF, diharapkan dapat lebih mengenal, apa, siapa dan bagaimana karya dan kinerja 17 Anggota LSF selama periode 2020-2024 ini. Baik sebelum maupun sesudah berkiprah di LSF. Termasuk apa, mengapa dan bagaimana kebijakan LSF diproses dan diputuskan.

DITERBITKAN OLEH

**LEMBAGA SENSOR FILM**
**REPUBLIK INDONESIA**

ISBN 978-602-19475-6-2